

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) KOTA BIMA TAHUN 2024 - 2026



**PEMERINTAH KOTA BIMA
TAHUN 2023**



WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kesinambungan perencanaan pembangunan di masa transisi menuju pemilihan umum kepala daerah secara nasional pada Tahun 2024 sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, perlu menetapkan Rencana Pembangunan Daerah Kota Bima Tahun 2024-2026 dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bima Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubahn beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;
13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 91);

15. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2022 Nomor 246, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 112);
16. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2019 Nomor 215, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 97) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2021 Nomor 234, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 106);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2024-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bima yang selanjutnya disingkat RPJPD Kota Bima adalah perencanaan pembangunan daerah Kota Bima untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
4. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Bima untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2028.
6. Rencana Pembangunan Daerah Kota Bima Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut RPD Kota Bima adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.

8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
12. Walikota adalah Walikota Bima.
13. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14. Daerah adalah Kota Bima.
15. Penjabat Walikota yang selanjutnya disingkat PJ adalah ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, untuk melaksanakan tugas dan wewenang bupati dan Walikota karena terdapat kekosongan jabatan bupati dan wakil bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) RPD merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.
- (2) RPD merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan dengan menjabarkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (3) RPD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra PD dan Renja PD.
- (4) RPD berpedoman pada RPJPD dan RPJMN serta memperhatikan RPD Kota Bima.

BAB III
SISTEMATIKA
Pasal 3

- (1) Sistematika RPD meliputi :
 - a. BAB I Pendahuluan
 - b. BAB II Gambaran Umum
 - c. BAB III Gambaran Keuangan Daerah
 - d. BAB IV Permasalahan Dan Isu Strategis
 - e. BAB V Tujuan Dan Sasaran
 - f. BAB VI Strategi, Arah Kebijakan, Dan Program
Prioritas
 - g. BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan
Program Perangkat Daerah
 - h. BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah
 - i. BAB IX Penutup

- (2) Sistematika RPD daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

RPD digunakan oleh Pejabat Walikota sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2024-2026

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Pj Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD Kota Bima.
- (2) Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pelaksanaan RPD Kota Bima; dan
 - b. hasil RPD Kota Bima.
- (3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 6

- (1) Perubahan RPD dapat dilakukan apabila :
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar; dan
 - d. perubahan RPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan RPD, maka penetapan perubahan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Sebelum RPJMD periode selanjutnya ditetapkan, penyusunan RKPD berpedoman pada RPD.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APBD tahun pertama periode pemerintahan Kepala Daerah terpilih berikutnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 18 April
2023



Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 18 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,



BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2023 NOMOR 820

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA BIMA TAHUN 2024-2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	ix
 BAB I PENDAHULUAN	 I - 1
1.1. Latar Belakang	I - 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I - 2
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I - 8
1.4. Maksud dan Tujuan	I - 13
1.5. Sistematika Penyusunan	I - 13
 BAB II GAMBARAN UMUM.....	 II - 1
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah	II - 1
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi	II - 1
2.1.1.1. Kondisi Geografis dan Batas Wilayah Administrasi	II - 1
2.1.1.2. Topografi	II - 2
2.1.1.3. Klimatologi	II - 3
2.1.1.4. Geologi	II - 5
2.1.1.5. Hidrologi	II - 6
2.1.1.6. Kondisi Demografis	II - 10
2.1.1.7. Potensi Pengembangan Wilayah	II - 15
2.1.1.8. Kawasan Rawan Bencana	II - 22
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II - 24
2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II - 24
2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial	II - 28
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum	II - 34
2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar	II - 34
2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	II - 48
2.1.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan	II - 61
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah	II - 65
2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II - 65
2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	II - 67
2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi	II - 69
2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia	II - 73
2.1.5. Standar Pelayanan Minimal	II - 74
2.1.6. Kerjasama Daerah	II - 77
2.1.7. Rencana Pembangunan Infrastruktur oleh APBN dan/atau APBD Provinsi	II - 79
2.1.8. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	II - 82
2.2. Capaian Kinerja Daerah	II - 85

2.2.1. Evaluasi RKPD Tahun 2022	II - 85
2.2.2. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	II - 102
2.2.2. Analisis Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)	II - 102
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	III - 1
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu	III - 1
3.1.1. Pendapatan Daerah	III - 3
3.1.2. Belanja Daerah	III - 8
3.1.3. Pembiayaan Daerah	III - 10
3.1.4. Neraca Daerah	III - 12
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III - 20
3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran	III - 20
3.2.2. Analisis Pembiayaan	III - 21
3.3. Kerangka Pendanaan	III - 27
3.3.1. Proyeksi Pendapatan Daerah	III - 27
3.3.2. Proyeksi Belanja yang Bersifat Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama	III - 30
3.3.3. Perhitungan Kerangka Pendanaan	III - 33
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	IV - 1
4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah	IV - 1
4.1.1. Layanan Urusan Pemerintahan Wajib yang Terkait Pelayanan Dasar	IV - 2
4.1.1.1. Urusan Pendidikan	IV - 2
4.1.1.2. Urusan Kesehatan	IV - 3
4.1.1.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IV - 5
4.1.1.4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	IV - 6
4.1.1.5. Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	IV - 6
4.1.1.6. Urusan Sosial	IV - 7
4.1.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Terkait Pelayanan Dasar	IV - 8
4.1.2.1. Tenaga Kerja	IV - 8
4.1.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	IV - 9
4.1.2.3. Ketahanan Pangan	IV - 10
4.1.2.4. Lingkungan Hidup	IV - 10
4.1.2.5. Administrasi Kependudukan	IV - 10
4.1.2.6. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	IV - 11
4.1.2.7. Perhubungan	IV - 11
4.1.2.8. Komunikasi dan Informatika	IV - 12
4.1.2.9. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	IV - 12
4.1.2.10. Penanaman Modal	IV - 12
4.1.2.11. Kepemudaan dan Olahraga	IV - 13
4.1.2.12. Kebudayaan	IV - 13
4.1.2.13. Perpustakaan	IV - 13
4.1.2.14. Kearsipan	IV - 13
4.1.3. Urusan Pemerintahan Pilihan	IV - 14
4.1.3.1. Pariwisata	IV - 14
4.1.3.2. Pertanian	IV - 14
4.1.3.3. Perdagangan	IV - 14

4.1.3.4. Perindustrian	IV - 14
4.1.3.5. Kelautan dan Perikanan	IV - 15
4.1.4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	IV - 15
4.1.4.1. Urusan Perencanaan	IV - 15
4.1.4.2. Urusan Keuangan	IV - 15
4.1.4.3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	IV - 15
4.1.4.4. Penelitian dan Pengembangan	IV - 16
4.1.4.5. Pengawasan	IV - 16
4.1.5. Urusan pendukung urusan Pemerintahan	IV - 16
4.1.5.1. Sekretariat Daerah	IV - 16
4.1.5.2. Sekretariat DPRD	IV - 16
4.1.6. Urusan Kewilayahan	IV - 16
4.1.6.1. Kecamatan	IV - 16
4.1.7. Urusan Pemerintahan Umum	IV - 16
4.1.7.1. Kesatuan Bangsa dan Politik	IV - 16
4.2. Analisis Isu Strategis	IV - 17
4.2.1. Telaahan terhadap RTRW Kota Bima Tahun 2011-2031	IV - 17
4.2.2. Telaahan terhadap RPJPD Kota Bima Tahun 2008-2028	IV - 19
4.2.3. Telaahan terhadap RPJMN Tahun 2020-2024	IV - 22
4.2.4. Telaahan terhadap RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023	IV - 25
4.2.5. Telaahan terhadap SDGs	IV - 25
4.2.6. Telaahan terhadap Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon	IV - 34
4.2.7. Telaahan Terhadap Capaian RPJMD 2018-2023	IV - 35
4.2.8. Isu Nasional di dalam RPJMN 2020-2024	IV - 38
4.2.9. Isu Strategis Provinsi NTB dalam RPD 2024-2026	IV - 43
4.2.10. Isu Strategis Kota Bima dalam RPJPD Periode IV (Tahun 2023-2028)	IV - 46
4.2.11. Isu Strategis RTRW Kota Bima	IV - 46
4.2.12. Isu Strategis RPD Kota Bima Tahun 2024-2026	IV - 50
4.2.11. Isu Strategis RTRW Kota Bima	IV - 45
4.2.11. Isu Strategis RTRW Kota Bima	IV - 45
BAB V TUJUAN DAN SASARAN	V - 1
5.1. Tujuan	V - 2
5.2. Sasaran	V - 5
5.3. <i>Cascading</i> Kinerja	V - 23
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PRIORITAS	VI - 1
6.1. Strategi dan Arah Kebijakan	VI - 1
6.2. Arah Kebijakan Tahunan dan Prioritas Pembangunan	VI - 12
6.3. Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026	VI - 18
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	VII - 1
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	VIII - 1

8.1. Indikator Kinerja Utama Daerah	VIII - 1
8.2. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKK)	VIII – 3
8.3. Indikator Makro Pembangunan	VIII – 14
8.4. Indikator Standar Pelayanan Minimal	VIII - 14
 BAB IX PENUTUP	 IX - 1
 DAFTAR LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Luas Wilayah Kota Bima	II - 1
Tabel 2.2. Luas Tanah Menurut Tinggi Rata-rata dari Permukaan Laut	II - 3
Tabel 2.3. Luas Lahan Menurut Kemiringan dan Kecamatan di Kota Bima	II - 3
Tabel 2.4. Keadaan Curah Hujan, Hari Hujan dan Penyinaran Matahari Tahun 2022	II - 4
Tabel 2.5. Keadaan Suhu Udara, Lembab Nisbi dan Tekanan Udara Dirinci per bulan di Kota Bima Tahun 2022	II - 4
Tabel 2.6. Sungai di Kota Bima	II - 6
Tabel 2.7. Persentase Luasan Area Desa-Desa yang dilalui oleh DAS Padolo di Kota Bima	II - 10
Tabel 2.8. Luasan Lereng-Lereng DAS Sori Padolo	II - 10
Tabel 2.9. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Bima Tahun 2021	II - 11
Tabel 2.10. Jumlah Penduduk Kota Bima Berdasarkan Tingkat Pendidikan Menurut Kecamatan di Kota Bima Tahun 2022	II - 11
Tabel 2.11. Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kota Bima Tahun 2018-2022 ...	II - 12
Tabel 2.12. Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan KTP dan Akte Lahir Tahun 2022	II - 13
Tabel 2.13. Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Dirinci Menurut Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Tahun 2018-2022	II - 14
Tabel 2.14. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan Utama Tahun 2022	II - 14
Tabel 2.15. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Bima Tahun 2018-2022	II - 24
Tabel 2.16. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di kota Bima, 2018-2022	II - 25
Tabel 2.17. Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kota Bima Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022	II - 26
Tabel 2.18. PDRB Perkapita Kota Bima Tahun 2018-2022	II - 27
Tabel 2.19. Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2018-2022 Kota Bima	II - 28
Tabel 2.20. Harapan Lama Sekolah di Kota Bima Tahun 2018-2022	II - 28
Tabel 2.21. Rata-rata Lama Sekolah di Kota Bima Tahun 2018-2022	II - 30

Tabel 2.22. Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Bima Tahun 2018-2022	II - 30
Tabel 2.23. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2018-2024 Kota Bima	II - 30
Tabel 2.24. Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (Orang) Tahun 2022	II - 31
Tabel 2.25. Perkembangan Angka Kematian Bayi di Kota Bima Tahun 2018-2022 ...	II - 32
Tabel 2.26. Angka Harapan Hidup Kota Bima Tahun 2018-2022	II - 33
Tabel 2.27. Jumlah Penduduk Miskin Kota Bima Tahun 2018-2022	II - 33
Tabel 2.28. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Dasar Kota Bima Tahun 2018-2022	II - 35
Tabel 2.29. Rasio Ketersediaan Sekolah Pendidikan Dasar di Kota Bima Tahun 2018-2022	II - 35
Tabel 2.30. Rasio Guru/Murid Sekolah Negeri di Kota Bima 2018-2022	II - 36
Tabel 2.31. Rasio Guru/Murid Madrasah Negeri di Kota Bima 2018-2022	II - 36
Tabel 2.32. Rasio Guru dan Murid per Kelas Rata-rata per 1000 Jumlah Murid di Kota Bima Tahun 2018-2022	II - 37
Tabel 2.33. Perkembangan Pelayanan Kesehatan Kota Bima Tahun 2018-2022	II - 38
Tabel 2.34. Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan di Kota Bima Tahun 2018 – 2022	II - 40
Tabel 2.35. Kondisi Jalan Kota di Kota Bima Tahun 2019-2022	II - 41
Tabel 2.36. Panjang Jaringan Irigasi Tahun 2018-2022	II - 41
Tabel 2.37. Rasio Jaringan Irigasi menurut Kecamatan Tahun 2018-2022	II - 42
Tabel 2.38. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi di Kota Bima Tahun 2018-2022	II - 42
Tabel 2.39. Proporsi Penduduk yang Mendapat Akses Air Minum Tahun 2018-2022	II - 43
Tabel 2.40. Proporsi Penduduk yang Mendapat Akses Air Minum Menurut Kecamatan di Kota Bima Tahun 2018-2022	II - 43
Tabel 2.41. Perkembangan Pelayanan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kota Bima Tahun 2018-2022	II - 43
Tabel 2.42. Permukiman Kumuh dan Rumah Layak Huni di Kota Bima Tahun 2018-2022	II - 45

Tabel 2.43. Luas Permukiman yang Tertata di Kota Bima Tahun 2018-2022	II - 45
Tabel 2.44. Kondisi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kota Bima Tahun 2018-2022	II - 46
Tabel 2.45. PMKS di Kota Bima Tahun 2018-2022	II - 47
Tabel 2.46. Angka Pengangguran di Kota Bima Tahun 2018-2022	II - 48
Tabel 2.47. Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan di Kota Bima Tahun 2018-2022.....	II - 49
Tabel 2.48. Perkembangan Pola Pangan Harapan Kota Bima Tahun 2018-2022	II - 50
Tabel 2.49. Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan KTP dan Akte Lahir Tahun 2018-2022	II - 51
Tabel 2.50. Jumlah dan Produksi Sampah di Kota Bima Tahun 2018-2022	II - 52
Tabel 2.51. Penanganan Sampah Menurut Kecamatan di Kota Bima Tahun 2018-2022	II - 52
Tabel 2.52. Capaian Kinerja Pelaksanaan Urusan Keluarga Berencana Tahun 2022 ..	II - 53
Tabel 2.53. Jumlah kendaraan bermotor menurut jenis kendaraan di Kota Bima Tahun 2020-2022	II - 54
Tabel 2.54. Jumlah Kendaraan Angkutan Umum Menurut Trayek di Kota Bima Tahun 2020-2022	II - 55
Tabel 2.55. Ketersediaan Prasarana Perhubungan di Kota Bima Tahun 2018-2022 ..	II - 55
Tabel 2.56. Pertumbuhan UMKM di Kota Bima Tahun 2018-2022	II - 57
Tabel 2.57. Nilai Investasi PMDN di Kota Bima 2019- 2022	II - 58
Tabel 2.58. Prestasi dan Prasarana Olah Raga Kota Bima Tahun 2018-2022	II - 59
Tabel 2.59. Perkembangan Pranata Adat Yang Terbentuk di Kota Bima Tahun 2018-2022	II - 60
Tabel 2.60. Perkembangan Pengunjung Perpustakaan di Kota Bima Tahun 2018-2022	II - 60
Tabel 2.61. Perkembangan Pelayanan Urusan Perikanan dan Kelautan Kota Bima Tahun 2018-2022	II - 62
Tabel 2.62. Angka Kunjungan Wisatawan Tahun 2019-2022	II - 63
Tabel 2.63. Perkembangan Produksi Pertanian di Kota Bima Tahun 2018-2022	II - 64
Tabel 2.64. Jumlah Sarana Perdagangan di Kota Bima Tahun 2018-2022	II - 64

Tabel 2.65. Jumlah Perusahaan, Tenaga Kerja, dan Nilai Produksi Menurut Klasifikasi Industri di Kota Bima Tahun 2021	II - 65
Tabel 2.66. Angka Konsumsi RT per Kapita di Kota Bima Tahun 2018-2022	II - 66
Tabel 2.67. Persentase Konsumsi RT non-Pangan di Kota Bima Tahun 2018-2022 ..	II - 66
Tabel 2.68. Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Kota Bima Tahun 2018-2022	II - 67
Tabel 2.69. Jumlah Kunjungan Kapal di Pelabuhan Bima Tahun 2018-2022	II - 67
Tabel 2.70. Jenis dan Jumlah Bank di Kota Bima Tahun 2018-2022	II - 68
Tabel 2.71. Daya Listrik Terpasang dan Jumlah Kebutuhan Listrik Kota Bima Tahun 2018-2022	II - 69
Tabel 2.72. Angka Kriminalitas Kota Bima Tahun 2018-2022	II - 69
Tabel 2.73. Lama Proses Perijinan Kota Bima Tahun 2022	II - 70
Tabel 2.74. Rasio Lulusan S1/S2/S3 di Kota Bima Tahun 2018-2022	II - 73
Tabel 2.75. Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal per Urusan Tahun 2022 ...	II - 74
Tabel 2.76. Rencana Kegiatan Penataan Permukiman Kumuh Kawasan Sapaga ..	II - 80
Tabel 2.77. Rencana Kegiatan Penataan Permukiman Kumuh Kawasan Dana Taraha	II - 81
Tabel 2.78. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	II - 85
Tabel 2.79. Capaian Kinerja RKPD Kota Bima Tahun 2022	II - 87
Tabel 2.80. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Bima Tahun 2018-2022 ..	II - 104
Tabel 2.81. Evaluasi terhadap Hasil RPJMD Kota Bima Periode Tahun 2018-2020 ...	II - 111
Tabel 2.82. Evaluasi terhadap Hasil RPJMD Kota Bima Periode Tahun 2021-2022 ...	II - 139
Tabel 2.83. Capaian IKK Kota Bima Tahun 2022	II - 167
Tabel 2.84. Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan TPB (SDG's) Kota Bima Tahun 2022	II - 176
Tabel 3.1. Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Penerimaan Pembiayaan, dan Pengeluaran Pembiayaan Kota Bima Tahun 2018-2021	III - 2
Tabel 3.2. Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bima Tahun 2018-2021	III - 4
Tabel 3.3. Rata-Rata Pertumbuhan Belanja Daerah Kota Bima Tahun 2018-2021 ...	III - 9
Tabel 3.4. Rata-Rata Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Kota Bima Tahun 2018-2021	III - 11

Tabel 3.5. Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Bima Tahun 2018-2021 ...	III - 13
Tabel 3.6. Analisis Rasio Likuiditas Neraca Daerah Kota Bima Tahun 2018-2021	III - 17
Tabel 3.7. Analisa Rasio Solvabilitas Neraca Daerah Kota Bima Tahun 2018-2021 ...	III - 19
Tabel 3.8. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Bima Tahun 2018-2021	III - 20
Tabel 3.9. Defisit Riil Anggaran Kota Bima Tahun 2018-2021	III - 22
Tabel 3.10. Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Bima Tahun 2018-2021	III - 17
Tabel 3.11. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Bima Tahun 2018-2021	III - 26
Tabel 3.12. Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2024-2026	III - 29
Tabel 3.13. Proyeksi Belanja Tahun 2024-2026	III - 32
Tabel 3.14. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026	III - 34
Tabel 3.15. Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2024-2026	III - 36
Tabel 4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pendidikan	IV - 3
Tabel 4.2. Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Kesehatan	IV - 4
Tabel 4.3. Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IV - 5
Tabel 4.4. Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	IV - 6
Tabel 4.5. Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	IV - 7
Tabel 4.7. Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Sosial	IV - 8
Tabel 4.8. Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	IV - 9
Tabel 4.9. Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	IV - 10
Tabel 4.10. Matrik Pembangunan Kota Bima Dalam RPJMN 2020-2024	IV - 22
Tabel 4.11. Daerah Rawan Banjir di Kota Bima	IV - 48
Tabel 4.12. Timbunan Sampah di Kota Bima	IV - 49
Tabel 4.13. Keterkaitan Isu Strategis Kota Bima, Provinsi NTB, dan Nasional	IV - 53

Tabel 5.1. Tujuan yang Menjawab Isu Strategis	V - 2
Tabel 5.2. Rumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Indikator Capaian RPD Kota Bima Tahun 2024-2026	V - 4
Tabel 5.3. Cascading Kinerja Daerah Tahun 2024-2026	V - 8
Tabel 6.1. Analisa SWOT Bagi Perumusan Strategi Pembangunan	VI - 2
Tabel 6.2. Strategi dan Arah Kebijakan	VI - 8
Tabel 6.3. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Tahunan RPD Kota Bima Tahun 2024-2026	VI - 14
Tabel 6.4. Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Bima Tahun 2024-2026 ...	VI - 19
Tabel 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Bima Tahun 2023-2026	VII - 2
Tabel 8.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Bima Tahun 2024-2026	VIII - 2
Tabel 8.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	VIII - 4
Tabel 8.3. Penetapan Target Indikator Makro Pembangunan Tahun 2024-2026.....	VIII - 15
Tabel 8.4. Target SPM Kota Bima	VIII - 16

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan	I - 12
Gambar 2.1. Geomorfologi Kota Bima	II - 7
Gambar 2.2. Peta DAS Sori Padolo	II - 10
Gambar 2.3. Peta DAS Sori Padolo dan Kelurahan yang Dilewatinya di Kota Bima	II - 10
Gambar 2.4. Peta Lereng DAS Sori Padolo	II - 11
Gambar 2.5. Peta Rawan Bencana Kota Bima	II - 26
Gambar 3.1. Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Kota Bima Tahun 2018-2021	III - 6
Gambar 3.2. Proporsi Realisasi Komponen Pembentuk PAD Kota Bima Tahun 2018-2021	III - 6
Gambar 3.3. Derajat Kemandirian Daerah dan Rasio Ketergantungan Daerah Kota Bima.....	III - 8
Gambar 3.4. Proporsi Realisasi Belanja terhadap Total Belanja.....	III - 10
Gambar 5.1. Proses Bisnis Tujuan 1.....	V - 46
Gambar 5.2. Proses Bisnis Tujuan 2	V – 47
Gambar 5.3. Proses Bisnis Tujuan 3	V - 47
Gambar 5.4. Proses Bisnis Tujuan 4	V – 48
Gambar 5.5. Proses Bisnis Tujuan 5	V – 48
Gambar 5.6. Proses Bisnis Sasaran 1	V – 49
Gambar 5.7. <i>Cross Cutting</i> Sasaran 1	V - 49
Gambar 5.8. Proses Bisnis Sasaran 2	V – 50
Gambar 5.9. <i>Cross Cutting</i> Sasaran 2	V - 50
Gambar 5.10. Proses Bisnis Sasaran 3	V – 51
Gambar 5.11. <i>Cross Cutting</i> Sasaran 3	V - 51
Gambar 5.12. Proses Bisnis Sasaran 4	V – 52
Gambar 5.13. <i>Cross Cutting</i> Sasaran 4	V - 52
Gambar 5.14. Proses Bisnis Sasaran 5	V – 53
Gambar 5.15. <i>Cross Cutting</i> Sasaran 5	V - 53

Gambar 5.16. Proses Bisnis Sasaran 6	V – 54
Gambar 5.17. <i>Cross Cutting</i> Sasaran 6	V - 54
Gambar 5.18. Proses Bisnis Sasaran 7.....	V – 55
Gambar 5.19. <i>Cross Cutting</i> Sasaran 7	V – 55
Gambar 5.20. Proses Bisnis Sasaran 8	V – 56
Gambar 5.21. <i>Cross Cutting</i> Sasaran 8	V - 56
Gambar 5.22. Proses Bisnis Sasaran 9	V – 57
Gambar 5.23. <i>Cross Cutting</i> Sasaran 9	V - 57
Gambar 5.24. <i>Cross Cutting</i> Sasaran 9-lanjutan.....	V – 58
Gambar 5.25. Proses Bisnis Sasaran 10	V – 58
Gambar 5.26. <i>Cross Cutting</i> Sasaran 10	V - 59
Gambar 5.27. Proses Bisnis Sasaran 11	V – 59
Gambar 5.28. <i>Cross Cutting</i> Sasaran 11	V - 60
Gambar 5.29. <i>Cross Cutting</i> Sasaran 11-lanjutan.....	V - 60
Gambar 5.30. Proses Bisnis Sasaran 12	V – 61
Gambar 5.31. <i>Cross Cutting</i> Sasaran 12	V - 61
Gambar 5.32. Proses Bisnis Sasaran 13	V – 62
Gambar 5.33. <i>Cross Cutting</i> Sasaran 13	V - 62

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebijakan Nasional tentang Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Kepala Daerah telah mengalami perubahan seiring dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Undang-Undang tersebut mengamanatkan bahwa Kepala Daerah yang masa Jabatannya berakhir di Tahun 2023, akan diangkat dan ditetapkan seorang Penjabat Kepala Daerah atau Penjabat Walikota sampai dengan terlaksananya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilaksanakan secara serentak pada Tahun 2024. Berdasarkan hal tersebut, Tahun 2023 merupakan tahun berakhirnya masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Bima periode 2018-2023 yang diikuti dengan berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2018-2023. Tahun 2023 juga merupakan masa transisi menjelang pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak Tahun 2024, dimana Kabupaten/Kota tetap memerlukan perencanaan pembangunan sebagai pedoman bagi Penjabat Kepala Daerah untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk itu, Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Intruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Bagi Daerah Otonomi Baru.

Mengacu pada Inmendagri tersebut, Pemerintah Kota Bima yang masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berakhir pada tanggal 26 September 2023, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bima beserta perangkat daerah lainnya telah membentuk tim dalam menyiapkan dan menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 -2026, yang akan digunakan oleh Penjabat Kepala Daerah dalam menjalankan roda penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan selama (3) tiga tahun kedepan.

Dokumen RPD juga merupakan dokumen perencanaan yang sama muatannya dengan RPJMD, yang membedakan dalam dokumen ini adalah tidak ada muatan Visi dan Misi Kepala Daerah. Namun kedua-duanya terlahir dari berbagai permasalahan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di daerah, yang dapat diidentifikasi dan dirumuskan menjadi isu permasalahan atau masalah pokok, yang akan berkembang menjadi isu strategi.

Berdasarkan Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022, juga terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam penyusunan RPD Kota Bima, yaitu sinergitas perencanaan Pusat dan Daerah dengan memperhatikan pendekatan penyelarasan target indikator makro dan program prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024, kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kota Bima sampai dengan Tahun 2026, hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah dalam RPJMD Kota Bima Tahun 2018-2023, RPD Provinsi, isu-isu strategi yang berkembang dan kebijakan Nasional dan regulasi yang berlaku. Selanjutnya, dalam penyusunan program dalam RPD harus memperhatikan beberapa hal antara lain: penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan RPJMD Provinsi, evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran, dan hasil (outcome), Renstra Perangkat Daerah, isu-isu strategis terkait bidang urusan dan tupoksi Perangkat Daerah, standar pelayanan minimum, serta usulan program dari para pemangku kepentingan pembangunan daerah maupun program pembangunan daerah yang bersebelahan. Penyusunan RPD Kota Bima juga tidak terlepas dari telaahan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Adapun dasar hukum yang dipergunakan dalam penyusunan RPD Kota Bima Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 13. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 14. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 16. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

- Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 26. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 80);
27. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
 28. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 29. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang

- Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1731);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
37. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;
38. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
39. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 26);
40. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 1);
41. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi NTB Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 Nomor xxx)
42. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 91);

43. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2012 Nomor 130);
44. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2022 Nomor XXX, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor XXX);
45. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2021 Nomor 234, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 106) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2021 Nomor 234, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 106).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Hubungan antar dokumen perencanaan daerah secara relevan dan kontekstual sangat mendukung dalam upaya membangun keselarasan perencanaan antar dokumen perencanaan dalam lingkup daerah maupun dengan lingkup nasional dan provinsi. Sinkronisasi antar dokumen perencanaan yang dapat menggambarkan penyelarasan yang menjadi tujuan Pembangunan dari pusat sampai ke daerah memiliki hubungan yang sinergitas yang dapat di jabarkan sebagai berikut:

1.2.1. Hubungan antara RPD dengan RPJMN

RPD Kota Bima Tahun 2024-2026 disusun dengan memperhatikan penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional

dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Selain itu, pengembangan isu-isu strategis daerah juga disusun dengan melakukan penelaahan terhadap isu-isu strategis nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 maupun kebijakan strategis nasional lainnya.

1.3.1 Hubungan antara RPD dengan RPJMD Provinsi NTB

Pengembangan isu-isu strategis daerah tahun 2024-2026 disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018-2023. Selain itu, untuk menjaga keselarasan perencanaan pembangunan, RPD Tahun 2024-2026 disusun dengan memperhatikan arah pengembangan wilayah dan juga dukungan Kota Bima atas target-target dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018-2023.

1.3.2 Hubungan antara RPD dengan RPJPD Kota Bima

RPD Kota Bima Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran periode keempat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bima Tahun 2008-2028 yang memiliki visi ***Mewujudkan Kota Bima Yang Sejahtera, Maju dan Mandiri Pada Tahun 2028.*** Dalam tahap keempat ini pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Kota Bima yang maju dan mandiri, melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat ditunjukkan oleh makin tinggi dan meratanya tingkat pendapatan masyarakat dengan jangkauan lembaga jaminan sosial yang lebih menyeluruh; mantapnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, antara lain ditandai oleh meningkat dan meratanya akses, tingkat kualitas, dan relevansi pendidikan seiring dengan makin efisien dan efektifnya manajemen pelayanan pendidikan; meningkatnya kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat;

meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak; dan terwujudnya kesetaraan gender; bertahannya kondisi ? dan penduduk tumbuh seimbang. Dalam rangka memantapkan pembangunan yang berkelanjutan, keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam terus dipelihara dan dimanfaatkan untuk terus mempertahankan nilai tambah dan daya saing bangsa serta meningkatkan modal pembangunan nasional pada masa yang akan datang.

1.3.3 Hubungan antara RPD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bima

RPD Kota Bima Tahun 2024-2026 akan menjadi pedoman didalam menyusun rencana kerja tahunan di dalam periode tersebut dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penyusunan RKPD berpedoman pada RPD terkait dengan penyelarasan sasaran, strategi, kebijakan, beserta program prioritas Perangkat Daerah. Selanjutnya RKPD menjadi acuan bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah.

1.3.4 Hubungan antara RPD dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah

RPD Kota Bima Tahun 2024-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024-2026. Renstra PD merupakan penjabaran RPD yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah yang berfungsi untuk menentukan tujuan dan sasaran beserta indikasi program serta kegiatan Perangkat Daerah dalam rangka mendukung pencapaian RPD berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

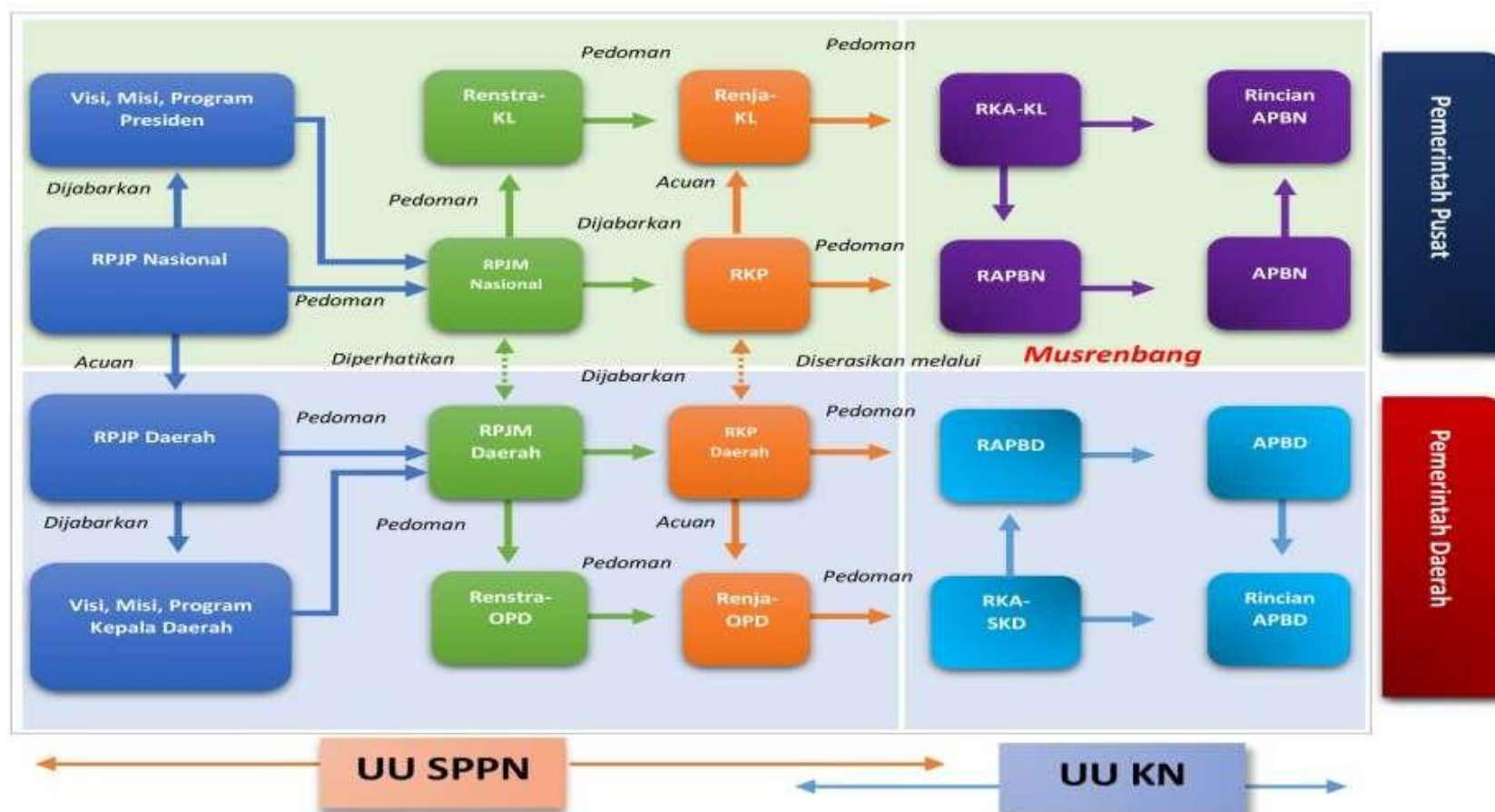
1.3.5 Hubungan Antara RPD dengan RTRW Kota Bima

Tujuan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bima yaitu "Penataan ruang wilayah Kota Bima bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan, sebagai bagian dari gugusan kepulauan, dengan pembangunan berbagai sektor dalam masyarakat berbudaya yang luhur." Pengaturan tata ruang sesuai peruntukan menjadi tantangan yang harus dihadapi untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran

pemanfaatan ruang dan mengalokasikan sumber daya pembangunan sesuai dengan indikasi program rencana tata ruang dalam jangka waktu panjang.

1.3.6 Hubungan Antara RPD dengan Dokumen Daerah Sekitarnya

Hubungan antara dokumen RPD Kota Bima Tahun 2024-2026 dengan dokumen serupa daerah sekitar yang meliputi Kabupaten Bima diidentifikasi dengan kesamaan sasaran strategis antara lain pertumbuhan ekonomi, dan lingkungan hidup yang asri dan ramah.



Gambar 1. 1. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bima Tahun 2024-2026 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arahan sekaligus menjadi pedoman bagi Penjabat Kepala Daerah beserta seluruh jajarannya dan seluruh pemangku kepentingan baik masyarakat maupun dunia usaha di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan Kota Bima secara sinergis dan berkesinambungan.

1.4.2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan RPD Kota Bima Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Tahun 2024-2026;
- 2) Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD, serta sebagai acuan Perangkat Daerah dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
- 3) Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) 2024-2026;
- 4) Menjadi instrumen penilaian dalam sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah;
- 5) Menjadi ruang bagi pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

1.5. Sistematika Penyusunan

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bima Tahun 2024-2026, disusun dengan sistematika sebagai berikut;

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang;
2. Dasar Hukum Penyusunan;

3. Hubungan Antara Dokumen

1. Hubungan Antara RPD dengan RPJMN
 2. Hubungan Antara RPD dengan RPJMD Provinsi NTB
 3. Hubungan Antara RPD dengan RPJPD Kota Bima
 4. Hubungan Antara RPD dengan RKPD Kota Bima
 5. Hubungan Antara RPD dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Bima
 6. Hubungan Antara RPD dengan RTRW Kota Bima
 7. Hubungan Antara RPD dengan Dokumen Daerah Sekitarnya.
4. Maksud dan Tujuan; dan
5. Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

1. Aspek Geografi dan Demografi;
2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat;
3. Aspek Pelayanan Umum;
4. Aspek Daya Saing Daerah;
5. Standar Pelayanan Minimal;
6. Kerjasama Daerah;
7. Rencana Pembangunan Infrastruktur oleh APBN dan/atau APBD Provinsi;
8. BUMD

2.2. Capaian Kinerja Daerah

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

1. Kinerja Keuangan Masa Lalu;
2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu;
3. Kerangka Pendanaan.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

1. Permasalahan Pembangunan Daerah;
2. Analisis Isu Strategis;

BAB V TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan;
2. Sasaran;
3. *Cascading* Kinerja;

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

1. Strategi dan Arah Kebijakan;
2. Arah Kebijakan Tahunan dan Prioritas Pembangunan;
3. Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

1. Kerangka Pendanaan;
2. Program Pembangunan Daerah.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

1. Indikator Kinerja Utama Daerah;
2. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKK)
3. Indikator Makro Pembangunan
4. Indikator Standar Pelayanan Minimal

BAB IX PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Kondisi Geografis dan Batas Wilayah Administrasi

Secara astronomis Kota Bima terletak antara 8020'-8030' Lintang Selatan dan antara 118041'-118048' Bujur Timur dengan orientasi wilayah berada pada sebelah timur Teluk Bima Pulau Sumbawa. Luas wilayah Kota Bima adalah 222,25 km² yang terbagi dalam 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Rasanae Barat, Rasanae Timur, Asakota, Mpunda dan Raba dengan batas wilayah:

- Sebelah Utara : Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima
- Sebelah Timur : Kecamatan Wawo Kabupaten Bima
- Sebelah Selatan : Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima
- Sebelah Barat : Teluk Bima

Asakota merupakan kecamatan terluas dengan luas area mencapai 69,03 km² atau 31 persen dari luas Kota Bima. Pada urutan kedua ada Kecamatan Rasanae Timur dengan luas area mencapai 28,83 persen, selanjutnya Kecamatan Raba dengan luas sebesar 28,67 persen, Kecamatan Mpunda sebesar 6,88 persen. Sementara itu, Rasanae Barat adalah kecamatan dengan luas area paling kecil yaitu 10,14 km² atau 4,56 persen dari luas Kota Bima.

Tabel 2.1. Luas Wilayah Kota Bima

No.	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Luas Wilayah (km2)
I.	Kecamatan Rasanae Barat	Kel. Tanjung	0,79
		Kel. Paruga	0,91
		Kel. SaraE	0,48
		Kel. NaE	0,31
		Kel. Pane	0,31
		Kel. Dara	7,34
Jumlah I			10.14
II.	Kecamatan Mpunda	Kel. Sambinae	5,43
		Kel. Panggi	3,51
		Kel. Monggonao	0,63
		Kel. Manggemaci	0,52
		Kel. Penatoi	0,74

No.	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Luas Wilayah (km ²)
		Kel. Lewirato Kel. Sadia Kel. Mande Kel. Santi Kel. Matakando	0,49 0,68 0,69 0,72 1,87
Jumlah II			15.28
III.	Kecamatan Raba	Kel. Penaraga Kel. Penanae Kel. Rite Kel. Rabangodu Utara Kel. Rabangodu Selatan Kel. Rabadompu Timur Kel. Rabadompu Barat Kel. Rontu Kel. Ntobo Kel. Kendo Kel. Nitu	0,74 5,34 1,84 0,98 1,43 0,54 1,66 4,74 31,19 9,08 6,19
Jumlah III			63.73
IV.	Kecamatan Asakota	Kel. Melayu Kel. Jatiwangi Kel. Jatibaru Kel. Kolo Kel. Ule Kel. Jatibaru Timur	0,76 18,91 17,18 26,49 3,27 2,42
Jumlah IV			69,03
V.	Kecamatan Rasanae Timur	Kel. Kumbe Kel. Lampe Kel. Oi Fo'o Kel. Kodo Kel. Dodu Kel. Lelamase Kel. Nungga Kel. Oimbo	7,23 9,20 5,55 7,93 21,05 11,59 2,74
Jumlah V			64.07
Jumlah I + II + III + IV + V			222,25

Sumber: Kota Bima Dalam Angka, BPS Kota Bima 2022

2.1.1.2. Topografi

a. Ketinggian

Wilayah Kota Bima umumnya didominasi oleh dataran rendah dimana daerah yang berada pada ketinggian antara 0-25 m dpl seluas 9.259 ha atau mencapai 43 persen dari luas Kota Bima. Sementara itu luas tanah dengan

ketinggian 25-50 m seluas 5.161 ha (23,57%) dan di atas 50 m seluas 7.307 ha (33,63%).

Tabel 2.2. Luas Tanah Menurut Tinggi Rata-rata dari Permukaan Laut

Tinggi Rata-rata dari Permukaan Laut	Luas Tanah (ha)	Persentase Terhadap Luas Kota Bima (%)
0 – 25	9.259	43
25 – 50	5.161	23,57
> 50	7.307	33,63
Jumlah	21.727	100,00

Sumber : Kota Bima Dalam Angka, BPS Kota Bima 2022

b. Kelerengan

Tingkat kemiringan lahan di Kota Bima bervariasi mulai dari kelompok lahan berjenis datar dengan tingkat kemiringan 0-2% hingga sangat curam dengan tingkat kemiringan >40%. Kota Bima didominasi oleh lahan dengan kemiringan curam dengan kelerengan 15-40°, yaitu seluas 9.003,33 ha, kemudian lahan sangat curam seluas 6.242,06 ha.

Tabel 2.3. Luas Lahan Menurut Kemiringan dan Kecamatan di Kota Bima

No	Kecamatan	Datar (0 - 2°)	Bergelombang (2 - 15°)	Curam (5 - 40°)	Sangat Curam (> 40°)
1	Rasanae Barat	248,78	176,41	164,37	81,97
2	Mpunda	202,63	727,72	616,25	86,32
3	Rasanae Timur	34,33	998,11	3553,95	1577,59
4	Raba	179,61	1287,27	2178,17	2459,83
5	Asakota	369,43	922,11	2490,58	2036,34
Jumlah		1034,78	4 111,62	9 003,33	6 242,06

Sumber : Kota Bima Dalam Angka, BPS Kota Bima 2022

Wilayah yang memiliki tingkat kemiringan curam yang paling luas adalah wilayah Kecamatan Rasanae Timur, sedangkan wilayah yang relatif datar di Kecamatan Asakota dan bergelombang wilayah Kecamatan Raba.

2.1.1.3. Klimatologi

Wilayah Kota Bima beriklim tropis dengan curah hujan rata-rata pada tahun 2021 sebesar 87,6 mm³/th, dimana curah hujan tertinggi terjadi pada Bulan Januari yaitu 350,3 mm³ dan terendah pada bulan Mei yaitu 4,1 mm³. Jumlah hari hujan

selama tahun 2021 tercatat 147 hari dengan jumlah hari hujan terbanyak pada Bulan Januari yaitu 25 hari dan terendah pada bulan Juli sebanyak 1 hari hujan.

Tabel 2.4. Keadaan Curah Hujan, Hari Hujan dan Penyinaran Matahari Tahun 2022

Bulan	Curah Hujan (mm3)	Hari Hujan (hh)	Penyinaran Matahari (%)
Januari	350,3	25	32,3
Pebruari	148,3	20	31,7
Maret	172,8	22	41,6
April	153,5	10	52,7
Mei	4,1	5	57,9
Juni	16,9	3	53,8
Juli	5,2	1	61,0
Agustus	4,4	4	65,2
September	41,2	6	56,5
Oktober	32,9	8	56,5
Nopember	280,1	21	27,3
Desember	340,4	22	35,1
Jumlah	1.550	147	

Sumber : BPS Kota Bima, 2022

Tabel 2.5. Keadaan Suhu Udara, Lembab Nisbi dan Tekanan Udara Dirinci per bulan di Kota Bima Tahun 2022

No	Bulan	Suhu Udara (oC)			Lembab Nisbi (%)	Tekanan Udara (mb)	Kecepatan Angin (m/det)
		Rata-rata	Max	Min			
1	Januari	28.83	35.40	23.00	80.18	1008,55	1.24
2	Pebruari	28.80	35.80	23.80	84.65	1009.62	1.06
3	Maret	28.01	34.60	23.40	84.88	1009.73	0.96
4	April	28.17	34.80	22.60	82.82	1010.20	1.16
5	Mei	28.18	35.00	22.20	81.74	1010.11	1.58
6	Juni	27.42	33.80	21.40	78.63	1010.88	2.37
7	Juli	26.67	33.00	19.80	74.24	1010.65	3.00
8	Agustus	27.17	35.60	18.20	72.16	1011.04	2.98
9	September	28.50	36.40	22.60	71.29	1010.45	3.32
10	Oktober	24.00	36.40	24.00	74.57	1009.33	2.82
11	Nopember	29.22	37.40	24.00	76.88	1008.93	1.70
12	Desember	27.62	35.00	23.40	84.23	1007.30	1.17
	Rata-Rata	27,71	35,27	22,37	78,86	1009,73	1,94

Sumber : BPS Kota Bima, 2022

2.1.1.4. Geologi

Wilayah Kota Bima dan sekitarnya secara geomorfologi dan berdasarkan morfometri dan morfogenesis dapat dikelompokkan ke dalam 4 satuan geomorfologi, yaitu:

Satuan geomorfologi dataran fluvial.

Di daerah Kota Bima ini terhampar diantara perbukitan disekitarnya dan Teluk Bima yang terletak di tengah-tengah daerah Kota Bima memanjang dari Barat ke Timur melalui celah antara Dora Pokah dengan Doro Kolo. Satuan geomorfologi ini menempati $\pm 20\%$ dari daerah Kota Bima, yang terhampar luas pada bagian utara dan bagian selatan lokasi Kota Bima. Satuan geomorfologi dataran fluvial, meliputi daerah Jatibaru, Sadia, Sambinae, Monggonao, Paruga, Nae, Santi, Penatoi, Penaraga, Raba Ngodu, Raba Dompui, Kumbe, Sadia, Kendo, Tato, Lampe, dan sekitarnya. Satuan geomorfologi dataran fluvial ini memiliki nilai beda tinggi rata-rata 3 meter dan kemiringan lereng rata-rata sebesar 2%. Litologi penyusun dari satuan geomorfologi ini adalah pasir dan lempung.

Satuan Geomorfologi Dataran Endapan Pantai

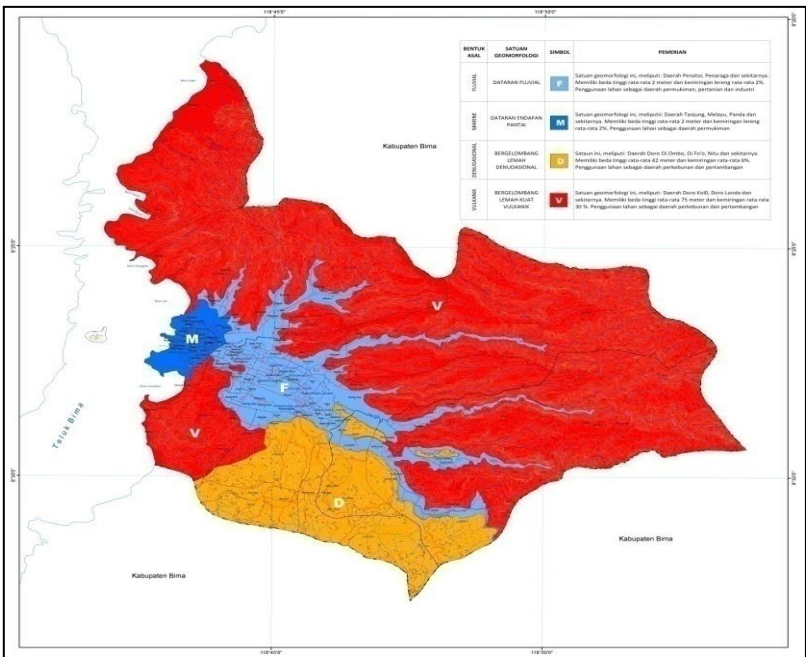
Satuan geomorfologi ini menempati $\pm 10\%$ dari daerah Kota Bima, yang terhampar luas pada bagian barat Kota Bima. Satuan geomorfologi dataran endapan pantai, meliputi: daerah Tanjung, Melayudan sekitarnya. Satuan geomorfologi dataran endapan pantai ini memiliki nilai beda tinggi rata-rata 2 meter dan kemiringan lereng rata-rata sebesar 2%. Litologi penyusun dari satuan geomorfologi ini adalah pasir.

Satuan geomorfologi bergelombang lemah denudasional.

Disusun oleh batuan hasil gunung api tua, batuan sedimen dan setempat-setempat oleh batugamping koral. Satuan geomorfologi ini menempati $\pm 30\%$ dari daerah Kota Bima, yang terhampar luas pada bagian tengah lokasi Kota Bima. Satuan geomorfologi bergelombang lemah denudasional, meliputi: daerah Doro Oi'ombo, Doro Oi'si,i, Doro Jati Oi'ifoo, Nitu dan sekitarnya. memiliki nilai beda tinggi rata-rata 42 meter dan kemiringan lereng rata-rata sebesar 6%. Litologi penyusun dari satuan geomorfologi ini adalah batu gamping dan batu pasir.

Satuan geomorfologi bergelombang lemah–kuat vulkanik.

Disusun oleh batuan hasil gunungapi tua berupa breksi, lava, tuf dan batuan beku terobosan. Satuan geomorfologi ini menempati $\pm 40\%$ dari daerah Kota Bima, yang terhampar luas pada bagian tengah dan bagian selatan lokasi Kota Bima satuan geomorfologi bergelombang lemah–kuat vulkanik, meliputi: daerah Doro Kolo, Doro Lewamori, Doro Lalepa, Doro Londa dan sekitarnya. Memiliki nilai beda tinggi rata – rata 75 meter dan kemiringan lereng rata – rata sebesar 13 %. Litologi penyusun dari satuan geomorfologi ini adalah andesit dan tuf.



Gambar 2.1. Geomorfologi Kota Bima

2.1.1.5. Hidrologi

Wilayah Kota Bima dilewati oleh 7 (tujuh) sungai. Sungai-sungai tersebut memiliki hulu di sebelah utara dan timur Kota Bima, dan bermuara menuju Teluk Bima. Sungai terpanjang adalah Sungai Lampe yang memiliki panjang 25 km. Air sungai dimanfaatkan antara lain sebagai sumber air minum dan pengairan/irigasi.

Tabel 2.6. Sungai di Kota Bima

Nama Sungai		Panjang Sungai (km)	Lebar Sungai (m)	Kecamatan	
				Hulu	Hilir
1	Sungai Lampe	25	30	Rasanae Timur	Rasanae Barat
2	Sungai Dodu	12	20	Rasanae Timur	Rasanae Timur

Nama Sungai		Panjang Sungai (km)	Lebar Sungai (m)	Kecamatan	
				Hulu	Hilir
3	Sungai Nungga	22	20	Rasanae Timur	Mpunda
4	Sungai Kendo	15	15	Raba	Rasanae Barat
5	Sungai Ntobo	12	15	Raba	Rasanae Barat
6	Sungai Jatiwangi	16	12	Asakota	Asakota
7	Sungai Romo	2	2,5	Asakota	Asakota

Sumber : Kota Bima Dalam Angka, BPS Kota Bima 2022

Mata air yang ada di Kota Bima teridentifikasi berada di beberapa lokasi, terutama di Kecamatan Rasanae Timur, Raba dan Asakota. Mata air ini sebagian sudah dimanfaatkan oleh warga sebagai air baku air minum dan untuk mata air dengan debit yang besar telah dimanfaatkan oleh PDAM sebagai sumber air baku.

Daerah aliran sungai (DAS) atau dalam skala luasan kecil disebut Catchment Area adalah suatu wilayah daratan yang dibatasi oleh punggung bukit atau batas-batas pemisah topografi, yang berfungsi menerima, menyimpan dan mengalirkan curah hujan yang jatuh di atasnya ke alur-alur sungai dan terus mengalir ke anak sungai dan ke sungai utama, akhirnya bermuara ke danau/waduk atau ke laut.

Sedangkan air pada DAS merupakan aliran air yang mengalami siklus hidrologi secara alamiah. Selama berlangsungnya daur hidrologi, yaitu perjalanan air dari permukaan laut ke atmosfer kemudian ke permukaan tanah dan kembali lagi ke laut yang tidak pernah berhenti, air tersebut akan tertahan (sementara) di sungai, danau/waduk, dan dalam tanah sehingga akan dimanfaatkan oleh manusia atau makhluk hidup.

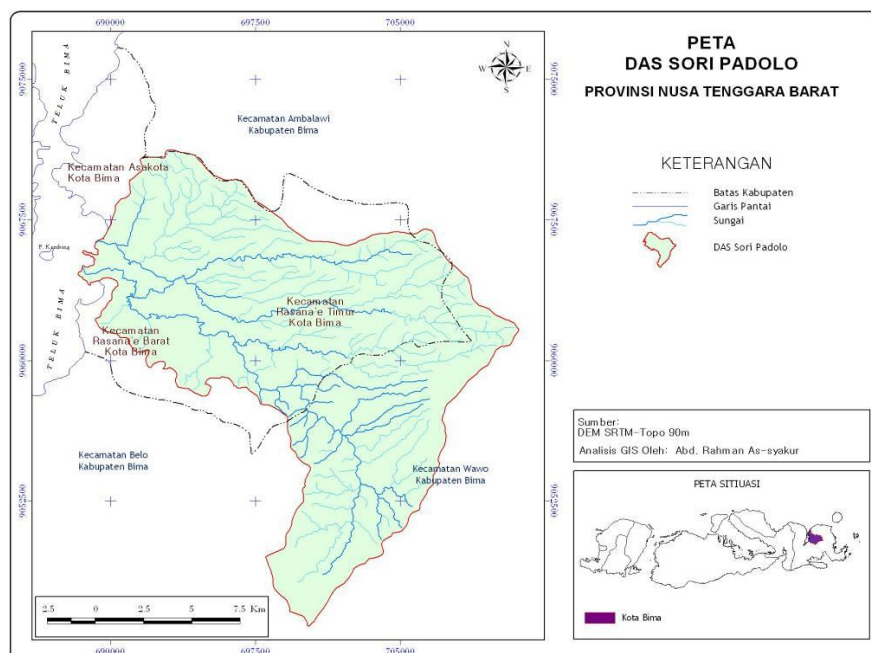
Suatu DAS harus dikelola untuk menjaga fungsi hidrologis dan orografinya. Pengelolaan ini mempunyai sifat memanipulasi sumber daya alam dan manusia yang terdapat di daerah tersebut untuk mendapatkan manfaat produksinya khususnya kuantitas, kualitas, dan kontinuitas air (water yield) untuk kepentingan bersama akan tetapi hal ini tidak menyebabkan terjadinya kerusakan pada sumber daya air dan tanah pada DAS tersebut.

Sori Padolo merupakan DAS yang membelah Kota Bima dan melewati pusat Kota Bima. DAS ini mempunyai hilir di Kecamatan Wawo, Kota Bima yaitu Sori Na'e dan bermuara di dua sungai di Kota Bima yaitu Sori Padolo dan Sori Melayu. Peningkatan debit sungai pada saat musim penghujan sering menyebabkan

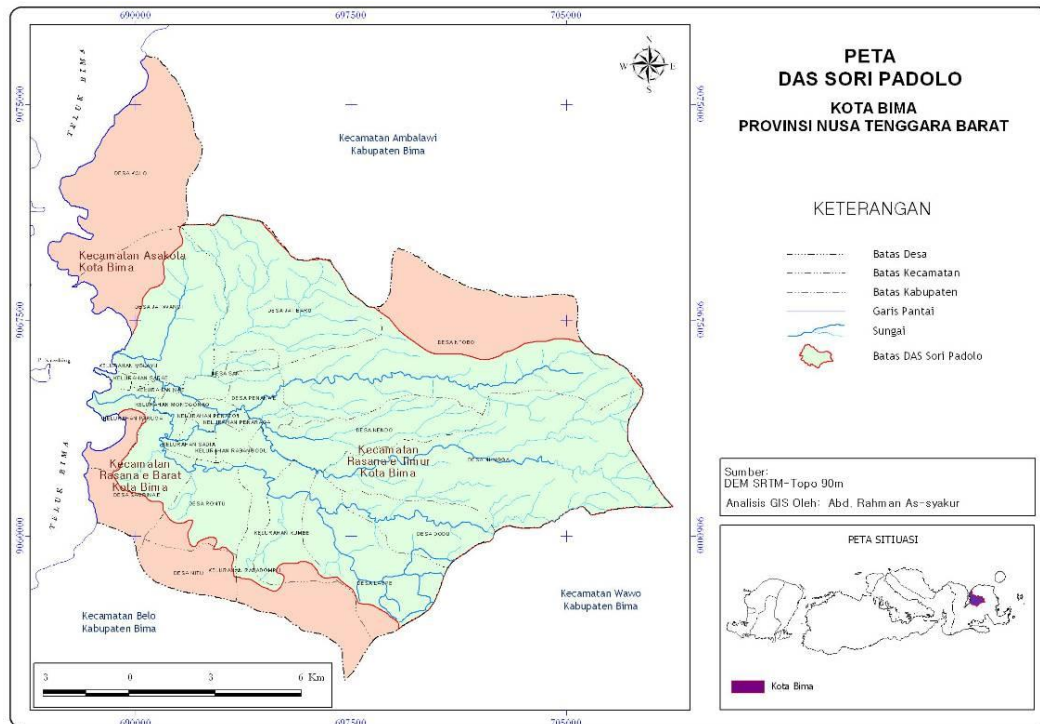
terjadinya banjir pada hulu DAS Sori Padolo. Hal ini disebabkan karena hulu DAS Sori Padolo relatif datar dengan kemiringan lereng didominasi oleh lereng 0-3%.

Luas DAS Sori Padolo adalah 25.255,92 Ha, dimana dari luas tersebut sekitar 15.603,71 Ha atau 61,78% melewati area Kota Bima dan hanya sekitar 9.652,21 Ha atau 32,22% yang melewati Kota Bima. Kecuali Desa Kolo, semua desa-desa yang ada di Kota Bima dilewati oleh DAS ini dan terdapat 14 desa yang 100% arealnya dilewati oleh DAS ini. Peta DAS dan sebaran desa-desa yang dilewatinya dapat dilihat pada Peta dan Tabel berikut.

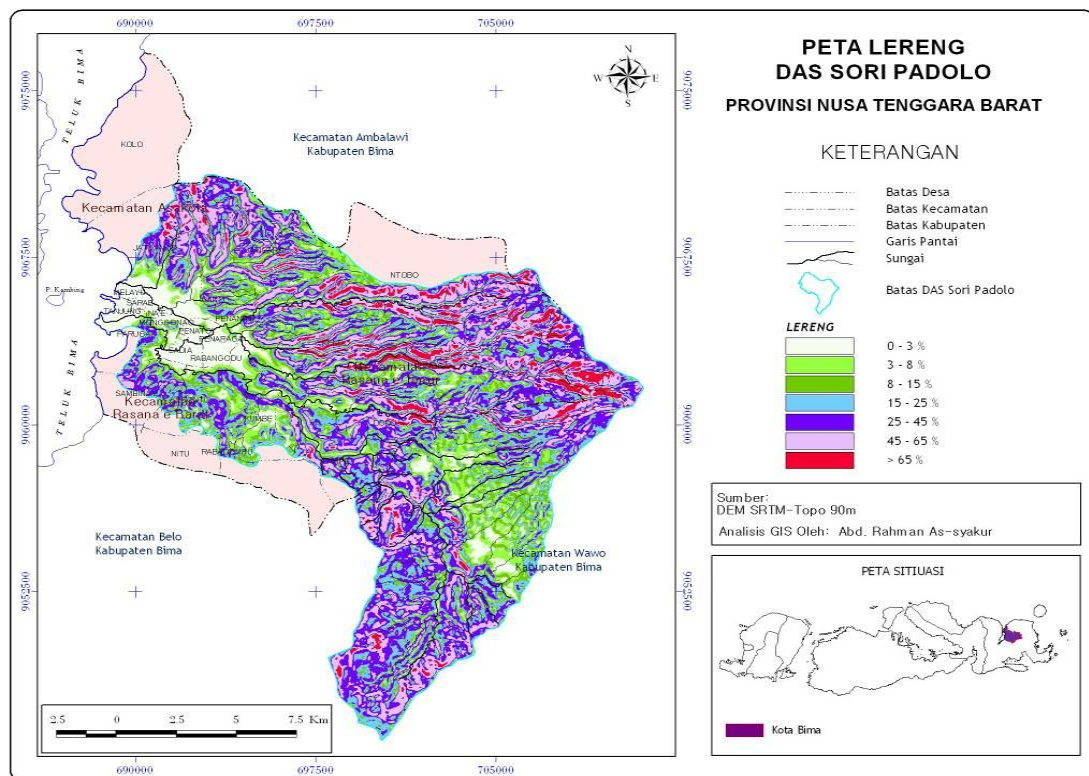
DAS Sori Padolo didominasi oleh lereng dengan kelas lereng curam sampai sangat curam dimana luas lereng yang curam adalah 11.105,03 Ha atau 43,99% dari seluruh total luas DAS. Di areal DAS yang melewati Kota Bima, DAS ini juga didominasi oleh tingkat kelerengan yang curam yaitu sebesar 6.274,40 Ha atau 40,26% dari luas Kota Bima. Dilihat dari sebarannya, lereng yang datar mendominasi daerah hulu dari DAS Sori Padolo dan sebagian berada di hilir DAS yaitu di bagian tenggara dari DAS sedangkan lereng yang sangat curam mendominasi daerah di bagian timur laut dari DAS. Keadaan lereng yang datar di daerah hulu dan sangat curam di daerah hilir sebagian besar berada di Kota Bima, akan tetapi ada sebagian dari wilayah DAS yang mempunyai daerah datar yang berada di Kota Bima. Sebaran kondisi lereng di wilayah DAS ini dan luasannya dapat dilihat pada Peta dan Tabel dibawah.



Gambar 2.2. Peta DAS Sori Padolo



Gambar 2.3. Peta DAS Sori Padolo dan Kelurahan yang Dilewatinya di Kota Bima



Gambar 2.4. Peta Lereng DAS Sori Padolo

Tabel 2.7. Persentase Luasan Area Kelurahan yang dilalui oleh DAS Padolo di Kota Bima

No	KELURAHAN	Persentase Areal Kelurahan (%)
1	Kelurahan Dodu	100.00
2	Kelurahan Jatibaru	99.47
3	Kelurahan Jatiwangi	66.14
4	Kelurahan Kendo	100.00
5	Kelurahan Lampe	91.15
6	Kelurahan Nitu	1.89
7	Kelurahan Ntobo	61.31
8	Kelurahan Nungga	100.00
9	Kelurahan Penana'e	100.00
10	Kelurahan Rontu	80.61
11	Kelurahan Sambina'e	57.33
12	Kelurahan Santi	100.00
13	Kelurahan Kumbe	85.58
14	Kelurahan Melayu	100.00
15	Kelurahan Monggonao	100.00
16	Kelurahan Na'e	100.00
17	Kelurahan Paruga	48.06
18	Kelurahan Penaraga	100.00
19	Kelurahan Penato'i	100.00
20	Kelurahan Rabadompu	38.32
21	Kelurahan Rabangodu	100.00
22	Kelurahan Sadia	100.00
23	Kelurahan Sarae	100.00
24	Kelurahan Tanjung	100.00

Sumber : Hasil Analisis PPLH UNUD

Tabel 2.8. Luasan Lereng-Lereng DAS Sori Padolo

Lereng (%)	Bentuk wilayah	Luas (ha)	%
0 – 3	Datar	2268.248	8.986
3 – 8	Agak landau	2693.520	10.670
8 – 15	Landai	3217.028	12.744
15 – 25	Agak curam	4656.533	18.447
25 – 40	Curam	6448.500	25.546
40 – 60	Sangat curam	4773.060	18.908
> 60	Terjal	1186.088	4.699

Sumber : Hasil Analisis PPLH UNUD

2.1.1.6. Kondisi Demografis

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kota Bima Tahun 2021 mencapai 156.224 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki adalah 78.550 jiwa sedangkan jumlah penduduk perempuan

adalah 77.674 jiwa. Kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi berdasarkan hasil SP2020 adalah Kecamatan Raba dengan jumlah penduduk 34.845 jiwa. Sedangkan yang paling sedikit adalah Kecamatan Rasanae Timur yaitu 16.205 jiwa.

Tabel 2.9. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Bima Tahun 2021

No	Kecamatan	Penduduk (ribu jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk 2010-2021 (%)
1.	Rasanae Barat	30 648	-0,20
2.	Mpunda	33 543	0,22
3.	Raba	18 706	1,24
4.	Rasanae Timur	38 822	0,92
5.	Asakota	34 505	1,87
Jumlah Total		156 224	0,76

Sumber : BPS Kota Bima, 2022

b. Pengelompokan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jumlah penduduk Kota Bima tahun 2022 berdasarkan tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan secara umum didominasi oleh lulusan SLTA/ sederajat yang mencapai 45.437 jiwa atau sebesar 29,38 persen dari total penduduk. Angka penduduk berpendidikan rendah yang merupakan tamatan SD sampai SLTP sederajat mencapai 32.451 jiwa atau 21,03 persen. Jumlah penduduk yang menyelesaikan pendidikan tinggi diploma sebesar 2.367 atau 1,53 persen dan jumlah penduduk yang menyelesaikan pendidikan tinggi sarjana dan pasca sarjana sebesar 14.812 atau 9,60 persen, dimana 15 diantaranya adalah berpendidikan S3 (doktor), sebanyak 665 berpendidikan S2 (Master) dan sebanyak 2.367 jiwa berpendidikan Diploma IV/S1. Sedangkan jumlah penduduk yang tidak menamatkan SD masih sangat tinggi yaitu sejumlah 19.351 jiwa atau 12,54 persen dari jumlah penduduk. Adapun jumlah penduduk yang belum/tidak bersekolah sebanyak 39.999 jiwa atau 25,92 persen.

Tabel 2.10. Jumlah Penduduk Kota Bima berdasarkan Tingkat Pendidikan Dirinci Menurut Kecamatan di Kota Bima Tahun 2022

Kecamatan	Tidak/ Belum Sekolah	Tidak Tamat SD/ Sederajat	Tamat SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Sederajat	Diploma I/II/III	Diploma IV/S1	Strata II	Strata III
Rasanae Barat	7.259	3.585	2.657	3.487	9.983	428	2.490	107	2
Mpunda	8.049	3.552	2.464	2.903	9.805	695	4.620	269	3
Rasanae Timur	5.369	2.605	2.198	2.209	5.180	201	939	10	0

Raba	10.314	4.788	3.740	3.667	11.691	678	3.914	161	7
Asakota	9.008	4.821	4.925	4.201	8.688	365	2.169	118	3
Jumlah	39.999	19.351	15.984	16.467	45.347	2.367	14.132	665	15

Sumber : Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga, 2023

c. Pengelompokan Penduduk Berdasarkan Persebaran Penduduk

Indikator penting untuk melihat persebaran penduduk adalah rasio kepadatan penduduk (density ratio), yang sangat berkaitan erat dengan daya dukung (carrying capacity) suatu wilayah. Indikator kepadatan penduduk merupakan rasio yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk terhadap luas wilayah. Berdasarkan persebaran penduduk tahun 2021, kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Rasanae Barat dengan jumlah kepadatan 3022,49 jiwa/km². Sedangkan Kecamatan Rasanae Timur merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah dengan jumlah kepadatan 291,96 jiwa/km².

Tabel 2.11. Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kota Bima Tahun 2017 – 2022 (Jiwa/km²)

No	Kecamatan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Rasanae Barat	3.824	3.899	3.001	3.022	3022
2	Mpunda	2.608	2.659	2.180	2.195	2195
3	Raba	658	674	605	609	609
4	Rasanae Timur	276	282	290	292	292
5	Asakota	456	465	496	500	500
Jumlah		764	764	780	703	703

Sumber : Kota Bima Dalam Angka, BPS Kota Bima 2023

d. Pencatatan Sipil

Untuk mendapatkan data penduduk yang sudah terdaftar dalam catatan sipil, dapat dihitung berdasarkan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akte Kelahiran. Sampai dengan akhir tahun 2022, jumlah penduduk Kota Bima yang wajib KTP-Elektronik 109.573 jiwa. Kepala keluarga di Kota Bima, yang sudah memiliki Kartu Keluarga Nasional sampai dengan akhir tahun 2022 sebanyak 49.663 atau 100%. Jumlah pencatatan kelahiran tahun 2022 yaitu sebanyak 81.739 jiwa.

**Tabel 2.12. Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan KTP dan Akte Lahir
Tahun 2022**

Uraian	2022
Jumlah Penduduk Wajib KTP	109.573 Jiwa
Jumlah Penduduk sudah cetak KTP	103.789 Jiwa
Rasio Penduduk ber-KTP	100 %
Jumlah Penduduk ber-akte lahir	81.739 Jiwa
Jumlah KK	49.663 Jiwa
Sudah Cetak KK	100 %
Rasio Kepemilikan KK	100 %

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan sipil 2023

e. Ketenagakerjaan

Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang termasuk dalam kategori tenaga kerja adalah penduduk yang telah berusia diatas 15 tahun ke atas. Sedangkan menurut ILO yang termasuk dalam katagori tenaga kerja adalah penduduk yang berusia mulai dari umur diatas 10 tahun. Tenaga kerja dapat diklasifikasikan pada komponen Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja. Yang dimaksud dengan Angkatan Kerja adalah Penduduk usia kerja 15 tahun atau lebih yang bekerja atau punya pekerjaan tetapi sifatnya sementara, tidak bekerja dan yang mencari pekerjaan. Sedangkan yang termasuk Bukan Angkatan Kerja adalah Penduduk Usia Kerja 15 tahun ke atas yang kegiatan utamanya seperti sekolah, mengurus rumah tangga dan lansia (penerima pensiun).

Pada tahun 2022 jumlah angkatan kerja di Kota Bima mencapai 98.022 Jiwa. Angkatan kerja sudah bekerja laki-laki sebanyak 53.718 jiwa atau lebih besar dibandingkan jumlah angkatan kerja sudah bekerja perempuan yang hanya sejumlah 40.652 jiwa. Dari jumlah tersebut, 96,27 persen angkatan kerja sudah bekerja sedangkan 3,73 persen menganggur. Jumlah penduduk yang masuk dalam kategori bukan angkatan kerja adalah sebesar 42.420 Jiwa yang terdiri dari penduduk yang masih sekolah sebanyak 12.476 jiwa dan penduduk yang mengurus rumah tangga sebanyak 23.687 jiwa dan penduduk dengan kegiatan lainnya 6.253 jiwa.

Tabel 2.13. Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Dirinci Menurut Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	JUMLAH PENDUDUK ≥ 15 THN (JIWA)	122.780	125.568	133.836	137.149	140.438
2	ANGKATAN KERJA (JIWA)	87.544	89.930	99.361	103.498	98.022
	Bekerja	85.455	86.168	94.970	99.811	94.370
	Pengangguran/TPT	2.089	3.762	4.391	3.687	3.652
3	BUKAN ANGKATAN KERJA (JIWA)	35.236	35.638	34.475	33.651	42.420
	Sekolah	10.790	9.627	8.915	7.278	12.476
	Mengurus RT (%)	20.273	21.792	20.241	21.855	23.687
	Lainnya (%)	4.173	4.219	5.319	4.518	6.253

Sumber : BPS Kota Bima, 2023

Komposisi penduduk menurut lapangan pekerjaan di Kota Bima pada tahun 2022 didominasi oleh 3 (tiga) sektor lapangan pekerjaan. Penduduk yang bekerja di sektor Pekerja lainnya, IRT, Pelajar, Pensiunan adalah yang paling dominan yaitu mencapai 68,78 persen. Lapangan pekerjaan selanjutnya pada sektor Dosen, Guru, PNS, TNI, POLRI yaitu sebesar 9,02 persen, dan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang mencapai 8,71 persen serta Karyawan Swasta, BUMN, BUMD dan Honorer mencapai 8,61 persen.

Tabel 2.14. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Kegiatan Utama Tahun 2022

Lapangan Pekerjaan	2022
Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	9.553
Industri Pengolahan	9
Listrik, Gas dan Air	15
Bangunan	1.038
Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel	957
Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi	1.068
Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan	0
Jasa Kemasyarakatan, Sosial, Keagamaan dan Perorangan	2.261
Pekerja lainnya, IRT, Pelajar, Pensiunan	75.443
Karyawan Swasta, BUMN, BUMD dan Honorer	9.441
Dosen, Guru, PNS, TNI, POLRI	9.890
J u m l a h	109.675

Sumber : BPS Kota Bima, 2023

Data di atas menunjukkan bahwa sektor jasa dan perdagangan memang merupakan lapangan pekerjaan dominan bagi penduduk Kota Bima. Hal ini sejalan dengan karakteristik wilayah sebagai sebuah kota meskipun sektor pertanian dalam arti luas juga masih memberikan kontribusi yang cukup besar.

Pertumbuhan sektor Perdagangan dan Jasa ini pada dasarnya didukung oleh keberadaan pelabuhan laut Bima serta fungsi wilayah kota Bima dalam struktur ruang regional sebagai sub pusat pertumbuhan di bagian timur Provinsi NTB. Oleh karena itu, pengembangan kota diarahkan pada upaya untuk lebih meningkatkan produktifitas, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kota secara keseluruhan. Adapun sebagai Kota Jasa, Kota Bima akan lebih menekankan pada fungsi kota dalam pelayanan publik di berbagai bidang yang menunjang sebagai pusat koleksi dan distribusi.

2.1.1.7. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah Kota Bima dalam pembahasannya mengacu pada arahan rencana penataan ruang Wilayah Kota Bima yang meliputi potensi pengembangan kawasan lindung dan kawasan Budidaya.

A. Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam serta sumber daya buatan guna pembangunan berkelanjutan. Jenis kawasan lindung yang direncanakan berdasarkan RTRW adalah sebagai berikut:

1. Kawasan Hutan Lindung
2. Kawasan perlindungan setempat;
 - ✓ Sempadan pantai;
 - ✓ Sempadan sungai;
 - ✓ Waduk
 - ✓ Kawasan sekitar mata air.
3. Kawasan rawan bencana alam;
 - ✓ Kawasan rawan gempa;
 - ✓ Kawasan rawan gerakan tanah dan longsor;
 - ✓ Kawasan rawan bencana banjir;
 - ✓ Kawasan rawan bencana tsunami;

- ✓ Kawasan rawan bencana gelombang pasang;

4. Kawasan Cagar Budaya

5. Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

B. Kawasan Budidaya

Kawasan Hutan Produksi

Hutan produksi yaitu adalah hutan yang dapat dikelola untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomi dan yang sengaja di kelola olah manusia. Hutan produksi terbagi menjadi menjadi dua yaitu hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap.

Hutan Produksi Terbatas

Adapun peruntukan untuk hutan produksi terbatas tersebar di Kecamatan Asakota dan Kecamatan Rasanae timur dengan luas keseluruhan 1.497,00 Ha, yang meliputi hutan Maria (RTK.25), di Kecamatan Rasanae Timur dengan luas 627,00 Ha dan hutan Nanganae Kapenta (RTK.68) seluas 870,00 Ha

Hutan Produksi Tetap

Untuk peruntukan hutan produksi tetap terdapat di Kelurahan Asakota dan Kecamatan Mpunda dengan luasan sebesar 1.258 Ha, yang terdiri dari 1.010 Ha hutan Donggomasa (RTK.67) dan 248,00 Ha hutan Nanganae Kapenta (RTK.68)

Kawasan Peruntukan Perumahan

Rencana pengembangan perumahan di kota Bima seluas 1.255 Ha diklasifikasikan dengan perumahan kepadatan tinggi, kepadatan sedang dan kepadatan rendah. Perumahan dengan kepadatan tinggi diarahkan di kawasan pusat kota dan sekitarnya meliputi kelurahan Merlayu, Tanjung, Paruga, Dara, Sarae, Nae, Monggonao, Manggemaci, Pane, Penatoi, Lewirato, Mande, Santi, Rabadompu Barat, Rabadompu Timur, Rabangodu Utara, Penaraga, dan Kelurahan Sadia. Perumahan dengan kepadatan sedang diarahkan di kawasan sub pusat kota dan sekitarnya, meliputi kelurahan Sambinae, Panggi, Rontu, Kumbe, Jatiwangi, Jatibaru, Matakando, Rite, Penanae, dan Rabangodu Selatan. Perumahan dengan kepadatan rendah diarahkan di kawasan pinggiran kota meliputi kelurahan Kolo, Ntobo, Kendo, Nungga, Lelamase, Dodu, Lampe, Oi Fo'o, Nitu, dan Kodo

Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa

Perkembangan kawasan perdagangan dan jasa di wilayah Kota Bima keberadaannya memusat di pusat kota, tetapi ada indikasi berkembang secara linier pada jalan-jalan utama kota. Kegiatan perdagangan di wilayah Kota Bima semakin berkembang dan meningkat. Dalam skala regional keberadaan Kota Bima adalah sebagai pusat kegiatan koleksi dan distribusi barang dan jasa untuk wilayah sekitarnya, khususnya dalam kaitannya dengan pengembangan skala regional. Sehingga keberadaan Kota Bima mempunyai arti yang sangat penting dan perlu diarahkan secara tetap dan memenuhi sasaran. Sesuai dengan kondisi dan tingkat perkembangan Kota Bima maka rencana pengembangan kawasan komersial yang ada di Kota Bima adalah sebagai berikut:

Untuk pusat perbelanjaan berupa pasar raya Bima sebagai pasar grosir. Kegiatan perdagangan ini perlu dilengkapi dengan tempat bongkar muat barang, tempat parkir kendaraan, tempat sampah dan perlengkapan kebersihan lainnya.

Pusat perbelanjaan berupa plaza dan pasar swalayan di Kota Bima perlu dikembangkan mengingat kecenderungan perkembangan kota Bima yang semakin pesat. Mengingat keberadaan pasar swalayan ini mempunyai daya tarik yang besar, maka untuk pengembangan yang akan datang diusahakan berada pada kawasan yang baru, seperti disekitar pusat perkantoran. Dengan demikian diharapkan kegiatan aktivitas kota tidak hanya memusat di pusat kota saja, tetapi mampu berkembang secara merata di seluruh wilayah Kota Bima. Salah satu upaya lain yang perlu diperhatikan adalah mengusahakan keberadaan pasar swalayan dan Plaza ini tidak mengganggu keberadaan pasar tradisional yang ada.

Untuk kegiatan perdagangan campuran, seperti garment/konveksi, elektronik, dealer motor, biro perjalanan, jasa seperti bank berkembang secara linier yaitu mulai dari Sultan Hasanuddin, Jalan Sultan Kaharuddin, dan Jalan Gajah Mada serta Jalan Jenderal Soedirman, Pengembangan perdagangan dan jasa ini perlu dibatasi, mengingat keberadaan kawasan perdagangan ini sudah padat dan tidak adanya tempat parkir yang memadai. Sehingga yang perlu dilakukan pada kawasan perdagangan dan jasa ini adalah pengaturan parkir dengan sistem parkir paralel dan parkir menyudut untuk memenuhi kebutuhan parkir pengunjung di kawasan tersebut.

Kawasan Peruntukan Perkantoran

Rencana kawasan peruntukan perkantoran di Kota Bima yaitu untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan perkantoran pemerintah dan swasta dengan luas kawasan sebesar 46 Ha, adapun sebaran kawasan peruntukan perkantoran yaitu berada pada Kelurahan Penatoi, Kelurahan Sadia, Kelurahan Lewirato, Kelurahan Rabangodu Selatan, Kelurahan Rabangodu Utara, Kelurahan Menggemaci, Kelurahan Paruga, dan Kelurahan Dara.

Kawasan Peruntukan Industri dan Pergudangan

Lokasi Pengembangan Kawasan industri dan pergudangan di Kota Bima direncanakan:

Pengembangan industri pengolahan hasil perikanan di Kelurahan Tanjung, industri garam rakyat di Kelurahan Dara dan Kelurahan Paruga, dan industri pengolahan hasil pertanian di Kelurahan Jatiwangi dengan luas sebesar 14 Ha.

Pengembangan Kawasan industri kecil atau industri tenunan tradisional dengan skala regional dan lokal berlokasi di Kelurahan Ntobo, Kelurahan Nitu, Rabadompu Barat, Kelurahan Rabadompu Timur, Kelurahan Kumbe dan didukung oleh kegiatan industri tenun di seluruh kelurahan di kota.

Adapun untuk pengembangan kawasan pergudangan dipusatkan di Lingkungan Kampung Sumbawa Kelurahan Tanjung, sampai Lingkungan Bina Baru Kelurahan Dara.

Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan wisata disini didefinisikan sebagai keberkaitan beberapa obyek atau potensi wisata dalam satu keberkaitan yang umumnya jaraknya berdekatan. Sehingga kawasan wisata tidak didefinisikan sebagai obyek wisata, tetapi lebih pada adanya obyek dan potensi wisata disertai infrastruktur, pusat pelayanan wisata dan akomodasi wisata sebagai satu kesatuan sistem. Pengkajian ini didasarkan pada potensi yang ada, potensi yang akan datang atau potensi yang akan dikembangkan. Pengembangan wisata ini harus diikuti wisata andalan serta keberkaitan dengan wisata provinsi dan nasional. Rencana arahan lokasi Pengembangan Kawasan wisata di Kota Bima adalah:

Pengembangan kawasan wisata alam (pantai/bahari) diarahkan pada kawasan pesisir pantai Ni'u sampai Amahami Kelurahan Dara, kawasan pantai Kolo dan sekitarnya, dengan luas kawasan sebesar kurang lebih 72 Ha.

Pengembangan kawasan pariwisata belanja khususnya produk kerajinan dilakukan di Kelurahan Ntobo, Kelurahan Rabadompu Timur dan Kelurahan Nitu.

Pengembangan kawasan wisata budaya diarahkan di Kelurahan Paruga, Kelurahan Sarae, Kelurahan Nitu, Kelurahan Ntobo dan Kelurahan Melayu.

Pengembangan kawasan pariwisata religi diarahkan di Kelurahan Paruga dan Kelurahan Pane.

Pengembangan kawasan wisata kuliner diarahkan di Kelurahan Dara, Kelurahan Paruga, Kelurahan Sadia, dan Kelurahan Manggemaci.

Kawasan Peruntukan Sektor Informal

Peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal direncanakan dilakukan di areal kawasan perdagangan dan jasa, areal rekreasi sepanjang pantai Niu-Lawata-Amahami Kelurahan Dara, taman lapangan Pahlawan Raba, Kompleks Paruga Nae, Jalan Sulawesi, Jalan Flores, Jalan Sultan Kaharuddin, Jalan Sultan Salahuddin, Jalan Mujair, Jalan Wolter Monginsidi, Jalan Martadinata, Jalan Gadjah Mada.

Kawasan Peruntukan Pendidikan

Berdasarkan kondisi saat ini kecenderungan perkembangan fasilitas pendidikan berada di pusat kota, sehingga perlu adanya pemerataan fasilitas pendidikan pada seluruh wilayah Kota Bima dan agar tidak terkonsentrasi di pusat kota saja. Kaitannya dengan arahan rencana pengembangan pendidikan menengah dan pendidikan dasar ini, lebih ditekankan pada pusat pelayanan lingkungan yang belum mempunyai fasilitas pendidikan maupun fasilitas pendidikannya masih kurang. Selain mengarahkan lokasi pendidikan ini, juga perlu adanya usaha-usaha yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan, seperti dengan peningkatan sumber daya manusia, peningkatan fasilitas-fasilitas penunjang kegiatan belajar atau bahkan menciptakan pendidikan yang unggul. Pengembangan kawasan pendidikan dilakukan untuk melayani kebutuhan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi skala regional, dan lokal. Adapun rencana pengembangan kawasan pendidikan, diarahkan di Kelurahan Mande, Kelurahan Sadia, kelurahan Sambinae, Kelurahan Santi,

Kelurahan Sarae, dan Kelurahan Rabangodu Utara, dengan luas kawasan kurang lebih sebesar 81, 26 Ha.

Kawasan Peruntukan Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang bardaya guna, Dan untuk menunjang hal tersebut maka Ketersedian fasilitas kesehatan sangat diperlukan, untuk melayani kesehatan seluruh penduduk di Kawasan Kota Bima atau Pulau Sumbawa Bagian Timur dengan skala regional maupun skala lokal.

Adapun untuk pengembangan kawasan kesehatan di Kota Bima, di arahkan di Kelurahan Rabangodu Utara, Kelurahan Monggonao, Kelurahan Sambinae, Kelurahan Nae, Kelurahan Paruga, Kelurahan Sadia, Kelurahan Penanae, Kelurahan Jatiwangi dan Kelurahan Kodo, dengan luas kawasan keseluruhan kurang lebih sebesar 15 Ha. Pengembangan kawasan peruntukan kesehatan dilakukan melalui antara lain: Pengembangan status Rumah Sakit dari tipe B menjadi tipe A, Pengembanagan Puskesmas di tiap kecamatan, dan Pengembangan Posyandu di tiap Kelurahan.

Kawasan Peribadatan

Bahwa sebagaian besar penduduk di Indonesia adalah pemeluk agama Islam, begitu pula dengan penduduk yang ada di wilayah Kota Bima yaitu mayoritas memeluk agama Islam. Jenis fasilitas peribadatan yang ada di Kota Bima seperti langgar/mushola, masjid, dan lain-lain keberadaannya menyebar di seluruh wilayah, dengan kecenderungan menyatu dengan permukiman penduduk. Dominannya pemeluk agama islam di Kota Bima tidak berarti mengesampingkan pemeluk agama lainnya, sehingga perlu penyediaan berbagai fasilitas peribadatan bagi pemeluk agama non islam, seperti gereja, Pura dan Vihara. Disamping itu adanya pemeluk agama non muslim ini tidak menjadikan toleransi antar pemeluk agama menjadi hilang akan tetapi semakin tinggi sifat toleransi antar pemeluk agama, hingga tercipta keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

Untuk memenuhi kebutuhan ruang bagi kegiatan peribadatan dan kegiatan yang terkait dengan pengembangan kegiatan keagamaan skala nasional, regional, dan lokal, maka di upayakan pengembangan kawasan peribadatan.

Rencana Pengembangan Kawasan Peribadatan kurang lebih seluas 23 Ha, yang dilakukan pada Pengembangan Masjid Agung Al Muwahiddin (Masjid Raya) dan Pusat Kajian Islam (Islamic Centre) yang berlokasi di Kelurahan Pane dan pengembangan masjid dan musholla di setiap kelurahan.

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Pertahanan dan Keamanan atau lebih lazim disebut sebagai Kawasan militer yang ada di wilayah Kota Bima, sebagian besar dimanfaatkan untuk kegiatan perkantoran/administrasi, permukiman, dan latihan. Adapun kawasan militer yang ada di Kota Bima, seperti kawasan militer yang ada di Kelurahan Jatiwangi milik Angkatan Darat dan Kompi Brimob yang ada di Kelurahan Sambinae, serta kawasan militer lainnya yang berada di Kelurahan Sadia, Kelurahan Monggonao, dan Kelurahan Rabangodu Utara, adalah bertujuan untuk penegakan keamanan di Kota Bima.

Kawasan peruntukan militer hanya ditetapkan lokasinya, tidak untuk dikembangkan karena menyangkut kebijakan internal korps militer yang bersangkutan. Meskipun demikian, lahan bekas peruntukan kegiatan militer dapat digunakan dan dibangun peruntukan yang baru apabila kawasan militer tersebut sudah dipindahkan. Adapun lokasi rencana untuk kawasan militer dilakukan di Kelurahan Jatiwangi, Kelurahan Sambinae, Kelurahan Sadia, Kelurahan Monggonao, Kelurahan Rabangodu Utara.

Kawasan Peruntukan Pertanian

Pengembangan Kawasan pertanian di Kota Bima meliputi kawasan: pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan serta peternakan lokasinya menyebar di seluruh kecamatan yang ada di Kota Bima Dengan total luasan sebesar 2.253 Ha. Rencana luas kawasan pertanian tanaman pangan ditetapkan dengan pertimbangan utama untuk peningkatan dan pemenuhan kebutuhan pangan bagi wilayah Kota Bima. Pengembangan kawasan direncanakan dengan meningkatkan tingkat pelayanan dan ketersediaan infrastruktur pendukung. Lahan pertanian tanaman pangan merupakan lahan pertanian dengan didukung irigasi baik teknis maupun non teknis. Berdasarkan hal tersebut, maka penetapan kawasan pertanian lahan basah ditentukan pada kawasan yang saat ini sudah memiliki prasarana irigasi dan kemampuan lahan

yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan tanaman pangan (padi). Kawasan pertanian tanaman pangan di Kota Bima meliputi: Kecamatan Mpunda seluas 303 Ha, Kecamatan Rasanae Timur seluas 463 Ha, Kecamatan Raba seluas 489 Ha, Kecamatan Asakota seluas 121 Ha.

Kawasan peruntukkan perkebunan seluas kurang lebih 3.632 Ha, dengan komoditi unggulan jambu mete dan kelapa yang tersebar pada Kelurahan Ntobo, Kelurahan Jatibaru, Kelurahan Jatiwangi, Kelurahan Nitu, Kelurahan Nungga, Kelurahan Lelamase, Kelurahan Lampe, Kelurahan Matakando, dan Kelurahan Kolo.

Kawasan peternakan diprioritaskan dikembangkan di Kecamatan Rasanae Timur, Kecamatan Raba, Kecamatan Mpunda dan Kecamatan Asakota dalam rangka mendukung program Bumi Sejuta Sapi (BSS); dan pengelolaannya dilakukan dengan cara peningkatan jumlah ternak, penggemukan ternak, pembibitan ternak, penyediaan pakan ternak, dan pengembangan industri pengolahan hasil ternak. Adapun kawasan peternakan ini menyebar disemua kecamatan yang ada di Kota Bima dengan komoditi unggulan sapi.

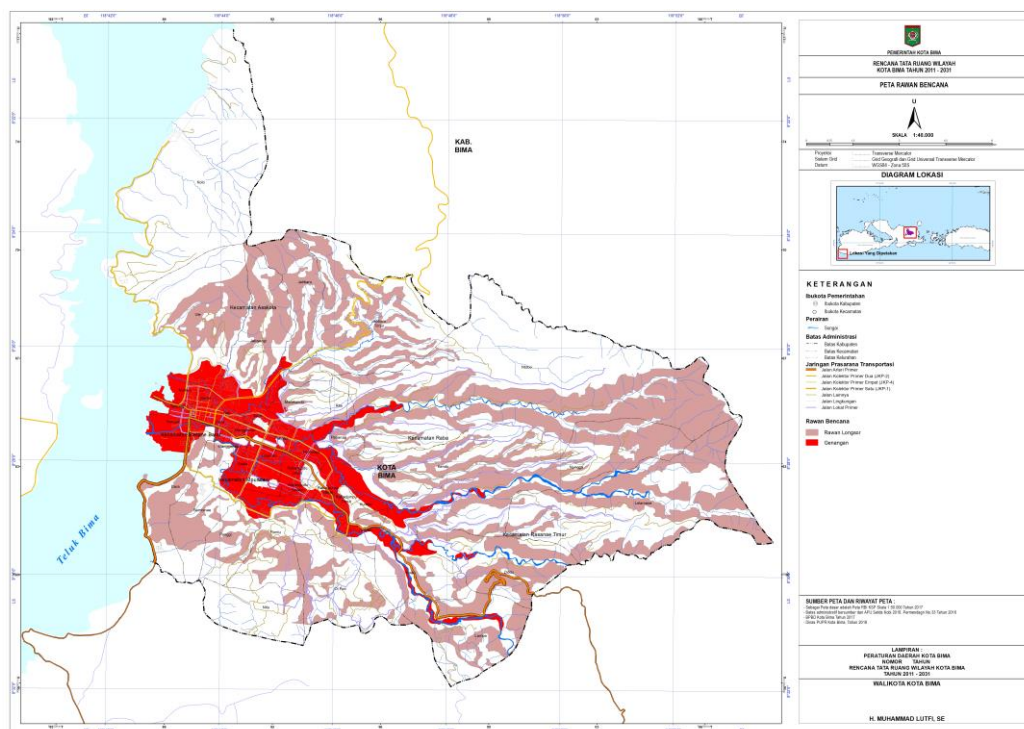
Kawasan Peruntukan Perikanan

Pengembangan kawasan perikanan tangkap, dilakukan di Kelurahan Kolo, Kelurahan Jatiwangi, Kelurahan Melayu, Kelurahan Tanjung, dan Kelurahan Dara. Sedangkan pengembangan perikanan budidaya, dilakukan di Kelurahan Dodu, Matakando, Nungga, Kelurahan Melayu, Kelurahan Jatiwangi, dan Kelurahan Panggi.

2.1.1.8. Kawasan Rawan Bencana

Kota Bima merupakan salah satu daerah yang dilewati oleh jalur cincin api sehingga potensi bencana gempa bumi sangat besar. Disamping rawan bencana gempa bumi, wilayah Kota Bima juga rawan bencana banjir yang meliputi seluruh wilayah kecamatan Rasanae Barat, Sebagian Kecamatan Mpunda, Sebagian Kecamatan Raba, Sebagian Kecamatan Asakota dan sebagian Kecamatan Rasanae Timur. Pada tahun 2016 terdapat 35 kelurahan yang terpapar bencana banjir bandang dari total 38 Kelurahan pada saat itu. Potensi bencana yang lain meliputi tanah longsor, angin puting beliung, cuaca ekstrim serta bencana kebakaran yang berakibat timbulnya korban jiwa, harta, benda, kerusakan sarana dan prasarana serta fasilitas umum. Dan untuk menghindari atau meminimalkan korban jiwa akibat bencana yg terjadi maka disediakan ruang evakuasi, untuk memberikan

pengembangan ruang evakuasi bencana gempa bumi dilakukan pada: bagian timur (Kecamatan Rasanae Timur di Lapangan Lampe dan Lapangan Kodo, Kecamatan Raba di lapangan Pahlawan Raba serta bangunan lainnya yang memungkinkan untuk menampung korban bencana). Bagian tengah (Kecamatan Mpunda) di Lapangan SMK 2, Lapangan Kantor Walikota Bima, dan bangunan sosial, serta bangunan lain yang memungkinkan untuk menampung korban bencana. Bagian barat (Kecamatan Rasanae Barat di Gedung Paruga Nae dan Satdion Manggemaci dan Kecamatan Asakota di Lapangan SPMA, bangunan sosial, dan bangunan lain yang memungkinkan untuk menampung korban bencana).



Gambar 2.5. Peta Rawan Bencana Kota Bima

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

a. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Bruto pada tingkat nasional serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDB maupun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya.

PDB maupun PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

Nilai PDRB Kota Bima atas dasar harga berlaku pada tahun 2021 mencapai 4,301 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 168 (4,06%) milyar rupiah dibandingkan dengan tahun 2020 PDRB Kota Bima mencapai 4,133 triliun rupiah.

Selama lima tahun terakhir (2017-2020) struktur perekonomian Kota Bima didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Transportasi dan Pergudangan dan Konstruksi.

Pada tahun 2021, perekonomian Kota Bima mengalami peningkatan lebih dari 2%. Kenaikan terbesar terjadi pada pengadaan listrik dan gas. Namun sektor pertambangan mengalami penurunan diatas 5%.

Tabel 2.15. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Bima (miliar) Tahun 2018 – 2022

Kategori	2018	2019	2020	2021	2022
	Rp (miliar)	Rp (miliar)	Rp (miliar)	Rp (miliar)	Rp (miliar)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	536,40	571,86	581,11	590,98	614,46
B Pertambangan dan Penggalian	15,58	16,97	16,18	16,50	16,23
C Industri Pengolahan	118,82	127,09	127,28	128,84	134,37
D Pengadaan Listrik dan Gas	7,28	7,77	8,22	8,77	9,69
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,	1,34	1,39	1,37	1,39	1,48

Kategori	2018	2019	2020	2021	2022
	Rp (milliar)	Rp (milliar)	Rp (milliar)	Rp (milliar)	Rp (milliar)
Limbah dan Daur Ulang					
F Konstruksi	363,29	399,90	349,21	391,63	381,11
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	966,21	1073,00	1019,53	1 057,95	1161,90
H Transportasi dan Pergudangan	401,25	435,56	354,38	366,17	416,94
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	122,95	131,79	126,01	129,53	160,81
J Informasi dan Komunikasi	59,14	63,40	72,78	76,57	80,22
K Jasa Keuangan dan Asuransi	97,19	100,38	102,77	107,59	124,50
L Real Estate	209,43	224,64	228,42	232,00	246,54
M,N Jasa Perusahaan	13,9	14,99	14,94	14,98	16,81
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	462,05	470,75	492,00	510,18	519,64
P Jasa Pendidikan	305,40	336,24	340,64	363,05	362,86
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	123,78	134,45	138,96	149,58	155,23
R,S,T,UJasa lainnya	141,84	156,21	150,17	155,32	171,83
PDRB	3945,92	4267,40	4133,13	4 301,03	4574,61

Sumber : BPS Kota Bima, 2023

Tabel 2.16. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Bima (juta rupiah), Tahun 2018 – 2022

Kategori	2018	2019	2020	2021	2022
	Rp (milliar)	Rp (milliar)	Rp (milliar)	Rp (milliar)	Rp (miliar)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	400,11	412,92	410,77	410,79	416,55
B Pertambangan dan Penggalian	12,33	12,91	11,99	12,14	11,43
C Industri Pengolahan	99,70	103,92	103,20	103,81	105,84
D Pengadaan Listrik dan Gas	6,60	7,09	7,67	8,27	9,06
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,95	0,98	0,96	0,96	0,97
F Konstruksi	291,52	305,62	266,80	284,10	262,18
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	691,30	740,10	695,71	711,18	739,34
H Transportasi dan Pergudangan	308,06	326,41	260,35	263,95	289,34
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	74,63	78,07	73,98	75,01	91,09
J Informasi dan Komunikasi	54,28	56,96	64,64	67,97	69,85
K Jasa Keuangan dan Asuransi	70,63	71,96	73,36	73,37	78,87
L Real Estate	145,33	153,60	155,58	157,37	164,10
M,N Jasa Perusahaan	10,13	10,56	10,35	10,37	11,14
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	276,99	280,51	279,44	283,97	282,05
P Jasa Pendidikan	224,40	241,35	244,61	248,06	246,04
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	100,89	106,18	107,06	113,17	116,40
R,S,T,UJasa lainnya	112,74	119,91	112,75	114,64	124,17
PDRB	2880,59	3 029,04	2 879,22	2 939,13	3.018,40

Sumber : BPS Kota Bima, 2023

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Bima hingga tahun 2019 setiap tahun mengalami peningkatan, akan tetapi pada tahun 2020 nilai PDRB Kota Bima mengalami penurunan, dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2021 dan 2022. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh adanya beberapa faktor, salah satu

faktor yang sangat mempengaruhi penurunan PDRB Kota Bima adanya pandemi COVID-19 yang berdampak hampir di semua sektor lapangan usaha dan mengalami penurunan. Seiring pemulihan ekonomi setelah pandemi Covid-19, nilai PDRB Kota Bima pun mengalami peningkatan.

Apabila dilihat dari nilai PDRB Kota Bima atas dasar harga konstan, pada tahun 2022 mencapai 3.018,40 miliar rupiah. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 79,27miliar rupiah (2,7%) dari nilai PDRB tahun 2021 yaitu sebesar 2.939,13 miliar rupiah.

Tabel 2.17. Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kota Bima Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2018-2022

Kategori	2018	2019	2020	2021	2022
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,08	3,20	-0,52	0,01	1,40
B Pertambangan dan Penggalian	5,05	4,72	-7,19	1,32	-5,73
C Industri Pengolahan	3,52	4,23	-0,69	0,59	1,90
D Pengadaan Listrik dan Gas	1,93	7,46	8,23	7,78	9,53
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,41	3,44	-2,23	0,06	1,03
F Konstruksi	4,93	4,84	-12,70	6,48	-7,72
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,99	7,06	-6,00	2,22	3,96
H Transportasi dan Pergudangan	4,21	5,96	-20,24	1,38	9,63
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,86	4,61	-5,24	1,38	21,44
J Informasi dan Komunikasi	6,62	4,93	13,48	5,16	2,76
K Jasa Keuangan dan Asuransi	6,18	1,88	1,95	0,02	7,49
L Real Estate	5,74	5,69	1,29	1,15	4,27
M,N Jasa Perusahaan	7,40	4,18	-1,94	0,12	7,46
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,98	1,27	-0,38	1,62	-0,68
P Jasa Pendidikan	5,53	7,56	1,35	1,41	-0,81
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,86	5,25	0,83	5,71	2,85
R,S,T, Jasa lainnya	5,71	6,35	-5,97	1,67	8,32
U					
PDRB	4,70	5,15	-4,95	2,08	2,70

Sumber : BPS Kota Bima, 2023

b. PDRB Per Kapita

Pada Desember 2022, berdasarkan hasil Susenas Maret 2022, pengeluaran masyarakat terbesar tercatat ada di kelompok Perumahan dan fasilitas rumah tangga dan kelompok makanan dan minuman jadi.

Selain itu, pada tahun 2022 penduduk kota bima secara rata-rata mengalami penurunan pengeluaran baik untuk barang bukan makanan, dari yang semula 888.696 di tahun 2021 menjadi 729.817 pada 2022. Kondisi ini

menyebabkan secara total, rata-rata pengeluaran per kapita masyarakat turun menjadi 1.434.157 di tahun 2022 dari yang semula 1.718.519 di tahun 2021.

Oleh karena itu, data Susenas Maret 2022 mengungkapkan bahwa sebagian besar penduduk Kota Bima termasuk dalam kelompok pengeluaran > 1.500.000.

Tabel 2.18. PDRB Perkapita Kota Bima Tahun 2018-2022

Nilai PDRB (Milliar Rupiah)					
	2018	2019	2020	2021	2022
- ADHB	3.949	4.273	4.133	4.301,03	4574,61
- ADHK	2.881	3.029,04	2.879,22	2.939,13	3.018,40
PDRB per Kapita (Persen)					
- ADHB	100,00	100,00	100,00	100	100
- ADHK	4,74	5,22	-4,95	2,08	2,70
- Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK	4,74	5,22	-4,95	2,08	2,70
Jumlah Penduduk (ribu orang)	169,7	173.3	155,1	156,2	157,4
Pertumbuhan Jumlah Penduduk	1,99	1,95	1,96	0,76	0,71

Sumber : BPS Kota Bima, 2023

Laju Inflasi

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur stabilitas ekonomi adalah kestabilan harga-harga. Harga yang merupakan hasil interaksi antara permintaan (demand) dan penawaran (supply) barang dan jasa yang beredar di masyarakat, perlu dipantau perkembangannya sebagai salah satu 27iscal27or penentu kebijakan pemerintah di bidang pendapatan, 27iscal maupun moneter. Untuk memperoleh gambaran mengenai kenaikan harga berbagai barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dari waktu ke waktu dilakukan dengan menghitung indeks harga konsumen. Berdasarkan IHK inilah kemudian didapat besaran angka inflasi/deflasi yaitu besarnya persentase perubahan IHK antar periode.

Nilai inflasi yang terlalu tinggi akan mendorong turunnya investasi, sehingga akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi inflasi maka semakin rendah daya beli dari uang dan dengan sendirinya semakin rendah pula daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa kebutuhan rumah tangga. Laju inflasi yang tidak terlalu tinggi akan membuat stabilitas tetap terjaga dan roda perekonomian dapat terus bergulir.

Pada Bulan Desember 2021, Kota Bima mengalami inflasi sebesar 0,13 persen atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 105,89 pada Bulan November 2021 menjadi 106,49 pada Bulan Desember 2021. Angka ini searah dengan angka inflasi nasional sebesar 1,87 persen.

Inflasi pada Bulan Desember 2022 meningkat tajam menjadi sebesar 6,39 persen terjadi karena adanya peningkatan harga yang akan dirasakan langsung oleh masyarakat dengan pendapatan menengah kebawah. Hal tersebut dikarenakan, ketika terjadi kenaikan harga barang maka daya beli masyarakat akan mengalami penurunan, yang akan memberikan efek berkelanjutan sehingga dapat menyebabkan pendapatan dan standar hidup yang menurun.

Tabel 2.19. Nilai Inflasi Rata-rata Tahun 2018-2022 Kota Bima

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Kota Bima	3,22	2,27	2,05	0,13	6.39

Sumber : BPS Kota Bima, 2023

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

a. Pendidikan

1. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan indikator yang mencerminkan seberapa lama masyarakat yang berusia 7 tahun di suatu wilayah memiliki harapan untuk bersekolah. Harapan lamanya penduduk Kota Bima untuk bersekolah sejak tahun 2017 sampai 2021 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2017, penduduk Kota Bima memiliki harapan untuk bersekolah selama 14,97 tahun, berbeda dengan di tahun 2022 dimana penduduk Kota Bima telah memiliki harapan untuk bersekolah selama 15,05 tahun. Hal ini berarti telah terjadi peningkatan HLS Kota Bima sebesar 0,08 persen selama periode 2018-2022.

Tabel 2.20. Harapan Lama Sekolah di Kota Bima Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Kota Bima	14,98	14,99	15,00	15,04	15,05
Provinsi NTB	13,47	13,48	13,70	13,96	13,96
Kota Mataram	15,52	15,58	15,59	15,48	15,96

Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2023

Penduduk usia 7 tahun Kota Bima memiliki harapan lama sekolah yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata penduduk usia 7 tahun Provinsi NTB. Pada tahun 2017, penduduk usia 7 tahun Kota Bima memiliki harapan untuk bersekolah selama 14 tahun atau sudah lewat dari pendidikan Diploma 1, sementara rata-rata penduduk usia 7 tahun di Provinsi NTB hanya memiliki harapan lama bersekolah selama 13 tahun. Selanjutnya, pada tahun 2022 angka HLS Kota Bima mencapai angka 15 tahun yang berarti penduduk usia 7 tahun Kota Bima telah memiliki harapan untuk bersekolah sampai ke jenjang pendidikan Diploma 3, berbeda dengan rata-rata penduduk usia 7 tahun Provinsi NTB yang hanya memiliki harapan untuk bersekolah selama 13 tahun atau setara Diploma1.

Kota Bima sendiri memiliki angka HLS dengan peringkat kedua di Provinsi NTB setelah Kota Mataram. Sejak tahun 2017 baik Kota Mataram maupun Kota Bima mengalami peningkatan angka HLS, hanya pada tahun 2022 Kota Mataram mengalami penurunan angka HLS. Meskipun begitu, terlihat perbedaan kecepatan tumbuh angka HLS Kota Mataram dan Kota Bima. Selisih HLS Kota Mataram dan Kota Bima di tahun 2017 sebesar 0,55 tahun, sementara di tahun 2021 selisih ini menurun menjadi sebesar 0,91 tahun. Artinya, dalam 6 tahun terakhir angka HLS Kota Bima lebih cepat tumbuh dibandingkan dengan Kota Mataram. Salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan angka HLS adalah kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan yang ada di kedua kota. Kota Mataram memiliki fasilitas pendidikan yang lebih memadai dibandingkan dengan Kota Bima.

2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Sejalan dengan kondisi HLS, rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kota Bima selama periode 2017-2022 selalu lebih tinggi daripada rata-rata Provinsi NTB. Sejak tahun 2017, penduduk Kota Bima telah bersekolah dengan rata-rata lama bersekolah 10,14 tahun. Angka 10,14 ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi NTB yang hanya sebesar 6,90 di tahun yang sama. Selanjutnya, pada tahun 2021 Kota Bima telah berhasil memperpanjang rata-rata lama sekolahnya dengan berbagai program pengembangan bidang pendidikan dalam kurun waktu 6 tahun menjadi sebesar 10,94 tahun.

Tabel 2.21. Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Bima Tahun 2018-2022

Rata-Rata Lama Sekolah	2018	2019	2020	2021	2022
Kota Bima	10,30	10,38	10,49	10,65	10,94
Provinsi NTB	7,03	7,27	7,31	7,38	7,61

Sumber : BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2023

3. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama.

Tabel 2.22. Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Bima Tahun 2018-2022

No	Angka Partisipasi Murni	2018	2019*	2020	2021	2022
1	SD/MI	100,00	99,38	99,21	99,17	99,88
2	SMP/MTs	96,96	96,91	96,81	96,83	96,9
3	SMA/MA/SMK	79,29	79,75	79,34	80,56	81,05

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, BPS Kota Bima 2022

4. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu jenjang pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Tabel 2.23. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Bima Tahun 2018-2022

No	Angka Partisipasi Kasar	2018	2019	2020	2021	2022
1.	APK SD/MI (%)	114,03	109,42	108,14	108,94	109,65
2.	APK SMP/MTs (%)	108,64	100,82	100,29	100,07	106,58
3.	APK SMA/MA/SMK (%)	91,41	95,25	96,34	95,28	95,03

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, BPS Kota Bima 2023

APM SD/MI, APK SMP/MTs, serta APK SMA/MA/SMK mengalami penurunan pada tahun 2021 karena data yang digunakan sebagai dasar perhitungan berbeda.

Pada tahun 2020, jumlah penduduk sebagai salah satu variabel perhitungan menggunakan data asumsi oleh BPS sementara pada tahun 2022 menggunakan data real time dari Dinas Dukcapil.

5. Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT)

Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT) merupakan persentase jumlah penduduk, baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi, menurut pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah tingkat pendidikan yang dicapai seseorang setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi sesuai tingkatan sekolah dengan mendapatkan tanda tamat sekolah (ijazah).

Indikator pendidikan ini bermanfaat untuk menunjukkan capaian hasil pembangunan pendidikan di suatu daerah, selain itu berguna pula untuk menyusun perencanaan penawaran tenaga kerja, terutama untuk mengetahui kualifikasi pendidikan angkatan kerja di suatu wilayah.

Tabel 2.24. Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (Orang) Tahun 2022

Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Terakhir Dirinci per Kecamatan di Kota Bima (Jiwa)									
	Jumlah	Strata III	Strata II	Diploma IV Strata I	Diploma I atau III	SLTA	SLTP	Tamat SD	Tidak Tamat SD	Tidak atau Belum Sekolah
	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
Rasanae Barat	30.196	2	107	2.490	428	9.983	3.487	2.657	3.585	7.259
Mpunda	32.706	3	269	4.620	695	9.805	2.903	2.464	3.552	8.049
Rasanae Timur	18.830	0	10	939	201	5.180	2.209	2.198	2.605	5.369
Raba	39.310	7	161	3.914	678	11.691	3.667	3.740	4.788	10.314
Asakota	34.477	3	118	2.169	365	8.688	4.201	4.925	4.821	9.008
Kota Bima	155.519	15	665	14.132	2.367	45.347	16.467	15.984	19.351	39.999

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2023 (diolah)

b. Kesehatan

1. Angka Kematian Bayi (AKB)

Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup di Kota Bima selama kurun tahun 2017–2022 menunjukkan kondisi yang cenderung stagnan. Pada tahun 2017, AKB di Kota Bima tercatat sebesar 6 per 1.000 kelahiran (6/1000 KH). Pada tahun 2018 dan 2019 berturut-turut mengalami peningkatan menjadi 7/1000 KH dan 9/1000 KH. Namun pada tahun 2020

mengalami penurunan tajam menjadi 4/1000 KH dan kembali pada angka 6/1000 KH ditahun 2021 dan pada tahun 2022 menurun menjadi 5/1000 KH.

Tabel 2.25. Perkembangan Angka Kematian Bayi di Kota Bima Tahun 2018-2022

Jumlah Puskesmas	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Paruga	3	2	2	4	2
Mpunda	8	7	3	5	0
Rasanae Timur	1	3	1	3	0
Kumbe	1	3	2	1	4
Penanae	8	8	4	2	8
Jatibaru	3	5	2	2	2
Kolo	0	0	0	2	0
Kota Bima	24	28	14	19	16
Angka Kematian	7/1000 KH	9/1000 KH	4/1000 KH	6/1000 KH	5/1000 KH

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bima, 2023

2. Angka Harapan Hidup

Pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu diupayakan agar penduduk dapat mencapai usia hidup yang panjang dan sehat. Salah satu indikator yang dapat menggambarkan usia hidup yang telah ditetapkan oleh UNDP adalah Angka Harapan Hidup (AHH). Angka ini memperkirakan lama hidup rata-rata penduduk sejak dilahirkan, dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Penghitungan AHH dilakukan dengan metode tidak langsung, dari keterangan anak lahir hidup dan anak masih hidup pada suatu kurun waktu tertentu. Dengan menggunakan tabel kematian, AHH dapat diperoleh untuk penduduk pada tahun tertentu. Perhitungan AHH masih menggunakan metode tidak langsung karena pelaksanaan registrasi vital yang menyangkut perubahan aktivitas vital penduduk (kelahiran, kematian, dan migrasi) belum dilakukan secara optimal di Indonesia.

Keberhasilan pemerintah dan masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas hidup penduduk di bidang kesehatan dapat terlihat dari peningkatan AHH Kota Bima dari tahun ke tahun pada periode 2017-2022. Pada tahun 2017, penduduk Kota Bima memiliki harapan untuk dapat hidup selama hampir 69,58 tahun. Angka ini terus meningkat hingga di tahun 2022 penduduk Kota Bima memiliki harapan untuk

hidup sampai usia mencapai 70,83 tahun. Dengan kata lain, terjadi peningkatan AHH Kota Bima sebesar hampir 1,32 persen selama 5 tahun atau jika diubah dalam satuan waktu AHH Kota Bima meningkat sebesar kurang lebih 0,3 persen per tahunnya.

Tabel 2.26. Angka Harapan Hidup Kota Bima Tahun 2018 – 2022

AHH	2018	2019	2020	2021	2022
Kota Bima	69,84	70,20	70,38	70,50	70,83
NTB	65,87	66,28	66,51	66,81	67,07

Sumber : BPS Kota Bima, 2023

Kemiskinan

Secara persentase penduduk miskin Kota Bima pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0.08 poin dengan jumlah penduduk miskin sebesar 16.440 jiwa dibandingkan dengan tahun lalu.

Persentase penduduk miskin di Kota Bima secara tren selalu menurun semenjak tahun 2017 namun kembali meningkat di tahun 2021. Persentase kemiskinan Kota Bima masih terbilang rendah jika dibandingkan dengan data persentase kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2022 sebesar 13,83%.

Tabel 2.27. Jumlah Penduduk Miskin Kota Bima Tahun 2018– 2022

Kota Bima	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	14.840	14.800	14.660	16,220	16.440
Tingkat Kemiskinan (%)	8,79	8,60	8,35	8,88	8.80

Sumber : BPS Kota Bima, 2023

c. Seni Budaya

Bima sangat kaya akan sejarah, adat dan budaya, karakter kepemimpinan, filsafat hidup, bahasa dan sastra yang merupakan warisan leluhur dan kebanggaan masyarakatnya. Upaya pelestarian seni budaya Bima sebelumnya dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bima melalui program kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan kini diampu oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Pada capaian kinerja Dinas Dikbud hingga tahun 2022, pelestarian seni budaya masuk sebagai salah satu tujuan Perangkat Daerah yakni “meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal”, dengan indikator tujuan yaitu “cakupan nilai budaya, adat dan tradisi yang dibina” dimana pada tahun 2022 tercapai sebesar 70 persen.

d. Olahraga

Kota Bima memiliki segudang potensi atlet untuk berbagai cabang olahraga. Namun keterbatasan sarana dan prasarana olahraga menjadi salah satu faktor penyebab pembinaan atlet belum bisa maksimal.

Terdapat 35 Pengurus Cabang Olah Raga se-Kota Bima yang bernaung dibawah KONI Kota Bima. Prestasi olahraga Kota Bima menunjukkan tren stabil dari tahun ketahun melalui keikutsertaan pada ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB, namun pasif pada tahun 2020 karena dampak dari pandemi Covid-19.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

a. Urusan Pendidikan

Gambaran umum kondisi layanan urusan wajib bidang pendidikan di Kota Bima akan mencakup keadaan yang meliputi tinjauan terhadap Angka Partisipasi Sekolah (APS) baik untuk pendidikan dasar maupun pendidikan menengah. Disamping itu juga akan mencakup tinjauan rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk, rasio guru dengan murid, rasio guru dengan murid per kelas rata-rata serta sebaran bangunan sekolah berdasarkan kecamatan.

1. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

APS merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Sehingga, naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahnya infrastruktur sekolah serta

peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah. APS di Kota Bima adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.28. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Dasar Kota Bima Tahun 2018-2022

No	Jenjang Pendidikan	2018	2019	2020	2021	2022
1.	APS SD/MI	84,83	109,42	88,14	99,17	106,63
2.	APS SMP/MTs	84,65	100,82	101,96	99,17	107,38

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2023

2. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Hal yang penting dalam rangka pembangunan dan pelayanan umum urusan wajib bidang pendidikan adalah mengetahui apakah bangunan sekolah yang ada sekarang telah memenuhi standar dan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia sekolah tingkat pendidikan (dasar dan menengah). Untuk itu perlu diketahui rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk usia sekolah. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan.

Tabel 2.29. Rasio Ketersediaan Sekolah Pendidikan Dasar di Kota Bima Tahun 2018-2022

No.	Jenjang Pendidikan	2018	2019	2020	2021	2022
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah gedung sekolah	88	88	88	91	91
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	17.226	16.643	16.773	14 687	14.570
1.3.	Rasio	195,75	189,12	190,60	161,39	160,11
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah gedung sekolah	33	35	35	34	37
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	7.735	8.679	9978	13764	14089
2.3.	Rasio	234,39	247,97	285,08	404,82	380,78

Sumber : BPS Kota Bima, 2023

Dari tabel tersebut diatas bahwa penduduk usia sekolah pendidikan 7-12 tahun (SD/MI) pada 2022 perbandingan satu gedung sekolah menampung 160,11 orang, kemudian pada penduduk usia sekolah 13-15 tahun (SMP/MTs) perbandingan satu sekolah menampung 380,8 orang.

Rasio Guru/Murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan per 1.000 jumlah murid pendidikan. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.

**Tabel 2.30. Rasio Guru/Murid Sekolah Negeri di Kota Bima
Tahun 2018-2022**

No	Jenjang Pendidikan	2018	2019	2020	2021	2022
1	SD					
1.1.	Jumlah Guru	1.906	1.854	1.828	1.821	1.809
1.2.	Jumlah Murid	13.959	15.068	15.043	14.727	15.267
1.3.	Rasio	7,32	8,13	8,23	8,09	8,44
2	SMP					
2.1.	Jumlah Guru	777	787	809	846	822
2.2.	Jumlah Murid	6.099	6.135	6.065	5865	5.586
2.3.	Rasio	6,95	7,54	6,80	6,93	6,80

Sumber : Kota Bima Dalam Angka, BPS Kota Bima 2023

**Tabel 2.31. Rasio Guru/Murid Madrasah Negeri di Kota Bima
Tahun 2018-2022**

No	Jenjang Pendidikan	2018	2019	2020	2021	2022
1	MI					
1.1.	Jumlah Guru	186	168	200	207	194
1.2.	Jumlah Murid	1.812	1.764	1.974	1.903	1.903
1.3.	Rasio	9,74	10,5	9,87	9,19	9,81
2	MTs					
2.1.	Jumlah Guru	317	322	322	415	409
2.2.	Jumlah Murid	3.390	3.099	3.099	3.885	3.748
2.3.	Rasio	13,01	8,47	12,27	9,36	9,16

Sumber : Kota Bima Dalam Angka, BPS Kota Bima 2022

4. Rasio guru/murid per kelas rata-rata

Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata adalah jumlah guru pendidikan dasar per kelas per 1.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini

mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar per kelas. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal guru per kelas terhadap jumlah murid agar tercapai mutu pengajaran.

Tabel 2.32. Rasio Guru dan Murid per Kelas Rata-rata per 1000 Jumlah Murid di Kota Bima Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah ruang kelas jenjang SD/MI	840	847	847	847	929
Jumlah ruang kelas jenjang SMP/MTs	366	391	391	391	417
Total jumlah ruang kelas pendidikan dasar	1.206	1.238	1.238	1.238	1.346
Jumlah guru pada jenjang pendidikan dasar	3.394	3.549	3.854	3.295	2.233
Rata-rata jumlah guru sekolah pendidikan dasar per kelas	3,15	3,20	3,11	2,66	2.5
Jumlah murid jenjang pendidikan dasar	26.589	25.322	31.608	26.384	28.491
Rata-rata jumlah murid pendidikan dasar per kelas	24,64	23,45	25,53	21,31	20,00
Rasio guru per kelas rata-rata per 1.000 jumlah murid	0,116	0,105	0,311	0,101	0,11

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bima, 2023

b. Urusan Kesehatan

Pembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi - tingginya. Dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat diperlukan adanya kegiatan yang dapat menyentuh langsung kebutuhan masyarakat akan kesehatan yang paling mendasar untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik.

Penyelenggaran urusan pemerintah bidang kesehatan bisa dilihat dari capaian indikator angka usia harapan hidup, yang dihitung menggunakan variabel angka kematian bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI). Angka Kematian bayi menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (per seribu kelahiran hidup). Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan

derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup di Kota Bima selama kurun tahun 2017–2022 menunjukkan kondisi yang cenderung stagnan. Pada tahun 2017, AKB di Kota Bima tercatat sebesar 6 per 1.000 kelahiran (6/1000 KH). Pada tahun 2018 dan 2019 berturut-turut mengalami peningkatan menjadi 7/1000 KH dan 9/1000 KH. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan tajam menjadi 4/1000 KH dan kembali naik pada angka 5/1000 KH ditahun 2022.

Dalam upaya percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi, Kesiapsiagaan Kelurahan Siaga yang ada memiliki kontribusi yang positif. Pengembangan Kelurahan Siaga Aktif merupakan program pengembangan desa siaga yang sudah dimulai tahun 2006. Pengembangan Kelurahan siaga aktif dilaksanakan melalui pemberdayaan masyarakat, yaitu upaya memfasilitasi proses belajar masyarakat kelurahan dalam memecahkan masalah-masalah kesehatan. Pelaksanaan pengembangan Kelurahan Siaga di Kota Bima sampai dengan tahun 2022 tercatat dari 41 kelurahan, 38 diantaranya telah mengembangkan Kelurahan siaga aktif.

Tabel 2.33. Perkembangan Pelayanan Kesehatan Kota ahun 2018-2022

No	Urusan Kesehatan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Angka Kematian Bayi	24 kasus	28 kasus	14 kasus	19 kasus	16 kasus
2.	Angka Kematian Ibu AKI)	148/1000 00 KH	183/100 000KH	90/100 .000 KH	192/100 000 KH	98/1000 00 KH
3.	Persentase Kelurahan STBM	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Persentase sarana Pelayanan kesehatan yang memenuhi standar	65%	70%	70%	75%	75%
5.	% Desa Siaga Aktif	98%	98%	98%	98%	98%
6.	% Pembinaan Sekolah	22 sklh	24 sklh	24 sklh	24 sklh	22 sklh

No	Urusan Kesehatan	2018	2019	2020	2021	2022
	Sehat					
7.	Jumlah Puskesmas	5	7	7	7	7
8.	Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani	169,17%	94,49%	69,0%	70,0%	99,74%
9.	Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	94,05%	92,90%	94,6%	95%	89,20%
10.	Cakupan kunjungan ibu hamil (K4)	96,61%	95,18%	94,4%	95%	94,15%
11.	Cakupan peserta KB aktif	99,59%	90,30%	87,1%	88%	88,79%
12.	Cakupan Kunjungan Neonatus (KN3)	96,48%	95,87%	97,9%	97,9%	97,9%
13.	Cakupan Kunjungan Bayi	97,08%	91,50%	93,3%	93,3%	97,45%
14.	Cakupan Kunjungan Balita	91,47%	78,40%	89,7%	89,7%	91,30%

Sumber : Dinas Kesehatan, 2023

Strategi pelayanan kesehatan dasar masyarakat dengan fokus khusus pada ibu dan anak dapat dilakukan pada Posyandu. Analisis rasio posyandu terhadap jumlah balita perlu dilakukan dalam upaya peningkatan fasilitasi pelayanan pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan, dan agar status gizi maupun derajat kesehatan ibu dan anak dapat dipertahankan dan atau ditingkatkan. Pada kondisi ideal, satu Posyandu melayani 100 balita. Artinya, minimal terdapat 10 posyandu per 1000 balita.

Puskesmas adalah sarana pelayanan dasar dan unit yang strategis dalam mendukung terwujudnya perubahan status kesehatan masyarakat menuju peningkatan derajat kesehatan yang optimal. Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan tingkat pertama dan terdepan dalam system pelayanan kesehatan harus mampu dijangkau dan diakses oleh masyarakat secara luas dan mudah. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui keterjangkauan penduduk terhadap puskesmas adalah dengan mengetahui rasio puskesmas per 100.000 penduduk.

Sampai dengan tahun 2022, Puskesmas di Kota Bima adalah sejumlah 7 (tujuh) unit yang tersebar secara merata di 5 kecamatan dan didukung oleh 15 puskesmas pembantu.

Sejak tahun 2018 Pemerintah Kota Bima sudah memiliki rumah sakit sendiri yang terletak di Kecamatan Asakota. Ada pula rumah sakit dengan Tipe C yaitu RSUD Bima yang pengelolaannya masih dibawah Pemerintah Kabupaten Bima

meskipun lokasinya berada dalam wilayah administrasi Pemerintah Kota Bima. dikelola oleh swasta masih dalam bentuk klinik yaitu PKU Muhammadiyah dan RS. Dr. Agung, Klinik Salma Husada dan Klinik Arsyafi.

Indikator rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk. Jumlah dokter dan dokter spesialis di Indonesia belum memenuhi kebutuhan sesuai rasio jumlah penduduk Indonesia. Selain itu distribusi dokter dan dokter spesialis tidak merata serta kualitasnya masih perlu ditingkatkan.

**Tabel 2.34. Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan di Kota Bima
Tahun 2018 – 2022**

No	Kecamatan	Jumlah Dokter				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kecamatan Rasanae Barat	11	9	10	7	8
2	Kecamatan Rasanae Timur	3	10	7	8	3
3	Kecamatan Mpunda	15	8	9	9	9
4	Kecamatan Raba	40	5	6	5	4
5	Kecamatan Asakota	19	23	24	27	3
Jumlah		88	55	56	56	27

Sumber: Dinas Kesehatan, 2023

c. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Ketersediaan infrastruktur yang layak dan memadai merupakan aspek dasar yang diperlukan dalam proses pembangunan. Jalan dan jembatan merupakan prasarana mutlak untuk memperlancar kegiatan ekonomi suatu daerah. Jalan dan jembatan dibutuhkan untuk meningkatkan mobilitas penduduk maupun perdagangan barang antar wilayah.

Untuk mendukung kelancaran transportasi darat, hingga tahun 2022 di Kota Bima telah dibangun jalan sepanjang 258,105 km Jalan Kota. Dari total panjang Jalan Kota, 66,49% dalam kondisi baik, 8,24% dalam kondisi sedang, dan sedangkan sisanya sebesar 25,27% kondisi jalan masih kategori rusak ringan maupun rusak berat.

Tabel 2.35. Kondisi Jalan di Kota Bima Tahun 2019-2022 (km)

Kondisi Jalan	Tahun 2019	2020	2021	2022
Baik	120,425	160,501	164,997	171,614
Sedang	84,23	24,112	27,006	21,382
Rusak	28,715	16,267	18,75	11,357
Rusak Berat	24,735	57,225	47,352	53,752
Jumlah	258,105	258,105	258,105	258,105

Sumber : Dinas PUPR Kota Bima, 2023

Terjadinya peningkatan panjang jalan dalam kondisi rusak berat ini dikarenakan banyaknya pembukaan ruas jalan baru dalam beberapa tahun terakhir sehingga kecenderungan terdapat peningkatan jalan rusak dan rusak berat khususnya jalur jalan ekonomi yang mengarah ke perbukitan dan gunung-gunung.

Rasio Jaringan Irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya. Pada tahun 2022, rasio pelayanan jaringan irigasi di Kota Bima baru mencapai angka 54,80. Namun pada tahun 2022 rasio ini mengalami penurunan menjadi 22,73 karena banyak jaringan irigasi yang mengalami kerusakan karena banjir.

Tabel 2.36. Panjang Jaringan Irigasi Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jaringan primer (meter)	5.578	5.578	5.578	6.564,46	11.275,76
2.	Jaringan Sekunder (meter)	28.880	29.440	29.440	26.200,73	27.845,1
3.	Jaringan Tersier (meter)	19.244	19.844	19.844	14.537,1	14.537,1
4.	Luas lahan budidaya (Ha)	1.005,56	1.001,12	1.001,12	2.361	2.361
Rasio		53,41	54,80	54,80	20,03	22,73

Sumber : Dinas PUPR dan data diolah Tahun 2023

**Tabel 2.37. Rasio Jaringan Irigasi menurut Kecamatan
Tahun 2018 – 2022**

No	Kecamatan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Rasanae Barat	-	-	-	68,79	68,89
2	Mpunda	123,96	71,45	71,45	14,47	14,97
3	Raba	45,82	65,12	65,12	27,23	27,78
4	Rasanae Timur	56,78	72,21	72,21	12,66	13,59
5	Asakota	47,78	65,23	65,23	36,68	37,28
Kota Bima		53,41	54,80	54,80	18,21	22,73

Sumber : Dinas PUPR dan data diolah Tahun 2022

Rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi, yaitu fasilitas air bersih, pembuangan tinja, pembuangan air limbah (air bekas), dan pembuangan sampah.

**Tabel 2.38. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi di Kota Bima
Tahun 2018-2022**

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah rumah tinggal bersanitasi	34.242	35.672	33.196	37.352	38.052
2.	Jumlah rumah tinggal	38.713	39.020	35.349	41.506	39056
Persentase (%)		88,45	91,41	93,91	89,99	97,42

Sumber : Dinas PUPR Kota Bima Tahun 2022

Persentase penduduk berakses air bersih adalah proporsi jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan. Akses air bersih meliputi air minum yang berasal dari air mineral, air leding/PAM, pompa air, sumur, atau mata air yang terlindung dalam jumlah yang cukup sesuai standar kebutuhan minimal. Dalam bidang pelayanan air minum, penduduk Kota Bima yang memiliki akses air minum pada tahun 2021 mencapai 95,71%.

**Tabel 2.39. Proporsi Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum
Tahun 2018-2022**

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah penduduk yang berakses air Minum (Jiwa)	160.914	164.206	165.333	169.714	156.224
Jumlah penduduk (Jiwa)	169,714	173,031	155,140	162.434	156.067
Persentase penduduk berakses air minum (%)	94,81	94,89	95,50	95,71	99,89

Sumber : Dinas PUPR Kota Bima, 2023

**Tabel 2.40. Proporsi Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum
Menurut Kecamatan di Kota Bima Tahun 2018 – 2021**

No	Kecamatan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kecamatan Rasanae Barat	94,35	94,51	95,11	95,80	95,80
2	Kecamatan Rasanae Timur	92,38	92,61	93,71	90,93	90,93
3	Kecamatan Mpunda	95,62	95,73	96,75	97,25	97,25
4	Kecamatan Raba	94,74	94,83	94,90	99,69	99,69
5	Kecamatan Asakota	96,76	96,80	97,00	93,81	93,81

Sumber : Dinas PUPR Kota Bima, 2022

Secara umum kinerja pelayanan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dalam kurun waktu 2018 – 2022 sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 2.41. Perkembangan Pelayanan Urusan Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang di Kota Bima Tahun 2018-2022**

No	URUSAN PEKERJAAN UMUM	2018	2019	2020	2021	2022
1.	panjang jaringan jalan kota dalam kondisi baik (%)	70,75	69,08	70,08	74,39	74,77
2.	Rasio Jaringan Irigasi Teknis	0.70	0,71	0,72	0,70	2,69
3.	Persentase Jaringan Irigasi Teknis (%)	70.44	70,92	70,50	70,04	81,88
4.	Rumah tangga pengguna air bersih (%)	84,04	94,89	95,05	95,71	99,89
5.	Rumah tangga bersanitasi layak (%)	88,45	91,41	90,25	89,99	97,43
6.	luas permukiman kumuh (%)	8,03	7,23	13,37	11,66	7,91
7.	luas kawasan tepian air (waterfront city) yang tertata (%)	36	41	50	50	50

No	URUSAN PEKERJAAN UMUM	2018	2019	2020	2021	2022
8.	konektivitas pusat kegiatan dan pusat produksi (%)	107,69	100	100	100	100
9.	Penerangan Jalan Umum yang berfungsi baik (%)	100	100,00	100,00	100	100
10.	Meningkatnya Kelancaran Saluran Drainase (%)	70,62	74,54	74,54	74,23	80,75
11.	Panjang Sungai Tertangani (%)	53,65	60,12	63,12	75,18	76,8
12.	Luas Wilayah yang telah terlayani oleh Rencana Rinci Tata Ruang (%)	20	20	20	10,55	100
13.	Peningkatan jumlah bangunan ber IMB	6,88	8,84	8,97	9,41	12,31

Sumber: Dinas PUPR Kota Bima, 2023

Pada bidang penataan ruang yang mencakup aspek perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian, salah satunya memfokuskan pada ketersediaan dokumen bidang penataan ruang yang akan dijadikan pedoman dalam proses pembangunan secara umum. Indikatornya yaitu dengan tersedianya dokumen perencanaan sesuai Undang-Undang Penataan Ruang, yaitu Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2011-2031, telah terealisasi.

Adapun sistem perkotaan menurut Perda Nomor 4 Tahun 2012, yaitu menyebutkan bahwa Pusat Kegiatan Nasional (PKN) berada di Kota Bima; Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) berada di Bima; Sub Pusat Kota berada di Mpunda dan Raba.

d. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia dalam meningkatkan harkat, martabat, mutu kehidupan dan penghidupan, serta sebagai pencerminan diri pribadi dalam upaya peningkatan taraf hidup, serta pembentukan watak, karakter dan kepribadian bangsa. Namun sayangnya hak dasar rakyat tersebut pada saat ini masih belum sepenuhnya terpenuhi. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya kemampuan daya beli masyarakat, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam memenuhi kebutuhan akan rumahnya.

Lebih lanjut, Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat menyatakan bahwa Pemerintah memberikan pelayanan dalam bidang perumahan rakyat agar masyarakat mampu menghuni rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).

Tabel 2.42. Permukiman Kumuh dan Rumah Layak Huni di Kota Bima Tahun 2018-2022

No.	Perumahan dan Kawasan Permukiman	2018	2019	2020	2021	2022
1.	% luas permukiman kumuh	8,03	7,23	13,37	11,66	10,10
2.	% Rumah Layak Huni	85,26	103,47	93,91	69,17	70,15

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima, 2022

Persentase luas permukiman yang tertata adalah proporsi luas area permukiman yang sesuai dengan peruntukan berdasarkan rencana tata ruang satuan permukiman terhadap luas area permukiman keseluruhan.

Tabel 2.43. Luas Permukiman yang Tertata di Kota Bima Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	luas area permukiman tertata (Ha)	1.688,98	1.701,12	1.690,30	1709,71	1.735,36
2.	luas area permukiman keseluruhan (Ha)	1.863,96	1.885,23	1.860,22	1.880,32	1.895,73
3.	Persentase Luas Permukiman yang Tertata (%)	90,61	90,23	90,87	90,93	91,54

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima, 2022

e. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh 3 (tiga) Perangkat Daerah yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, dan Satuan Polisi Pamong Praja. Salah

satu faktor syarat terlaksananya pembangunan adalah terwujudnya ketenteraman dan ketertiban umum. Selama kurun waktu tahun 2017–2022, konflik yang terjadi terus menunjukkan trend penurunan sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.44. Kondisi Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Di Kota Bima Tahun 2018-2022

No.	Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	2018	2019	2020	2021	2022
19.1.	Jumlah konflik SARA	0	0	0	0	0
19.2	Persentase Pembinaan Terhadap Aparatur dan Masyarakat dalam menghadapi potensi konflik	20%	20%	20%	20%	0,27%
19.3	% Gejala Konflik yang diatasi	30%	35%	30%	30%	33%
19.4	Persentase Cakupan wilayah potensi konflik	20%	20%	20%	20%	24%
19.5	Persentase Pembinaan terhadap LMS dan Ormas	45%	60%	50%	50%	50%
19.6	Persentase pembinaan politik terhadap aparaturnya dan masyarakat	30%	45%	45%	45%	50%

Sumber : Badan Kesbangpol, 2023

Upaya penurunan konflik dilakukan dengan melakukan pemilihan strategi, kebijakan, dan program yang tepat dengan meningkatkan koordinasi dengan aparat keamanan dan organisasi (mitra kerja) yang dibentuk untuk keperluan tersebut seperti Forum Koordinasi Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT). Sekecil apapun isu yang berpotensi menimbulkan konflik yang berdasarkan hasil deteksi dini akan ditindaklanjuti dengan berbagai kegiatan atau aksi dalam pencegahan dini. Namun demikian jika konflikpun terjadi maka akan diusahakan agar cepat diselesaikan secara optimal agar tidak berdampak luas.

Untuk penanganan terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota telah dilakukan secara preventif. Selama kurun waktu tahun 2018 - 2022, jumlah pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sebanyak 110 kasus dan telah tertangani seluruhnya.

f. Urusan Sosial

Permasalahan sosial merupakan permasalahan yang harus dihadapi oleh Kota Bima saat ini dan di masa yang akan datang, berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bima dan masyarakat serta swasta diantaranya pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), kegiatan penanganan PMKS, dan jumlah sarana sosial (seperti panti sosial, panti jompo, dan panti rehabilitasi). Adapun jumlah sarana sosial pada tahun 2022 di Kota Bima baru berjumlah 3 LKS.

Pemerintah Kota Bima dalam melakukan penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) hingga kini terus diupayakan oleh Dinas Sosial dengan berbagai cara, salah satunya pendampingan serta pemberian pekerjaan bagi orang-orang yang bekerja di jalan agar menjadi produktif. Jenis dan jumlah masalah kesejahteraan sosial di Kota Bima pada tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.45. PMKS di Kota Bima Tahun 2018–2022

No	PMKS	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Anak Balita Terlantar (jiwa)	313	22	0	0	0
2.	Anak Terlantar (jiwa)	721	378	531	273	249
3.	Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan	78	0	0	0	0
4.	Anak Nakal (jiwa)	493	0	0	0	0
5.	Anak Jalanan (jiwa)	94	63	0	0	0
6.	Korban Tindak Kekerasan (jiwa)	161	0	0	0	0
7.	Anak yang berhadapan dengan Hukum	11	58	0	0	0
8.	Anak Dengan Kedisabilitasan (ADK)	137	0	0	0	0
9.	Penyandang Disabilitas	568	907	450	715	807
10.	Penyandang Disabilitas Berat	163	0	0	0	0
11.	Lanjut Usia Terlantar (jiwa)	1.626	285	280	460	302
12.	Korban Tindak Kekerasan	345	80	0	0	0
13.	Tuna Susila (jiwa)	16	16	0	0	0
14.	Gelandangan (jiwa)	24	0	50	30	30
15.	Keluarga Bermasalah Sosial	109	0	0	0	0

No	PMKS	2018	2019	2020	2021	2022
16.	Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan (BWBLK)	343	290	0	0	0
17.	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (jiwa)	212	60	0	0	0
18.	Korban Penyalahgunaan Napza (jiwa)	246	224	0	0	0
19.	Orang dengan HIV/AIDS (jiwa)	3	0	0	0	0
20.	Kelompok Minoritas	39	0	0	0	0
21.	Korban Trafficking	0	0	0	0	0
22.	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (jiwa)	1.007	0	0	0	0
23.	Keluarga Fakir Miskin (KK)	20.015	9.618	19.700	29.460	34520
24.	Keluarga Berumah Tidak Layak Huni (KK)	1.111	0	0	0	0
25.	Korban Bencana Alam (KK)	996	221	343	5.963	386
26.	Korban Bencana Sosial atau Pengungsi (KK)	179	136	116	130	187
Total		29.007	12.768	21.470	37.031	36.481

Sumber : Dinas Sosial Kota Bima, 2023

Dari jumlah PMKS sebagaimana ditunjukkan dalam tabel tersebut di atas, penanganan PMKS di Kota Bima selama kurun waktu tahun 2017 - 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dimana pada tahun 2017 hanya 16,10 persen PMKS yang ditangani dan pada tahun 2021 telah meningkat menjadi 84,59 persen.

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

a. Ketenagakerjaan

Sampai dengan tahun 2022, Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Bima mencapai 3,72 persen atau 3.650 orang, mengalami peningkatan sebesar 0.16 persen dibandingkan pada tahun 2021 sebesar 3.56 persen atau setara dengan 3.687 orang.

Tabel 2.46. Angka Pengangguran di Kota Bima Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	JUMLAH PENDUDUK $\geq$ 15 THN (JIWA)	122.780	122.780	133.836	137.149	140.440
2	ANGKATAN KERJA (JIWA)	87,544	87.544	99.361	103.498	98.020
	Bekerja	85.455	85.455	94.970	99.811	94.370

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	JUMLAH PENDUDUK $\geq$ 15 THN (JIWA)	122.780	122.780	133.836	137.149	140.440
	Pengangguran/TPT	2.089	2.089	4.391	3.687	3.650

Sumber: Kota Bima Dalam Angka, BPS Kota Bima 2022 dan Dinas Tenaga Kerja, 2023

Adapun penanganan keselamatan dan perlindungan tenaga kerja yang telah dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja mencapai 73,24%, serta kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan dengan perjanjian bersama sebanyak 13 kasus.

Strategi yang dilakukan dalam penyelenggaraan bidang ketenagakerjaan diantaranya mendukung Pembentukan Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) dalam rangka mendekatkan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI di LTSP, kegiatan Informasi Pasar Kerja (job fair), peningkatan kompetensi kepada calon tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan, dan menjaga kondusifitas hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja dengan meningkatkan peran Pengawas ketenagakerjaan dalam mengawasi/penegakan penerapan Undang-Undang Ketenagakerjaan di perusahaan.

b. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Untuk melihat pemberdayaan perempuan, kita dapat melihat dua indikator makro yang dapat mengukur sejauh mana upaya pengarusutamaan gender dilakukan di Kota Bima yaitu indikator Partisipasi perempuan dalam pembangunan serta tingkat penanganan pengaduan kekerasan terhadap perempuan. Partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintah maupun lembaga swasta menunjukkan peningkatan selama kurun waktu 2017-2021. Pada tahun 2017 partisipasi perempuan di lembaga Pemerintah mencapai 37,31 persen, lembaga swasta 57,94 persen dan Legislatif sebesar 12 persen, pada tahun 2021 meningkat menjadi 53,66 persen pada lembaga pemerintahan, 47,94 persen pada lembaga swasta dan yang berpartisipasi di lembaga legislatif sebanyak 16 persen.

Tabel 2.47. Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan di Kota Bima Tahun 2018-2022

No	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2018	2019	2020	2021	2022
11.1	Partisipasi perempuan di Lembaga pemerintah (%)	69,99	37,31	53,66	53,66	55,95

No	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2018	2019	2020	2021	2022
11.2	Partisipasi perempuan di Lembaga Swasta (%)	20,86	57,90	57,90	19,79	26,14
11.3	Partisipasi perempuan di lembaga legislatif (%)	16,00	16,00	16,00	16,00	16,01
11.4	Pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan (%)	0,16	0,72	0,72	0,02	0
11.5	Terwujudnya Kota Bima Kota Layak Anak	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Dinas PPPA Kota Bima, 2023

c. Ketahanan Pangan

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, menjelaskan ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

Keberhasilan penyelenggaraan urusan wajib bukan pelayanan dasar bidang pangan diukur melalui indikator Pola Pangan Harapan (PPH). PPH adalah susunan beragam pangan atau kelompok pangan yang didasarkan atas sumbangan energi terhadap total energi dari kelompok pangan utama (baik secara absolut maupun relatif) dari suatu pola ketersediaan dan atau konsumsi pangan yang mampu mencukupi kebutuhan konsumsi pangan penduduk secara kualitas, kuantitas maupun keragamannya, dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa. PPH menggambarkan kualitas konsumsi pangan masyarakat untuk hidup sehat dan dikatakan ideal bila mendekati skor 100 berdasarkan kesepakatan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi tahun 1998 yang menggunakan bobot (rating) FAO RAPA (1989) yang terus disempurnakan menjadi Pola Pangan Harapan (PPH) tahun 2020.

Tabel 2.48. Perkembangan Pola Pangan Harapan Kota Bima Tahun 2018-2022

No	Ketahanan Pangan	2018	2019	2020	2021	2022
1.	- Skor pola pangan harapan (PPH)	95,30	94	85,7	86,0	81,8

2.	- Penanganan daerah rawan pangan	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima, 2023

Subsistem ketahanan pangan yang sangat menentukan ketersediaan pangan adalah subsistem ketersediaan pangan. Hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) X Tahun 2012 mensyaratkan penyediaan pangan setara energi minimal yang harus disediakan sebesar 2.200 kal/kapita/hari dan protein sebesar 57 gr/kapita/hari, sebagai penilaian jumlah zat gizi yang diperlukan setiap individu untuk hidup sehat dan beraktifitas. Ketersediaan energi dan protein di Kota Bima tahun 2015-2019 cukup berfluktuatif, namun selalu melampaui ketersediaan minimal yang dipersyaratkan.

Selain menjamin ketersediaan pangan melalui peningkatan produksi, penyediaan pangan melalui pengembangan cadangan pangan juga dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan pangan dalam mengisi kesenjangan antara produksi dan kebutuhan terutama pada saat terjadi bencana, paceklik serta menjaga stabilitas harga. Cadangan pangan merupakan salah satu indikator yang menunjukkan kuatnya ketahanan pangan suatu wilayah atau daerah.

d. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dalam melaksanakan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Administrasi Kependudukan dan Capil, tergambar bahwa Rasio penduduk yang telah memiliki e-KTP terus mengalami peningkatan dimana pada tahun 2020 adalah sebesar 99,18 % naik menjadi 100 % pada tahun 2021.

Rasio penduduk ber-KTP adalah perbandingan jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas yang ber-KTP terhadap jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas atau telah menikah.

Tabel 2.49. Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan KTP dan Akte Lahir Tahun 2018 - 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Penduduk keseluruhan	146.959	149.498	152.516	155.519	156.067
Jumlah Penduduk Wajib KTP	102.173	104.547	107.565	110.362	109.573
Jumlah Penduduk Pemegang e-KTP	98.987	103.651	106.669	103.789	108.510

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Penduduk Pemegang KTP Manual (non e-KTP)	-	-	-	-	-
Total Penduduk ber-KTP	98.987	103.651	106.669	103.789	109.573
Kepemilikan KTP (%)	67,36	99,14	99,18	100 %	100%
Jumlah Penduduk ber-akte lahir	69.663	70.015	73.033	81.739	145.200
Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 penduduk)	473,84	468,33	486,33	525,59	N/A

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, 2022 (diolah)

e. Lingkungan Hidup

Pelayanan pengelolaan sampah di Kota Bima selama kurun waktu tahun 2017 - 2022 terus mengalami peningkatan. Kondisi kinerja pada tahun 2017 dalam pelayanan persampahan sebesar 20,50%, selanjutnya meningkat pada tahun 2021 menjadi sebesar 54,10%. Pelayanan persampahan ini di Kota Bima masih difokuskan pada kawasan perkotaan yang meliputi kecamatan Rasanae Barat, Kecamatan Mpunda dan Kecamatan Raba serta sebagian Kecamatan Asakota. Sedangkan Kecamatan Rasanae Timur baru sebagian Kelurahan yang sudah terlayani dengan baik penanganan Volume Sampah persampahannya.

Tabel 2.50. Jumlah dan Produksi Sampah di Kota Bima Tahun 2018- 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah volume produksi sampah (M3)	416,00	456,13	475,83	461,81	517,23

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima, 2023

Tabel 2.51. Penanganan Sampah Menurut Kecamatan di Kota Bima Tahun 2018 - 2022

No	Kecamatan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kecamatan Rasanae Barat	95,05	104,69	108,72	87,57	98,08
2	Kecamatan Mpunda	97,69	105,51	111,72	98,22	110,01
3	Kecamatan Raba	43,41	113,17	117,59	111,84	60,27
4	Kecamatan Rasanae Timur	102,74	47,82	49,82	53,81	125,26
5	Kecamatan	77,11	84,94	87,98	110,37	123,61

No	Kecamatan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	Asakota					
Jumlah		416,00	456,13	475,83	461,81	517,23

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima, 2023

Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk adalah jumlah daya tampung tempat pembuangan sampah per 1.000 jumlah penduduk. Daya tampung TPS dihitung dengan satuan Ton. Dengan menggunakan konversi maka 1 ton setara dengan 3 M3.

Angka Pencemaran dan Perusakan Lingkungan juga dapat dikendalikan seiring dengan makin meningkatnya peran lembaga masyarakat yang peduli terhadap pelstarian sumber daya alam, dimana pada tahun 2021 telah terbentuk 5 POKMAS Peduli lingkungan.

Dari aspek ketersediaan Ruang Hijau Publik minimal 20% juga sudah memenuhi ketentuan minimum tersebut dimana pada tahun 2017 luas RTH Publik baru mencapai 16,90% dan pada tahun 2021 telah mencapai 23,75%.

f. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Laju Pertumbuhan penduduk alamiah dipengaruhi oleh dua komponen utama yaitu tingkat kelahiran (fertilitas) dan tingkat kematian (mortalitas). Fertilitas dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti jumlah penduduk perempuan, jumlah penduduk usia produktif, status perkawinan, dan usia pada perkawinan pertama.

Pelaksanaan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diukur oleh 3 (tiga) indikator kinerja kunci yang harus dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima. Yang pertama adalah cakupan peserta KB aktif, yang kedua Jumlah peserta KB aktif, dan ketiga, persentase keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera.

**Tabel 2.52. Capaian Kinerja Pelaksanaan Urusan Keluarga Berencana
Tahun 2022**

NO	URAIAN	Tahun 2022		
		TARGET	REALISASI	%
1	Angka Kelahiran Total (TFR) Per WUS (15 - 49 Tahun)	2.5	2.28	91.2

NO	URAIAN	Tahun 2022		
		TARGET	REALISASI	%
2	Meningkatnya Angka prevalensi pemakaian kontrasepsi/CPR suatu metode pada kurun waktu tertentu	3,396	2.530	75,5
3	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	251	125	49.80
4	Porsentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet need)	2.999	22.147	72
5	Persentase Peserta KB aktif MKJP	5.188	8.429	163,6 7

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2023

g. Perhubungan

Meningkatnya jumlah penduduk kota akan disertai dengan penambahan jumlah sarana angkutan darat baik angkutan publik yaitu kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat, serta angkutan umum, dan menuntut ketersediaan prasarana perhubungan jalan yang memadai untuk pengangkutan barang dan jasa baik dalam kota maupun ke luar kota. Tantangan yang dihadapi dalam sarana dan prasarana perhubungan darat adalah bagaimana memfasilitasi kebutuhan angkutan publik melalui penyebaran jalur-jalur angkutan dan peningkatan serta pembangunan prasarana jalan.

Kendaraan bermotor di Kota Bima mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu. Jumlah kendaraan bermotor di Kota Bima pada tahun 2021 adalah 63.293 dengan jenis kendaraan tertinggi adalah sepeda motor mencapai 54 ribu sepeda motor. Jumlah angkutan umum AKAP dan AKDP di Kota Bima pada tahun 2021 sejumlah 208 kendaraan. Jumlah ini tidak mengalami perubahan dari tahun lalu. Begitu juga dengan kendaraan umum untuk trayek dalam kota dan juga trayek angkutan pedesaan.

Tabel 2.53. Jumlah kendaraan bermotor menurut jenis kendaraan di Kota Bima Tahun 2020-2022

No	Kendaraan Umum	2020	2021	2022
1	Alat Berat	11	25	25
2	Sedan	199	205	211
3	Jeep	367	379	405

No	Kendaraan Umum	2020	2021	2022
4	Bus	360	360	360
5	Mikrobus	76	76	77
6	Minibus	3.245	3.527	3.648
7	Truk	896	936	980
8	Mobil box	51	51	51
9	Pick up	1.738	1.902	2.049
10	Sepeda motor	53.226	55.989	58.391
11	Kendaraan tak bermotor	400	400	400
	Jumlah	60.569	63.850	66.597

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bima, 2023

Sedangkan berdasarkan trayek, Angkutan umum di Kota Bima didominasi oleh trayek Antar Kota Antar Provinsi dan Antar Kota Dalam Provinsi terutama Bus Malam jurusan Bima- Mataram PP. Hal ini ditunjang oleh keberadaan terminal AKAP Dara, serta terminal type C Kumbe dan Jatibaru.

Tabel 2.54. Jumlah Kendaraan Angkutan Umum Trayek di Kota Bima Tahun 2020-2022

No	Kendaraan	2020	2021	2022
1	Bus	360	360	360
2	Mobil penumpang	135	137	140
3	Mobil barang	1.055	1.063	1.072
4	Kendaraan tak bermotor	400	400	400

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bima, 2022

Adapun pelayanan pada urusan perhubungan terkait dengan penyediaan fasilitas dan prasarana perhubungan menunjukkan peningkatan dari tahun 2018 ke tahun 2021 sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.55. Ketersediaan Prasarana Perhubungan di Kota Bima Tahun 2018-2022

No	Prasarana LLAJ	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase ketersediaan fasilitas dan prasarana LLAJ (%)	64,00	64,00	64,00	70,00	70,00
2.	Persentase konektivitas pusat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Prasarana LLAJ	2018	2019	2020	2021	2022
	kegiatan dan pusat produksi (%)					
3.	Persentase angkutan umum yang lulus uji KIR (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bima, 2023

h. Urusan Komunikasi dan Informatika

Penerapan teknologi informasi melalui media online dalam hal ini website telah menjadi kebutuhan yang wajib dan sebagai salah satu pelayanan yang disediakan oleh pemerintah bagi masyarakat luas. Ketersediaan website milik Pemerintah Kota Bima telah tersedia selama ini. Salah satunya melalui <http://bimakota.go.id/> .

Transparansi penyelenggaraan pemerintahan Kota Bima menjadi tuntutan yang tidak dapat ditawar lagi. Terbukanya akses informasi pelayanan kepada masyarakat baik mengenai data perencanaan, keuangan, pengadaan barang dan jasa, capaian kinerja, statistik, regulasi, LHKPN dan data aset. Selain itu, informasi mengenai pelayanan publik meliputi maklumat pelayanan, daftar informasi pelayanan (DIP), jenis pelayanan, standar pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan laporan permohonan dan keberatan terpublikasikan dalam website Kota Bima. Adanya kemudahan akses yang diimbangi dengan integritas jajaran Pemerintah Kota diharapkan akan menghasilkan percepatan pembangunan Kota Bima dan meningkatkan kepercayaan publik kepada birokrasi.

i. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Jumlah UMKM, pada awal tahun 2018 tercatat sebanyak 7.905 UMKM dan pada tahun 2022 telah tumbuh mencapai 34.923 UMKM. Sebaliknya, jumlah Koperasi Aktif menurun, dimana pada tahun 2017 tercatat sebanyak 181 koperasi aktif namun pada tahun 2022 tercatat 102 koperasi aktif.

Selain itu, Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM juga telah didirikan dan mulai beroperasi sejak tahun 2014 dengan tujuan untuk memberikan pelayanan konsultan pelatihan bisnis, pendampingan bisnis, fasilitasi akses pembiayaan, fasilitasi pemasaran dan promosi, networking dan layanan perpustakaan usaha, yang dibantu oleh 7 orang konsultan pendamping untuk mendampingi KUMKM.

Tabel 2.56. Pertumbuhan UMKM di Kota Bima Tahun 2018 – 2022

No	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah UMKM	7905	8654	8754	34.432	34.923
2.	Jumlah Koperasi Aktif	187	197	197	103	102

Sumber: Dinas Koperindag Kota Bima, 2023

j. Penanaman Modal

Kegiatan investasi merupakan suatu tahapan awal proses pembangunan yang strategis namun krusial. Strategis karena harus mengelola sumberdaya pembangunan untuk membangun asset-aset produksi agar menghasilkan barang dan jasa untuk keperluan domestic maupun ekspor. Krusial karena memerlukan daya visioner yang jauh kedepan untuk memprediksi permintaan pasar, sehingga apabila tidak tepat sasaran akan terjadi pemborosan sumberdaya nasional. Sehubungan dengan itu diperlukan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas peran dan kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat lainnya dalam mengelola kegiatan investasi untuk membangun Kota Bima.

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator utama meski bukan satu-satunya cara untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat disuatu wilayah. Oleh karena itu, sudah menjadi jamak jika kebijakan ekonomi pemerintah diarahkan untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan untuk menjaga kecenderungan pertumbuhan ekonomi yang positif serta meningkat dari tahun ketahun.

Guna mendorong pertumbuhan semakin cepat, dan kesempatan berusaha yang semakin luas, diperlukan berbagai kemudahan usaha yang semakin baik, kemudahan untuk menjangkau permodalan dan pasar yang semakin luas bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Kebijakan penanaman modal daerah harus diarahkan untuk menciptakan perekonomian daerah yang memiliki daya saing yang tinggi dan berkelanjutan. Penanaman modal yang kondusif dengan terus mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang bisa mengubah keunggulan komperatif menjadi keunggulan kompetitif. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan arah perencanaan penanaman modal yang jelas dalam jangka panjang yang termuat dalam sebuah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal. Untuk mendukung pelaksanaan RUPMP guna mendorong peningkatan penanaman modal

yang berkelanjutan diperlukan kelembagaan yang kuat baik di Kota. Oleh karena itu, visi yang sama dari seluruh pemangku kepentingan di bidang penanaman modal merupakan suatu keharusan, khususnya terkait dengan pembagian kewenangan, dan koordinasi masing masing pihak.

Nilai investasi PMDN di Kota Bima dari tahun 2019 terus mengalami peningkatan. Namun demikian reformasi di bidang pelayanan perijinan juga sudah dimulai juga dengan melaksanakan survey kepuasan konsumen untuk memperoleh nilai indeks kepuasan konsumen terhadap pelayanan perijinan dan pelayanan penanaman modal di Kota Bima.

Tabel 2.57. Nilai Investasi PMDN di Kota Bima Tahun 2019- 2022

No	Nilai Investasi PMDN	2019	2020	2021	2022
1	I. Jumlah Realisasi Nilai Investasi PMDN - SIUP Mikro Rp. 9.629.000.000 - SIUP Kecil Rp. 83.626.000.000 - SIUP Menengah Rp.46.600.000.000	Rp. 196.883.397.742	Rp. 604.275.484.278	Rp. 604.275.484.278	Rp. 705.275.484.000
	- SIUP Besar Rp. 95.500.000.000 - Izin Prinsip Rp. 558.300.000.000				
	I. Jumlah Investor PMDN - SIUP Mikro 332 Investor - SIUP Kecil 438 Investor - SIUP Menengah 38 Investor	692 Investor	926 Investor	926 Investor	926 Investor
	- SIUP Besar 4 Investor - Izin Prinsip 1 Investor				
2	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan - Persyaratan Nilai 71,83 - Prosedur Nilai 74,83 - Waktu pelayanan Nilai 74,67	76,86 (Kategori Baik)	80,90 (Kategori Baik)	80,90 (Kategori Baik)	80,90 (Kategori Baik)
	- Biaya/ Tarif Nilai 88,00 - Produk spesifikasi jenis pelayanan Nilai 89,00 - Kompetensi pelaksana				

No	Nilai Investasi PMDN	2019	2020	2021	2022
	Nilai 81,00 - Perilaku pelaksana Nilai 81,83 - Maklumat pelayanan Nilai 85,83 - Penanganan Pengaduan, saran dan masukan Nilai 84,33				

Sumber: DPMPTSP Kota Bima, 2023

k. Kepemudaan dan Olah Raga

Penyelenggaraan pelayanan bidang Kepemudaan dan Olahraga di Kota Bima tahun 2018-2022 untuk peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana olahraga, dan peningkatan capaian prestasi pemuda dan olah raga.

Tabel 2.58. Prestasi dan Prasarana Olah Raga Kota Bima Tahun 2018-2022

No	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	2018	2019	2020	2021	2022
1	Capaian Prestasi Pemuda dan Olahraga	10	7	4	10	2
2	Jumlah Klub Olahraga	27	27	205	2018	243
3	Jumlah Gedung Olahraga	3	3	1	1	1

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Bima, 2023

Capaian prestasi pemuda dan olahraga Kota Bima tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya bahkan sama sekali tidak ada prestasi olahraga. Hal ini disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia mulai akhir tahun 2019.

l. Kebudayaan

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2018-2022 oleh Pemerintah Kota Bima dalam rangka memperkenalkan nilai-nilai budaya daerah, membentuk karakter masyarakat serta nilai budaya lokal yang pada akhirnya bermuara pada pelestarian nilai budaya dan pembentukan pranata adat di masyarakat. Pranata adat adalah nilai luhur nenek moyang yang telah ada, terpatrit dan menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Bima sehingga

menjadi sebuah karakter budaya. Perkembangan pembentukan pranata adat di Kota Bima tahun 2018-2021 sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.59. Perkembangan Pranata Adat Yang Terbentuk di Kota Bima Tahun 2018 – 2022

No	Pranata Adat	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah lembaga Pranata Adat	8	8	8	8	8
	Jumlah	8	8	8	8	8

Sumber: Dinas Pariwisata, 2023

m. Perpustakaan

Perpustakaan sebagai tempat untuk mengakses informasi saat ini terus berbenah untuk dapat memberikan pelayanan dengan baik, melalui pelaksanaan tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan pengumpulan, penyimpanan, serta pelestarian terbitan Indonesia sebagai khazanah kebudayaan serta menjamin pemeliharaan terbitan Indonesia.

Tabel 2.60. Perkembangan Pengunjung Perpustakaan di Kota Bima Tahun 2018 – 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah pengunjung perpustakaan	15.000	19.057	6.653	6.675	13.694

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bima, 2023

n. Kearsipan

Kearsipan merupakan suatu proses yang diawali dari penciptaan, penerimaan, pengumpulan, pengaturan, pengendalian, pemeliharaan dan perawatan serta penyimpanan menurut sistem tertentu. Kearsipan memegang peranan penting bagi kelancaran jalannya organisasi, yaitu sebagai sumber informasi dan sebagai pusat ingatan bagi organisasi.

o. Persandian

Capaian kinerja urusan persandian diukur dengan indikator persentase penurunan kasus informasi kebocoran daerah, dengan capaian pada tahun 2022 sebesar 70%. Angka ini meningkat dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu

60%. Variabel indikator ini adalah jumlah kasus yang ditangani. Pada kasus filterisasi telah berhasil ditangani sebanyak 945 dari 1890 kasus/serangan.

p. Statistik

Penyelenggaraan urusan Statistik dilaksanakan melalui program penyelenggaraan statisti Sektoral pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dengan indikator kinerja Persentase Satu Data Kota Bima. Pada tahun 2022 diperoleh capaian sebesar 80% Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 72%, maka terjadi peningkatan Persentase Satu Data Kota Bima.

2.1.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan

1. Perikanan dan Kelautan

Luas wilayah daratan pesisir Kota Bima yang diukur dari luas wilayah administratif (desa/kelurahan pesisir) sekitar 50,78 km² dan luas wilayah laut yang menjadi wilayah pengelolaannya sekitar 11,48 km² dengan panjang garis pantai sekitar 26 km. Ditinjau dari luas wilayahnya, baik wilayah pesisir dan laut maupun wilayah daratan yang hanya sekitar 222,25 km², Kota Bima memiliki luas wilayah yang lebih sempit dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi NTB. Meskipun demikian pada kawasan pesisir dan laut yang menjadi kewenangan Kota Bima memiliki nilai-nilai strategis dan keunggulan dari aspek sarana dan prasarana maupun keanekaragaman hayati dan non hayati. Hal ini juga didukung oleh kebijaksanaan Provinsi NTB yang menetapkan Kawasan Teluk Bima sebagai Kawasan Strategis Pariwisata dan Perikanan Provinsi NTB.

Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya perikanan ini perlu diupayakan untuk meningkatkan produksi dan produktifitas perikanan dan kelautan sehingga mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir. Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai sasaran yang ditetapkan adalah optimalisasi pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan yang didukung program pengadaan sarana dan prasarana perikanan dan kelautan, revitalisasi kelompok tani nelayan, peningkatan pengetahuan kelompok tani dan nelayan serta kebijakan layanan pembinaan petani nelayan.

**Tabel. 2.61. Perkembangan Pelayanan Urusan Perikanan dan Kelautan
Kota Bima Tahun 2018-2022**

No	Perikanan dan Kelautan	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Cakupan bina kelompok kelautan dan perikanan	26 klp	15 klp	15 klp	17 klp	20 klp
2.	Jumlah Produksi Perikanan	2.847,73 ton	2.870,02 ton	2.587,57 ton	3.056,69 ton	793.156,1 Ton
3.	Jumlah Produk olahan yang dihasilkan	857,57 ton	6.324,632 ton	55,75 ton	6,765 ton	5.935,180 Ton
4.	Tingkat konsumsi ikan perkapita pertahun	42,33 kg/kapita/tahun	38,46 kg/kapita/tahun	38,46 kg/kapita/tahun	42,64 Kg/Kapita/Tahun	48,79 Kg/Kapita/Tahun

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima, 2023

Cakupan Bina Kelompok Kelautan dan perikanan, pada tahun 2018 tercatat 26 kelompok dan pada tahun 2021 menurun jadi 17 kelompok, dan pada tahun 2022 kembali mengalami peningkatan menjadi 22 kelompok. Cakupan bina kelompok kelautan dan perikanan meliputi peningkatan kelas kelompok yaitu kelompok pemula, kelompok madya dan kelompok utama.

Jumlah produksi perikanan, pada tahun 2018 tercatat 2.847,73 ton dan terus mengalami peningkatan sampai tahun 2021 yaitu 3.056,69 ton. Pada tahun 2020 terjadi sedikit penurunan karena adanya pandemi Covid-19. Pada tahun 2022 mengalami peningkatan secara signifikan sebesar 793.156,1 ton. Beberapa faktor yang menyebabkan produksi budidaya meningkat antara lain bertambahnya sarana dan prasarana budidaya. Produksi Perikanan Budidaya di Kota Bima cenderung stabil atau menunjukkan tren yang positif di mana pada setiap tahunnya mengalami pertumbuhan dan mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini tidak terlepas dari adanya dukungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima terkait dengan bantuan bibit ikan unggul bagi kelompok budidaya baik tawar, laut maupun payau, bantuan sarana dan prasarana budidaya serta semakin tingginya kesadaran dari kelompok pembudidaya ikan untuk terus mengembangkan usahanya.

Jumlah produk olahan yang dihasilkan semakin meningkat sampai tahun 2019 sebesar 6.324,632 ton namun pada tahun 2020 terjadi penurunan yang signifikan diangka 55,75 ton terkait mewabahnya COVID-19, namun kembali naik menjadi 6,765 ton pada tahun 2021, dan kembali mengalami penurunan sebesar 829,82 ton atau sebesar 13,99 persen. Pengembangan produk hasil perikanan yang

bernilai tambah merupakan suatu hal yang harus terus dilakukan, hal ini disebabkan karena adanya beberapa pergeseran yang terjadi di masyarakat antara lain adanya perubahan gaya hidup, perubahan pola konsumsi, banyaknya wanita/ibu rumah tangga yang bekerja, konsumen yang lebih menyukai produk yang lebih praktis, daya simpan produk olahan lebih lama dan memiliki nilai jual yang lebih tinggi.

2. Pariwisata

Sektor pariwisata Kota Bima memiliki potensi yang besar sebagai daerah transit wisata dengan banyaknya destinasi dan keragaman potensi wisata kelas dunia yang ada di Kabupaten Bima maupun di Kabupaten Dompu seperti Pantai Lariti, Pantai Pink, Pulau Ular, Gunung Sangiang Api, Pantai Lakey, Gunung Tambora maupun kekayaan tradisi, seni budaya, sejarah, dan industri kerajinan rakyat yang unik dan potensial.

Pembangunan pariwisata memiliki kontribusi signifikan dalam pembangunan ekonomi daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah. Keberhasilan kinerja pembangunan pariwisata ini ditunjukkan dengan Peningkatan Kunjungan Wisatawan baik mancanegara dan nusantara seperti yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.62. Angka Kunjungan Wisatawan Tahun 2019-2022

Indikator	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Kunjungan Wisatawan	37.617	214.436	100.985	112.364
- Mancanegara	1.152	267	186	194
- Nusantara	36.565	214.169	100.799	112.170

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Bima, 2023

3. Pertanian

Jumlah produksi pertanian tanaman pangan pada tahun 2018 adalah 62.726 terus meningkat sampai tahun 2019 sebesar 83.328 ton dan mengalami penurunan menjadi 68.486 ton pada tahun 2021, dan pada tahun 2022 kembali mengalami peningkatan sebesar 14,55 persen atau menjadi 80.152 ton.

**Tabel 2.63. Perkembangan Produksi Pertanian di Kota Bima
Tahun 2018-2022**

No	Pertanian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Produksi Pertanian Tanaman Pangan (ton)	62.726	83.328	76.693	68.486	80.152
	- Padi (GKG)	31,269	29.251	28.427	25.301	20.403
	- Jagung	30.307	53.573	48.070	43.044	59.617
	- Kedelai	1.150	53.573	196	141	132
	-Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	100.00%	100.00%	100%	100%	100%
2.	Produksi perkebunan (ton)					
	1) Tembakau	1) 1,40	1) 6,00	1)10,00	1)2,13	1)2,05
	2) Jambu mente	2) 150,40	2) 144,62	2)147,17	2)147,17	2)114,87
	3) Kelapa	3) 26,08	3) 21,75	3)162,65	3)19,52	3)14,38
3.	Pengkartuan Ternak (ekor)	16,479	18,057	18,057	11.302	9.495
4.	Vaksinasi Ternak	17,303	18,959	18,959	12.319	9.493
5.	Penurunan Angka Kematian Pedet	20%	20%	20%	20%	20%
6.	Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular	82%	87%	87%	83%	81%

Sumber: Dinas Pertanian Kota Bima, 2023

4. Perdagangan dan industri

Penyediaan pasar tradisional berfungsi sebagai pusat distribusi perdagangan. Pada tahun 2022, jumlah pedagang pasar di Kota Bima tercatat sebanyak 1.352 orang sementara jumlah toko ada 629 unit. Jumlah toko mengalami penurunan karena terdampak pandemi Covid-19. Sebagian besar pedagang pasar berjualan di Pasar Raya Amahami, yaitu sebanyak 1.073 orang dan masih ada 118 orang yang berjualan di Pasar Lama Bima. Sementara itu, di Pasar Jati Baru tercatat jumlah pedagang hanya 8 orang.

Tabel 2.64. Jumlah Sarana Perdagangan di Kota Bima Tahun 2018-2022

Jenis Sarana Perdagangan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Pasar	8	8	8	8	8
Toko	634	715	555	465	629

Kios	2656	2678	2678	2678	2778
Jumlah	3.298	3.401	3.241	3.151	3.415

Sumber: BPS Kota Bima & Dinas Koperindag Kota Bima, 2023

Tabel 2.65. Jumlah Perusahaan, Tenaga Kerja, dan Nilai Produksi Menurut Klasifikasi Industri di Kota Bima Tahun 2021

Klasifikasi Industri	Jumlah Perusahaan	Jumlah Tenaga Kerja	Nilai Produksi (Rp)
Industri makanan dan minuman	3	89	16.211.640.000
Industri pengolahan tembakau	-	-	-
Industri pakaian jadi dan tenun	7	357	3.712.865.000
Industri pengolahan kayu dan rotan	-	-	-
Industri moulding kayu, kerajinan anyaman bambu dan rotan, dan ukiran kayu	-	-	-
Industri barang-barang dari tanah	-	-	-
Industri kapur, semen, dan barang-barang dari kapur dan semen	1	21	2.773.680.000
Industri pengolahan batu apung	-	-	-
Industri pengolahan lainnya	1	22	469.200.000

Sumber: BPS Kota Bima, 2022

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

1. Angka Konsumsi Per Rumah Tangga Per Kapita

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut.

Angka konsumsi per rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung

berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya.

Pada Desember 2021, berdasarkan hasil Susenas Maret 2021, pengeluaran masyarakat terbesar tercatat ada di kelompok Perumahan dan fasilitas rumah tangga dan kelompok Makanan dan minuman jadi. Selain itu, pada tahun 2021 penduduk Kota Bima secara rata-rata mengalami peningkatan pengeluaran untuk barang bukan makanan, dari yang semula 678.713 di tahun 2020 menjadi 888.696 pada 2021. Kondisi ini menyebabkan secara total, rata-rata pengeluaran per kapita masyarakat naik menjadi 1.718.519 di tahun 2021 dari yang semula 1.366.747 di tahun 2020.

Oleh karena itu, data Susenas Maret 2021 mengungkapkan bahwa sebagian besar penduduk Kota Bima termasuk dalam kelompok pengeluaran > 1.500.000.

Tabel 2.66. Angka Konsumsi RT per Kapita di Kota Bima Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Total Pengeluaran RT (Rp)	1.084.821	1.399.041	1.366.747	1.718.519	1.434.157
2	Jumlah RT	42.331	43.498	44.623	44.623	39.050
3	Rasio (1/2)	25,63	32,16	30,62	38,51	36.72

Sumber : BPS Kota Bima, 2022

2. Konsumsi non pangan

Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita dibuat untuk mengetahui pola konsumsi rumah tangga di luar pangan. Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita dapat dicari dengan menghitung persentase konsumsi RT untuk non pangan, yaitu proporsi total pengeluaran rumah tangga untuk non pangan terhadap total pengeluaran.

Tabel 2.67. Persentase Konsumsi RT non-Pangan di Kota Bima Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Total Pengeluaran RT non pangan (Rp)	506.560	718.651	678.713	888.696	729.817

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
2	Total Pengeluaran (Rp)	1.084.821	1.399.041	1.366.747	1.718.519	1.434.157
3	Rasio (%)	46,70	51,37	49,66	51,71	50,89

Sumber : BPS Kota Bima, 2023

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

1. Aksesibilitas daerah

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan dapat memberi akses tiap kendaraan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah perbandingan panjang jalan terhadap jumlah kendaraan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kota Bima pada tahun 2017-2022 umumnya mengalami penurunan disebabkan oleh terus meningkatnya jumlah kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) setiap tahunnya.

Tabel 2.68. Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Kota Bima Tahun 2018-2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Panjang Jalan (Km)	312,27	312,265	311,425	311,425	311,425
2.	Jumlah Kendaraan	53.415	59.239	60 569	63 850	66,597
3.	Rasio	1:171	1:198	1:190	1:205	1:213

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Bima, 2023

Jumlah orang yang melalui dermaga selama tahun 2020 sampai 2022 mengalami penurunan yang signifikan disebabkan oleh pandemi Covid-19. Tapi untuk muat bongkar barang mengalami peningkatan yang cukup baik dibanding tahun 2019.

Tabel 2.69. Jumlah Kunjungan Kapal di Pelabuhan Bima Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Call (Unit)					
	Tiba	2.039	2.507	1.801	1.925	1.947
	Berangkat	2.013	1.765	1.511	1.827	1.829
2	Volume Muatan Barang (m3)					
	Tiba	2.491.605	2.605.808	2.519.756	3.137.912	3.237.891
	Berangkat	2.473.558	1.737.989	2.014.644	3.054.797	3.091.787

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bima, 2023

2. Penataan Wilayah

Ketaatan terhadap RTRW merupakan kesesuaian implementasi tataruang hasil perencanaan tata ruang berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional dengan peruntukan yang direncanakan sesuai dengan RTRW. Luas wilayah produktif adalah persentase realisasi luas wilayah produktif terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan RTRW. Luas wilayah produktif adalah 10.909 dari luas seluruh wilayah budidaya sebesar 11.669 km².

3. Fasilitas Bank dan Non Bank

Fasilitas bank dan non bank diukur dengan jenis dan jumlah bank dan cabang-cabangnya, dan jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang-cabangnya. Jumlah bank di Kota Bima pada tahun 2022 adalah sebanyak 14 unit. Adapun secara rinci fasilitas bank dan non bank dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.70. Jenis dan Jumlah Bank di Kota Bima Tahun 2018-2022

No	Sektor	Jumlah				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Bank Umum	8	9	11	13	9
2.	Bank Syariah	4	4	5	5	2
3.	BPR	4	4	2	3	3
Jumlah		16	16	18	21	14

Sumber : Bagian Perekonomi dan Usaha Daerah Setda, 2023

4. Fasilitas Listrik

Penyediaan tenaga listrik bertujuan untuk meningkatkan perekonomian serta memajukan kesejahteraan masyarakat. Bila tenaga listrik telah dicapai pada suatu daerah atau wilayah maka kegiatan ekonomi dan kesejahteraan pada daerah tersebut dapat meningkat. Rumah tangga yang menggunakan listrik merupakan proporsi jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai daya penerangan.

Daya terpasang di Kota Bima pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 69.698.370KWh. Sedangkan pelanggan listrik mengalami peningkatan sebesar 2.136 pelanggan menjadi 51.116 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

**Tabel 2.71. Daya Listrik Terpasang dan Jumlah Kebutuhan Listrik Kota
Bima Tahun 2018-2022**

No	URAIAN	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Daya Listrik Terpasang	VA	54.655.520	59.010.870	64.093.020	69 698 37	N/A
2	Jumlah Kebutuhan Listrik	kWh	75.820.914	78.769.461	86.858.486,25	94.947.511,5	N/A

Sumber : PT. PLN (Persero) Wilayah NTB Area Bima, 2022

2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

1. Angka Kriminalitas

Indikator kriminalitas berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat. Semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat. Angka kriminalitas dihitung berdasarkan delik aduan dari penduduk korban kejahatan dalam periode 1 (satu) tahun.

Tabel 2.72. Angka Kriminalitas Kota Bima Tahun 2018-2022

No	Jenis Kriminal	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Laporan Tindak Kriminal Selama 1 Tahun	551	442	512	515	N/A
2.	Jumlah Penduduk	169.714	173.031	176.432	156.224	N/A
Angka Kriminalitas		0,32	0,26	0,29	0,32	N/A

Sumber : Kepolisian Resor Bima Kota, 2022 (diolah)

Angka kriminalitas pada tahun 2021 mengalami peningkatan dengan adanya kasus pembunuhan, perkelahian antarkampung dan insiden serangan menggunakan panah oleh remaja. Berdasarkan karakteristik tindak kriminalitas yang terjadi, faktor penyebabnya bukan dari motif ekonomi namun lebih kepada kurang optimalisasi pengawasan lingkungan. Hal ini menjadi perhatian untuk program kegiatan pada Perubahan RKPD Tahun 2022 maupun RKPD Tahun 2023.

2. Kemudahan perijinan

Investasi yang akan masuk ke suatu daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Daya saing investasi suatu daerah tidak terjadi dengan serta merta. Pembentukan daya saing investasi, berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya kemudahan perijinan.

Kemudahan perijinan adalah proses pengurusan perijinan yang terkait dengan persoalan investasi relatif sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Lama proses perijinan merupakan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh suatu perijinan (dalam hari).

Tabel 2.73. Lama Proses Perijinan Kota Bima Tahun 2022

NO	NAMA - NAMA IZIN / URAIAN	Lama Mengurus (Hari)	Jumlah Persyaratan (Dokumen)	Biaya Resmi (Rata-rata mks Rph)
1	2	3	4	5
	PENANAMAN MODAL			
1	Izin Pendaftaran Penanaman Modal	13	21	Rp. 0,-
2	Izin Perubahan Penanaman Modal	13	6	Rp. 0,-
3	Izin Perluasan Penanaman Modal	13	8	Rp. 0,-
4	Izin Penggabungan Penanaman Modal	13	7	Rp. 0,-
	KOPERINDAG			
5	Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas KSP	13	28	Rp. 0,-
6	Izin Usaha Simpan Pinjam	13	27	Rp. 0,-
7	Surat Izin Menempati Kios (SIMK)	4	8	Rp. 0,-
8	Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)	3	20	Rp. 0,-
9	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	3	11	Rp. 0,-
10	Nomor Induk Berusaha (NIB)	3	8	Rp. 0,-
11	Tanda Daftar Gudang (TDG)	3	11	Rp. 0,-
12	Izin Usaha Play Station/Video Game	13	18	Rp. 0,-
13	Izin Usaha Toko Modern (IUTM)	13	21	Rp. 0,-
14	Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUPPT)			Rp. 0,-
15	Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)	13	28	Rp. 0,-
16	Izin Usaha Air Isi Ulang	13	23	Rp. 0,-
17	Izin Usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)	13	27	Rp. 0,-
18	Izin Penyimpanan Bahan Bakar Minyak (IP BBM)	13	20	Rp. 0,-
19	Izin Agen, Pangkalan Gas Elpiji			Rp. 0,-
20	Izin Usaha Industri (IUI)	13	14	Rp. 0,-
21	Tanda Daftar Industri (TDI)	3	12	Rp. 0,-
	DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG			
22	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	14	7	(Rp. Biaya)
23	Izin Lokasi (investasi)	13	11	(Rp. Biaya)
	PERTANIAN DAN PETERNAKAN			
24	Tanda Daftar Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras	14	11	Rp. 0,-
25	Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras	14	11	Rp. 0,-

NO	NAMA - NAMA IZIN / URAIAN	Lama Mengurus (Hari)	Jumlah Persyaratan (Dokumen)	Biaya Resmi (Rata-rata mks Rph)
1	2	3	4	5
26	Izin Usaha Pemasukan dan Pengeluaran Ternak	14	20	Rp. 0,-
27	Izin Usaha Peternakan	13	20	Rp. 0,-
28	Izin Usaha Budidaya Burung Walet	13	19	Rp. 0,-
29	Izin Usaha Pemotongan Hewan	13	23	Rp. 0,-
30	izin Usaha toko Obat Hewan	13	25	Rp. 0,-
31	Izin Prakter Dokter Hewan	-	-	Rp. 0,-
32	Izin Pengolahan Hasil Pertanian Sertifikasi Benih	-	-	Rp. 0,-
33	Izin Pengolahan Hasil Perkebunan	-	-	Rp. 0,-
	DINAS PERHUBUNGAN			
34	Izin Usaha Angkutan Orang	14	18	Rp. 0,-
35	Izin Usaha Sewa Kendaraan/Rentcar	13	17	Rp. 0,-
36	Izin Parkir Tempat Khusus	-	-	Rp. 0,-
	DINAS KOMINFO			
37	Izin Usaha TV Kabel	13	14	Rp. 0,-
38	Izin Penyelenggaraan Reklame	13	20	Rp. 0,-
39	Izin Usaha Menara Telekomunikasi (TOWER)	13	19	Rp. 0,-
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
40	Izin Lingkungan Hidup	13	3	Rp. 0,-
41	Izin Penyimpanan Sementara Limbah Cair B3	13	13	Rp. 0,-
42	Izin PembuanganLimbah Cair B3	13	15	Rp. 0,-
43	Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT)	13	16	Rp. 0,-
	DINAS KESEHATAN			
44	Izin usaha Apotik	13	21	Rp. 0,-
45	Izin Usaha Penyelenggaraan Optikal	13	21	Rp. 0,-
46	Izin Usaha Toko Obat	13	21	Rp. 0,-
47	Izin usaha Laboratorium Swasta	13	22	Rp. 0,-
48	Izin Usaha Salon Kecantikan	13	23	Rp. 0,-
49	Izin Usaha Praktek Dokter Kecantikan, Dokter Umum, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi	13	21	Rp. 0,-
50	Izin Praktek Bidan	13	20	Rp. 0,-
51	Izin Praktek Perawat	13	16	Rp. 0,-
52	Izin Praktek Radiografer	13	19	Rp. 0,-
53	Izin Praktek Pengobatan Tradisional	13	21	Rp. 0,-
54	Izin Kerja Perawat Gigi	13	22	Rp. 0,-
55	Izin Usaha klinik Rawat Inap	13	26	Rp. 0,-
56	izin Usaha Penyaluran Kesehatan	13	36	Rp. 0,-
57	Izin usaha Dental Gigi	13	20	Rp. 0,-
58	Izin rumah Sakit Umum (Tipe C dan Tipe D)	13	20	Rp. 0,-

NO	NAMA - NAMA IZIN / URAIAN	Lama Mengurus (Hari)	Jumlah Persyaratan (Dokumen)	Biaya Resmi (Rata-rata mks Rph)
1	2	3	4	5
59	Izin PIRT Laike Higienis Sanitasi (LHS)	-	-	Rp. 0,-
60	Izin Praktek Fisioterapi	-	-	Rp. 0,-
	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			
61	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)	14	11	Rp. 0,-
62	Izin Usaha Budidaya Ikan	14	11	Rp. 0,-
63	Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan (SIPI)	14	12	(Rp. Biaya)
64	Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)	14	16	(Rp. Biaya)
65	Izin Usaha Budidaya Mutiara	14	13	Rp. 0,-
66	Izin Usaha Budidaya Rumput Laut	14	13	Rp. 0,-
67	Izin Usaha Budidaya Udang	14	15	Rp. 0,-
68	Izin Usaha Budidaya Bandeng	14	13	Rp. 0,-
69	Izin Usaha Budidaya Ikan Air Tawar	14	13	Rp. 0,-
70	Izin Usaha Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI	13	14	Rp. 0,-
	BAPPEDA LITBANG			
71	Izin Penelitian	3	6	Rp. 0,-
	DINAS DIKBUD			
72	Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)	13	26	Rp. 0,-
73	Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal (IPLPNF)	13	18	Rp. 0,-
74	Izin Pendirian Sekolah Swasta	13	19	Rp. 0,-
75	Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	13	21	Rp. 0,-
76	Izin Usaha Lapangan Futsal	13	13	Rp. 0,-
77	Izin Usaha Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi	13	25	Rp. 0,-
78	Izin Usaha Titipan barang/Kantor Cabang	13	24	Rp. 0,-
79	Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh masyarakat	-	-	Rp. 0,-
80	Izin Penyelenggaraan Pusat Kebugaran Jasmani	13	18	Rp. 0,-
	DINAS PARIWISATA			
81	Izin Usaha Daya Tarik Wisata	13	17	Rp. 0,-
82	izin Usaha jasa Perjalanan wisata	13	17	Rp. 0,-
83	Izin Usaha Restoran	13	19	Rp. 0,-
84	Izin Usaha Rumah Makan, warung Wisata	13	13	Rp. 0,-
85	Izin Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi	13	15	Rp. 0,-
86	Izin Usaha Penyediaan Akomodasi	13	14	Rp. 0,-
87	Izin Usaha Jasa konsultan Pariwisata	13	14	Rp. 0,-
88	Izin Usaha Jasa Pramuwisata	13	14	Rp. 0,-

NO	NAMA - NAMA IZIN / URAIAN	Lama Mengurus (Hari)	Jumlah Persyaratan (Dokumen)	Biaya Resmi (Rata-rata mks Rph)
1	2	3	4	5
89	izin Usaha Wisata Tirta	13	14	Rp. 0,-
90	Izin Usaha Santa Par Aqua (SPA)	13	15	Rp. 0,-
91	Surat Tanda Daftar Usaha Pariwisata (STUP)	13	14	Rp. 0,-
92	Izin Usaha Hotel	13	19	Rp. 0,-
93	Izin Usaha Pondok Wisata	13	19	Rp. 0,-
94	Izin Usaha Kawasan Pariwisata	13	19	Rp. 0,-
95	Izin Usaha Jasa Transportasi Wisata	13	15	Rp. 0,-
96	Izin Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran	13	12	Rp. 0,-
97	Izin Usaha Karaoke/Café	13	18	Rp. 0,-

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP, 2023

2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

1. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3)

Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3. Rasio lulusan S1/S2/S3 di Kota Bima pada 2015 tercatat sebesar 748 per 10.000 penduduk dan pada tahun 2019 tercatat sebesar 917 per 10.000 penduduk.

Tabel 2.74. Rasio Lulusan S1/S2/S3 di Kota Bima Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah lulusan S1	12372	13.110	6.897	8132	14.187
2.	Jumlah lulusan S2	559	607	433	665	674
3.	Jumlah lulusan S3	13	14	14	15	16
4.	Jumlah lulusan S1/S2/S3	12.944	13.731	7.344	8812	14.887
5.	Jumlah penduduk	169.714	173.031	155.140	156224	156.067
Rasio lulusan S1/S2/S3 per 10.000 penduduk		705	763	473	564	953

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2023

2. Tingkat ketergantungan

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia

diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi.

Rasio ketergantungan (dependency ratio) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sebaliknya persentase dependencyratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

2.1.5. Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Sebagian substansi Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar ditetapkan sebagai SPM.

Pada tahun 2021, Kota Bima menetapkan target untuk 36 SPM yang terdiri atas 3 SPM pada urusan pendidikan, 14 SPM pada urusan kesehatan dan gizi, 2 SPM pada urusan pekerjaan umum, 2 SPM pada urusan bidang perumahan rakyat, 5 SPM pada urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas), 5 SPM pada urusan sosial, dan 4 SPM pada urusan kebencanaan.

Capaian kinerja standar pelayanan minimal Kota Bima tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.75.

Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal per Urusan Tahun 2021

No	Urusan/ Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target dan Capaian Kinerja 2021	
			Target	Realisasi
I	PENDIDIKAN			

1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100%	99%
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan	100%	94%
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	95%
II	KESEHATAN			
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu\hamil yang mendapatkan layanan Kesehatan	95%	95%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan Kesehatan	90%	93%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan Kesehatan	90%	96%
4	Pelayanan kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan Kesehatan	85%	78%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan pendidikan dasar	85%	60%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	75%	70%
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	70%	51%
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	20%	13%
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita <i>diabetes mellitus</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	20%	12%
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	50%	12%
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	CDR	50%	23%
		CURRE RATE (KESEMBUHAN)	85%	78%
		SUCCESS RATE (KEBERHASILAN PENGobatan)	85%	78%

12	Pelayanan kesehatan orang dengan terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human <i>Immunodeficiency Virus</i>)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human <i>Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan layanan kesehatan	50%	30%
III	PEKERJAAN UMUM			
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	75,88%	56%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	74,67%	59%
IV	PERUMAHAN RAKYAT			
1	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	100%
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi peyediaan rumah yang layak huni	100%	64%
V	TRANTIBUMLINMAS			
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	100%	62%
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	88%
4	pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasikorban kebakaran	100%	77%

VI	SOSIAL			
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	22%
2	Rehabilitasi Sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang Memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	25%
3	Rehabilitasi sosial dasar Lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	22%
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	22%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%

Sumber: Data diolah

2.1.6. Kerjasama Daerah

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan pelayanan publik pada masyarakat, Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama, kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah tidak hanya sebatas kerjasama antar daerah tetapi juga dapat dilakukan dengan Pihak Ketiga, hal tersebut sesuai dengan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada pasal 363 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Daerah dengan:

- a. Daerah lain;
- b. Pihak Ketiga; dan/atau
- c. Lembaga atau Pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah menyatakan "bahwa pihak ketiga yang dapat menjadi mitra dalam Kerjasama Daerah dalam Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga (KSDPK) terdiri atas:

- a. Perseorangan;
- b. Badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum Maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan Ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Dalam ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah “bahwa Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga (KSDPK) meliputi:

- a. Kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik;
- b. Kerja sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi daerah;
- c. Kerja sama Investasi;
- d. Kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Kerjasama diinisiasi oleh Pemerintah Daerah, maka sesuai ketentuan Pasal 30 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga dinyatakan bahwa surat penawaran rencana Kerjasama Dengan Pihak Ketiga yang telah ditandatangani Kepala Daerah disampaikan kepada Pihak Ketiga calon mitra dilengkapi dengan kerangka acuan kerja”.

Pada pasal 30 Ayat (3) dinyatakan bahwa dalam hal terdapat beberapa calon mitra yang memenuhi syarat, Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) dapat melakukan pemilihan calon mitra dengan mempertimbangkan:

- a. Bonafiditas;
- b. Pengalaman di bidang yang akan dikerjasamakan; dan
- c. Komitmen untuk melaksanakan program/kegiatan KSDPK.

Dengan adanya payung hukum tentang Kerja sama Daerah dengan Pihak Ketiga tentu menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat serta Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selama tahun 2022, kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Bima yaitu:

1. Kerjasama dengan Bank NTB Syariah, Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Negara Indonesia (BNI) tentang Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum Pemerintah dalam bentuk deposito berjangka Tahun Anggaran 2022;
 2. Kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang NTB tentang Penyelenggaraan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Bagi Pegawai Non ASN Kota Bima;
 3. Kerjasama dengan Kementerian Pertanian tentang Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Berupa Tanah Milik Pemerintah Kota Bima Terletak di Belakang Kantor Dinas Pertanian Kota Bima;
 4. Kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Raba tentang Kerjasama Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara
 5. Kerjasama dengan OXFAM Great Britain tentang Rencana Kerja Tahunan (RKT) dengan agenda memprokmosikan ketangguhan terhadap bencana. Aksi yang dilaksanakan mencakup:
 - a. Meningkatkan kemampuan masyarakat rentan bencana untuk menyiapkan diri sebelum terjadi bencana, melakukan tindakan saat terjadi bencana dan melakukan aksi adaptasi,
 - b. Menyusun dan mempraktekkan sistem manajemen risiko bencana terutama di daerah rentan perkotaan dan pedesaan bagi perempuan dan penyandang disabilitas,
 - c. Meningkatkan ketahanan masyarakat rentan di perkotaan dan pedesaan terhadap perubahan iklim melalui aksi adaptasi di bidang mata pencaharian khususnya pertanian.
- Obyek sasaran dalam kesepakatan bersama ini adalah pengelolaan lingkungan yang berlokasi di Kelurahan Lelamase Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima.
6. Kerjasama dengan Yayasan Relief Islam Indonesia tentang pemberdayaan masyarakat dalam mengendalikan perubahan iklim.
 7. Kerjasama dengan Bank NTB Syariah Cabang Bima Tentang Pemanfaatan Layanan Melalui rekening untuk penyaluran bantuan sosial tunai kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di Kota Bima Tahun 2022.

2.1.7. Rencana Pembangunan Infrastruktur oleh APBN dan/atau APBD Provinsi

Pembangunan infrastruktur merupakan pembangunan kawasan-kawasan potensial dan strategis pada wilayah. Kawasan-kawasan tersebut bisa disebut kawasan perkotaan yang merupakan pusat kegiatan ekonomi wilayah, kawasan perdesaan, kawasan industry, kawasan pariwisata, dan kawasan ekonomi khusus.

Upaya terbaik pengurangan kemiskinan melalui bidang infrastruktur harus dilakukan diantaranya melalui pembangunan jaringan jalan, perumahan (peningkatan kualitas permukiman kumuh), sanitasi, dan jaringan air minum. Faktor dukungan lain adalah ketersediaan jaringan listrik antar daerah atau antar kota (*rural road dan rural electricity*). Berdasarkan data hasil penelitian World Bank, semakin banyak pembangunan jalan dan jaringan listrik antar daerah atau antar kota, maka kemungkinan meningkatkan tingkat perekonomian masyarakat di daerah terpencil makin besar.

Pada tahun 2023 peningkatan kualitas permukiman kumuh dilaksanakan di beberapa kawasan yaitu Kawasan Sapaga dan Kawasan Dana Traha.

a. Perencanaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Skala Kawasan Sapaga

Dalam perencanaannya, kawasan Sapaga terbagi dalam dua segmen, yaitu Sapaga 1 yang merupakan deleniasi kawasan kumuh yang berada dalam wilayah administrasi kelurahan Jatibaru dan Sapaga 2 yang merupakan deleniasi kawasan kumuh yang berada dalam wilayah administrasi kelurahan Jatibaru Timur. Kawasan permukiman kumuh Sapaga memiliki luas 16,75 Hektar. Penanganan kawasan permukiman kumuh Sapaga diusulkan melalui Dana Reguler Skala Kawasan Kementerian PUPR maupun Dana Alokasi Khusus Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (DAK Tematik PPKT) di tahun 2023.

Tabel 2.76. Rencana Kegiatan Penataan Permukiman Kumuh Kawasan Sapaga

No.	Kegiatan	Sumber Dana Pembangunan
1	Pekerjaan Jalan Lingkungan	Kementerian PUPR
2	Pembangunan Jembatan	Kementerian PUPR
3	Pekerjaan Jalur Hijau dan Pedesterian	Kementerian PUPR
4	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah	Kementerian PUPR
5	Pekerjaan Sistem Jaringan Perpipaan Ar Minum (SPAM)	Kementerian PUPR

No.	Kegiatan	Sumber Dana Pembangunan
6	Sistem Proteksi Kebakaran (Hidran)	Kementerian PUPR
7.	Sistem Jaringan Persampahan	APBD II
8.	Pembangunan TPS 3R	APBD II
9	Ruang Terbuka Publik	Kementerian PUPR
10	Pembangunan Talud Penahan Tebing Sungai	Kementerian PUPR

b. Perencanaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Dana Taraha

Kawasan kumuh Dana Taraha merupakan salah satu kawasan permukiman kumuh yang terdapat dalam Surat Keputusan Walikota Bima tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh memiliki luasan terbesar di Kota Bima dan tersebar di empat wilayah administrasi kelurahan, yaitu Kelurahan Paruga, Dara, Tanjung dan Melayu dengan total luas 26,80 Ha. Penanganan kawasan permukiman kumuh Dana Taraha diusulkan melalui Dana Alokasi Khusus Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (DAK Tematik PPKT) di tahun 2023.

Tabel 2.77. Rencana Kegiatan Penataan Permukiman Kumuh Kawasan Dana Taraha

No.	Kegiatan	Sumber Dana Pembangunan
1	Pembangunan Baru Rumah Warga Relokasi di Kawasan Kumuh Ilegal Kelurahan Melayu	APBN & APBD II
2	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	APBN I
3	Perbaikan Rumah Warga Terdampak Program	APBN I
4	Pembangunan Jalan Sempadan Sungai	APBN I
5	Peningkatan Jalan Utama dan Pedestrian	APBN I
6	Peningkatan Jalan Lingkungan	APBN I
7.	Peningkatan Drainase Lingkungan	APBN I
8.	Pembangunan Jamban dan Septictank Individu	APBN II
9	Optimalisasi Pelayanan Air Bersih (Penyediaan SR)	APBN I

No.	Kegiatan	Sumber Dana Pembangunan
10	Pembangunan TPS 3R	APBN I
11	Penyediaan Lahan Relokasi Warga di Kawasan Kumuh Ilegal Kelurahan Melayu	APBD II

2.1.8. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) telah mengatur bahwa kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Kepala daerah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah dimaksud menyusun laporan keuangan daerah yang memuat salah satunya ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hal ini menegaskan bahwa BUMD merupakan badan usaha yang dimiliki oleh pemda. Oleh karena itu, Pemda harus mengoptimalkan peran BUMD.

BUMD merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemda melalui kekayaan daerah yang dipisahkan untuk dijadikan penyertaan modal BUMD. Dalam kerangka regulasi, pengaturan mengenai BUMD telah tercantum dalam Pasal 304 serta Pasal 331 sampai dengan Pasal 343 UU Pemda. Pengaturan lebih *rigid* mengenai tata kelola BUMD mulai dari pendirian, penyelenggaraan, hingga pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (PP BUMD).

BUMD pada dasarnya didirikan untuk memberikan manfaat dalam perkembangan perekonomian daerah, memberikan kemanfaatan umum bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat, serta untuk memperoleh laba dan/atau keuntungan. Tujuan pendirian dimaksud menunjukkan adanya relasi antara peran BUMD dan pelaksanaan otonomi daerah oleh pemda yang berkewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 6 UU Pemda.

Relasi antara BUMD dengan pelaksanaan otonomi daerah tersebut tergambarkan manakala BUMD dibagi menjadi dua jenis yakni Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Dalam Pasal 8 PP BUMD, BUMD Perumda tugasnya lebih difokuskan pada kemanfaatan umum

berupa penyediaan barang dan/atau jasa sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan. Hal ini berbeda dengan BUMD Perseroda yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU Perseroan Terbatas) yang lebih berorientasi untuk menghasilkan laba.

BUMD Kota Bima dengan nama Perumda Bima Aneka di tetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 8 Tahun 2019. Didirikannya dengan maksud untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan dengan tujuan untuk turut serta mengembangkan perekonomian daerah guna menunjang pembangunan daerah serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Perumda Bima Aneka mempunyai usaha produksi meliputi bidang pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan, industri, perdagangan dan jasa.

Belum Berjalan Secara Maksimal

Kontribusi BUMD dalam peningkatan perekonomian daerah belum berjalan optimal. BUMD yang seharusnya menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum menjadikan suatu daerah mandiri secara fiskal. Pada faktanya perekonomian daerah masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Selain dari tingkat kemandirian fiskal daerah, kontribusi BUMD dalam peningkatan perekonomian daerah juga ditunjukkan melalui perbandingan total aset dengan laba yang dihasilkan masih sangat jauh dari yang diharapkan. Kendala belum maksimalnya BUMD juga terkait munculnya atau terkait pandemi COVID- 19.

Permasalahan Tata Kelola BUMD

Selain sebagai tindak lanjut amanat UU Pemda, lahirnya PP BUMD diharapkan dapat menyelesaikan berbagai permasalahan tata kelola BUMD yang selama ini terjadi. Pada tataran implementasi, beberapa BUMD maupun pemda menyampaikan berbagai permasalahan terkait tata kelola BUMD yang dapat dikelompokkan menjadi tiga isu.

Pertama, permasalahan jenis bentuk hukum BUMD. Belum seluruh pemda melakukan penyesuaian badan hukum BUMD, baik menjadi berbentuk Perumda maupun Perseroda sebagaimana diatur dalam PP BUMD. Selanjutnya, masih terdapat tantangan bagi pemda dalam pendirian BUMD baru dan bagi BUMD dalam

melakukan pembentukan anak perusahaan, serta adanya kompleksitas penyertaan modal pada BUMD pada saat pendiriannya.

Kedua, permasalahan regulasi, yaitu belum ditetapkannya seluruh substansi peraturan turunan dari PP BUMD, tidak implementatifnya peraturan perundang-undangan terkait BUMD sektor keuangan mikro/Lembaga Keuangan Mikro (LKM), peraturan perundang-undangan yang kurang memberikan ruang BUMD untuk berkembang, dan terdapat peraturan perundang-undangan terkait BUMD yang sudah tidak sesuai dengan kondisi perkembangan.

Ketiga, permasalahan penyelenggaraan BUMD pada masa pandemi COVID-19 yang bermula sejak tahun 2020 mengakibatkan perekonomian daerah maupun nasional terpuak dengan terjadinya penurunan pendapatan (*revenue*) di hampir seluruh jenis usaha termasuk BUMD karena adanya pembatasan mobilitas masyarakat.

Langkah Perbaikan Terhadap Tata Kelola BUMD

Dalam menghadapi permasalahan tata kelola BUMD, Pemda telah melakukan berbagai upaya seperti menindaklanjuti peraturan perundang-undangan, perbaikan kelembagaan BUMD, melakukan pembinaan dan pengawasan secara rutin sebagaimana amanat PP BUMD, serta melakukan berbagai kegiatan guna mendukung implementasinya dengan pembentukan Tim Pembinaan BUMD.

Selain upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemda dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemda.

Pertama, terkait jenis bentuk hukum BUMD, agar melakukan penyesuaian/perubahan bentuk hukum BUMD sesuai PP BUMD. Kemendagri perlu lebih memperhatikan proses pendirian BUMD dan pemda melakukan penataan dalam proses penyertaan modal awal BUMD.

Kedua, terkait permasalahan regulasi, di antaranya perlu segera menyusun peraturan pelaksana yang belum ditetapkan sebagaimana amanat PP BUMD dan perubahan peraturan pelaksana yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi perkembangan saat ini. Pemerintah dan pemda perlu melakukan tindak lanjut terhadap pengaturan BUMD sektor keuangan yaitu Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

Ketiga, BUMD perlu melakukan inovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi, dan melakukan diversifikasi usaha guna menghasilkan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat.

2.2. Capaian Kinerja Daerah

2.2.1. Evaluasi RKPD Tahun 2022

RKPD Kota Bima tahun 2022 ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bima Nomor 34 Tahun 2021 dan dilaksanakan melalui APBD tahun 2022. Untuk memastikan perkembangan hasil pelaksanaan RKPD tahun 2022 dan keselarasan antara RKPD dengan APBD, maka perlu dilakukan evaluasi kinerja RKPD Kota Bima tahun 2022.

Angka capaian kinerja program diperoleh dari perhitungan rata-rata capaian seluruh program dan kegiatan pada Perangkat Daerah, sementara angka capaian kinerja keuangan diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang bersumber dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bima.

Dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, dilakukan atribusi penilaian menggunakan skala ordinal sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.78. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

No	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Simbol	Interval Nilai Realisasi Kinerja 1 tahun (Permendagri 32/2012)	Interval Nilai Realisasi Kinerja s.d. TW II	Interval Nilai Realisasi Kinerja s.d. TW III
1	Sangat Tinggi	ST	91 % ≤ 100 %	45 % ≤ 50 %	70 % ≤ 75 %
2	Tinggi	T	76 % ≤ 90%	39 % ≤ 44 %	60 % ≤ 69 %
3	Sedang	S	66 % ≤ 75 %	33 % ≤ 38 %	50 % ≤ 59 %
4	Rendah	R	51 % ≤ 65 %	26 % ≤ 32 %	46 % ≤ 49%
5	Sangat Rendah	SR	≤ 50 %	≤ 25 %	≤ 46 %

Sumber : Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Berdasarkan hasil evaluasi, program-program yang tertuang dalam RPKD Tahun 2022 secara konsisten teranggarkan dalam APBD TA. 2022, sedangkan rata-rata capaian kinerja program dari 34 Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Bima Tahun Anggaran 2022 mencapai 91,57% (Kategori Sangat Tinggi), sedangkan rata-rata capaian kinerja keuangannya mencapai 91,87% (Kategori Sangat Tinggi).

Secara umum, ada beberapa hal yang menjadi faktor kendala dalam pencapaian realisasi kinerja Perangkat Daerah yaitu:

1. Banyaknya program kegiatan yang tertunda karena pandemi COVID-19;
2. *Refocussing* dan realokasi anggaran untuk penanggulangan dan pemulihan COVID-19.

Hasil evaluasi pelaksanaan RPKD Tahun 2022 menurut Perangkat Daerah dapat dideskripsikan sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2.79
Capaian Kinerja RKPD Kota Bima Tahun 2022

No	Nama Perangkat Daerah	Rata-rata Tingkat Capaian RKPD		Predikat Tingkat Capaian RKPD		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Realisasi Anggaran		
		(%)	(%)				
1	2	3	4	5	6	7	8
A	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR						
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	98,28	86,30	Tinggi	Sangat Tinggi	SDM, Sarana dan prasarana, Anggaran yang tersedia.	Masih kurangnya pemahaman dari seluruh unit sistem pengelola pendidikan tentang penerapan manajemen akuntabilitas kinerja dan keuangan.
2	Dinas Kesehatan	87,01	91,60	Tinggi	Sedang	Adanya kejelasan arah pembangunan kesehatan baik nasional maupun daerah sehingga tujuan, visi dan misi, serta arah organisasi jelas.	Ada alokasi anggaran yang dicadangkan untuk penanganan Covid-19 namun tidak terpakai.
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	101,95	85,37	Sangat Tinggi	Tinggi	Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang dan komitmen dalam memprioritaskan kegiatan-	Tingginya tingkat kerusakan karena umur konstruksi, bencana alam dan kurang optimalnya

No	Nama Perangkat Daerah	Rata-rata Tingkat Capaian RKPD		Predikat Tingkat Capaian RKPD		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Realisasi Anggaran		
		(%)	(%)				
1	2	3	4	5	6	7	8
						kegiatan untuk mencapai target indikator capaian kinerja	kegiatan operasi dan pemeliharaan, juga rendahnya keterlibatan petani dan stakeholders lainnya dalam pengelolaan jaringan irigasi
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	99,75	91,79	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Kuatnya koordinasi dengan masyarakat serta aparatur dan Stakeholder terkait	Jumlah PNS Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima jika dibandingkan dengan tugas dan fungsi masih belum memadai, sehingga berpengaruh terhadap efektifitas pelaksanaan tugas baik administrasi maupun operasional. Laju Pertumbuhan Penduduk jauh lebih cepat dibanding laju pertumbuhan perumahan dan

No	Nama Perangkat Daerah	Rata-rata Tingkat Capaian RKPD		Predikat Tingkat Capaian RKPD		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		Kinerja	Anggaran				
		(%)	(%)	Kinerja	Realisasi Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Permukiman Pengajuan/usulan lokasi pengadaan tanah yang diajukan oleh perangkat daerah yang membutuhkan tanah banyak yang tidak sesuai peruntukannya dan tidak dilengkapi dengan kajian teknis
5	Satuan Polisi Pamong Praja	92,50	96,34	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Peningkatan efektivitas perencanaan kegiatan dan penganggaran.	Masih kurangnya SDM berkompetensi sesuai kebutuhan organisasi.
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	71,13	97,55	Sedang	Sangat Tinggi	Peningkatan Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam PRB	Masih kurangnya SDM berkompetensi sesuai kebutuhan organisasi, dan fasilitas sarana prasarana pendukung masih kurang memadai
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	98,33	97,03	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Semangat dan komitmen kerja jajaran Dinas Damkar dan Penyelamatan sebagai Dinas yang baru terbentuk.	Masih kurangnya SDM berkompetensi sesuai kebutuhan organisasi. Masih kurangnya sarana

No	Nama Perangkat Daerah	Rata-rata Tingkat Capaian RKPD		Predikat Tingkat Capaian RKPD		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Realisasi Anggaran		
		(%)	(%)				
1	2	3	4	5	6	7	8
							operasional.
8	Dinas Sosial	103,05	98,15	Tinggi	Sangat Tinggi	SDM, Sarana dan prasarana, Anggaran yang tersedia.	
B	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR						
9	Dinas Tenaga Kerja	94,46	98,55	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan internal maupun eksternal berjalan baik.	Konsistensi dan optimalisasi anggaran untuk bidang ketenagakerjaan
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	90,89	70,59	Tinggi	Sedang	Dukungan anggaran serta sarana dan prasarana kantor.	Masih terbatasnya data dan informasi yang dibutuhkan untuk perencanaan. Perlu terus didorong peningkatan partisipasi dan kerjasama dengan berbagai stakeholder yang ada di Kota Bima seperti masyarakat, DPRD, Perguruan Tinggi, dan lain sebagainya.

No	Nama Perangkat Daerah	Rata-rata Tingkat Capaian RKPD		Predikat Tingkat Capaian RKPD		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Realisasi Anggaran		
		(%)	(%)				
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Dinas Ketahanan Pangan	101,00	97,94	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Peningkatan kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan institusi yang menangani Ketahanan Pangan di tingkat provinsi dan Kabupaten/kota serta pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) lainnya. Sinkronisasi kebijakan baik antar kementerian maupun dengan pihak swasta yang diwujudkan dalam bentuk progr am dan kegiatan sesuai kewenangan masing-masing namun saling mendukung.	Kampanye dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan masih kurang, dan masih kurangnya pengawasan teradap mutu pangan segar serta belum terpetakannya kawasan rawan/rentan pangan
12	Dinas Lingkungan Hidup	87,80	93,11	Tinggi	Sangat Tinggi	SDM, Sarana dan prasarana, Anggaran yang tersedia.	Tidak tersedianya lahan untuk penambahan luasan RTH Publik sehingga menyebabkan terjadinya stagnansi dari luasan RTH Publik dimaksud. Dalam RTRW Kota Bima tahun 2011-2031 telah ditetapkan bahwa untuk luasan RTH

No	Nama Perangkat Daerah	Rata-rata Tingkat Capaian RKPD		Predikat Tingkat Capaian RKPD		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Realisasi Anggaran		
		(%)	(%)				
1	2	3	4	5	6	7	8
							Publik minimal 20 persen dari total luas kawasan terbangun.
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	99,93	98,32	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Adanya kejelasan arah pembangunan kependudukan baik nasional maupun daerah sehingga tujuan, visi dan misi, serta arah organisasi jelas. Ketepatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan.	Sarana dan prasarana pendukung kinerja masih terbatas. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus administrasi kependudukan
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100,00	97,50	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SDM, Sarana dan prasarana, Anggaran yang tersedia.	Ada kegiatan yang belum dapat dilaksanakan karena pembatasan aktivitas akibat pandemi Covid-19.
15	Dinas Perhubungan	98,35	95,89	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Dukungan anggaran serta sarana dan prasarana kantor.	Keterbatasan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor, Pengelolaan parkir belum optimal.
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	90,54	97,27	Tinggi	Sangat Tinggi	Optimalisasi sistem perencanaan dan pengendalian daerah yang berbasis teknologi informasi yang	-

No	Nama Perangkat Daerah	Rata-rata Tingkat Capaian RKPD		Predikat Tingkat Capaian RKPD		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Realisasi Anggaran		
		(%)	(%)				
1	2	3	4	5	6	7	8
						telah dikembangkan sebagai upaya tersedianya data dan informasi yang cepat, akurat dan aktual serta kualitas analisa pembangunan untuk mendukung kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.	
17	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	100,00	92,06	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Dukungan anggaran serta sarana dan prasarana kantor.	Perlu penambahan jumlah aparatur dengan bidang ilmu dan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas, dan masih kurangnya pelatihan bagi pelaku UMKM dan IKM
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	100,00	96,01	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	1. Tersedianya anggaran yang cukup; 2. Adanya Kemitraan dan koordinasi dengan Dinas/badan teknis terkait; 3. Tersedianya Sumber Daya Pegawai yang cukup memadai;	Masih kurangnya pembinaan terhadap perusahaan PMA/PMDN, dan masih lemahnya koordinasi dengan berbagai unsur pendukung.

No	Nama Perangkat Daerah	Rata-rata Tingkat Capaian RKPD		Predikat Tingkat Capaian RKPD		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Realisasi Anggaran		
		(%)	(%)				
1	2	3	4	5	6	7	8
						4. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung.	
19	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	123,7	98,67	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sarana dan prasarana yang memadai sehingga dapat meminimalisir hambatanhambatan tak terduga dalam kegiatan penggunaan anggaran. Komitmen kinerja yang berorientasi pada output dan outcome yang baik.	Program kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan
C	URUSAN PILIHAN						
20	Dinas Kelautan dan Perikanan	125,00	93,46	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Pendekatan sosialisasi kepada masyarakat pesisir dan pembinaan kelompok berkelanjutan sehingga kepedulian masyarakat terhadap kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan akan terwujud. Senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pusat dalam upaya	Perlunya sosialisasi pentingnya makan ikan maupun pembinaan kelompok masyarakat pengolah hasil perikanan agar lebih kreatif dan inovatif dalam mengenalkan produksi produksi hasil perikanan

No	Nama Perangkat Daerah	Rata-rata Tingkat Capaian RKPD		Predikat Tingkat Capaian RKPD		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Realisasi Anggaran		
		(%)	(%)				
1	2	3	4	5	6	7	8
						mendatangkan program-program pendukung yang bersumber dari APBD I maupun APBN.	
21	Dinas Pariwisata	97,50	97,68	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Peningkatan jumlah personil yang profesional dibidang kepariwisataan, kepemudaan olahraga. Peningkatan kemitraan dengan berbagai kelompok masyarakat yang berhubungan dengan kepariwisataan, kepemudaan olahraga.	
22	Dinas Pertanian	108,99	98,57	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Adanya komitmen yang baik antara beberapa <i>stakeholder</i> yang tergabung dalam rumpun hijau dalam melahirkan beberapa program/kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan petani peternak serta peningkatan kualitas sumber daya petani peternak dan aparatur pemerintah. Adanya dukungan dan komitmen yang kuat dari Pemerintah, baik	Laju pembangunan yang menyebabkan lahan-lahan produktif mengalami penyusutan karena alih fungsi lahan. Masih terbatasnya kualitas sumber daya aparatur, petani dan peternak. Sarana transportasi bagi tenaga teknis lapangan yang masih terbatas.

No	Nama Perangkat Daerah	Rata-rata Tingkat Capaian RKPD		Predikat Tingkat Capaian RKPD		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Realisasi Anggaran		
		(%)	(%)				
1	2	3	4	5	6	7	8
						Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat untuk mempertahankan status lahan pertanian dalam upaya mempertahankan luas tanam pertanian.	
D	URUSAN PENUNJANG						
23	Sekretariat Daerah	98,50	98,37	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah Kota Bima didukung dengan sarana dan prasarana berupa kendaraan operasional roda empat dan roda dua, peralatan kantor dan perlengkapan kantor. Selain itu perkembangan teknologi informasi yang pesat dimanfaatkan dengan membuat sistem informasi yang dapat mempermudah dalam pelaksanaan pekerjaan.	Dibutuhkan penguatan koordinasi dan kesamaan pemahaman antar unit kerja (bagian) dalam merumuskan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan sehingga program dan anggaran dapat lebih efektif dan efisien.
24	Inspektorat	117,52	99,01	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah Kota Bima didukung dengan sarana dan prasarana berupa kendaraan operasional roda empat dan roda	Masih minimnya perangkat daerah yang diusulkan sebagai WBK/WBBM di

No	Nama Perangkat Daerah	Rata-rata Tingkat Capaian RKPD		Predikat Tingkat Capaian RKPD		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Realisasi Anggaran		
		(%)	(%)				
1	2	3	4	5	6	7	8
						dua, peralatan kantor dan perlengkapan kantor. Selain itu perkembangan teknologi informasi yang pesat dimanfaatkan dengan membuat sistem informasi yang dapat mempermudah dalam pelaksanaan pekerjaan.	lingkungan Pemerintah Kota Bima. Keterbatasan data pendukung proses pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM.
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	103,68	95,34	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Penempatan SDM sesuai kompetensi serta ketersediaan sarana dan prasarana kantor.	Inkonsistensi data sebagai basis intervensi program-program yang akan diimplementasikan dilapangan, sinkronisasi perencanaan antara pusat & daerah yang tidak dapat dilakukan secara optimal karena regulasi perencanaan & penganggaran dari pemerintah pusat yang berubah-ubah
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan	89,43	86,41	Tinggi	Tinggi	Adanya kegiatan pendampingan penyusunan laporan keuangan oleh Tim BPKP perwakilan NTB.	Tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih

No	Nama Perangkat Daerah	Rata-rata Tingkat Capaian RKPD		Predikat Tingkat Capaian RKPD		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Realisasi Anggaran		
		(%)	(%)				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Aset Daerah					Terus dilakukan penyempurnaan aplikasi simda berbasis akrual. SDM pengelola keuangan (PPK dan Bendahara Pengeluaran) mendapatkan bimtek tiap tahun tentang pengelolaan keuangan daerah. Telah dilakukan inventarisasi asset secara menyeluruh pada seluruh SKPD oleh TIM inventarisasi dari KPKNL dan bidang asset BPKAD Kota Bima. Anggaran yang tersedia sangat memadai untuk pelaksanaan kegiatan.	rendah, dan wajib pajak tidak memberikan informasi yang sbenarnya terhadap omset yang mereka miliki. Peta blok yang belum lengkap
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	82,00	82,41	Tinggi	Tinggi	Optimalisasi mekanisme kerja dan koordinasi baik secara internal maupun eksternal. Secara internal dapat dimulai dengan sinergitas antar bidang dan evaluasi mekanisme kerja masing-masing bidang serta penataan koordinasi dan administrasi yang baik.	Perlunya optimalisasi sistem perencanaan dan pengendalian daerah yang berbasis teknologi informasi yang telah dikembangkan sebagai upaya tersedianya data dan informasi kepegawaian yang cepat,

No	Nama Perangkat Daerah	Rata-rata Tingkat Capaian RKPD		Predikat Tingkat Capaian RKPD		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Realisasi Anggaran		
		(%)	(%)				
1	2	3	4	5	6	7	8
							akurat dan aktual serta kualitas analisa pengembangan SDM untuk mendukung kualitas perencanaan dan pengendalian pengelolaan kepegawaian daerah.
28	Sekretariat DPRD	95,00	95,33	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.	Perlu peningkatan pelaksanaan sistem pengendalian intern (SPI) pada masing-masing Bagian pada Sekretariat DPRD Kota Bima.
29	Kecamatan Rasanae Barat	85,00	87,88	Tinggi	Tinggi	Sarana dan prasarana kantor serta alokasi Dana Kelurahan.	Berbagai kegiatan kemasyarakatan banyak yang tertunda karena pembatasan aktivitas akibat pandemi Covid-19.
30	Kecamatan Rasanae Timur	85,00	87,82	Tinggi	Tinggi	Sarana dan prasarana kantor serta alokasi Dana Kelurahan.	Berbagai kegiatan kemasyarakatan banyak yang tertunda karena pembatasan aktivitas

No	Nama Perangkat Daerah	Rata-rata Tingkat Capaian RKPD		Predikat Tingkat Capaian RKPD		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Realisasi Anggaran		
		(%)	(%)				
1	2	3	4	5	6	7	8
							akibat pandemi Covid-19.
31	Kecamatan Asakota	87,50	90,26	Tinggi	Sangat Tinggi	Sarana dan prasarana kantor serta alokasi Dana Kelurahan.	Berbagai kegiatan kemasyarakatan banyak yang tertunda karena pembatasan aktivitas akibat pandemi Covid-19.
32	Kecamatan Mpunda	87,00	88,45	Tinggi	Tinggi	Sarana dan prasarana kantor serta alokasi Dana Kelurahan.	Berbagai kegiatan kemasyarakatan banyak yang tertunda karena pembatasan aktivitas akibat pandemi Covid-19.
33	Kecamatan Raba	91,00	92,05	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sarana dan prasarana kantor serta alokasi Dana Kelurahan.	Berbagai kegiatan kemasyarakatan banyak yang tertunda karena pembatasan aktivitas akibat pandemi Covid-19.
34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100,00	96,47	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Optimalnya pelaksanaan tugas Intelijen Daerah yang telah dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik serta mendorong tumbuhnya kader-kader Intelijen yang mampu melakukan deteksi dini serta	Perlu penempatan aparatur berdasarkan analisa beban kerja yang sudah dilakukan dengan memperhatikan kemampuan masing-masing sumber daya

No	Nama Perangkat Daerah	Rata-rata Tingkat Capaian RKPD		Predikat Tingkat Capaian RKPD		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Realisasi Anggaran		
		(%)	(%)				
1	2	3	4	5	6	7	8
						dapat mengeliminir setiap permasalahan yang berkembang di tengah masyarakat	aparatur yang ada.

Sumber: Hasil Analisis

2.2.2. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Capaian kinerja daerah ditampilkan dalam dua bagian yaitu capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tabel 2.80 dan capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada tabel 2.81 dan 2.82.

Terdapat 16 Sasaran pada RPJMD Kota Bima Tahun 2018-2023 yang diukur melalui 19 Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

1. Angka Harapan Hidup
2. Angka Partisipasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar
3. Persentase peningkatan mutu pendidikan
4. Pengeluaran Per Kapita
5. Indeks Ketahanan Pangan
6. Pertumbuhan PDRB
7. Angka Kemiskinan
8. Tingkat Pengangguran Terbuka
9. Nilai SAKIP
10. Skor LPPD
11. Opini BPK
12. Rasio PAD terhadap APBD
13. Rata-rata skor Indeks Kepuasan Masyarakat
14. Persentase Kesesuaian Tata Ruang
15. Indeks kualitas lingkungan hidup
16. Luas kawasan kumuh
17. Persentase peningkatan infrastruktur daerah dalam kondisi baik
18. Indeks Ketahanan Daerah
19. Persentase penurunan Angka kriminalitas

2.2.3. Analisis Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diharapkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah

secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan. Suatu indikator kinerja dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Bima periode tahun 2018-2021. Ukuran keberhasilan pembangunan suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut.

Selengkapnya, Penetapan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Bima periode tahun 2018-2022 disajikan dalam 2 tabel karena terdapat perbedaan nomenklatur program kegiatan akibat penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Tabel 2.81 menampilkan capaian tahun 2018-2020 dan tabel 2.82 menampilkan capaian tahun 2021-2022.

Tabel 2.80
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Bima Tahun 2018-2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 5 Tahun Terakhir					Keterangan	Analisis
				2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8		11	12
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Angka	69,35	70,2	70,38	70,5	70,83	Pencapaian tahun 2020 sudah melewati target akhir masa RPJMD	Faktor pendukung: • komitmen Pemerintah Kota Bima dalam mendorong program peningkatan pelayanan pada urusan kesehatan, baik peningkatan sarana dan prasarana, SDM, dan anggaran.
2	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Angka Partisipasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar	Angka	98,29%	98,79%	99,29%	99,17%	98,00%	Pencapaian tahun 2020 sudah melewati target akhir masa RPJMD	Faktor pendukung: • Komitmen daerah dalam hal alokasi anggaran pendidikan lebih dari 20% APBD
		Persentase peningkatan mutu pendidikan	%	23,17%	26,12%	27,17%	33%	33%	Meningkat dari tahun ketahun	Kendala: • Masih lemah kualitas SDM pendidikan serta sarana dan prasarana.
3	Meningkatnya Daya Beli masyarakat	Pengeluaran Per Kapita	Rp.000 /thn	10.825	11.334	11.105	11.135	11.395	Meningkat dari tahun ketahun, tahun 2022 sudah melampaui	Faktor pendukung: • Pertumbuhan pada sektor perbankan, UMKM, dan jasa

									target akhir masa RPJMD	Kendala: • Belum optimalnya pengembangan produk unggulan daerah, terutama peningkatan kualitas dan promosi hasil olahan lokal sehingga produk unggulan daerah menjadi kalah bersaing dengan produk daerah lain.
4	Meningkatnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	59,9	63,52	65,9	69,28	70,25	Meningkat dari tahun ketahun	Faktor pendukung: • ketersediaan pangan dan tingkat distribusinya cukup merata. Kendala: • masih kurangnya tingkat keberagaman/diversifikasi pangan.
5	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan PDRB	%	6,50%	5,22%	-4,95%	2,08%	2,70	Pertumbuhan ekonomi menurun secara signifikan pada tahun 2020. Hal ini merupakan kondisi umum global sebagai dampak pandemi Covid 19, dimana pertumbuhan ekonomi nasional juga berada pada angka -2,03% dan Provinsi NTB pada angka -3,58%.	
6	Menurunnya angka kemiskinan	Angka Kemiskinan	%	8,79%	8,60%	8,35%	8,88%	8,80	Meskipun pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi, angka kemiskinan Kota Bima mengalami penurunan pada tahun 2019 dan	Faktor pendukung: • komitmen kepala daerah untuk melaksanakan program penanganan kemiskinan yang terintegrasi, baik perencanaan dan pelaksanaannya.

									2020. Pemberian paket bantuan ekonomi melalui jaring pengaman sosial efektif menaikkan daya beli masyarakat.	Kendala: • masih lemahnya aspek koordinasi dalam pendataan dan verifikasi data kemiskinan di daerah sehingga menghambat pelayanan.
7	Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,51	4,18	4,42	3,56	3,73	Tingkat pengangguran terbuka mengalami peningkatan. Hal ini merupakan imbas dari terganggunya kegiatan usaha masyarakat dikarenakan pembatasan aktivitas ekonomi dan sosial sebagai dampak pandemi Covid-19.	Kendala: • Angkatan kerja di Kota Bima masih perlu ditingkatkan kompetensi/skill-nya sehingga dapat langsung terserap sesuai kebutuhan. Rencana kedepan: • Komitmen Pemerintah Kota Bima dalam mendorong program perluasan lapangan kerja, membangun kelembagaan dan sarana prasarana ketenagakerjaan, seperti membentuk Dinas Tenaga Kerja dan Balai Latihan Kerja (BLK).
8	Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	Huruf dan Angka	B (63,64)	B (67,05)	B (68,48)	B (68,69)	B (68,17)	Meningkat dari tahun ketahun	Faktor pendukung: • Komitmen Kepala Daerah untuk mewujudkan <i>good governance</i> .
		Skor LPPD	Angka	Sangat Tinggi (3,1845)	Sangat Tinggi (3,2595)	Sangat Baik (3,2595)	Sangat Baik (3,2595)	Sangat Baik (3,2595)*	Pencapaian tahun 2019 sudah melewati target akhir masa RPJMD	• Pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) bekerja sama dengan BPKP perwakilan NTB.
										• Pengelolaan keuangan dan aset daerah didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi, seperti aplikasi SIMDA dan SIMBADA.

		Opini BPK	Huruf	WTP	WTP	WTP	WTP	N/A	Predikat WTP 7 tahun berturut-turut	
9	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Rasio PAD terhadap APBD	%	5,56%	5,62%	6,41%	6,20%	8.99%	Pencapaian tahun 2020 sudah melewati target akhir masa RPJMD	Faktor pendukung: • peningkatan komitmen petugas dalam mengamankan kebocoran penerimaan PAD. Kendala: • masih lemah sistem dan sarana prasarana pelayanan sehingga menghambat transparansi penerimaan. • Pandemi COVID-19 yang masih melanda seluruh dunia termasuk Kota Bima sangat berdampak pada beberapa sumber PAD Kota Bima.
10	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Rata-rata skor Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	83,64	82,36	82,61	83,42	86,89	Meningkat dari tahun ketahun	Faktor pendukung: • semakin membaiknya penyiapan pada standar pelayanan publik, baik persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya, produk, kompetensi, perilaku pelayanan, maklumat pelayanan, dan penanganan pengaduan.
11	Meningkatnya ketaatan terhadap rencana tata ruang	Persentase Kesesuaian Tata Ruang	%	85%	98%	98%	98,50%	98.08.00	Kesesuaian Tata Ruang menunjukkan ketaatan terhadap rencana tata ruang. Masih ada kawasan yang pemanfaatan lahannya belum sesuai rencana tata ruang, misalnya di kawasan bantaran sungai.	

12	Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	Angka	76,41	74,13	74,13	52,73	56,08	Penurunan Indeks kualitas lingkungan hidup dipengaruhi oleh penurunan kualitas air secara signifikan (bakteri coli)	Faktor pendukung: • Efektifnya pelaksanaan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, dan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup. Kendala: • Pengelolaan air limbah permukiman masih belum optimal.
13	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Persentase peningkatan infrastruktur daerah dalam kondisi baik	%	3,10%	4,21%	2,80%	9,94%	9,96	Ada 3 komponen infrastruktur yang diukur yaitu irigasi teknis, jalan dan saluran drainase. Pada tahun 2019, 61,09% infrastruktur irigasi teknis, jalan dan saluran drainase berada dalam kondisi baik. Pada tahun 2020, 63,78% infrastruktur dalam kondisi baik. Dengan demikian terdapat peningkatan sebesar 2,8%.	Faktor pendukung: • keterpaduan pendanaan kegiatan baik yang bersumber dari APBD, APBN maupun dari lembaga non pemerintah lainnya. Kendala: • masih banyaknya jalan di Kota Bima yang belum memiliki status sehingga apabila diterbitkan SK status jalan baru maka akan menambah panjang jalan Kota dengan kondisi yang belum baik. Disamping itu, kerusakan infrastruktur akibat bencana banjir bandang Tahun 2016 yang lalu belum sepenuhnya mampu diperbaiki. Rencana kedepan: Peningkatan kualitas kemitraan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah dalam pembangunan infrastruktur yang ada di Kota Bima.

14	Meningkatnya Ketahanan terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,83	0,84	0,74	0,74	0,74	Skor Indeks Ketahanan Daerah Kota Bima menurun pada tahun 2020 karena beberapa dokumen perencanaan mitigasi bencana belum berhasil diperbarui karena penundaan kegiatan sebagai akibat pandemi Covid-19.	Faktor pendukung: • adanya PUSDALOPS yang telah terintegrasi dengan pusat. Kendala: • masih belum optimalnya pelaksanaan koordinasi lintas sektor dalam pencegahan tindakan kriminal.
15	Meningkatnya keamanan, ketenteraman dan ketertiban	Persentase penurunan Angka kriminalitas	%	20%	33%	-	104.1%	66%	Berdasarkan data pada Kepolisian Resort Bima Kota, angka kriminalitas pada tahun 2020 mengalami peningkatan. Dengan demikian, capaian persentase penurunan angka kriminalitas bernilai negatif.	Faktor pendukung: • Adanya intervensi program yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan terbentuknya forum-forum seperti Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Konflik Sosial (FPK) yang ikut mendukung penurunan angka kriminalitas dan konflik sosial di Kota Bima.
									Namun demikian, angka ini tidak hanya menunjukkan angka kriminalitas di wilayah Kota Bima, melainkan juga di wilayah Kabupaten Bima (Kecamatan Wawo dan Sape) yang merupakan wilayah kewenangan Polres Bima Kota.	Kendala: • masih belum optimalnya pelaksanaan koordinasi lintas sektor dalam pencegahan tindakan kriminal.

		Persentase penurunan Angka Konflik Sosial	%	11,5	12,5	N/A	57	58	Faktor pendukung: adanya intervensi program yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan terbentuknya forum-forum seperti Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Konflik Sosial (FPK) yang ikut mendukung penurunan angka kriminalitas dan konflik sosial di Kota Bima.	Hambatan dalam pencapaian kinerja berupa masih belum optimalnya pelaksanaan koordinasi lintas sektor dalam pencegahan tindakan kriminal. Solusi untuk kedepannya berusaha meningkatkan program pencegahan kriminalitas dan konflik sosial.
16	Meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatn budaya lokal	Persentase peningkatan nilai budaya, adat dan tradisi yang dibina	%	1,1	2,2	3,5	5,2	5,4	Kegiatan pembinaan dilaksanakan pada 37 jenis nilai budaya, adat dan tradisi.	Faktor-faktor pendukung pencapaian yaitu adanya intervensi program yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
17	Meningkatnya pengamalan ajaran agama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	83	82,11	95,67	96,28	96,86	Kerukunan umat beragama di Kota Bima tercapai berkat koordinasi yang baik antara Pemerintah Kota Bima melalui Badan Kesbangpol dengan FKUB dan Kementerian Agama.	

Tabel 2.81. Evaluasi terhadap Hasil RPJMD Kota Bima Periode Tahun 2018-2020

Misi/Tujuan / Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2017	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA TAHUN						REALISASI TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN						TINGKAT CAPAIAN TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN (%)					
				2018		2019		2020		2018		2019		2020		2018		2019		2020	
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Misi 1. Mewujudkan Masyarakat Berkualitas yang Berdaya Saing																					
Tujuan 1.1. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	70,8	71,4	61.015.130.775,59	72,01	60.966.171.198,00	72,62	109.859.508.017,07	75,04	59.564.429.469,35	75,8	62.278.274.205,00	75,81	98.078.945.831,00	105,1	97,62	105,26	102,15	104,39	89,28
Sasaran 1.1.1. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	N/A	69,35	20.350.354.310,99	69,55	25.839.562.402,00	69,75	65.379.172.506,37	69,58	20.314.556.305,99	70,02	25.793.269.202,00	70,38	53.440.869.321,00	100,33	99,82	100,68	99,82	100,9	81,74
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Pelayanan Puskesmas dan Jaringannya	persen		90	9.449.018.523,99	90	6.803.205.421,00	90	2.660.269.500,00	89,7	9.449.018.523,99	85	6.803.205.421,00	90	1.857.775.600,00	99,67	100	94,44	100	100	69,83
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit menular	Persentase Penderita Jumlah Kasus Penyakit Menular	%		81,2	865.216.950,00	82,2	801.470.300,00	83,5	930.980.673,00	73,34	839.616.950,00	80	755.177.100,00	82,2	822.795.250,00	90,32	97,04	97,32	94,22	98,44	88,38

	lar																				
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit tidak menular	Perse ntase pena ngan an kasus penyakit tidak menu lar	%		0	0	0	0	83,5	92.198.000,00					90	110.270.000,00	0	0	0	0	107,78	119,6
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Prose ntase Pusk esmas yang terak redit asi	%		5 Prata ma	1.091.174.703,00	7 Prata ma,1 Madya	2.211.393.669,00	7 Prata ma,3 Madya	26.449.379.086,00	100	1.091.174.703,00	100	2.211.393.669,00	100	26.449.379.086,00	100	100	100	100	100	100
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit	Perse ntase sarana a pelay anan kese hatan yang direh abilit asi	unit				1	1.998.733.131,00	1	14.735.246.371,37			1	1.998.733.131,00	1	7.424.362.965,00	0	0	100	100	100	50,39
Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Caku pan UHC	%		100	8.421.431.009,00	100	11.886.968.971,00	100	18.369.803.926,00	100	8.421.431.009,00	100	11.886.968.971,00	100	14.634.991.470,00	100	100	100	100	100	79,67
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Angk a Kema tian Ibu	Per 100.000 KH						137/100.000 KH	876.572.500,00					90/100.000	876.572.500,00	0	0	0	0	65,69	100
	Angk a Kema	Per 1000 KH						8/1000 KH	0					4/1000		0	0	0	0	50	0

	tan Bayi																				
Program Keluarga Berencana	Rasio peserta KB Aktif	%		3	296.873.525,00	4	2.017.764.910,00	10	796.012.450,00	3	286.675.520,00	4	2.017.764.910,00	10	796.012.450,00	100	96,56	100	100	100	100
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan penguatan Kelembagaan Anak	Cakupan pengembangan Kota Layak Anak	%		30	226.639.600,00	35	120.026.000,00	50	468.710.000,00	30	226.639.600,00	35	120.026.000,00	46,52	468.710.000,00	100	100	100	100	93,04	100
Sasaran 1.1.2. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	Angka	N/A	10,14	31.365.725.991,36	10,39	32.683.900.372,00	10,64	42.709.232.725,70	12,64	31.365.725.991,36	12,69	34.151.502.721,00	12,75	42.709.232.725,00	124,65	100	122,14	104,49	119,83	100
Program Pendidikan Anak Usia Dini	Capaian peserta pendidikan anak usia dini	%		56	2.444.571.146,45	100	5.281.490.000,00	100	5.876.088.000,00	56	2.444.571.146,45	94,53	5.281.490.000,00	100	5.876.088.000,00	100	100	94,53	100	100	100
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Capaian Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	%		98	27.288.314.649,91	100	26.143.650.523,00	100	36.390.584.025,70	98	27.288.314.649,91	100	27.611.252.872,00	100	36.390.584.025,00	100	100	100	105,61	100	100
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga	Capaian Penin	%		80	1.207.326.076,00	100	496.598.505,00	100	271.920.500,00	80	1.207.326.076,00	100	496.598.505,00	100	271.920.500,00	100	100	100	100	100	100

Kependidikan	n mutu dan tenaga kependidikan.																				
Program Pengembangan Budaya Baca dan pembinaan Perpustakaan	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Angka		5,15	425.514.119,00	5,15	762.161.344,00	5,15	170.640.200,00	5,15	425.514.119,00	6,54	762.161.344,00	5,15	170.640.200,00	100	100	126,99	100	100	100
Sasaran 1.1.3. Meningkatkan Daya Beli masyarakat	Pengeluaran Per Kapita	Rp.000/bulan	N/A	1.250,00	627.547.095,00	1.300,00	980.340.535,00	1.400,00	878.391.100,00	1.084,82	555.579.922,00	1.399,04	871.134.393,00	1.366,74	1.039.771.100,00	86,79	88,53	107,62	88,86	97,62	118,37
Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Perseentase angkatan kerja yang terdapat pada dunia usaha dan dunia kerja	%		70	215.728.000,00	76	279.979.465,00	78	355.781.600,00	70	215.728.000,00	38,21	280.815.000,00	0,74	355.781.600,00	100	100	50,28	100,3	0,95	100
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Perseentase pertumbuhan Wirausaha Baru	%		100	87.282.222,00	100	404.096.193,00	120	163.279.500,00	275,34	87.282.222,00	93,64	404.096.193,00	120	168.331.000,00	275,34	100	93,64	100	100	103,09
Program Pengembangan Sistem Pendukung	Cakupan Koperasi	%		100	324.536.873,00	100	296.264.877,00	100	359.330.000,00	110,89	252.569.700,00	76,34	186.223.200,00	100	515.658.500,00	110,89	77,82	76,34	62,86	100	143,51

BagiUsaha Mikro Kecil menengah	Aktif																				
Sasaran 1.1.4. Meningkatnya ketahanan pangan	Skor Pola Pangan harapan	Angka	N/A	80,9	8.671.503.378,24	83,3	1.462.367.889,00	85,7	892.711.685,00	95,3	7.328.567.250,00	85,5	1.462.367.889,00	85,7	889.072.685,00	117,8	84,51	102,64	100	100	99,59
Program peningkatan ketahanan pangan	Perse ntase penin gkatan ketah anan pang an	%		100	7.827.017.620,24	100	860.003.592,00	100	260.970.300,00	100	6.474.552.000,00	100	860.003.592,00	100	260.970.300,00	100	82,72	100	100	100	100
Program Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Perse ntase penin gkatan pema saran hasil prod uksi	%		100	59.801.600,00	100	84.165.800,00	100	69.851.285,00	100	59.801.600,00	100	84.165.800,00	100	69.851.285,00	100	100	100	100	100	100
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Caku pan prod uk ola ha n hasil perik anan	%		0,4	784.684.158,00	0,45	518.198.497,00	0,5	561.890.100,00	0,59	794.213.650,00	2,2	518.198.497,00	4,99	558.251.100,00	147,15	101,21	489,71	100	997,6	99,35
Misi 2. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera melalui pemerataan pembangunan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Pengembangan Produk Unggulan;																					
Tujuan 2.1. Meningkatkan pemerataan ekonomi masyarakat	Indeks Gini	Nilai	0,390	0,410	23.534.499.348,61	0,390	25.264.375.631,00	0,385	28.537.053.823,27	0,420	816.609.498.548,61	0,370	25.502.172.931,00	0,380	26171176564,270	102,69	3.469,84	94,87	100,94	98,70	91,71
Sasaran 2.1.1. Meningkatnya	Pertumbuhan PDRB	Persen (%)	6,76	6,5	23.534.499.348,61	5,8	25.264.375.631,00	5	28.537.053.823,27	6,76	816.609.498.548,61	5,22	25.502.172.931,00	-4,95	26.171.176.564,27	104	3.469,84	90	100,94	-99	91,71

pertumbuhan ekonomi																					
Program pengembangan budidaya perikanan	Produksi perikanan budidaya	ton		1.008,79	816.247.000,00	839,68	737.006.989,00	849,75	752.108.550,00	773,63	816.247.000,00	776,12	737.006.989,00	785,9	741.110.958,00	76,69	100	92,43	100	92,49	98,54
Program pengembangan perikanan tangkap	Produksi perikanan tangkap	ton		2.115,06	1.420.275.537,00	2.136,21	1.668.548.694,00	2.168,25	2.366.191.250,00	2.074,10	1.420.275.537,00	2.093,90	1.668.548.694,00	2.313,55	2.366.191.250,00	98,06	100	98,02	100	106,7	100
Program pengembangan pemasaran pariwisata	Jumlah program promosi pemasaran industri pariwisata	Kali		2	1.013.877.411,00	2	2.292.817.173,00	2	1.093.185.000,00	2	1.013.876.611,00	2	2.292.817.173,00	2	1.093.185.000,00	100	100	100	100	100	100
Program pengembangan destinasi pariwisata	Perseentase pengembangan destinasi wisata	%		50	1.712.297.416,75	50	3.629.112.580,00	50	2.831.789.000,00	50	1.712.297.416,75	50	3.629.112.580,00	50	576.203.633,00	100	100	100	100	100	20,35
Program Pengembangan Industri dan Kemitraan Pariwisata	Lembaga pelaku industri pariwisata	Usaha		10	230.496.950,00	10	48.655.315,00	10	80.966.000,00	10	230.496.950,00	10	643.340.615,00	50	80.966.000,00	100	100	100	1.322,24	500	100
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Produktifitas hasil	ton		51	129.617.500,00	53,8	597.167.800,00	53,8	439.824.125,00	51	129.617.500,00	85,04	597.167.800,00	82,06	409.641.225,00	100	100	158,07	100	152,53	93,14

	prod uksi perta nian/ perke buna n																					
Program peningkatan produksi hasil peternakan	Popul asi Tern ak Besar , Kecil dan Ungg as	ekor		800	234.453.006 ,00	1.000 ,00	344.114.5 65,00	1.500,0 0	2.500.920.0 00,00	800	234.453.0 06,00	820,2	344.11 4.565, 00	806,6 9	2.437.534 .400,00	100	100	82,02	100	53,78	97,4 7	
Program pengembanga n sentra- sentra industri potensial	Meni ngkat nya Sentr a Indus tri di daera h	sentra		74	1.071.417.1 21,46	74	296.595.4 73,00	74	1.666.637.6 00,00	100	1.071.417 .121,46	15,24	296.59 5.473, 00	100	1.666.637 .600,00	135,1 4	100	20,59	100	135,1 4	100	
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Caku pan Peme nuha n Bara ng dan Jasa	%		100	2.752.911.2 11,97	100	3.414.989 .188,00	100	1.934.925.0 00,00	100	2.752.911 .211,97	100	3.414. 989.18 8,00	100	1.934.925 .000,00	100	100	100	100	100	100	
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Perse ntase pertu mbu han Inves tasi PMD N	%		20	225.889.797 ,00	20	109.332.1 55,00	20	93.652.300, 00	20	225.889.7 97,00	29	109.33 2.155, 00	53	92.327.30 0,00	100	100	145	100	265	98,5 9	
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Meni ngkat nya Inves tasi	%		20		20	177.595.9 99,00	20		20	793.075.0 00.000,00	13	177.59 5.999, 00	32	107.237.7 00,00	100	0	65	100	160	0	

	PMD N rata- rata 1 % perta hun																				
Program Pengembang an Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	% wilay ah strat egis dan cepat tumb uh kota bima yang ditan gani	%		20	13.927.016. 397,43	20	11.948.43 9.700,00	20	14.776.854. 998,27	20	13.927.01 6.397,43	20	11.591 .551.7 00,00	20	14.665.21 6.498,27	100	100	100	97,01	100	99,2 4
Tujuan 2.2. Meningkatka n kesejahteraan n sosial masyarakat	Ang ka kemi skin an	Persen tase	N/A	7	3.573.591.6 50,00		3.830.297 .115,00		1.354.982.2 00,00	8,79	3.789.319 .927,00	8.60	1.936. 875.81 5,00	8,35	3.182.215 .656,00	125,5 7	106,04	0	50,57	0	234, 85
Sasaran 2.2.1. Meningkatny a kualitas hidup PMKS	Perse ntase Penu runa n Angk a Kemi skina n	PMKS yang tertang ani	Persen (%)	70	3.325.164.1 50,00	70	3.329.388 .130,00	75	868.459.000 ,00		3.325.164 .150,00		1.435. 966.83 0,00		2.702.030 .281,00	0	100	0	43,13	0	311, 13
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Perse ntase PMKS yang Terla tih	%		60	706.436.000 ,00	60	465.832.5 00,00			54,81	706.436.0 00,00	66,88	465.83 2.500, 00	65,3	240.179.0 00,00	91,35	100	111,47	100	0	0

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Perse ntase PMKS yang mend apatk an pelay anan dan reha bilita si Sosia l	%		60	530.224.500 ,00	60	598.557.1 30,00	80	490.976.500 ,00	86,36	530.224.5 00,00	70	598.55 7.130, 00	71,79	483.387.0 00,00	143,9 3	100	116,67	100	89,74	98,4 5
Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Perse ntase Peny anda ng Cacat dan trau ma yang terta ngani	%		50	22.800.000, 00	50	83.270.00 0,00			50	22.800.00 0,00	80	83.270 .000,0 0	100	483.387.0 00,00	100	100	160	100	0	0
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Perse ntase waha na kesej ahter aan sosial berb asis masy araka t (WKB SM) yang meny ediak an saran a prasa rana	%		60	133.222.000 ,00	80	122.258.0 00,00	80	112.972.500 ,00	60	133.222.0 00,00	50	122.25 8.000, 00	33,33	30.985.00 0,00	100	100	62,5	100	41,66	27,4 3

	pelayanan kesejahteraan sosial																					
Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	Prosentase rumah tidak layak huni akibat bencana alam/sosial yang ditangani	%		50	1.932.481.650,00	56,5	2.059.470.500,00	100	264.510.000,00	50	1.932.481.650,00	108,73	166.049.200,00	100	1.464.092.281,00	100	100	192,44	8,06	100	553,51	
Sasaran 2.2.2. Meningkatkan kesempatan kerja	Partisipasi Angkatan Kerja	Persen (%)	N/A	96,44	248.427.500,00	98	500.908.985,00	99	486.523.200,00	71,3	464.155.777,00		500.908.985,00		480.185.375,00	73,93	186,84	0	100	0	98,7	
	Angka Pengangguran Terbuka			3,56		2		1		2,39		4,18		4,42		67,13	0	209	0	442	0	
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	%		50	0	70	279.979.465,00	75	355.781.600,00	50	215.728.000,00	75,14	279.979.465,00	74,24	354.502.375,00	100	0	107,34	100	98,99	99,64	

	han berb asis masy araka t																				
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Besar an penc ari kerja yang terda ftar yang ditem patka n	%		70	248.427.500 ,00	89	220.929.5 20,00	90	130.741.600 ,00	71,35	248.427.7 77,00	98,14	220.92 9.520, 00	94,81	125.683.0 00,00	101,9 3	100	110,27	100	105,3 4	96,1 3
Misi 3. Menghadirkan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan mengedepankan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.																					
Tujuan 3.1. Meningkatka n kinerja penyelengga raan pemerintaha n	Inde ks Refo rmas i Biro krasi	Nilai	N/A	N/A	27.709.151. 410,53	N/A	41.611.21 6.480,62	55	18.328.609. 990,00		27.770.09 4.744,53		16.878 .968.9 23,00		15.643.04 3.718,00		100,22		40,56	0	85,3 5
Sasaran 3.1.1. Meningkatny a akuntabilita s kinerja keuangan dan penyelengga raan pemerintaha n daerah	Nilai SAKI P	Huruf dan Angka	B (62,58)	B (63,64)	12.813.202. 710,00	B (65,5 8)	14.058.56 1.360,00	BB (70,01)	15.039.575. 090,00	B (63,64)	12.813.20 2.710,00	B (67,05)	13.914 .315.1 60,00		13.468.49 0.518,00	B	100	B	98,97	B	89,5 5
	Skor LPPD	Angka	N/A	Sangat Tinggi (3,1845)		Sang at Tingg i (3,19 30)		Sangat Tinggi (3,200)		Sangat Tinggi (3,1819)		Sangat Tinggi (3,259 5)			Sanga t Tinggi	0	Sangat Tinggi	0	Sanga t Tinggi	0	
	Opini BPK	Huruf	N/A	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP	0	WTP	0	WTP	0
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Kabupaten/Ko ta	Lapor an Keua ngan Peme rinta h	Dokum en (Lapora n)		Sesuai	102.154.151 ,00	Sesu ai	128.441.8 46,00	Sesuai	804.200.875 ,00	Sesuai	102.154.1 51,00	Sesuai	128.44 1.846, 00	Sesua i	804.200.8 75,00	Sesua i	100	Sesuai	100	Sesuai	100

	daerah Kota Bima sesuai dengan SAP dan SPI																				
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Perse ntase menu runn ya temu an APIP dan BPK	%		0,53	1.913.712.887,00	0,94	1.785.580.637,00	0,88	1.656.583.000,00	53,13	1.913.712.887,00	94,12	1.785.580.637,00	71,88	1.654.837.403,00	10.000,00	100	10.000,00	100	8.145,97	99,89
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Perse ntase ASN APIP yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis, subta si,pe ngenj angan, dan profe si	ASN APIP		0,83	142.535.998,00	0,65	210.435.466,00	0,67	231.544.172,00	82,5	142.535.998,00	64,17	210.435.466,00	100	218.970.472,00	10.000,00	100	9.916,55	100	14.999,25	94,57
Program perencanaan pembangunan daerah	Perse ntase sasaran Renst ra	%			2.058.737.718,00	100	1.702.363.896,00	100	4.125.442.750,00	1	2.058.737.718,00	100	1.558.117.696,00	83,33	3.670.243.859,00	0	100	100	91,53	83,33	88,97

	SKPD yang selaras dengan Sasaran RPJMD																				
	Perse ntase progr am RKPD yang selaras dengan RPJMD	%				100		100		1		100		100		0	0	100	0	100	0
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK atas audit laporan keuangan daerah	WTP		WTP	6.267.684.547,00	WTP	7.207.723.264,00	WTP	6.322.686.693,00	WTP	6.267.684.547,00	WTP	7.207.723.264,00	WTP	5.349.243.846,00	WTP	100	WTP	100	WTP	84,6
Program Peningkatan Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah	Opini BPK atas audit laporan keuangan daerah	WTP		WTP	1.237.176.419,00	WTP	1.134.252.815,00	WTP	1.162.116.600,00	WTP	1.237.176.419,00	WTP	1.134.252.815,00	WTP	1.128.558.329,00	WTP	100	WTP	100	WTP	97,11
Program Peningkatan Kompetensi Aparatur	Perse ntase ASN yang memenuhi syara	%			909.307.650,00	0,02	1.526.948.302,00	0,04	582.635.000,00	0,3	909.307.650,00	30,1	1.526.948.302,00	30	279.620.600,00	0	100	129.741,38	100	74.441,69	47,99

	t komp etens i																				
Program Pembangunan Sistem Informasi yang Terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian Kota Bima	Caku panm statis tic kepe gawa ian yang diter bitka n oleh BKD	%		90	181.893.340 ,00	100	362.815.1 34,00	100	154.366.000 ,00	50	181.893.3 40,00	50	362.81 5.134, 00	50	362.815.1 34,00	55,56	100	50	100	50	235, 04
Sasaran 3.1.2. Meningkatkan kemandirian keuangan daerah	Kontr ibusi PAD terha dap Pend apata n	Persen (%)	N/A	5,56	2.757.234.5 33,00	6,5	2.964.653 .763,00	7,19	1.640.412.1 00,00	6,01	2.818.044 .200,00	5,58	2.964. 653.76 3,00	6,41	2.174.553 .200,00	108,0 9	102,21	85,85	100	89,15	132, 56
Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Perse ntase penin gkata n PAD tiap tahu n	%		20	2.757.234.5 33,00	20	2.604.126 .763,00	20	1.183.322.1 00,00	20	2.818.044 .200,00	20	2.604. 126.76 3,00	20	1.685.603 .200,00	100	102,21	100	100	100	142, 45
Program Peningkatan Layanan Perpustakaan	Perse ntase pelay anan jasa perp arkira n	%		10		20	360.527.0 00,00	40	457.090.000 ,00	10		20	360.52 7.000, 00	40	488.950.0 00,00	100	0	100	100	100	106, 97
Sasaran 3.1.3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Rata- rata skor IKM	Angka	N/A	B (77,54)	12.138.714. 167,53	B (78,58)	24.588.00 1.357,62	B (80,00)	1.648.622.8 00,00	81	12.138.84 7.834,53	82,36		82,61		#VAL UE!	100	#VALUE!	0	#VAL UE!	0

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	Prosentase Puskesmas yang memiliki sarana prasarana Rawat Inap sesuai standar	%		14,29	9.500.769.462,53	28,57	20.729.546.229,62		0	14,29	9.500.903.129,53	28,57	20.729.546.229,62			100	100	100	100	0	0
Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rasio penduduk ber KTP-el per satuan penduduk	%		94,31	1.849.735.876,00	94,58	1.845.030.564,00	95,33	1.452.742.800,00	94,31	1.849.735.876,00	94,58	1.845.030.564,00	95,33	1.598.708.600,00	100	100	100	100	100	110,05
Pengembangan dan Pengelolaan Terminal	% ketersediaan layanan terminal sesuai kebutuhan	%		45	100.800.000,00	50	120.200.000,00		0	80	100.800.000,00	50	120.200.000,00			177,78	100	100	100	0	0
Pengembangan e-Government dan pelayanan TIK	Prosentase penyelenggaraan sistem E-	%				20	1.279.229.401,00					20	1.279.229.401,00			0	0	100	100	0	0

	governmen t																				
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan	Meni ngkat nya Kualit as Pelay anan Perizi nan	%		20	687.408.829 ,00	20	613.995.1 63,00	20	195.880.000 ,00	20	687.408.8 29,00	20	613.99 5.163, 00	20	260.600.0 00,00	100	100	100	100	100	133, 04
Misi 4. Mewujudkan Lingkungan yang Berkualitas dan Ramah, melalui Penyediaan Infrastruktur Pendukung Perkotaan yang terintegrasi dengan Pengurangan Resiko Bencana																					
Tujuan 4.1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang	Pers enta se Keta atan terh adap tata Ru ang	Angka	N/A	N/A	14.399.918. 169,40	74,12	13.497.73 1.204,23	76,4	11.602.126. 501,81		14.655.27 6.054,00										
Sasaran 4.1.1. Meningkatkan ketaatan terhadap rencana tata ruang	Perse ntase Ketaa tan terha dap tata Ru ang	Persen (%)	N/A	85	4.580.364.5 54,00	95	1.292.424 .466,00	95	3.997.344.6 00,00		4.580.364 .554,00	98,1		98,1		0	100	103,26	0	103,2 6	0
Program Perencanaan Tata Ruang	% keter sedia an doku men re nca na tata ru an g sesua i	%			1.177.265.3 94,00	20	786.241.8 66,00	20	609.869.030 ,00	100	1.177.265 .394,00	100	786.24 1.866, 00	100	594.482.2 00,00	0	100	500	100	500	97,4 8

	keten tuan																					
Program Pemanfaatan Ruang	% pema nfata an ruan g sesua i Renc ana Tata Ruan g	%			572.059.400 ,00	20	360.827.6 00,00	20	177.397.500 ,00	100	572.059.4 00,00	100	360.82 7.600, 00	100	156.207.7 52,00	0	100	500	100	500	88,0 6	
Program pengendalian pemanfaatan Ruang	kelay akan bang unan yang dapat diberi kan reko mend asi IMB dan SLF	%		0,04	244.419.100 ,00	0,04		0,05	217.025.000 ,00	1	244.419.1 00,00		1	168.950.0 00,00	2.538, 07	100	0	0	2.028, 40	77,8 5		
Program pengembang an Kawasan	Perse ntase masy araka t yang terke na relok asi akiba t progr am peme rinta	%		0	208.270.000 ,00	15,38	145.355.0 00,00	38,46	21.575.000, 00		208.270.0 00,00	100	145.35 5.000, 00	0,64	21.575.00 0,00	0	100	650,2	100	1,67	100	

	h daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni																				
Program Penataan Penguasaan Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Perse ntase asset tanah Pemerintah Kota yang berse tifikat	%		10		25		40		10		1,07		0,86		100		4,29		2,15	
	Perse ntase Tanah milik pemerintah yang tidak memiliki konflik	%		0	2.378.350.660,00	10	8.288.509.620,00	30	2.971.478.070,00		2.378.350.660,00	100	8.288.509.620,00	30	2.971.478.070,00	0	100	1.000,00	100	100	
Sasaran 4.1.2. Meningkatkan kualitas lingkungan	Indeks kualitas lingkungan	Angka	N/A	60	9.819.553.615,40	45	12.205.306.738,23	50	7.604.781.901,81	68,89	10.074.911.500,00	83,84		74,12		114,82	102,6	186,31	0	148,24	0

	hidup																				
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah mata air yang dilindungi	%		94	532.638.000,00	94	326.465.000,00	95	179.315.000,00	94	538.755.000,00	100	326.465.000,00	95	244.215.000,00	100	101,15	106,38	100	100	136,19
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Perseentase sumber mata air terlindungi	%		94	167.970.000,00	94	263.360.000,00	94	546.620.000,00	83,33	178.150.000,00	100	263.360.000,00	94	589.010.000,00	88,65	106,06	106,38	100	100	107,75
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Peningkatan jumlah lembaga masyarakat yang peduli akan kelestarian SDA	kelompok masyarakat		5	81.450.000,00	10		15	0	5	81.650.000,00	10		15		100	100,25	100	0	100	0
Program Pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya	% jaringan irigasi yang berfungsi baik	%	56,25	43	4.461.409.532,23	0,47	5.420.319.162,23	0,5	902.960.000,00	100	4.691.312.425,00	1	5.420.319.162,23	1	902.960.000,00	232,56	105,15	212,77	100	200	100
Program pembangunan saluran Drainase dan	% saluran drain	%	71,04	74,85	4.576.086.083,17	2,82	6.195.162.576,00	3,52	5.975.886.901,81	100	4.585.044.075,00	100	4.485.024.576,00	100	5.975.886.901,81	133,6	100,2	3.546,10	72,4	2.840,91	100

Gorong-gorong	ase yang berfungsi baik																				
Tujuan 4.2. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan kawasan permukiman berbasis mitigasi bencana	Persentase luas kawasan permukiman layak	Persen	N/A	93,97	147.155.723.953,02	95,47	102.880.354.912,88	96,97	100.955.336.857,58		116.863.283.938,00										
Sasaran 4.2.1. Meningkatkan kualitas kawasan permukiman	Luas kawasan kumuh	Persen (%)	N/A	0,23	31.732.351.562,00	0,16	35.880.624.125,00		41.224.640.273,00		33.382.705.878,00	6,23		13,37		0	105,2	3.945,54	0	0	0
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Prosentase kelurahan yang melaksanakan STBM	%		90	189.422.500,00	92	188.416.750,00	94	100.670.000,00	90	189.422.500,00	92	188.416.750,00	100	145.208.000,00	100	100	100	100	106,38	144,24
Program pembangunan turap/talud/bronjong	% Panjang sungai yang berfungsi baik	%	50,89	50,89	5.338.603.701,58	2,88	6.110.167.356,00	4,81	4.012.295.000,00	100	5.346.745.708,00	2,88	6.110.167.356,00	4,81	4.012.295.000,00	196,5	100,15	100	100	100	100
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	% cakupan Layanan air minum perpi	%	58,7	57,09	19.966.532.686,02	6,13	11.710.809.734,08	6,44	12.088.753.223,47	100	20.170.891.316,00	6,13	11.710.809.734,08	6,44	12.088.753.223,47	175,16	101,02	100	100	100	100

	paan di luar kawasan kumuh																				
	% cakupan Layanan air limbah	%	71,81	70,75		4,19		4,4		70,75		4,19		4,4		100	0	100	0	100	0
Program pembangunan sarana dan Prasarana kelurahan	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana di kelurahan	%	65,34	65,34	145.419.400,00	0	9.494.788.325,00	0,01	16.932.142.400,00	65,34	145.419.400,00	0	9.199.650.325,00	0,01	16.932.142.400,00	100	100	0	96,89	100	100
Program Pengembangan Perumahan	Perentase RTLH yang ditan gani di luar Kawasan Kumuh	%		33,33	1.673.512.104,00	45	714.480.350,00	58,33	4.427.675.600,00	33,33	1.673.512.104,00	45	714.480.350,00	58,33	4.427.675.600,00	100	100	100	100	100	100
	Perentase RTLH yang ditan gani pada Kawasan Kumuh			20		34		50		20		34		50		100	0	100	0	100	0

	uh																				
Program Perencanaan Pemukiman Kumuh	Perse ntase luas kawa san perm ukim an kumu h yang ditan gani	%		30,39	60.966.500, 00	59,37	479.530.2 30,00	88,34	264.510.000 ,00	30,39	60.966.50 0,00	100	479.53 0.230, 00	100	294.198.0 00,00	100	100	168,44	100	113,2	111, 22
Program Pengembanga n Kinerja Pengelolaan Persampahan	Perse ntase pena ngan an samp ah	%		47	4.357.894.6 70,00	0,52	7.182.431 .380,00	60	3.398.594.0 50,00	47	5.795.748 .350,00	0,52	7.494. 181.40 0,00	60	3.398.594 .050,00	100	132,99	100	104,3 4	100	100
Sasaran 4.2.2. Meningkatn ya kualitas infrastruktur daerah	Jalan dala m kondi si baik	Persen (%)	N/A	31,45	90.195.630. 330,65	38,81	50.916.75 8.175,79	45,01	27.887.848. 669,59	72,92	91.729.12 2.019,00	69,07		72,09		231,8 6	101,7	177,97	0	160,1 6	0
	Inde ks kone ktifita s trans porta si	Angka	N/A	0		0,5		1								0	0	0	0	0	0
Program Peningkatan Jalan & Jembatan	% Jalan Kota dala m kondi si mant ap	%	31,45	38,87	56.366.443. 897,74	5,81	18.705.79 9.930,00	9,69	2.674.933.0 99,52	38,87	57.813.77 0.408,00	5,81	18.705 .799.9 30,00	9,69	13.433.89 8.000,00	100	102,57	100	100	100	502, 21
Program	%	%	98,61			5,95	16.412.81		6.662.968.3			5,95	16.258		10.588.48	0	0	100	99,06	0	158,

pembangunan jalan dan jembatan	konektivitas jalan kota						9.460,00		79,59				.824.460,00		5.000,00						92
Program rehabilitasi/peeliharaan jalan dan jembatan	% jalan kota kondisi baik	%		2,82	5.306.553.419,48	2,82	426.979.000,00	0,29	2.865.718.000,00	0,84	5.372.472.022,00	69,07	426.979.000,00	71,18	3.383.369.000,00	29,65	101,24	2.449,29	100	24.544,83	118,06
Program pembangunan infrastruktur perdesaan	% jalan lingkungan di luar kawasan kumuh dalam kondisi baik	%	65,34	65,34	19.236.075.124,43	0	9.317.424.813,00	0	8.872.631.370,48	100	19.236.075.124,00	100	9.317.424.813,00	100	8.872.631.370,48	153,05	100	0	100	0	100
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	%penerangan jalan umum yang tersedia dan berfungsi baik sesuai kebutuhan	%	100	108,43	9.217.749.389,00	6,47	5.812.845.972,79	12,93	6.724.012.820,00	100	9.237.995.965,00	100	5.812.845.973,00	100	6.724.012.820,00	92,23	100,22	1.545,60	100	773,4	100
Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan	% ketersediaan sarpras	%	30		68.808.500,00	40	240.889.000,00	55	87.585.000,00	0,9	68.808.500,00	0,45	240.889.000,00	55	87.585.000,00	3	100	1,13	100	100	100

	perhubungan sesuai kebutuhan sistem																				
Sasaran 4.2.3. Meningkatkan Ketahanan terhadap bencana	Indeks ketangguhan bencana	Angka	N/A	75	25.227.742.060,36	80	16.082.972.612,01	85	31.842.847.914,52	80	25.134.161.919,00	84		74		106,67	99,63	105	0	87,06	0
Program Kesiapsiagaan dan Pencegahan	Cakupan sistem kesiapsiagaan terhadap bencana	%		56,51	667.042.341,00	61,25	1.143.783.632,00	82,88	1.042.926.800,00	56,51	663.372.200,00	61,25	1.143.783.632,00	82,88	1.074.435.500,00	100	99,45	100	100	100	103,02
Program Peningkatan Pelayanan Kedaruratan dan Logistik	Cakupan pemenuhan layanan kedaruratan dan logistik	%		100	168.610.000,00	100	586.711.708,00	100	502.648.400,00	100	168.610.000,00	100	586.711.708,00	100	502.648.400,00	100	100	100	100	100	100
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Cakupan sarana dan prasarana fisik, ekonomi dan	%	1,57	7,96	24.392.089.719,36	57,61	14.352.477.272,01	79,15	30.297.272.714,52	7,96	24.302.179.719,00	57,61	14.352.477.272,01	79,15	30.276.072.714,52	100	99,63	100	100	100	99,93

	sosial yang telah direhabilitasi/rekonstruksi pascabencana																				
Misi 5. Mewujudkan Masyarakat yang Berkarakter dan Agamais																					
Tujuan 5.1. Meningkatkan masyarakat yang tentram, bermoral dan agamais	Indeks Ketentraman	Nilai	N/A	0,79	8.048.699.447,72	0,81	8.914.460.784,00	0,84	7.274.588.576,00		5.766.186.996,72										
Sasaran 5.1.1. Meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban	Angka kriminalitas yang tertangani	Persen (%)	N/A	85	3.516.145.089,00	85	4.909.724.883,00	90	4.935.224.000,00	99	2.842.082.089,00					116,47	80,83	0	0	0	0
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%		0,8	1.443.515.500,00	0,8	1.302.392.000,00	0,85	1.227.753.800,00	0,8	1.428.825.000,00	0,8	1.285.633.000,00	0,9	1.227.753.800,00	100	98,98	100	98,71	105,88	100
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Persentase Peningkatan PERDARA	%		1	610.344.089,00	1	332.232.000,00	1	340.195.000,00	1	610.344.089,00	1	400.317.000,00	1	340.195.000,00	100	100	100	120,49	100	100

Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketertarikan, keamanan, keindahan)	%		0,9	24.291.000,00	0,9	25.171.000,00			0,9	25.171.000,00	0,9	25.171.000,00			100	103,62	100	100	0	0
Program pengembangan wawasan kebangsaan	Konflik Sosial	kasus		0	272.111.000,00	0	500.028.460,00	0	351.482.000,00	0,81	290.750.000,00	0	500.028.460,00	0	351.482.000,00	0	106,85	0	100	0	100
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Persepsi pembina terhadap aparat dan masyarakat dalam mengantisipasi potensi konflik	%		10	1.165.883.500,00	12	2.749.901.423,00	14	3.015.793.200,00	10	486.992.000,00	12	2.158.717.423,00	14,3	2.436.290.400,00	100	41,77	100	78,5	102,14	80,78

Sasaran 5.1.2. Meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal	Cakupan nilai budaya, adat dan tradisi yang lestari	Persen (%)	N/A	95	1.708.751.157,72	95	810.469.356,00	95	369.308.476,00	95	1.708.751.157,72					100	100	0	0	0	0
Program Pengembangan Nilai Budaya	Cakupan Pengembangan Budaya	%		20		25	210.020.500,00	30	250.308.476,00	20		25	210.020.500,00	30	109.942.476,00	100	0	100	100	100	43,92
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Cakupan Pengelolaan Keragaman Budaya	%		50		60	113.385.000,00		0	50		60	113.385.000,00		0	100	0	100	100	0	0
Program Pembangunan Sarana Prasarana Seni dan Budaya	Cakupan Pengembangan sarana dan prasarana budaya	%		30	1.708.751.157,72	35	810.469.356,00	40	119.000.000,00	30	1.708.751.157,72	35	810.469.356,00	40	210.400.000,00	100	100	100	100	100	176,81
Sasaran 5.1.3. Meningkatkan pengamalan ajaran agama	Indeks kerukunan umat beragama	Angka	N/A	N/A	2.823.803.201,00	90	3.194.266.545,00	90	1.970.056.100,00		1.215.353.750,00					#VALUE!	43,04	0	0	0	0

Program Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan	Jumlah lembaga keagamaan yang aktif	lembaga		100	2.823.803.201,00	100	3.170.266.545,00	100	1.970.056.100,00	100	1.215.353.750,00	100	1.440.964.000,00	100	1.934.311.600,00	100	43,04	100	45,45	100	98,19
Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-Nilai Agama	meningkatkan pengamalan dan pengembangan nilai-nilai agama	%		100		100	24.000.000,00	100	0	100		100	24.000.000,00	100		100	0	100	100	100	0

Sumber: Data diolah

Tabel 2.82. Evaluasi terhadap Hasil RPJMD Kota Bima Periode Tahun 2021-2022

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						REALISASI TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN KE-				TINGKAT CAPAIAN TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN (%)				TARGET KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD		URUSAN
			TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA TAHUN						REALISASI TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN				TINGKAT CAPAIAN TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN (%)						
			2021		2022		2023		2021		2022		2021		2022				
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Misi 1. Mewujudkan Masyarakat Berkualitas yang Berdaya Saing																			
Tujuan 1.1. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	73,24	139.27.0 91.506	73,24	36.615.0 36.277	74,49	150.718. 435.468, 88	76,11	134.316. 073.435	76.84	29.433.0 26.270	108,06	124,34			74.49	437.965. 526.986, 00	
Sasaran 1.1.1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	69,95	73.000.9 71.256,0 0	70,15	25.045.4 67.471,0 0	70,35	77.523.3 37.782,3 1	70,50	88.646.5 71.197,0 0	70.83	20.885.9 98.297	100,79	122,68	100,50		70,35	225.861. 895.325, 99	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penurunan Angka kesakitan	unit	4/7	69.446.1 12.846,0 0	4/7	24.475.2 78.671,0 0	4/7	73.675.3 81.118,3 2	4/7	82.726.7 48.036,0 0	4/7	20.325.3 00.329	100	119,12	100	83	13	214.650. 990.195, 70	Kesehatan
	Penurunan Angka Kematian Bayi	KH	2/100 0		1/100 0		0/100 0		2/100 0				100	0			0/10 00		
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang memenuhi Standar	persen	95	404.705. 800,00	95	22.692.0 00,00	92	429.352. 383,22	95	3.091.36 4.143,00	91	22.290.4 00	100	763,85	95,7 9	98	92	1.250.90 5.157,22	Kesehatan
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Jumlah Fasilitas Pelayanan Farmasi dan Alkes yang aman	persen	95	591.216. 100,00	95	111.433. 000,00	100	627.221. 160,49	87	591.216. 100,00	95	107.542. 600	91,58	100	94,7 4	97	100	1.827.38 9.843,49	Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN	Persentase Keluarga yang	persen	76,25	525.307. 810,00	96	100.581. 300,00	85,25	557.299. 055,63	100	461.220. 200,00	100	98.693.9	100	87,8	104, 17	98	85,2 5	1.623.67 3.909,93	Kesehatan

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						REALISASI TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN KE-				TINGKAT CAPAIAN TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN (%)				TARGET KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD		URUSAN
			TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA TAHUN						REALISASI TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN				TINGKAT CAPAIAN TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN (%)						
			2021		2022		2023		2021		2022		2021		2022				
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	menerapkan PHBS											00							
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK, PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN KB	Menurunnya angka TFR (Total Fertility Rate)	persen	80	371.233.700,00	80	274.680.000,00	80	242.049.215,14	80	367.453.118,00	80	273.949.478	100	98,98	100	100	2	705.203.053,14	Pengendalian Penduduk dan KB
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase penurunan angka unmet need	persen	25	1.662.395.000,00	25	60.802.500,00	25	1.992.034.849,51	25	1.408.569.600,00	25	58.221.590	100	84,73	100	96	5	5.803.733.166,51	Pengendalian Penduduk dan KB
	Persentase peningkatan angka prevalensi pengguna MCPR (Modern Contraceptive Prevalensi Rate)		0,68		0,69		70		66,99				9.851,47	0			70		
	Persentase penurunan ASFR (Age Spesific Fertility Rate)		38/1000		37/1000		36/1000		36,15/1000				95,13	0			36/1000		
Sasaran 1.1.2. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Angka Partisipasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar	Persen (%)	99,29	58.230.252.167,00	99,79	2.457.196.270,00	100	62.735.901.963,91	99.17	38.499.006.013,00	98.00	2.297.963.079,00	102,73	132,56			100	181.631.081.882,32	

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						REALISASI TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN KE-				TINGKAT CAPAIAN TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN (%)				TARGET KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD		URUSAN
			TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA TAHUN						REALISASI TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN				TINGKAT CAPAIAN TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN (%)						
			2021		2022		2023		2021		2022		2021		2022				
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	(Wajardikdas)																		
	Persentase Peningkatan Mutu Pendidikan	Persen (%)	29,17		31.17		33.17		33		33		92,1		105.87		33,17		
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase sekolah yang terakreditasi A	Persen	100	45.997.403.029,00	100	621.464.000,00	88,56	49.174.210.507,23	86,56	26.575.230.763,00	100	619.247.000	100	57,78	100	99,64	88,56	143.267.572.115,00	Pendidikan
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase lembaga yang memenuhi kriteria layak anak	persen	42,86	173.218.700,00	47,62	150.476.100,00	54,76	247.198.187,20	42,86	151.392.900,00	47,62	144.337.900	100	87,40	100	95,92	100	720.204.427,20	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase pengaduan tindak kekerasan terhadap Anak yang ditangani	persen	100	406.771.000,00	100	627.667.200,00	100	599.992.419,36	100	276.815.200,00	100	531.613.279	100	71,92	100	84,70	100	599.992.419,36	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase sekolah yang melaksanakan mulok	Persen	100	43.845.000,00	100	80.714.200,00	100	224.194.692,50	100	43.845.000,00	100	75.472.000	100	100	100	93,51	100	653.184.442,50	Pendidikan
PROGRAM	Persentase	Persen	100	7.782.10	100	13.919.0	100	30.920.6	100	7.782.10	100		100	100	100		100	90.086.4	Pendid

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						REALISASI TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN KE-				TINGKAT CAPAIAN TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN (%)				TARGET KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD		URUSAN
			TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA TAHUN						REALISASI TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN				TINGKAT CAPAIAN TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN (%)						
			2021		2022		2023		2021		2022		2021		2022				
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Lembaga Pendidikan yang mendapatkan Izin			0,00		00,00		73,13		0,00		6.650.000				47,78		44,13	ikan
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan yang Representatif	persen	90	11.601.232.338,00	90	962.955.770,00	90	12.459.385.484,49	100	11.443.940.050,00	100	920.642.900	111	98,64	111,11	96	75	36.300.042.034,13	Perpustakaan
Sasaran 1.1.3. Meningkatnya Daya Beli masyarakat	Pengeluaran Per Kapita	Rp.000/tahun	11.125	7.114.478.703,00	11.225,00	8.149.141.416,00	11.335,00	9.084.161.938,36	11.135,00	6.006.903.082,00	11.395	5.313.962.672,00	114,57	85,57	101.51		11.335,00	26.466.430.516,79	
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Kualitas Sumber Daya Pengelola Koperasi	persen	100	379.327.500,00	100	192.838.800,00	100	226.781.909,33	100	362.500.356,00	100	187.422.739	100	95,56	100,00	97	100	660.722.220,33	Koperasi dan UKM
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya Produktifitas UKM	persen	100	16.256.500,00	100	60.911.600,00	100	24.789.519,85	100	11.340.000,00	100	58.609.500	100	69,76	100,00	96	100	72.223.514,85	Koperasi dan UKM
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Peningkatan Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	persen	100	1.071.013.800,00	100	263.434.110,00	100	1.271.566.307,88	100	1.068.827.000,00	100	255.403.447	100	89,36	100,00	97	100	3.704.669.903,88	Koperasi dan UKM
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Meningkatnya Pemenuhan Barang dan Jasa	persen	100	162.237.000,00	100	665.032.800,00	100	328.696.631,29	100	148.676.356,00	100	204.105.600	100	91,64	100,00	31	100	957.647.674,29	Perdagangan

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						REALISASI TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN KE-				TINGKAT CAPAIAN TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN (%)				TARGET KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD		URUSAN
			TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA TAHUN						REALISASI TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN				TINGKAT CAPAIAN TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN (%)						
			2021		2022		2023		2021		2022		2021		2022				
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Konsumen	persen	100	97.810.000,00	100	104.347.000,00	100	98.226.609,20	100	50.554.000,00	100	72.931.600	100	51,69	100,00	70	100	286.180.249,20	Perdagangan
PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase partisipasi perempuan dalam berorganisasi	persen	30	2.922.675.025,00	32	3.815.741.400,00	32	3.854.227.656,62	28	1.949.563.050,00	9,58	1.692.690.971	93,33	66,70	29,94	44	32	11.229.175.477,28	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produk Olahan	Ton	878	854.884.550,00	897	1.288.274.600,00	917,25	1.132.861.430,50	6765	832.994.800,00	5930	1.208.897.560	770,50	97,44	661,09	94	912,49	3.300.557.447,00	Kelautan dan Perikanan
	Angka Konsumsi Ikan (AKI)	Kg/Perkapita/Thn	42,65		45,2		47,8		101,2				237,28	0,00	0,00		47,8		
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan	persen	100	1.610.274.328,00	100	1.758.561.106,00	87	2.147.011.873,69	89	1.582.447.520,00	90	1.633.901.255	89,00	98,27	90,00	92,91	87	6.255.254.029,96	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
Sasaran 1.1.4. Meningkatnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	88,1	1.281.389.380,00	90,5	963.231.120,00	92,8	1.375.033.784,30	69,28	1.163.593.143,00	70,25	935.102.222	74,8	98,86	77,62431		63,65	4.006.119.260,90	
PROGRAM PENINGKATAN	Angka ketersediaan	kka/kap/hari	2.632,00	1.102.434.380,00	2.662,00	816.483.920,00	2.692,00	1.228.522.221,22	2.684,00	1.001.224.943,00	3.19	802.733.	101,98	95,2	120,14	98,	2.692,00	3.579.262.261,82	Pangan

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						REALISASI TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN KE-				TINGKAT CAPAIAN TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN (%)				TARGET KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD		URUSAN
			TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA TAHUN						REALISASI TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN				TINGKAT CAPAIAN TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN (%)						
			2021		2022		2023		2021		2022		2021		2022				
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	energi										8	300				32			
	Angka ketersediaan protein	gram/kap/hari	66,68		67,18		67,68	0	74,17		75,74		111,23	0	112,74		67,68		
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase kelurahan rawan/ rentan pangan yang ditangani	persen	25	115.543.000,00	20	68.033.200,00	20	21.461.158,28	33	113.228.200,00	92	66.184.461	165	571,17	460,00	97,28	20	62.526.434,28	Pangan
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Presentase bahan pangan yang aman konsumsi	persen	85	63.412.000,00	88	78.714.000,00	90	125.050.404,80	88	49.140.000,00	100	66.184.461	103,53	53,8	113,64	84,08	90	364.330.564,80	Pangan
Misi 2. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera melalui pemerataan pembangunan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Pengembangan Produk Unggulan;																			
Tujuan 2.1. Meningkatkan pemerataan ekonomi masyarakat	Indeks Gini	Nilai		8.357.559.890,00		7.137.703.942,00		9.146.042.849,82	0,41	6.943.408.771,00	0.429	6.923.143.929	0	85,76			0,35	26.646.718.677,07	Lintas urusan
Sasaran 2.1.1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan PDRB	Persen (%)	3,3	8.357.559.890,00	3,6	7.137.703.942,00	3,9	9.146.042.849,82	2,08	6.943.408.771,00	2.70	6.923.143.929,00	40,78	85,76	70.00	3.90	5,3	26.646.718.677,07	
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Porsentase peningkatan invetasi menegah keatas yang berizin	persen	100	41.693.800,00	0	0,00	100	44.232.952,42	100	39.889.600,00	0	-	100	95,67	0	-	10	128.871.366,42	Penanaman Modal
PROGRAM	Porsentase	persen	100	365.406.	100	398.133.	100	409.499.	100	364.387.	114		100	99,72	114		100	1.193.06	Penan

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						REALISASI TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN KE-				TINGKAT CAPAIAN TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN (%)				TARGET KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD		URUSAN
			TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA TAHUN						REALISASI TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN				TINGKAT CAPAIAN TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN (%)						
			2021		2022		2023		2021		2022		2021		2022				
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	peningkatan investasi yang telah memenuhi ketentuan perizinan			400,00		000,00		973,70		281,00		371.427.800				93,29		5.763,70	aman Modal
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Cakupan pelaksanaan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	hari	100	15.075.000,00	100	41.841.400,00	100	15.993.067,50	100	15.075.000,00	100	41.823.400	100	100	100	99,96	100	46.595.317,50	Penanaman Modal
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi Perikanan Tangkap	Ton	2.201,90	1.124.123.835,00	2.204,25	221.243.900,00	2.267,30	1.097.953.311,67	2.262,56	1.083.645.563,00	2378,10	216.584.360	102,8	104,71	107,89	97,89	2.267,30	3.198.853.700,67	Kelautan dan Perikanan
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi Perikanan Budidaya	Ton	860,5	221.243.900,00	872,2	274.056.500,00	875,5	587.014.556,97	794,13	216.584.360,00	809,86	244.365.380	92,53	120,45	92,85	89,17	875,5	1.710.249.122,57	Kelautan dan Perikanan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase penyediaan sarana pertanian sesuai anjuran	persen	100	688.576.860,00	100	450.276.600,00	100	730.511.190,77	100	685.872.625,00	100	448.878.900	100	99,61	100	100	100	2.128.322.216,57	Pertanian
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA	Persentase peningkatan pemanfaatan prasarana dan	persen	60	20.020.200,00	60	20.808.700,00	62	21.239.430,18	100	15.234.000,00	60	20.558.700	166,67	76,09	100	99	62	61.880.436,18	Pertanian

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						REALISASI TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN KE-				TINGKAT CAPAIAN TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN (%)				TARGET KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD		URUSAN
			TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA TAHUN						REALISASI TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN				TINGKAT CAPAIAN TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN (%)						
			2021		2022		2023		2021		2022		2021		2022				
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
PERTANIAN	sarana pertanian dalam kondisi baik (%)																		
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan ternak yang terinfeksi PHMS (%)	persen	0,12	156.221.185,00	0,13	198.718.791,00	0,14	165.735.055,17	100	116.831.190,00		196.815.100	83.333,33	74,79	0	99	0,14	482.864.060,72	Pertanian
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase penanganan terhadap DPI	Nilai	50	491.492.320,00	40	189.517.000,00	52	521.424.202,29	85	502.465.100,00	40	187.606.000	170	102,23	100	99	52	1.519.153.611,89	Pertanian
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Cakupan pelayanan proses rekomendasi teknis bidang pertanian	persen	50	76.755.800,00	51	46.367.800,00	52	81.430.28,22	100	32.169.200,00	100	43.388.000	200	41,91	196,0784	94	52	237.244.502,22	Pertanian
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan kelas kelompok tani	persen	20	90.819.700,00	21	90.267.000,00	22	96.350.619,73	100	74.903.900,00	21	89.704.000	500	82,48	100	99	22	280.714.610,73	Pertanian
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Meningkatnya Pembangunan Industri Kota Bima	persen	26	744.977.900,00	46,30	852.262.600,00	28	790.347.054,11	37,72	631.974.000,00	59,29	801.438.000	145,08	84,83	128,06	94	28	2.302.652.191,11	Perdagangan
PROGRAM PENGENDALIAN IJIN USAHA INDUSTRI	Persentase Capaian Penerbitan	persen	75	22.293.000,00	80	22.961.790,00	85	23.650.643,70	75	22.293.000,00			100	100			85	68.905.433,70	Industri

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						REALISASI TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN KE-				TINGKAT CAPAIAN TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN (%)				TARGET KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD		URUSAN
			TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA TAHUN						REALISASI TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN				TINGKAT CAPAIAN TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN (%)						
			2021		2022		2023		2021		2022		2021		2022				
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
KABUPATEN/KOTA	Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah																		
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase pengembangan ODTW	persen	30	2.888.270.330,00	50	3.326.878.361,00	32	3.064.165.993,10	10	2.507.329.794,00	50	3.306.057.500	33,33	86,81	100	99,37	32	8.927.354.763,00	Pariwisata
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase jumlah kunjungan wisatawan	persen	10	827.589.860,00	10	715.613.901,00	10	877.990.082,47	10	294.181.558,00	10	668.136.189	33,33	35,55	100	93,37	32	2.557.997.498,27	Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM kepariwisataan yang terlibat	persen	15	582.999.800,00	15	288.756.599,00	15	618.504.487,82	30	340.572.600,00	15	286.360.600	100	58,42	100	99,17	32,5	1.801.994.081,82	Pariwisata
Tujuan 2.2. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat	Angka kemiskinan	Persentase	8,74	7.406.391.348,00	8,67	14.792.314.713,37	8,67	8.366.823.620,51	8,88	1.902.773.725,00	8.80	7.908.807.861,00	110,45	7,95	101.50	53.47	8,20	24.376.316.487,15	
Sasaran 2.2.1. Menurunnya angka kemiskinan	Persentase Penurunan Angka Kemiskinan	Persen (%)	8,74	6.760.101.148,00	8,67	12.931.756.613,37	8,67	7.516.092.505,13	8.88	1.275.832.850,00	8.80	7.315.355.861,00	101.60	18.87	101.50	56.57	8,20	21.897.907.742,57	
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PMKS yang terlatih	persen	70	157.500.000,00	75	312.384.500,00	80	521.750.620,00	84,97	106.963.900	82,06	297.606.500	121,39	67,91	109,4133	95,27	80	1.520.104.620,00	Sosial
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan	persen	50	926.281.119,00	30	729.126.009,00	60	992.134.816,14	47,62	853.565.300	58	701.982.111	95,24	92,15	193,3333	96,28	60	2.890.554.720,71	Sosial

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						REALISASI TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN KE-				TINGKAT CAPAIAN TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN (%)				TARGET KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD		URUSAN
			TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA TAHUN						REALISASI TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN				TINGKAT CAPAIAN TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN (%)						
			2021		2022		2023		2021		2022		2021		2022				
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Pelayanan Rehabilitasi Sosial																		
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	persen	50	171.950.200,00	30	6.131.778.400,00	80	161.783.218,58	30,00	134.618.000	55,64	6.039.787.250	60,00	78,29	185,4667	98,50	80	471.350.504,58	Sosial
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Presentase penurunan keluarga Pra Sejahtera dan Pra Sejahtera 1	persen	2,50	181.585.650,00	2,00	276.000.000,00	6,9	193.482.114,91	2,34	180.685.650	2,00	275.980.000	93,60	99,50	100	99,99	6,9	563.704.278,41	Pengendalian Penduduk dan KB
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	persen	100	5.322.784.179,00	100	5.482.467.704,37	100	5.646.941.735,50					0,00	0,00	0	0,00	100	16.452.193.618,87	Unsur Kewilayahan
Sasaran 2.2.2. Meningkatnya kesempatan kerja	Persentase Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen (%)	3,85	646.290.200,00	3,70	1.860.558.100,00	3,55	850.731.115,38	3.56	626.940.875,00	3.73	593.452.000,00	92.47	97.01	100.81	31.90	3,55	2.478.408.744,58	
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Keseuaian Perencanaan Tenaga Kerja dengan Kebijakan Ketenagakerja	persen	95	77.885.000,00	95	18.518.000,00	95	3.149.843,00	95	75.505.000,00	93,75	18.065.000	100	96.94	98.68	97.55	95	9.006.393,00	Tenaga Kerja

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						REALISASI TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN KE-				TINGKAT CAPAIAN TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN (%)				TARGET KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD		URUSAN
			TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA TAHUN						REALISASI TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN				TINGKAT CAPAIAN TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN (%)						
			2021		2022		2023		2021		2022		2021		2022				
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	an																		
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Produktivitas Tenaga Kerja	Rupiah	37	353.096.600,00	38 juta	493.898.200,00	40 Juta	605.344.235,50	33,5	354.502.375,00	43,72	491.592.000,00	90,54	62,13			40 Juta	1.763.652.085,50	Tenaga Kerja
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	persen	97	130.741.600,00	98	1.263.949.000,00	98	125.567.742,08	94,81	125.683.000,00			97,74	106,19			98	365.837.811,28	Tenaga Kerja
	Tingkat kepuasan pelayanan ketenagakerjaan	persen	95		96		97		91,00				95,79	0			97		
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang melaksanakan K3	persen	20	84.567.000,00	25	84.192.900,00	30	116.669.294,80	17,92	71.250.500,00	16,36	83.795.000	89,6	64,79			30	339.912.454,80	Tenaga Kerja
	Persentase peserta BPJS Ketenagakerjaan	persen	70		75		80		55,00		44,10		78,57	0			80		
	Persentase Perusahaan yang melaksanakan Upah Minimum Kota (UMK)	persen	25		30		35		15,24		18,40		60,8	0			35		
Misi 3. Menghadirkan Penyelenggaraan																			

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						REALISASI TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN KE-				TINGKAT CAPAIAN TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN (%)				TARGET KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD		URUSAN
			TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA TAHUN						REALISASI TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN				TINGKAT CAPAIAN TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN (%)						
			2021		2022		2023		2021		2022		2021		2022				
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Pemerintahan dengan mengedepankan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.																			
Tujuan 3.1. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	60	12.998.326.295,00	65	12.234.036.876,75	70	15.960.659.227,60		14.315.901.407,00	55.17	8.563.984.681,00	0	0	84.88	70.00	70,01	46.500.896.980,45	
Sasaran 3.1.1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	Huruf dan Angka	B (68,00)	10.191.478.806,00	B (69,00)	9.689.902.945,75	BB (70,01)	14.169.012.368,49	B (68,69)	11.818.267.093,00	B (68.17)	6.353.364.453,00	101.01	84,89	98.78		BB (80,01)	41.280.988.151,34	Lintas urusan
	Skor LPPD	Angka	Sangat Tinggi (3,2100)		Sangat Tinggi (3,2200)		Sangat Tinggi (3,2300)		Sangat Baik (3,259)		Sangat Baik (3.259)*		Sangat Tinggi (3.2300)	0	101.21	65.57	Sangat Tinggi (3,2300)		Lintas urusan
	Opini BPK	Huruf	WTP		WTP		WTP		WTP		N/A		WTP	0			WTP		Lintas urusan
PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	persen	100	443.393.200,00	100	459.194.394,00	100	472.970.225,82	100	443.079.772			100	99,93			100	1.377.984.419,82	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang memenuhi syarat kompetensi teknis dan manajerial	persen	100	1.602.630.880,00	42	2.669.187.011,00	50	2.749.262.621,33	100	1.531.614.531,00	100		100,00	95,57			46,46	8.009.893.332,33	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						REALISASI TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN KE-				TINGKAT CAPAIAN TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN (%)				TARGET KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD		URUSAN
			TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA TAHUN						REALISASI TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN				TINGKAT CAPAIAN TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN (%)						
			2021		2022		2023		2021		2022		2021		2022				
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase OPD yang tidak mendapat temuan bersifat materiil	persen	60,98	638.492.000,00	52,38	702.843.700,00	80	809.255.368,72	76,00	637.552.559	57,14	698.767.375	124,63	99,85			80	2.357.740.992,72	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
	Persentase tindak lanjut penyelesaian temuan hasil pemeriksaan APIP dan BPK	persen	90		84,76		92		65,63		93,37		72,92	0			92		
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Level Hasil Quality Assurance Perwakilan BPKP Provinsi NTB Terhadap Maturitas SPIP Kota Bima	Level	berkembang (2,80)	35.849.000,00	berkembang	39.319.900,00	berkembang	61.923.884,28	berkembang (2,4)	35.803.000		38.540.403	85,71	99,87			Terdefinisi	180.413.360,28	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
	Level Kapabilitas APIP	Level	Integrated		Integrated		Integrated		Integrated		Integrated						Integrated		
	Nilai SAKIP	Nilai	B (65,58)		BB		BB		B (68,69)		B (68,17)						A (80,01)		
	Persentase Pengaduan Masyarakat yang	persen	100		100		100		100		100			0			100		

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						REALISASI TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN KE-				TINGKAT CAPAIAN TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN (%)				TARGET KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD		URUSAN
			TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA TAHUN						REALISASI TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN				TINGKAT CAPAIAN TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN (%)						
			2021		2022		2023		2021		2022		2021		2022				
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	ditindaklanjuti																		
	Persentase capaian pencegahan elemen-elemen risiko korupsi	persen	77		82		85						0	0			85		
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian kinerja pengendalian perencanaan pembangunan daerah	persen	100	273.335.500,00	78,97	255.445.000,00	100	289.981.631,95	100	194.747.514,00	96,61	246.777.401	100,00	71,25	122,34	96,61	100	844.852.696,95	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase PD yang mengelola keuangan dengan baik	persen	100	2.713.707.752,00	100	2.617.507.752,00	100	6.052.663.792,32	100	5.079.137.766,00	100	2.543.542.289	100,00	187,17	100,00	97,17	100	17.634.252.536,22	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase PD yang mengelola BMD dengan baik	persen	100	585.510.980,00	95	585.510.980,00	100	347.624.784,73	100	397.453.848,00	100	561.160.488	100,00	67,88	105,26	95,84	100	1.012.794.275,73	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Peresentase program dan kegiatan yang diakomodir dalam RPKD	persen	100	860.797.800,00	78,97	371.380.000,00	100	913.220.386,02	100	1.104.171.640,00	96,12	344.990.531	100,00	128,27	121,72	92,89	100	2.660.639.920,02	Unsur Pendukung Urusan Pemer

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						REALISASI TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN KE-				TINGKAT CAPAIAN TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN (%)				TARGET KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD		URUSAN
			TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA TAHUN						REALISASI TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN				TINGKAT CAPAIAN TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN (%)						
			2021		2022		2023		2021		2022		2021		2022				
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
DAERAH																			ntahan
	Persentase renja perangkat daerah yang diakomodir dalam RKPD	persen	100		100		100		100		100		100	0			100		
	Persentase keselarasan antar bab dalam setiap dokumen perencanaan	persen	100		100		100		100		100		100	0			100		
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan capaian pelaksanaan urusan pemerintahan umum	persen	80	6.666.125,00	80	6.866.108,75	80	7.072.092,01					0	0			80	20.604.325,76	Unsur Kewilayahan
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase jumlah layanan informasi dan komunikasi publik yang dimanfaatkan	persen	70	1.479.435.150,00	2,3	1.252.892.500,00	100	741.166.488,45	70	1.292.468.898,00	1,91	1.190.801.800	100,00	87,36	83,04	95,04	100	2.159.366.103,45	Komunikasi dan Informasi, Statistik, Kearsipan
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Perangkat Daerah yang	persen	75	1.551.660.419,00	2,3	729.755.600,00	100	1.723.871.092,86	70	1.102.237.565,00	1,91	728.784.166	93,33	71,04	83,04	99,87	100	5.022.446.188,06	Komunikasi dan

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						REALISASI TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN KE-				TINGKAT CAPAIAN TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN (%)				TARGET KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD		URUSAN
			TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA TAHUN						REALISASI TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN				TINGKAT CAPAIAN TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN (%)						
			2021		2022		2023		2021		2022		2021		2022				
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	telah menerapkan E-government dan pelayanan TIK																		Informatika, Statistik, Kearsipan
Sasaran 3.1.2. Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Kontribusi PAD terhadap APBD	Persen (%)	5,02	1.445.986.289,00	5,12	1.290.672.359,00	5,22	467.026.851,84	6,2	1.136.773.114,00	8.99	1.091.077.943,00	101,64	100	175.59	84.53	6,02	1.360.668.579,84	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Objek Pajak Daerah Yang dilakukan Pendataan dengan baik Tiap Tahunnya	persen	100	1.445.986.289,00	100	1.290.672.359,00	100	467.026.851,84	100	1.136.773.114,00	100	1.091.077.943	100,00	78,62	100,00	84,54	100	1.360.668.579,84	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
Sasaran 3.1.3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Rata-rata skor IKM	Angka	B (84,50)	1.360.861.200,00	B (85,00)	1.253.461.572,00	B (85,50)	1.324.620.007,27	B (83,42)	1.360.861.200,00	B (86.89)	1.119.542.285,00	98.72	100	102.22	89.32	A (88,00)	3.859.240.249,27	
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Pendaftaran Penduduk	persen	98	600.459.400,00	98	463.461.900,00	97,5	486.385.359,37	97	600.459.400,00	97	455.187.525	98,98	100,00	98,98	98,21	97,5	1.417.069.004,87	Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Penerbitan Akta Kelahiran dan Kematian Per Tahun	persen	80	104.723.100,00	85	126.470.100,00	100	130.882.702,55	80	104.723.100,00	85	126.470.100	100,00	100,00	100,00	100,00	100	381.322.787,55	Kependudukan dan Pencatatan

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						REALISASI TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN KE-				TINGKAT CAPAIAN TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN (%)				TARGET KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD		URUSAN
			TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA TAHUN						REALISASI TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN				TINGKAT CAPAIAN TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN (%)						
			2021		2022		2023		2021		2022		2021		2022				
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																			Sipil
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Informasi Administrasi Kependudukan	persen	89	352.097.300,00	90	371.866.400,00	91	385.282.438,09	94	352.097.300,00	90	364.565.500	105,62	100,00	100,00	98,04	91	1.122.508.707,59	Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Perkembangan Kependudukan	persen	90	13.262.000,00	90	15.855.000,00	95	14.069.655,80	90	13.262.000,00	90	15.855.000	100,00	100,00	100,00	100,00	100	40.991.515,80	Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rata-rata Lama Proses penyelesaian Pelayanan perizinan	hari	1	179.977.000,00	1	162.155.500,00	1	190.937.599,30	1	179.977.000,00	1	157.464.160	100,00	100,00	100,00	97,11	1	556.290.909,30	Penanaman Modal
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat kepuasan masyarakat kelurahan terhadap pelayanan publik	persen	80	110.342.400,00	80	113.652.672,00	80	117.062.252,16	80	110.342.400,00			100,00	100,00	0,00	-	80	341.057.324,16	Unsur Kewilayahan
Misi 4. Mewujudkan Lingkungan yang Berkualitas dan Ramah, melalui Penyediaan Infrastruktur Pendukung Perkotaan yang terintegrasi dengan Pengurangan Resiko Bencana																			
Tujuan 4.1.	Indeks	Angka	61	7.674.71	62	9.183.49	63	8.561.49	52,73	7.340.37	56.0	8.537.86	67,6	95.1	90.4	95.	87,0	24.943.6	

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						REALISASI TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN KE-				TINGKAT CAPAIAN TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN (%)				TARGET KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD		URUSAN
			TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA TAHUN						REALISASI TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN				TINGKAT CAPAIAN TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN (%)						
			2021		2022		2023		2021		2022		2021		2022				
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang	Kualitas Lingkungan Hidup			4.745,00		7.287,00		9.451,47		7.420,00	8	6.980,16			5	79	0	69.200,24	
Sasaran 4.1.1. Meningkatnya ketaatan terhadap rencana tata ruang	Persentase Kesesuaian Tata Ruang	Persen (%)	98.1	330.912.040,00	98.2	344.143.435,00	98.3	652.142.003,85	52.73	321.254.800,00	56.08	342.820.100,00	101,55	53,83	87.11	99.62	87	1.899.995.965,40	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	% ketersediaan dokumen rencana tata ruang sesuai ketentuan	persen	79,44	330.912.040,00	79,44	344.143.435,00	3,65	652.142.003,85	97,73	321.254.800,00	97,73	342.820.100	123,02	97,08	123,02	99,62	3,65	1.899.995.965,40	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sasaran 4.1.2. Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	Angka	61	7.343.802.705,00	62	8.839.353.852,00	63	7.909.357.447,62	52,73	7.019.122.620,00	56.08	8.195.046.880,16	66,75	98,5	90.45		87	23.043.673.234,84	
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase menurunnya pelanggaran terhadap RPPLH	persen	75	124.598.150,00	60	251.312.405,00	40	169.914.964,04	75	122.325.000,00	50	204.466.350	100,00	98,18	83,33	81,36	40	495.042.098,54	Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air dan Udara	indeks	50	107.142.900,00	50	258.207.645,00	50	232.802.633,53	24,55	77.138.820,00	28,75	253.360.864	49,10	72,00	57,50	98,12	104,44 / 125	678.263.417,83	Lingkungan Hidup
			80		82		85		85,35		87,33		106,69						
PROGRAM	Persentase	persen	11,01	3.779.86	11,34	3.007.23	11,64	3.969.45	11,21	3.604.74	11,3		101.82	95,37	99,6		11,6	11.564.8	Lingku

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						REALISASI TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN KE-				TINGKAT CAPAIAN TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN (%)				TARGET KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD		URUSAN
			TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA TAHUN						REALISASI TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN				TINGKAT CAPAIAN TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN (%)						
			2021		2022		2023		2021		2022		2021		2022				
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Luas RTH Publik			4.855,00		1.905,00		6.346,82		0.450,00	0	3.001.779.560,16			5	99,82	4	90.774,24	ngan Hidup
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase meningkatnya jumlah ijin lingkungan yang diawasi	persen	55	24.156.000,00	60	1.594.078.900,00	75	46.339.369,37	48	23.876.000,00	48	1.087.586.660	87,27	98,84	80,00	68,23	75	135.008.348,37	Lingkungan Hidup
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase meningkatnya jumlah pokmas sadar lingkungan	persen	100	12.050.600,00	100	77.595.000,00	100	42.343.277,34	100	11.295.000,00	100	77.415.000	100,00	93,73	100,00	99,77	100	123.365.855,34	Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase meningkatnya penghargaan bidang lingkungan hidup	persen	100	33.405.000,00	100	36.974.050,00	100	35.439.364,50	100	19.725.000,00	100	35.665.000	100,00	59,05	100,00	96,46	100	103.251.514,50	Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Sampah yang tertangani	persen	67	3.262.585.200,00	70	3.613.953.947,00	70	3.413.061.492,02	66,49	3.160.022.350,00	71,54	3.534.773.446	99,24	96,86	102,20	97,81	70	9.943.851.226,02	Lingkungan Hidup
	Persentase Pengurangan sampah	persen	15		16,5		30		7,61		8,37		50,73		50,73		30		

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						REALISASI TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN KE-				TINGKAT CAPAIAN TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN (%)				TARGET KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD		URUSAN
			TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA TAHUN						REALISASI TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN				TINGKAT CAPAIAN TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN (%)						
			2021		2022		2023		2021		2022		2021		2022				
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Tujuan 4.2. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan kawasan permukiman berbasis mitigasi bencana	Persentase luas kawasan permukiman layak	Persen	98,47	68.150.973.975,00	99,95	100.205.149.023,00	100	73.278.062.220,46		66.298.975.992,29		86.233.993.705,00		97.28		86.06	100	276.864.224.647,11	
Sasaran 4.2.1. Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Penurunan kawasan kumuh	Persen (%)	34	34.936.115.562,00	51,52	47.375.360.759,00	100	36.448.454.236,45	11.66	35.012.483.417,33	10.10	34.023.313.223,00	150	99,39	19.60	71.82	10	153.973.913.768,27	
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	% wilayah strategis dan cepat tumbuh kota bima yang ditangani	persen	2,09	8.053.460.697,00	1,5	12.057.040.000,00	2,31	8.543.916.453,45	1,90	8.053.460.697,00	0	912.351.060	90,91	100,00	0,00	7,57	2,31	15.975.734.375,88	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase masyarakat yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	persen	100	4.505.054.100,00	100	3.274.947.000,00	80	5.019.560.613,57	139,64	4.504.873.100,00	564,65	3.274.586.000	139,64	100,00	564,65	99,99	80	14.624.337.732,57	Perumahan dan Pemukiman
PROGRAM PENGELOLAAN DAN	% jumlah penduduk	persen	2,5	6.579.342.960.00	2,78	6.511.530.881.00	96,36	7.005.355.537.00	9,86	6.749.320.698.50	1,718	5.779.01	394,40	102,58	61,80	88,	96,36	27.798.657.191.0	Pekerjaan

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						REALISASI TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN KE-				TINGKAT CAPAIAN TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN (%)				TARGET KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD		URUSAN
			TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA TAHUN						REALISASI TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN				TINGKAT CAPAIAN TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN (%)						
			2021		2022		2023		2021		2022		2021		2022				
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	yang memperoleh akses air minum layak											8.470				75		0	Umum dan Penataan Ruang, Kesehatan
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	% rumah tangga yang mengakses IPAL	persen	2,52	3.060.75 3.643,00	2,78	5.768.11 9.120,00	92,33	3.162.75 7.047,97	9,61	2.995.59 5.766,38	1,68 7	5.682.67 2.568	381,35	97,87	60,6 8	98,52	92,3 3	25.551.5 93.734,8 0	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kesehatan
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	% luas wilayah permukiman bebas genangan	persen	4,2	6.272.40 2.694,00	4,41	6.927.91 0.718,00	91,75	5.432.63 6.032,45	2,25	6.268.96 4.981,89	3,50 7	5.726.43 1.525	53,57	99,95	79,5 2	82,66	91,7 5	26.288.7 31.925,2 6	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kesehatan
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	persentase pengembangan perumahan layak huni bagi masyarakat	persen	100	142.649. 100,00	100	1.484.37 0.000,00	100	1.401.84 4.121,36	88,89	139.201. 100,00	98,3 6	1.399.36 5.000	88,89	97,58	98,3 6	94,27	100	8.406.65 3.850,11	Perumahan dan Pemukiman

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						REALISASI TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN KE-				TINGKAT CAPAIAN TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN (%)				TARGET KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD		URUSAN
			TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA TAHUN						REALISASI TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN				TINGKAT CAPAIAN TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN (%)						
			2021		2022		2023		2021		2022		2021		2022				
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	berpenghasilan rendah																		
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	%bangunan gedung pemerintah yang dibangun sesuai dengan ketentuan penataan bangunan gedung milik pemerintah	persen	100	231.710.294,00	100	331.220.000,00	100	207.871.154,65	100	211.592.500,00	100	231.720.000	100,00	91,32	100,00	69,96	100	605.626.309,65	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	meningkatnya kualitas infrastruktur lingkungan skala lingkungan	km	10	6.090.742.074,00	10	11.020.223.040,00	12	5.674.513.276,00	10	6.089.474.573,56	7,81	11.017.168.600	100,00	99,98	78,10	99,97	90	34.722.578.649,00	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sasaran 4.2.2. Meningkatkan ya kualitas infrastruktur daerah	Persentase peningkatan infrastruktur daerah dalam kondisi baik	Persen (%)	41	30.476.084.223,00	42	49.693.627.504,00	43	34.906.797.665,78	9,94	28.894.273.171,96	9.96	49.133.645.500,00	19,56	88,82	23.71	98.87	4,3	117.288.261.286,41	
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	% Jalan Kota dalam kondisi mantap	persen	2,1	14.865.352.511,00	2,10	34.547.969.850,00	2,43	18.842.620.943,82	2,30	14.804.874.724,96	0,385	34.165.821.610	109,52	99,59	18,33	98,89	2,43	54.897.405.104,39	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						REALISASI TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN KE-				TINGKAT CAPAIAN TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN (%)				TARGET KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD		URUSAN
			TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA TAHUN						REALISASI TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN				TINGKAT CAPAIAN TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN (%)						
			2021		2022		2023		2021		2022		2021		2022				
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	% luas wilayah pertanian yang terlayani irigasi teknis	persen	2	7.524.45 9.660,00	2,20	6815459 142	73,01	7.982.69 9.253,00	0,42	6.272.40 2.694,00	22,7 34	6.780.57 5.439	21,00	83,36	1033 ,36	99, 49	73,0 1	38.845.7 16.481,0 0	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	% menurunnya angka kecelakaan transportasi darat	persen	90	8.032.76 7.052,00	90	8.279.24 3.512,00	100	8.007.84 3.582,66	90	7.763.50 2.753,00	90	8.136.36 8.451	100,00	96,65	100, 00	98, 27	100	23.330.6 09.604,7 2	Perhubungan
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Cakupan penataan dan pengelolaan pelayaran	persen	90	53.505.0 00,00	90	50.955.0 00,00	90	73.633.8 86,30	90	53.493.0 00,00	90	50.880.0 00	100,00	99,98	100, 00	99, 85	90	214.530. 096,30	Perhubungan
Sasaran 4.2.3. Meningkatnya Ketahanan terhadap bencana	Indeks ketahanan daerah	Angka	83.7	2.738.77 4.190,00	83.9	3.136.16 0.760,00	84.1	1.922.81 0.318,23	74,00	2.392.21 9.403,00	74,00	3.077.03 4.982,00	89,16	87,34	88.20	98. 11	88	5.602.04 9.592,43	
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase pemenuhan sistem kesiapsiagaan dan pencegahan terhadap bencana	persen	63,61	2.047.55 3.490,00	72,73	2.661.08 2.780,00	85	1.192.48 7.819,13	50,8	1.736.09 6.188,00	60,6 6	2.620.76 5.382	79,86	84,79	83,4 0	98, 48	85	3.474.27 7.123,33	Ketertarikan dan Ketertarikan Umum serta Perlindungan Masyarakat

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						REALISASI TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN KE-				TINGKAT CAPAIAN TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN (%)				TARGET KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD		URUSAN
			TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA TAHUN						REALISASI TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN				TINGKAT CAPAIAN TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN (%)						
			2021		2022		2023		2021		2022		2021		2022				
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																			akat, BPBD
	Persentase sarana dan prasarana terdampak bencana yang dimanfaatkan kembali	persen	100		100		100		100		100		100,00		100,00		100		
	Persentase kelompok usaha ekonomi terdampak yang kembali pulih	Persen	68,42		100		100		68,42		100		100,00		100,00		100		
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	% capaian pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Persen	90	615.899.000,00	88	362.117.980,00	90	653.407.249,10	92,46	596.460.215	97	346.814.600	102,73	96,84	110,23	95,77	90	1.903.682.219,10	Ketertarikan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, BPBD
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang	Persen	100	75.321.700,00	100	112.960.000,00	100	76.915.250,00	79,27	59.663.000,00	100	109.455.000	79,27	79,21	100,00	96,90	100	224.090.250,00	Ketertarikan dan

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						REALISASI TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN KE-				TINGKAT CAPAIAN TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN (%)				TARGET KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD		URUSAN
			TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA TAHUN						REALISASI TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN				TINGKAT CAPAIAN TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN (%)						
			2021		2022		2023		2021		2022		2021		2022				
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	tertangani dalam masa tanggap darurat																		Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, BPBD, Sosial
Misi 5. Mewujudkan Masyarakat yang Berkarakter dan Agamais																			
Tujuan 5.1. Meningkatkan masyarakat yang tentram, bermoral dan agamais	Indeks Ketentraman	Nilai	0,87	50.385.808.340,00	0,89	51.897.382.590,20	0,9	53.454.304.067,91		41.905.839.039,00		29.939.018.858					0,88	155.737.494.998,11	
Sasaran 5.1.1. Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban	Persentase Penurunan Angka Kriminalitas	Persen (%)	30.5	4.260.301.100,00	31	9.149.003.068,00	31.5	5.172.463.674,79	66	4.142.251.000,00	68	8.555.712.360,00	188,57	97.23	219.35	93.52	45	15.069.816.167,79	
	Persentase penurunan Angka konflik sosial	Persen (%)	16.70		20		25		16.70		52.00		100		260		14		
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penyelesaian keamanan, ketentraman dan ketertiban (K3)	Persen	100	2.551.217.900,00	100	5.273.570.708,00	100	2.739.271.383,40	98,98	2.516.072.300,00	92,50	4.881.792.700	98,98	98,62	92,50	92,57	100	7.980.784.163,40	Ketentraman dan Ketertiban Umum

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						REALISASI TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN KE-				TINGKAT CAPAIAN TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN (%)				TARGET KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD		URUSAN
			TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA TAHUN						REALISASI TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN				TINGKAT CAPAIAN TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN (%)						
			2021		2022		2023		2021		2022		2021		2022				
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																			serta Perlindungan Masyarakat
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan	Persen	80	104.512.000,00	80	107.647.360,00	80	110.876.780,80	79	115.360.000,00			98,75	110,38	0,00	-	80	323.036.140,80	Unsur Kewilayahan
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan	Persen	100	275.827.400,00	100	1.265.666.000,00	100	1.347.529.187,95	100	268.867.400,00	100	1.250.006.160	100,00	97,48	100,00	98,76	100	3.925.985.452,95	Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Keterlibatan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengawasan	Persen	100	408.381.200,00	90	197.484.200,00	95	486.432.410,28	100	349.909.200,00	90	182.643.000	100,00	85,68	100,00	92,48	95	1.417.206.086,28	Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN	Persentase Penguatan Kewaspadaan Nasional	Persen	100	920.362.600,00	100	2.304.634.800,00	100	488.353.912,36	100	892.042.100,00	100	2.241.270.500	100,00	96,92	100,00	97,25	100	1.422.804.324,36	Kesatuan Bangsa dan

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						REALISASI TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN KE-				TINGKAT CAPAIAN TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN (%)				TARGET KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD		URUSAN
			TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA TAHUN						REALISASI TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN				TINGKAT CAPAIAN TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN (%)						
			2021		2022		2023		2021		2022		2021		2022				
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL																			Politik
Sasaran 5.1.2. Meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal	Persentase nilai budaya, adat dan tradisi yang dibina	Persen (%)	10	208.934.699,00	2,4	403.172.679,00	2,5	334.544.948,63	10	203.532.099,00	10	273.808.143,00	100	66,25	100	67.91	6,3	974.686.569,63	
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase SDM Kebudayaan yang dibina	Persen	30	132.186.600,00	10	248.914.100,00	30	230.529.008,13	10	130.936.000,00	10	173.028.200	33,33	99,05	100,00	69,51	30	671.639.279,13	Kebudayaan
PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian TRADISIONAL	Persentase Lembaga Kesenian yang dibina	Persen	70	2.000.000,00	70	28.183.844,00	70	2.121.800,00	0	0,00	0	-	0,00	0,00	0,00	-	70	6.181.800,00	Kebudayaan
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Cakupan Pengelolaan Keragaman Budaya	Persen	70	1.005.300,00	70	28.183.844,00	70	1.066.522,77	0	0,00	0	28.183.844	0,00	0,00	0,00	100,00	70	3.107.281,77	Kebudayaan
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah Cagar Budaya yang teridentifikasi	Persen	30	73.742.799,00	40	97.890.891,00	40	100.827.617,73	30	72.596.099,00	30	72.596.099	100,00	98,45	75,00	74,16	40	293.758.208,73	Kebudayaan
Sasaran 5.1.3. Meningkatkan pengamalan ajaran agama	Indeks kerukunan umat beragama	Angka	84	37.425.785.240,00	84	32.053.213.790,00	84	47.947.295.444,49	67,46	37.213.325.527,00	72,39	21.109.498.355,00	80,31	82,81	86,18	65.86	84	139.692.992.260,69	

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						REALISASI TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN KE-				TINGKAT CAPAIAN TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN (%)				TARGET KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD		URUSAN
			TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA TAHUN						REALISASI TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN				TINGKAT CAPAIAN TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN (%)						
			2021		2022		2023		2021		2022		2021		2022				
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persen	100	37.298.853.440,00	100	31.753.251.190,00	100	47.704.914.061,56	100	37.088.839.927,00	100	20.835.947.195	100,00	99,44	100,00	65,62	95	138.986.821.446,76	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persen	60	126.931.800,00	60	299.962.600,00	90	242.381.382,93	60	124.485.600,00	60	273.551.160	100,00	98,07	100,00	91,20	90	706.170.813,93	Kesatuan Bangsa dan Politik

Sumber: Hasil Analisis

Indikator Kinerja Kunci atau disebut juga IKK adalah indikator kerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintah. Indikator kinerja juga dimaknai sebagai alat yang digunakan untuk mengukur pencapaian suatu target, baik dengan menggunakan ukuran kualitatif maupun ukuran kuantitatif.

Tabel 2.83 Capaian IKK Kota Bima Tahun 2022

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Capaian Tahun 2022
1	2	3	4
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT			
1	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi		
01.01	Pertumbuhan ekonomi	Persen	0
01.02	PDRB per kapita harga berlaku	Rp. Juta /Tahun	0
01.03	PPKS yang tertangani	Persen	82,06
01.04	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	0,00
01.05	Indeks Rasa Aman	Angka (skala 1-100)	87,6
2	Fokus Kesejahteraan Masyarakat		
02.01	Pendidikan		
02.01.01	Angka Partisipasi Sekolah (5-6)	Tahun	75
02.01.02	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-15	Tahun	99,7
02.01.03	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 Kesetaraan	Tahun	28,91
02.01.04	Kemampuan Literasi SD	Angka	50,87
03.01.05	Kemampuan Literasi SMP	Angka	35,3
04.01.06	Kemampuan Numerasi SD	Angka	44,13
05.01.07	Kemampuan Numerasi SMP	Persen	23,22
06.01.08	Proporsi Jumlah Kesatuan PAUD Terakreditasi Minimal B	Persen	28,35
07.01.09	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	Persen	81,59
08.01.10	Iklm Keamanan SD	Angka	73,29
09.01.11	Iklm Keamanan SMP	Angka	67,81
10.01.12	Iklm Kebinekaan SD	Angka	58,26
11.01.13	Iklm Kebinekaan SMP	Angka	64,23
12.01.14	Iklm Inklusivitas SD	Angka	64,52
13.01.15	Iklm Inklusivitas SMP	Angka	55,1
02.02	Kesehatan		
02.02.01	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	Persen	0,04%

02.02.02	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	94,15
02.02.03	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	89,2
02.02.04	Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	91,15
02.02.05	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	91,3
02.02.06	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	90,99
02.02.07	persentase orang usia 15-19 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	67,18
02.02.08	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	75,68
02.02.09	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	75,68
02.02.10	persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100
02.02.11	persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	93,23
02.02.12	Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	62,55
02.02.13	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	100
ASPEK PELAYANAN UMUM			
Layanan Urusan Wajib Dasar			
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
03.01	Pekerjaan Umum:		
03.01.01	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	72,24%

03.01.02	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Persen	84,94%
03.01.04	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	89,99%
03.01.05	Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota	Persen	74,77%
03.02	Penataan Ruang:		
03.02.01	Rasio kepatuhan IMB kabupaten/kota (Kesesuaian fungsi bangunan dengan IMB)	Persen	69,96%
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman		
04.01	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	unit	42
04.02	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	unit	60
04.03	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	Persen	29,75
04.04	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persen	0,6
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat		
05.01	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	97,92
05.02	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	92
05.03	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	17.983
05.04	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	17.983
05.05	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	17.983
05.06	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100

05.07	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	15
6	Sosial		
06.01	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	Persen	82,06
06.02	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Persen	100
Layanan Urusan Wajib Non Dasar			
1	Tenaga Kerja		
01.01	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	95
01.02	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Persen	25
01.03	Tingkat produktivitas tenaga kerja	Rupiah	38.000.000
01.04	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	70
01.05	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Persen	98
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
02.01	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	1,13
02.02	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Persen	100
02.03	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Kasus/100.000 penduduk perempuan	5,5
3	Pangan		
03.01	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	Persen	72

03.02	Coefesien Varian Stabilitas Harga Pangan (Beras) ditingkat Konsumen	Persen	$\leq 10\%$
03.03	Persentase Pola Konsumsi dan Suplai Pangan	Persen	81,8
4	Lingkungan Hidup		
04.01	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	56,08
04.02	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten/Kota	Persen	71,54
5	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
05.01	Perekaman KTP elektronik	Persen	97
05.02	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	Persen	89,95
05.03	Kepemilikan akta kelahiran	Persen	95
05.04	Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Perangkat Daerah	20
6	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
06.01	TFR (Angka Kelahiran Total)	Angka	2,27
06.02	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate/mCPR)	Persen	81,37
06.03	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	Persen	8,6
7	Perhubungan		
07.01	Persentase fasilitas jalan dalam kondisi baik	Persen	70
07.02	Presentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang tersedia sesuai kebutuhan	Persen	75
8	Komunikasi dan Informatika		
08.01	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	85
08.02	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	75

08.03	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Persen	N/A
9	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah		
09.01	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	Persen	9,59
09.02	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	Persen	3,12
10	Penanaman Modal		
10.01	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	Persen	29,75
11	Kepemudaan dan Olahraga		
11.01	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	N/A
11.02	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	N/A
11.03	Peningkatan prestasi olahraga	Persen	11
12	Statistik		
12.01	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	80
12.02	persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	80
13	Persandian		
13.01	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	70
14	Kebudayaan		
14.01	Terlestarikannya cagar budaya	Persen	N/A
15	Perpustakaan		
15.01	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka (1-100)	N/A
16	Kearsipan		

16.01	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (pasal 40 dan pasal 59 UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan)	Persen	87,66
16.02	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persen	N/A
Layanan Urusan Pilihan			
1	Kelautan dan Perikanan		
01.01	Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Ton	3.112,50
2	Pariwisata		
02.01	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Persen	1,12
02.02	persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	Persen	-3,53
02.03	Tingkat hunian akomodasi	Persen	75%
02.04	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Persen	6,68
02.05	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Persen	23,42
3	Pertanian		
03.01	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	ton/hektar	5,69
03.02	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	0,03
4	Perdagangan		
04.01	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko swalayan)	Persen	94,12%
5	Perindustrian		

05.01	Penambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/kota	Persen	59,29
05.02	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	95
05.03	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin perluasan usaha industri (IPUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	95
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan			
1	Kesekretariatan		
01.01	Rata-rata skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	86,89
2	Pengadaan		
02.01	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	7,55
02.02	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	26,14
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan			
1	Perencanaan dan Keuangan		
01.01	Rasio belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan	Persen	28,8
01.02	Rasio PAD terhadap APBD	Persen	8,99
01.03	Opini laporan keuangan	Opini BPK	WTP
01.04	Indeks Kualitas Perencanaan Daerah	Angka	97
2	Pengawasan		
02.01	Maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Level	Level 3
02.02	Peningkatan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP)	Level	Level 3
3	Kepegawaian		
03.01	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	74,11

03.02	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	49,16
4	Penelitian dan Pengembangan		
04.01	Persentase hasil penelitian yang menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan	Persen	40
Unsur Kewilayahan			
1	Kecamatan		
01.01	Rata-rata skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	86,89
Unsur Pemerintahan Umum			
1	Kesatuan Bangsa dan Politik		
01.01	Persentase penurunan Angka konflik sosial	Persen	58

Sumber: Data diolah

Tabel 2.84.
Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan TPB (SDG's) Kota Bima Tahun 2022

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN	PELAKSANA	TARGET Tahun 2022	REALISASI		PERSENT ASE CAPAIAN	KETERANGAN
						2021	2022		
1.1 Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari.	1.1.1*	Tingkat kemiskinan ekstrim.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.	BPS/TKPKD	0	0,83	1,32	-132%	TARGET BELUM TERCAPAI
1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.	BPS		8,88	8,8		TARGET TERCAPAI

1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1*	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.	DINAS SOSIAL	60	69	69	115,00%	TARGET TERCAPAI
	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.	Dinas Kesehatan	156.067	149.024	155.636	99,72%	TARGET HAMPIR TERCAPAI
	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.	Dinas Ketenaga kerjaan					DATA TIDAK TERSEDIA
1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki	1.4.1*	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.	BPS					DATA TIDAK TERSEDIA

hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.2*	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.	BPS/Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Bima	100	74,94	80,37	80,37%	TARGET HAMPIR TERCAPAI
1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.	BPBD	0	31.783,25	11.392,39		TARGET BELUM TERCAPAI
	1.5.4*	Proporsi pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi daerah pengurangan risiko bencana yang selaras dengan strategi nasional pengurangan risiko bencana	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.	BPBD	100	100	100	100,00%	TARGET TERCAPAI

2.4 Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrem, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.	2.4.1.(a)	Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.	DINAS PERTANIAN					DATA TIDAK TERSEDIA
2.a Meningkatkan investasi, termasuk melalui kerjasama internasional yang kuat, dalam infrastruktur perdesaan, layanan kajian dan perluasan pertanian, pengembangan teknologi dan bank gen untuk tanaman dan ternak, untuk meningkatkan kapasitas produktif pertanian di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang.	2.a.1*	Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.	DINAS PERTANIAN					DATA TIDAK TERSEDIA

3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya: (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih		Dikes	100	98,5	100	100,00%	TARGET TERCAPAI
		(b) di fasilitas kesehatan		Dikes	100	95,61	93,85	93,85%	TARGET HAMPIR TERCAPAI
3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.	DPPKB	25.600	24.097	25.028	97,77%	TARGET HAMPIR TERCAPAI
		(a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih		Dikes	14	14	14	100,00%	TARGET TERCAPAI
		(b) di fasilitas kesehatan		Dikes	14	14	14	100,00%	TARGET TERCAPAI
3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya: (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih		Dikes	3.427	3.092	3.057	89,20%	TARGET HAMPIR TERCAPAI

		(b) di fasilitas kesehatan		Dikes	3.427	3.092	3.057	89,20%	TARGET HAMPIR TERCAPAI
3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.	DINAS KESEHATAN	0,01	0,02	0,03	33,33%	TARGET BELUM TERCAPAI
	3.3.4*	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.	DINAS KESEHATAN	3,539	2,7	2,95	119,97%	TARGET TERCAPAI
	3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan: (a) Filariasis	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.	DINAS KESEHATAN	0	0	0	100,00%	TARGET TERCAPAI
		(b) Kusta		DINAS KESEHATAN	0	1,7	1,7	-170%	TARGET BELUM TERCAPAI
3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.1.(a)	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.	DINAS KESEHATAN		3.634	4.214	0,00%	TARGET BELUM TERCAPAI
	3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.	DINAS KESEHATAN	9.513	9.287	7.214	131,87%	TARGET TERCAPAI
	3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.	DINAS KESEHATAN	21.985,00	5.766	6.382	344,48%	TARGET TERCAPAI

					(21,8% dari penduduk berusia > 18 tahun)				
3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkoba dan penggunaan alkohol yang membahayakan.	3.5.1.(b)	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.	DINAS KESEHATAN	10	0	18	180,00%	TARGET TERCAPI
3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.2.(a)	<i>Total Fertility Rate</i> (TFR).	Indikator nasional sebagai indikator pengayaan.	DPPKB	2,2	2,23	2,27	103,18%	TARGET TERCAPI
3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	3.8.1*	Cakupan pelayanan kesehatan esensial.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.	DINAS KESEHATAN	(N/A)	(N/A)	(N/A)	(N/A)	DATA TIDAK TERSEDIA
	3.8.1.(a)	<i>Unmet Need</i> Pelayanan Kesehatan.	Indikator nasional sebagai indikator pengayaan.	DINAS KESEHATAN	(N/A)	(N/A)	(N/A)	(N/A)	DATA TIDAK TERSEDIA
	3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Indikator nasional sebagai indikator pengayaan.	DINAS KESEHATAN	156.067	149.024	155.636	99,72%	TARGET HAMPIR TERCAPI

3.a Memperkuat pelaksanaan <i>the Framework Convention on Tobacco Control WHO</i> di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.	DINAS KESEHATAN	9,98	12,219	15,364	64,96%	TARGET BELUM TERCAPAI
4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.2*	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.	DINAS PENDIDIKAN	99,8	99,17	99,7	99,90%	TARGET HAMPIR TERCAPAI
4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.	4.2.2*	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.	DINAS PENDIDIKAN	89,05	88,91	75	84,22%	TARGET HAMPIR TERCAPAI
4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.	4.3.1*	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.	DINAS PENDIDIKAN	(N/A)	(N/A)	(N/A)	(N/A)	DATA TIDAK TERSEDIA

	4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	Indikator nasional sebagai indikator pengayaan.	DINAS PENDIDIKAN					DATA TIDAK TERSEDIA
4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.	4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.	DINAS TENAGA KERJA/ BLK					DATA TIDAK TERSEDIA
4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat, SMA/ SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/ teratas, (d) disabilitas/ tanpa disabilitas.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.	DINAS PENDIDIKAN	80		72,69		TARGET HAMPIR TERCAPAI

4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.	DINAS PENDIDIKAN	30,5	24,71	28,91	94,79%	TARGET HAMPIR TERCAPAI
	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.	DINAS PENDIDIKAN	100	96,16	93,7	93,70%	TARGET HAMPIR TERCAPAI
5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah daerah.	Indikator nasional yang sesuai dengan Indikator global.	SEKRETARIA T DPRD/ BPS	16	16	16	100,00%	TARGET TERCAPAI
	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Indikator nasional yang sesuai dengan Indikator global.	BKPSDM					DATA TIDAK TERSEDIA
5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan <i>Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform</i> serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.	5.6.2*	Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.	Indikator nasional yang sesuai dengan Indikator global.	DPPKB					DATA TIDAK TERSEDIA

5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.	5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Indikator nasional yang sesuai dengan Indikator global.	DISKOMINFO TIK/ BPS		59,16	69,81		TIDAK ADA DATA TARGET
6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.	Indikator nasional sesuai dengan indikator global.	DINAS KESEHATAN/ PUPR	85,03%	83,23%	84,94%	99,89%	TARGET HAMPIR TERCAPAI
6.2. Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.	Indikator nasional sesuai dengan indikator global.	DINAS KESEHATAN/ PUPR	91,69%	89,99%	91,68%	99,99%	TARGET HAMPIR TERCAPAI

6.3. Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	6.3.1.(a)	Persentase limbah cair industri yang dikelola secara aman.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.	DINAS KESEHATAN/ DLH					DATA TIDAK TERSEDIA
6.4. Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.	6.4.2.(a)	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.	DIKES/ PUPR	0,90%	0,70%	0,80%	88,89%	TARGET HAMPIR TERCAPAI
	6.4.2.(b)	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air tanah terhadap ketersediaannya.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.	DIKES/ PUPR	3,50%	3,10%	3,30%	94,29%	TARGET HAMPIR TERCAPAI
9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal,	9.1.2*	Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda	Indikator nasional yang sesuai dengan	DINAS PERHUBUNG AN	549.592	504.008	523.420	95,24%	TARGET HAMPIR TERCAPAI

berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.		transportasi.	global.		1.028.049	921.982	932.469	90,70%	TARGET HAMPIR TERCAPAI
10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1. (a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global.	BPS		8,88	8,8		TARGET TERCAPAI
	10.1.1. (a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global.	BPS	10	8,88	8,80	113,64%	TARGET TERCAPAI
11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.	11.1.1. (a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.	DINAS PERKIM	75	197	117	156,00%	TARGET TERCAPAI
11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi	11.6.1. (a)	Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.	DLH	70		71,54	102,20%	TARGET TERCAPAI

perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	11.6.2. (b)	Indeks Kualitas Udara.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.	DLH	82		87,33	106,50%	TARGET TERCAPI
11.7 Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.	11.7.1. (a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.	BAPPEDA	30%	4,07%	4,07%	13,57%	TARGET BELUM TERCAPI
11.c Memberikan dukungan kepada negara-negara kurang berkembang, melalui bantuan keuangan dan teknis, dalam membangun bangunan yang berkelanjutan dan tangguh, dengan memanfaatkan bahan lokal.	11.c.1. (a)	Persentase Daerah yang memiliki Perda Bangunan Gedung yang Berkelanjutan, Berketahanan menggunakan Material Lokal.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.	BAPPEDA/ PUPR	100,00%	80,00%	80,00%	80,00%	TARGET HAMPIR TERCAPI
12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.	12.5.1. (a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.	DLH	15		7,61	50,73%	TARGET BELUM TERCAPI

12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.	12.8.1. (b)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	Indikator nasional sebagai indikator global.	BAPPEDA/ PUPR	88,36%	86,61%	88,31%	99,94%	TARGET HAMPIR TERCAPI
12.b Mengembangkan dan menerapkan perangkat untuk memantau dampak pembangunan berkelanjutan terhadap pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	12.b.1. (a)	Jumlah lokasi penerapan <i>sustainable tourism development</i> .	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAA N	2	2	2	100,00%	TARGET TERCAPI
13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara	13.1.1 *	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak langsung bencana per 100.000 orang.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.	BPBD		31.783,25	11.392,39		TIDAK ADA DATA TARGET

	13.1.3 *	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.	BPBD	100	100	100	100,00%	TARGET TERCAPI
16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	16.2.1. (b)	Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK	0	51	60		TARGET BELUM TERCAPI
	16.2.2 *	Angka korban perdagangan manusia per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK	0	0	0	100,00%	TARGET TERCAPI
16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.	16.03. 02	Proporsi tahanan terhadap seluruh tahanan dan narapidana.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.	LEMBAGA PEMASYARAKATAN/ KEJAKSAAN	298	479	490	164,43%	TARGET TERCAPI

16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.	16.5.1. (a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.	INSPEKTORAT	4,06	3,88	3,93	96,80%	TARGET HAMPIR TERCAPAI
16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	16.07.01	Proporsi jabatan di lembaga nasional dan daerah, meliputi (a) lembaga legislatif; (b) lembaga pelayanan publik; (c) lembaga peradilan, dibanding distribusi nasional, menurut jenis kelamin, kelompok umur, orang dengan disabilitas dan kelompok masyarakat.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan	BKPSDM		16	16		TIDAK ADA DATA TARGET
	16.7.1. (a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.	BKPSDM/ETARIAT DEWAN		16	16		TIDAK ADA DATA TARGET
16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	16.9.1 *	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.	DUKCAPIL	100	99,12	98,96	98,96%	TARGET HAMPIR TERCAPAI

	16.9.1. (a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global.	DUKCAPIL	100	92,93	91,65	91,65%	TARGET HAMPIR TERCAPAI
	16.9.1. (b)	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global.	DUKCAPIL	100	97,83	98,56	98,56%	TARGET HAMPIR TERCAPAI
	16.9.1. (b)	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global.	DUKCAPIL	100	92,3	93,84	93,84%	TARGET HAMPIR TERCAPAI
16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.	16.10. 1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	111	133		TIDAK ADA DATA TARGET
	16.10. 1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	Indikator nasional sebagai proksi dari indikator global.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	17	19		TIDAK ADA DATA TARGET

16.b Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.	16.b.1	Proporsi penduduk yang melaporkan mengalami diskriminasi dan pelecehan dalam 12 bulan lalu berdasarkan pada pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK/ KEPOLISIAN	-	111	133		TIDAK ADA DATA TARGET
17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	17.1.1 *	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.	BPKAD		26	26		TIDAK ADA DATA TARGET
	17.1.1. (a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global.	BPKAD		0,81	0,83		TIDAK ADA DATA TARGET
	17.1.2 *	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.	BPKAD		33	34		TIDAK ADA DATA TARGET

Sumber: Hasil Analisis

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Kinerja keuangan masa lalu

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, untuk dapat melakukan analisis pengelolaan keuangan daerah diperlukan analisis pelaksanaan APBD tahun sebelumnya, yang dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Postur APBD terdiri dari komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Dengan demikian dalam menganalisis pengelolaan keuangan daerah, terlebih dahulu perlu memahami jenis obyek pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah. Analisis tersebut diperlukan sebagai dasar untuk menentukan kerangka pendanaan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi.

Kinerja Pelaksanaan APBD

Secara umum komponen APBD Kota Bima terdiri atas: (1) Komponen Pendapatan Daerah, yang di dalamnya terdapat Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah; (2) Komponen Belanja Daerah, yang di dalamnya terdapat Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer; dan (3) Komponen Pembiayaan Daerah, yang di dalamnya terdapat Penerimaan Pembiayaan Daerah, dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Kinerja APBD Kota Bima Tahun 2018 hingga tahun 2022 menunjukkan realisasi pendapatan yang berfluktuatif. Pada tahun 2018 hingga 2022, realisasi pendapatan mencapai di atas 98 persen. Sedangkan realisasi komponen belanja daerah tahun 2018 hingga tahun 2022 tidak mencapai target tahunannya, namun pada tahun 2020 hingga 2022 realisasi penyerapannya melebihi 90 persen walaupun pada tahun 2018 hingga 2019 penyerapan belanja hanya

sebesar 85,51 persen dan 87,93 persen. Untuk realisasi komponen penerimaan pembiayaan, tahun 2018 hingga tahun 2022 menunjukkan realisasi penerimaan pembiayaan melebihi 100 persen. Realisasi penerimaan pembiayaan pada tahun 2020 dan 2022 mencapai 100 persen, sedangkan tahun 2018, 2019 dan 2021 mencapai di atas 100 persen. Kemudian realisasi komponen pengeluaran pembiayaan pada tahun 2021 hanya mencapai 86,96 persen sedangkan untuk tahun 2019, 2020 dan 2022 mencapai 100%. Dalam perspektif perencanaan, kondisi tersebut menunjukkan penetapan target yang terlalu optimis.

Tabel 3.1. Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Penerimaan Pembiayaan, dan Pengeluaran Pembiayaan Kota Bima Tahun 2018-2022

Tahun	Target	Realisasi	%	Bertambah / (Berkurang)
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
Pendapatan Daerah				
2018	797.016.283.441,20	768.070.688.024,82	96,37	-28.945.595.416,38
2019	792.132.422.723,45	774.410.991.653,59	97,76	-17.721.431.069,86
2020	736.298.044.130,13	715.383.787.682,95	97,16	-20.914.256.447,18
2021	745.404.518.907,00	729.687.511.750,67	97,89	-15.717.007.156,33
2022	786.130.956.782,00	805.803.209.696,96	102,50	19.672.252.914,96
Belanja Daerah				
2018	997.464.255.069,72	852.955.415.746,94	85,51	-144.508.839.322,78
2019	905.526.991.381,85	796.259.444.362,27	87,93	-109.267.547.019,58
2020	828.544.477.771,84	796.653.090.963,73	96,15	-31.891.386.808,11
2021	754.078.303.532,00	716.700.153.286,42	95,04	-37.378.150.245,58
2022	806.099.136.615,00	749.196.056.304,73	92,94	-56.903.080.310,27
Penerimaan Pembiayaan				

Tahun	Target	Realisasi	%	Bertambah / (Berkurang)
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
2018	200.447.971.628,52	200.458.301.376,52	100,01	10.329.748,00
2019	115.573.573.658,40	115.589.886.350,39	100,01	16.312.691,99
2020	93.246.433.641,71	93.243.087.895,71	100,00	-3.345.746,00
2021	10.973.784.625,00	10.974.821.367,93	100,01	1.036.742,93
2022	21.968.179.833,00	21.967.826.874,18	100,00	-352.958,82
Pengeluaran Pembiayaan				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	0,00
2020	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	0,00
2021	2.300.000.000,00	2.000.000.000,00	86,96	-300.000.000,00
2022	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00	0,00

*Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bima Tahun 2018-2022
(Audited)*

3.1.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Akun pendapatan daerah terdiri atas 3 kelompok, yaitu: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang komponennya dijelaskan sebagai berikut.

Pendapatan Asli Daerah, terdiri atas:

1. Pajak Daerah;
2. Retribusi Daerah;
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Adapun penerimaan dari Pendapatan Transfer, terdiri dari:

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, terdiri atas:

- a. Dana Perimbangan:
 - Dana Bagi Hasil;
 - Dana Alokasi Umum;
 - Dana Alokasi Khusus.
- b. Dana Insentif Daerah;
- c. Dana Otonomi Khusus;
- d. Dana Keistimewaan; dan
- e. Dana Desa.

2. Pendapatan Transfer Antar Daerah, terdiri atas:

- a. Pendapatan Bagi Hasil; dan
- b. Bantuan Keuangan.

Sedangkan pendapatan dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, bersumber dari:

- 1. Hibah;
- 2. Dana Darurat; dan
- 3. Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun rata-rata pertumbuhan realisasi Pendapatan Daerah Kota Bima untuk Tahun 2018 hingga tahun 2022 disajikan sebagai berikut.

Tabel 3.2. Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bima Tahun 2018-2022

Uraian	Rata-Rata Pertumbuhan (%)	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Pendapatan	1,41	768.070.688.024,82	774.410.991.653,59	715.383.787.682,95	729.687.511.750,67	805.803.209.696,96
Pendapatan Asli Daerah	6,14	46.115.436.512,62	50.422.855.052,89	47.279.817.936,69	46.993.516.746,67	57.351.422.644,96
Pajak Daerah	7,58	15.953.336.197,49	17.441.637.810,41	18.558.631.974,13	19.507.819.782,88	21.355.298.265,81
Retribusi Daerah	37,40	5.851.506.595,00	10.194.288.416,00	11.151.090.529,36	15.196.689.454,00	19.710.293.760,28
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-0,43	1.650.003.101,00	1.461.853.201,38	1.579.915.958,62	1.284.388.411,79	1.545.139.285,00
Lain-Lain PAD Yang Sah	-7,03	22.660.590.619,13	21.325.075.625,10	15.990.179.474,58	11.004.619.098,00	14.740.691.333,87
Pendapatan Transfer	1,76	705.287.128.698,00	706.123.154.695,00	648.337.522.906,00	664.762.654.304,00	748.451.787.052,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,29	668.443.906.827,00	656.961.214.046,00	607.033.428.216,00	624.035.340.074,00	696.779.883.471,00
Dana Perimbangan						
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	27,14	32.683.048.442,00	32.734.418.891,00	26.793.098.072,00	37.344.039.204,00	69.899.355.791,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	-1,27	455.972.250.000,00	484.764.635.000,00	439.644.557.000,00	432.159.814.000,00	430.503.529.123,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)	2,03	152.038.608.385,00	125.924.830.155,00	121.110.004.144,00	124.506.343.870,00	157.268.313.557,00
Dana Insentif Daerah (DID)	19,27	27.750.000.000,00	13.537.330.000,00	19.485.769.000,00	30.025.143.000,00	39.108.685.000,00

Uraian	Rata-Rata Pertumbuhan (%)	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Pendapatan Transfer Antar Daerah	10,73	36.843.221.871,00	49.161.940.649,00	41.304.094.690,00	40.727.314.230,00	51.671.903.581,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya	10,73	36.843.221.871,00	49.161.940.649,00	41.304.094.690,00	40.727.314.230,00	51.671.903.581,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-22,86	16.668.122.814,20	17.864.981.905,70	19.766.446.840,26	17.931.340.700,00	0,00
Pendapatan Hibah	-22,87	16.658.547.534,20	17.864.981.905,70	19.766.446.840,26	17.911.340.000,00	0,00
Pendapatan Lainnya	-50,00	9.575.280,00	0,00	0,00	20.000.700,00	0,00

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bima Tahun 2018-2022 (Audited)

Analisis Pendapatan Daerah menggunakan angka rata-rata pertumbuhan Pendapatan Daerah yang menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan Pendapatan Daerah, sekaligus digunakan sebagai salah satu dasar dalam merencanakan Pendapatan Daerah di masa yang akan datang. Kinerja Pendapatan Daerah Kota Bima selama kurun waktu 2018 hingga 2022 menunjukkan peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan pendapatan sebesar 1,41 persen. Pada tahun 2018 pendapatan daerah Kota Bima tercatat sebesar Rp.768.070.688.024,82, pada tahun 2019 sebesar Rp. 774.410.991.653,59, tahun 2020 sebesar Rp. 715.383.787.682,95, tahun 2021 sebesar Rp. 729.687.511.750,67 dan tahun 2022 sebesar Rp.805.803.209.696,96. Sebagai akibat dari dampak Pandemi Covid-19, pendapatan daerah pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 7,62 persen dan kembali meningkat pada dua tahun terakhir yaitu tahun 2021 sebesar 2,00 persen dan tahun 2022 sebesar 10,43 persen seiring mulai pulihnya perekonomian nasional.

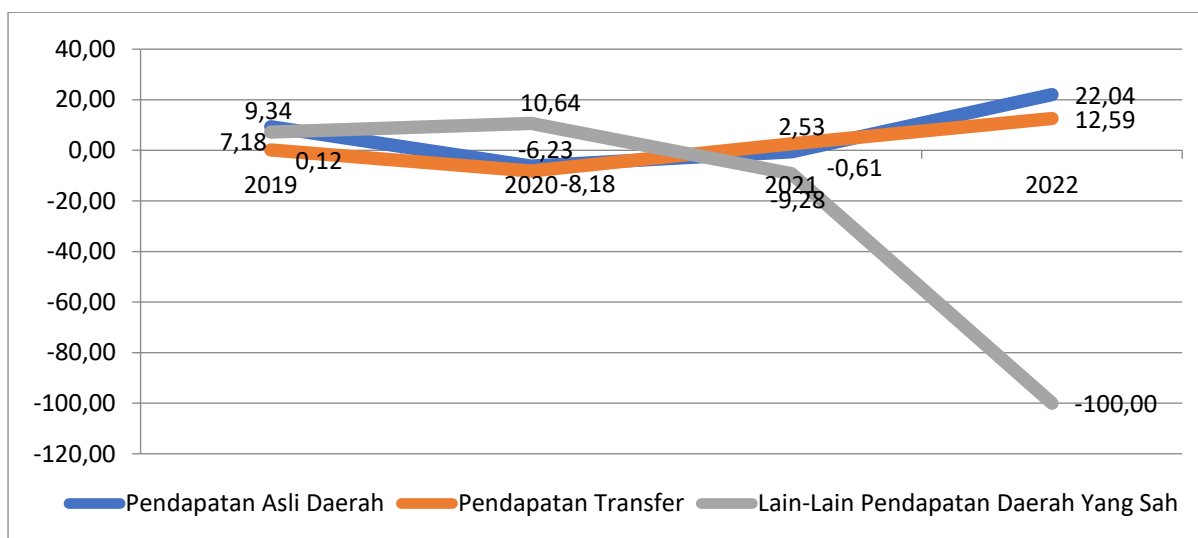
Komponen Pendapatan Asli Daerah, memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 6,14 persen dengan pertumbuhan tertinggi didapat dari Retribusi Daerah dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 37,40 persen, kemudian didapat dari Pajak Daerah dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,58 persen. Sumber Pendapatan Asli Daerah yang lain yaitu Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah masing-masing mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar minus 0,43 persen dan 7,03 persen.

Komponen Pendapatan Transfer mengalami pertumbuhan yang positif atau mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,76 persen. Pada komponen ini pertumbuhan positif terjadi pada Dana Perimbangan berupa Dana Bagi Hasil sebesar 27,14 persen, Dana Alokasi Khusus sebesar 2,03 persen dan Dana Insentif Daerah sebesar 19,27 persen. Sementara komponen lainnya pada Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat mengalami penurunan yaitu pada komponen Dana Alokasi Umum sebesar minus 1,27 persen. Adapun Pendapatan Transfer Antar Daerah mengalami pertumbuhan positif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 10,73 persen.

Selain itu, komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sampai dengan tahun 2021 menunjukkan rata-rata pertumbuhan yang positif yaitu sebesar 2,85 persen yang bersumber dari Pendapatan Hibah. Sedangkan sampai dengan tahun 2022, komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami pertumbuhan yang negatif yaitu sebesar minus 22,86 persen, hal ini dikarenakan pada tahun 2022 komponen ini bernilai nol.

Dilihat dari tren persentase pertumbuhan masing-masing komponen Pendapatan Daerah Kota Bima, dapat diketahui bahwa sumber pendapatan dari Pendapatan Transfer dan Pendapatan Asli Daerah berfluktuatif. Kedua komponen Pendapatan Daerah tersebut mengalami penurunan pada kurun waktu Pandemi Covid19 yaitu tahun 2019 sampai tahun 2021, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2022.

Namun jika dilihat dari nilai masing-masing komponen Pendapatan Daerah yang membentuk rasio kemandirian daerah, kinerja keuangan Kota Bima belum cukup baik dan belum mengarah pada kemandirian. Rasio kemandirian daerah dicerminkan oleh rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan, serta rasio transfer terhadap total pendapatan. Dua rasio tersebut memiliki sifat berlawanan, yaitu semakin tinggi rasio PAD semakin tinggi kemandirian daerah dan sebaliknya untuk rasio transfer. Tahun 2022 Rasio PAD terhadap Total Pendapatan sebesar 7,12 persen dan sebaliknya Rasio Transfer terhadap Total Pendapatan sebesar 92,88 persen. Hal ini menunjukkan Pendapatan Transfer masih menjadi mayoritas pembentuk pendapatan daerah Kota Bima sebagaimana disajikan dalam Gambar dibawah ini.

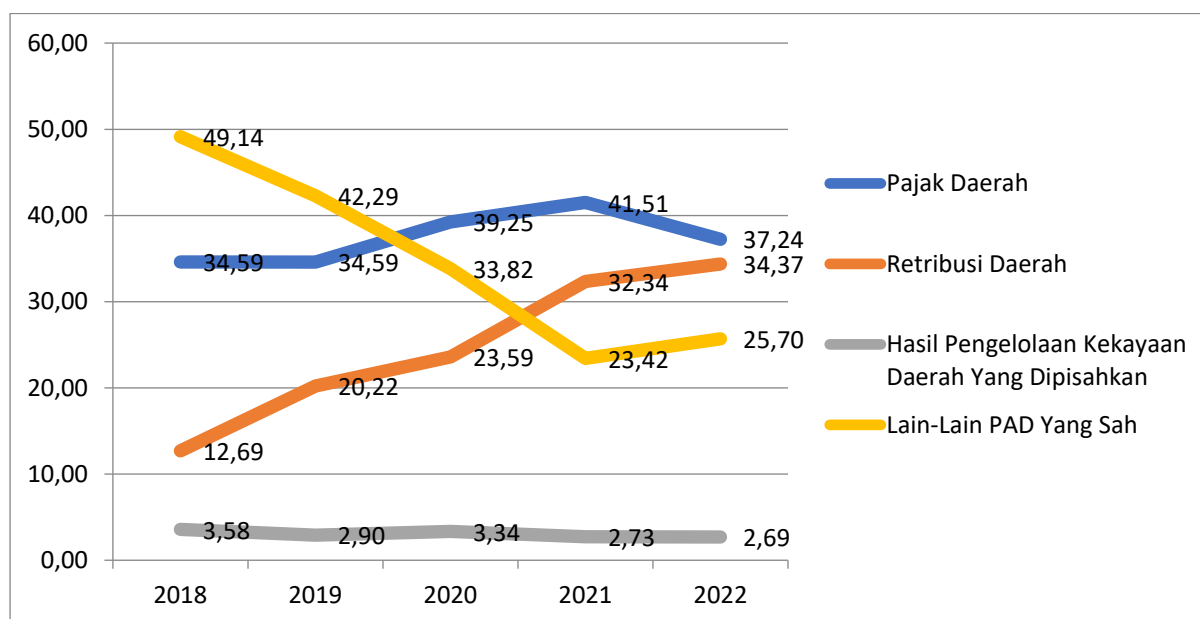


Gambar 3.1. Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Kota Bima Tahun 2018-2022

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bima Tahun 2018-2022 (Audited)

Apabila dilihat dari proporsi komponen pembentuk Pendapatan Asli Daerah, terlihat bahwa pendapatan dari Pajak Daerah merupakan komponen yang memberikan kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Adapun Lain-lain PAD yang Sah

memberikan kontribusi paling rendah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bima. Lebih lanjut dapat dilihat pada Gambar berikut.

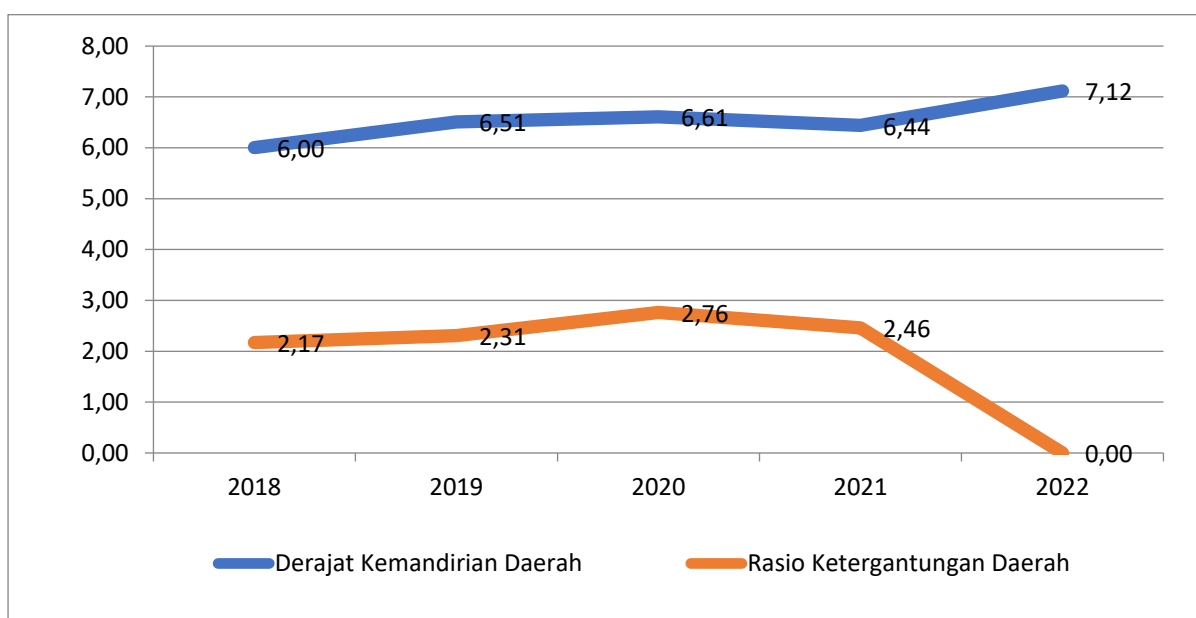


**Gambar 3.2. Proporsi Realisasi Komponen Pembentuk PAD
Kota Bima Tahun 2018-2022**

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bima Tahun 2018-2022 (Audited)

Derajat Kemandirian Daerah dan Rasio Ketergantungan Daerah menggambarkan tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap bantuan pihak eksternal, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah lain. Derajat Kemandirian Daerah ditunjukkan oleh proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan, sedangkan Rasio Ketergantungan Daerah ditunjukkan dari proporsi Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terhadap Total Pendapatan. Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan memiliki makna yang berkebalikan dengan rasio Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terhadap Total Pendapatan. Semakin besar angka proporsi Pendapatan Asli Daerah maka ketergantungan daerah semakin kecil. Sebaliknya semakin besar angka proporsi Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, maka semakin besar tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal. Dengan demikian, daerah yang memiliki tingkat ketergantungan yang rendah adalah daerah yang memiliki proporsi Pendapatan Asli Daerah yang tinggi sekaligus proporsi Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang rendah.

Perkembangan derajat kemandirian Kota Bima selama 4 tahun menunjukkan tren berfluktuasi, semula derajat kemandirian pada tahun 2018 sebesar 6,00 persen hingga sebesar 7,12 persen pada tahun 2022 dengan capaian tertinggi dicapai pada tahun 2022 dan terendah terjadi pada tahun 2018. Sedangkan rasio ketergantungan daerah Kota Bima juga menunjukkan tren berfluktuasi dari yang semula sebesar 2,17 persen pada tahun 2018 kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebesar 2,31 persen dan 2,76 persen pada tahun 2020 serta mengalami penurunan pada tahun 2021 sebesar 2,46 persen dan tahun 2022 sebesar 0,00 persen. Kondisi pada tahun 2020 menunjukkan kinerja keuangan Pemerintah Kota Bima relatif baik, yang dapat mengarah pada upaya mewujudkan kemandirian daerah. Lebih lanjut disajikan pada Gambar dibawah ini.



Gambar 3.3. Derajat Kemandirian Daerah dan Rasio Ketergantungan Daerah Kota Bima

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bima Tahun 2018-2022 (Audited)

3.1.2. Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja Daerah dikelompokkan menjadi: (1) Belanja Operasi, yang merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek; (2) Belanja Modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi; (3)

Belanja Tidak Terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya; dan (4) Belanja Transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

Analisis Belanja Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan pada periode tahun 2018-2022 yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan rencana Belanja Daerah di masa yang akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Perkembangan Belanja Daerah Kota Bima selama 5 tahun terakhir menunjukkan realisasi dengan kecenderungan menurun, yang semula pada tahun 2018 sebesar Rp.852.955.415.742,94 menjadi sebesar Rp. 749.196.056.304,73 pada tahun 2022 dengan belanja daerah tertinggi dicapai pada tahun 2018, terendah dialami pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp.716.700.153.286,42. Rata-rata pertumbuhan belanja daerah Kota Bima sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.3. Rata-Rata Pertumbuhan Belanja Daerah Kota Bima Tahun 2018-2022

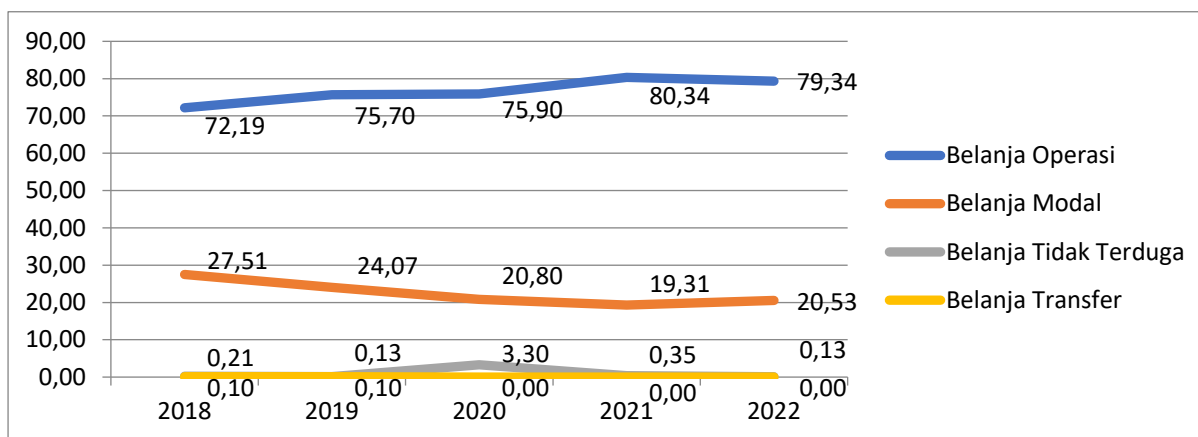
Uraian	Rata-Rata Pertumbuhan (%)	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Belanja	-3,02	852.955.415.742,94	796.259.444.362,27	796.653.090.963,73	716.700.153.286,42	749.196.056.304,73
Belanja Operasi	-0,83	615.744.356.242,00	602.797.708.441,56	604.662.659.665,71	575.787.111.971,68	594.440.854.017,00
Belanja Pegawai	0,77	351.030.320.828,00	363.582.580.570,94	360.913.051.466,29	357.437.167.837,55	361.680.806.870,00
Belanja Barang dan Jasa	7,14	168.033.893.974,00	168.667.626.819,33	146.888.810.652,00	200.214.962.134,13	209.804.746.008,00
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	-12,19	36.873.284.336,00	27.055.474.030,00	35.979.307.432,36	16.712.982.000,00	16.448.051.139,00
Belanja Bantuan Sosial	68,16	59.806.857.104,00	43.492.027.021,29	60.881.490.115,06	1.422.000.000,00	6.507.250.000,00
Belanja Modal	-9,30	234.618.482.307,94	191.649.681.895,71	165.721.375.475,02	138.378.990.564,74	153.809.784.287,73
Belanja Tanah	115,94	2.069.271.640,00	7.854.811.840,00	1.325.411.000,00	737.365.000,00	3.035.329.060,00
Belanja Peralatan dan Mesin	46,68	14.880.667.329,00	23.700.618.611,00	49.272.656.662,00	28.081.390.647,00	45.650.535.702,00
Belanja Gedung dan Bangunan	19,20	33.714.275.373,68	43.553.040.831,89	29.214.336.894,29	66.975.887.199,03	34.349.972.004,73
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-10,40	165.980.052.049,83	99.654.030.632,82	74.078.224.366,82	40.902.636.451,71	69.040.535.395,00

Uraian	Rata-Rata Pertumbuhan (%)	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Belanja Aset Tetap Lainnya	-29,68	17.974.215.915,43	16.887.179.980,00	11.830.746.551,91	1.681.711.267,00	1.733.412.126,00
Belanja Modal BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Tidak Terduga	582,59	1.770.165.541,00	1.000.000.000,00	26.269.055.823,00	2.534.050.750,00	945.418.000,00
Belanja Tidak Terduga	582,59	1.770.165.541,00	1.000.000.000,00	26.269.055.823,00	2.534.050.750,00	945.418.000,00
Belanja Transfer	-25,31	822.411.652,00	812.054.025,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan	-25,31	822.411.652,00	812.054.025,00	0,00	0,00	0,00
Surplus / (Defisit)		-84.884.727.718,12	-21.848.452.708,68	-81.269.303.280,78	12.987.358.464,25	56.607.153.392,23

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bima Tahun 2018-2022 (Audited)

Sepanjang Tahun 2018-2022, penggunaan Belanja Daerah berfluktuatif yang diperuntukkan untuk Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer sebagaimana disajikan dalam Gambar dibawah ini.

Gambar 3.4. Proporsi Realisasi Belanja terhadap Total Belanja



Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bima Tahun 2018-2022 (Audited)

3.1.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan Pembiayaan Daerah bersumber dari: SiLPA; Pencairan Dana Cadangan; Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengeluaran Pembiayaan Daerah dapat digunakan untuk: Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo; Penyertaan Modal Daerah; Pembentukan Dana Cadangan; Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan Pembiayaan Daerah Kota Bima berfluktuasi setiap tahunnya, dimana SiLPA memberikan kontribusi terbesar terhadap Penerimaan Pembiayaan Daerah. Sedangkan dari sisi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kota Bima, terlihat adanya peningkatan pengeluaran yang semula tidak dianggarkan pada tahun 2018 menjadi Rp. 2.000.000.000,00 pada tahun 2022. Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Bima yaitu untuk Penyertaan Modal pada perusahaan daerah (BUMD).

Adapun Pembiayaan Daerah Kota Bima periode tahun 2018 hingga tahun 2022 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.4. Rata-Rata Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Kota Bima Tahun 2018-2022

Uraian	Rata-Rata Pertumbuhan (%)	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Pembiayaan						
Penerimaan Pembiayaan	-12,43	200.458.301.376,52	115.589.886.350,39	93.243.087.895,71	10.974.821.367,93	21.967.826.874,18
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	-12,44	200.447.971.628,52	115.573.573.658,39	93.241.433.641,71	10.973.784.614,93	21.962.179.832,18
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	93,85	10.329.748,00	16.312.692,00	1.654.254,00	1.036.753,00	5.647.042,00
Pengeluaran Pembiayaan	50,00	0,00	500.000.000,00	1.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	50,00	0,00	500.000.000,00	1.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
Pembiayaan Netto		200.458.301.376,52	115.089.886.350,39	92.243.087.895,71	8.974.821.367,93	19.967.826.874,18
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)		115.573.573.658,40	93.241.433.641,71	10.973.784.614,93	21.962.179.832,18	76.574.980.266,41

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bima Tahun 2018-2022 (Audited)

3.1.4. Neraca Daerah

Neraca Daerah menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan Neraca Daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen Pemerintahan Daerah, pihak Legislatif Daerah maupun para kreditur/pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari: (1) aset lancar; (2) investasi jangka panjang; (3) aset tetap; (4) dana cadangan; dan (5) aset lainnya.

Perkembangan Neraca Daerah Kota Bima pada periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 disajikan pada tabel berikut di bawah ini.

Tabel 3.5. Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Bima Tahun 2018-2022

No	Uraian	Realisasi (Rp)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	A S E T						
2	ASET LANCAR						
3	KAS						
4	Kas di Kas Daerah	114.215.610.773,28	89.608.912.549,96	10.735.155.328,67	21.804.706.778,67	71.620.257.944,90	55,50
5	Kas di Kas Dana Kapitasi JKN FKTP	632.531.059,92	679.401.466,05	113.613.390,00	0,00	7.894.544,00	-43,97
6	Kas di Kas Bendahara Penerimaan	349.821.300,00	31.560.314,02	206.938.889,12	143.889,12	8.046.363,26	1.464,21
7	Kas di Kas Bendahara Pengeluaran	0,00	1.616.000,00	0,00	5.720.000,00	0,00	-50,00
8	Kas di Kas BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00	4.946.163.616,00	
9	Kas di Kas Dana BOS	725.431.825,20	2.951.503.625,70	125.015.896,26	151.753.053,51	664.161,51	33,23
10	Kas Lainnya - di Bendahara Pengeluaran	4.246.927,00	57.718.744,76	5.577.486,00	642.444,00	32.855.987,00	1.523,62
11	Jumlah Kas	115.927.641.885,40	93.330.712.700,49	11.186.300.990,05	21.962.966.165,30	76.615.882.616,67	59,42
12	Piutang						
13	Piutang Pajak	7.763.570.136,71	8.847.322.680,50	10.100.588.296,12	11.543.811.889,54	13.211.288.451,55	14,21
14	Penyisihan Piutang Pajak	-3.552.486.268,13	-4.549.551.078,22	-5.590.475.390,48			-12,26
15	Piutang Pajak Netto	4.211.083.868,58	4.297.771.602,28	4.510.112.905,64			-23,25
16	Piutang Retribusi	1.479.336.405,36	3.378.085.348,36	3.045.942.462,00	3.243.676.649,00	6.570.013.361,00	56,89
17	Penyisihan Piutang Retribusi	-952.727.773,94	-1.403.511.024,57	-1.808.532.774,44			-5,96
18	Piutang Retribusi Netto	526.608.631,42	1.974.574.323,79	1.237.409.687,56			34,41
19	Piutang Dana Bagi Hasil	21.339.374.118,00	10.505.792.473,00	10.025.579.119,00			-38,83
20	Penyisihan Piutang Dana Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00			
21	Piutang Dana Bagi Hasil Netto	21.339.374.118,00	10.505.792.473,00	10.025.579.119,00			-38,83
22	Piutang Deviden	0,00	0,00	0,00			
23	Piutang Lainnya	0,00	0,00	35.000.000,00		1.239.295,74	-25,00
24	Penyisihan Piutang Lainnya	0,00	0,00	0,00			
25	Piutang Lainnya Netto	0,00	0,00	35.000.000,00			-25,00

No	Uraian	Realisasi (Rp)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2018	2019	2020	2021	2022	
26	Belanja Dibayar Dimuka	148.958.333,34	2.520.980.222,03	381.153.304,45	2.969.280.200,00	274.770.484,00	523,95
27	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	2.850.445.021,14	2.987.002.079,23	2.845.318.495,90			-24,99
28	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00	0,00			
29	Piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Netto	2.850.445.021,14	2.987.002.079,23	2.845.318.495,90	2.778.761.737,25	2.778.761.737,25	-0,57
30	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	1.010.385.620,00	5.838.305.715,00	119,46
31	Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00	0,00	4.799.141.791,00	4.361.716.996,00	-2,28
32	Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	-9.145.910.533,21	-11.247.114.710,88	5,74
33	Jumlah Piutang	29.076.469.972,48	22.286.120.700,33	19.034.573.512,55	17.199.147.353,58	21.788.981.329,66	-5,22
34	Persediaan	2.763.263.518,35	2.763.263.518,35	17.698.117.595,74	10.469.710.895,88	12.186.271.978,05	129,01
35	JUMLAH ASET LANCAR	147.767.375.376,23	118.380.096.919,17	47.918.992.098,34	49.631.824.414,76	110.591.135.924,38	11,75
36	INVESTASI JANGKA PANJANG						
37	Investasi Non Permanen						
38	Investasi Dana Bergulir	3.550.493.435,00	3.534.180.743,00	3.532.526.489,00	3.531.489.736,00	3.525.842.694,00	-0,17
39	Dana Bergulir Diragukan Tertagih	-3.185.293.736,00	-3.346.647.667,50	-3.532.526.489,00	-3.531.489.736,00	-3.525.842.694,00	2,61
40	Jumlah Investasi Non Permanen	365.199.699,00	187.533.075,50	0,00	0,00	0,00	-37,16
41	Investasi Permanen						
42	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	11.912.370.394,00	12.412.370.394,00	13.412.370.394,00	14.612.249.186,29	16.937.626.176,93	9,28
43	Jumlah Investasi Permanen	11.912.370.394,00	12.412.370.394,00	13.412.370.394,00	14.612.249.186,29	16.937.626.176,93	9,28
44	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	12.277.570.093,00	12.599.903.469,50	13.412.370.394,00	14.612.249.186,29	16.937.626.176,93	8,48
45	ASET TETAP						
46	Tanah	98.752.770.652,00	106.572.203.992,00	542.813.686.849,00	547.910.105.241,37	570.064.223.241,37	105,56
47	Peralatan dan Mesin	188.333.945.974,35	221.863.700.059,41	266.321.791.632,74	292.753.815.364,26	331.728.951.182,14	15,27
48	Gedung dan Bangunan	505.640.234.260,41	534.274.175.792,30	576.481.970.544,44	614.844.747.188,93	722.897.429.589,66	9,45
49	Jalan, Irigasi dan Jaringan	905.891.882.912,91	1.023.816.130.074,23	1.128.750.005.178,81	1.173.746.744.126,20	1.235.419.949.690,20	8,13
50	Aset Tetap Lainnya	55.218.150.109,57	65.864.847.668,80	76.900.049.609,80	80.079.328.699,71	85.432.671.685,71	11,71
51	Konstruksi Dalam Pengerjaan	34.411.422.015,41	43.414.140.630,69	3.412.148.409,46	29.496.862.800,00	8.402.727.432,20	156,74

No	Uraian	Realisasi (Rp)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2018	2019	2020	2021	2022	
52	Akumulasi Penyusutan	-541.827.114.711,74	-645.467.592.900,41	-753.190.943.027,20	-873.866.912.418,86	-999.848.757.402,54	16,56
53	JUMLAH ASET TETAP	1.246.421.291.212,91	1.350.337.605.317,02	1.841.488.709.197,05	1.864.964.691.001,61	1.954.097.195.418,74	12,69
54	ASET LAINNYA						
55	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	618.679.232,78	117.440.440,87	64.898.774,20	34.766.666,67	34.766.666,67	-43,05
56	Aset Tak Berwujud	1.542.126.000,00	1.547.126.000,00	2.515.568.535,00	2.561.978.535,00	2.596.965.735,00	16,53
57	Amortisasi Aset Tak Berwujud	-235.785.288,00	-313.141.588,00	-438.920.014,78	-567.018.941,56	-692.600.664,00	31,08
58	Aset Lain-Lain	16.235.108.783,14	17.865.992.067,83	17.892.965.155,29	43.921.240.450,79	47.549.531.887,56	40,98
59	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	0,00	0,00	-350.910.849,89	-26.341.073.228,06	-29.084.696.063,50	1.854,23
60	JUMLAH ASET LAINNYA	18.160.128.727,92	19.217.416.920,70	19.683.601.599,82	19.609.893.482,84	20.403.967.561,73	2,98
61	JUMLAH ASET	1.424.626.365.410,06	1.500.535.022.626,39	1.922.503.673.289,21	1.948.818.658.085,50	2.102.029.925.081,78	10,67
62	KEWAJIBAN						
63	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
64	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	4.246.927,00	57.718.744,76	5.577.486,00	642.444,00	32.855.987,00	1.523,62
65	Pendapatan diterima dimuka	218.166.992,65	186.523.993,86	176.542.524,40	219.049.135,76	201.506.362,51	-0,95
66	Utang Belanja	228.268.928,00	148.747.599,00	2.074.300.840,00	508.956.003,00	505.977.977,00	295,91
67	Utang Jangka Pendek Lainnya	905.952.906,43	6.180.768.565,81	0,00	0,00	0,00	120,56
68	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	1.356.635.754,08	6.573.758.903,43	2.256.420.850,40	728.647.582,76	740.340.326,51	63,20
69	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
70	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72	JUMLAH KEWAJIBAN	1.356.635.754,08	6.573.758.903,43	2.256.420.850,40	728.647.582,76	740.340.326,51	63,20
73	EKUITAS						
74	Ekuitas	1.423.269.729.655,98	1.495.085.421.389,40	1.920.247.252.438,80	1.948.090.010.502,74	2.101.289.584.755,27	10,70
75	JUMLAH EKUITAS	1.423.269.729.655,98	1.495.085.421.389,40	1.920.247.252.438,80	1.948.090.010.502,74	2.101.289.584.755,27	10,70
76	JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS	1.424.626.365.410,06	1.501.659.180.292,83	1.922.503.673.289,20	1.948.818.658.085,50	2.102.029.925.081,78	10,67

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bima Tahun 2018-2022 (Audited)

Berdasarkan neraca daerah tersebut, dapat dianalisis kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio. Rasio keuangan yang dianalisis yaitu Rasio Likuiditas dan Rasio Solvabilitas (*Leverage*). Rasio Likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio Likuiditas yang digunakan dalam analisis ini adalah:

1. *Current Ratio* (rasio lancar) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan keuangan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya menggunakan kas yang dimilikinya. Dari analisis yang dilakukan dapat diketahui bahwa rasio lancar Pemerintah Daerah Kota Bima berada dibawah angka 1 (satu), menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kota Bima dalam membayar kewajiban jangka pendeknya menggunakan kas yang dimilikinya tergolong rendah.
2. *Quick Ratio* (rasio cair) yaitu ukuran kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang lebih likuid, dimana persediaan merupakan unsur aset lancar yang paling tidak likuid, sehingga harus dikeluarkan dari perhitungan. Dengan melihat analisis yang dilakukan, Pemerintah Kota Bima pada tahun 2020 dan 2022 capaiannya kurang dari 1 (satu), artinya Pemerintah Daerah tidak memiliki kemampuan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Hal ini menunjukkan keterbatasan kas dan piutang untuk membayar kewajiban jangka pendek.

Tabel 3.6. Analisis Rasio Likuiditas Neraca Daerah Kota Bima Tahun 2018-2022

No.	Uraian	Rasio Likuiditas				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
	Aset Lancar	1.424.626.365.410,06	1.500.535.022.626,39	1.922.503.673.289,21	1.948.818.658.085,50	2.102.029.925.081,78
	Kewajiban Lancar	1.424.626.365.410,06	1.501.659.180.292,83	1.922.503.673.289,20	1.948.818.658.085,50	2.102.029.925.081,78
1	Current Ratio	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Aset Lancar	1.424.626.365.410,06	1.500.535.022.626,39	1.922.503.673.289,21	1.948.818.658.085,50	2.102.029.925.081,78
	Persediaan	2.763.263.518,35	2.763.263.518,35	17.698.117.595,74	10.469.710.895,88	12.186.271.978,05
	Kewajiban Lancar	1.424.626.365.410,06	1.501.659.180.292,83	1.922.503.673.289,20	1.948.818.658.085,50	2.102.029.925.081,78
2	Quick Ratio	1,00	1,00	0,99	0,99	0,99

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bima Tahun 2018-2022 (Audited)

Rasio Solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjang sekaligus menunjukkan indikasi tingkat keamanan bagi para kreditur. Rasio yang digunakan yaitu:

1. Rasio total hutang terhadap total aset, adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya menggunakan aset yang dimilikinya, yang menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, di mana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan, juga menandakan informasi semakin besar resiko yang dihadapi oleh kreditur. Pengaruh hutang terhadap aktiva Pemerintah Kota Bima tergolong kecil, yaitu hanya 0,04 persen pada tahun 2022 dan tertinggi sebesar 0,44 persen pada tahun 2019. Hal ini berarti kewajiban-kewajiban jangka panjang Pemerintah Daerah sangat kecil dibandingkan aset yang dimilikinya. Kondisi ini menunjukkan bahwa dengan aset yang dimilikinya, pemerintah akan mampu membayar kewajiban jangka panjangnya.
2. Rasio hutang terhadap modal digunakan untuk mengukur kebutuhan untuk berhutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki, dimana semakin kecil nilainya berarti semakin mandiri atau tidak bergantung pada pembiayaan dari kreditur. Dari tabel Analisa Rasio Solvabilitas yang dilakukan diketahui bahwa rasio hutang terhadap modal Pemerintah Kota Bima tergolong baik dengan nilai rasio terbaik dicapai pada tahun 2021 dan 2022 sebesar 0,04 persen dan terendah sebesar 0,44 persen pada tahun 2019.

**Tabel 3.7. Analisa Rasio Solvabilitas Neraca Daerah Kota Bima
Tahun 2018-2022**

No	Uraian	Rasio Solvabilitas				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
	Total Aset	1.424.626.365.410,06	1.500.535.022.626,39	1.922.503.673.289,21	1.948.818.658.085,50	1.954.097.195.418,74
	Kewajiban	1.356.635.754,08	6.573.758.903,43	2.256.420.850,40	728.647.582,76	740.340.326,51
1	Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset	0,10	0,44	0,12	0,04	0,04
	Ekuitas	1.423.269.729.655,98	1.495.085.421.389,40	1.920.247.252.438,80	1.948.090.010.502,74	2.101.289.584.755,27
	Kewajiban	1.356.635.754,08	6.573.758.903,43	2.256.420.850,40	728.647.582,76	740.340.326,51
2	Rasio Hutang Terhadap Modal	0,10	0,44	0,12	0,04	0,04

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bima Tahun 2018-2022 (Audited)

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Terkait dengan Kebijakan Pengelolaan Keuangan kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2022, akan diuraikan ke dalam substansi Proporsi Penggunaan Anggaran untuk melihat proporsi belanja yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan aparatur; serta Analisis Pembiayaan, yang diuraikan ke dalam analisis Sumber Penutup Defisit Riil, analisis realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), dan analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi belanja yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan aparatur cenderung meningkat dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Diharapkan proporsi penggunaan belanja untuk kebutuhan aparatur dapat menurun dan proporsi penggunaan belanja untuk pembangunan menjadi meningkat, sehingga dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pelayanan publik. Proporsi penggunaan belanja daerah Kota Bima disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.8. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Bima Tahun 2018-2022

No.	Uraian	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Belanja Pegawai) (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan) (Rp)	Persentase (%)
1	2	3	4	$5 = 3 / 4 \times 100\%$
1	Tahun Anggaran 2018	351.030.320.828,00	852.955.415.742,94	41,15
2	Tahun Anggaran 2019	363.582.580.570,94	796.759.444.362,27	45,63
3	Tahun Anggaran 2020	360.913.051.466,29	797.653.090.963,73	45,25
4	Tahun Anggaran 2021	357.437.167.837,55	716.700.153.286,42	49,87
5	Tahun Anggaran 2022	361.680.806.870,00	749.196.056.304,73	48,28

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bima Tahun 2018-2022 (Audited)

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Untuk menyalurkan surplus atau menutup defisit, dalam penganggaran dikenal Pembiayaan Daerah. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

1. Analisis Sumber Penutup Defisit Riil

Analisis Pembiayaan Daerah dilakukan dengan terlebih dahulu mencari besarnya defisit riil anggaran, sekaligus mencari penutup defisit riil anggaran tersebut. Surplus/defisit riil anggaran Kota Bima yang disajikan pada Tabel 3.9 di bawah menunjukkan bahwa Kota Bima memiliki surplus pada tahun 2021 dan 2022. Sementara pada tahun 2018, 2019, dan 2020 anggaran mengalami defisit.

Tabel 3.9. Defisit Riil Anggaran Kota Bima Tahun 2018-2022

No	Uraian	Realisasi (Rp)				
		2018	2019	2020	2021	2022
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1	Realisasi Pendapatan Daerah	768.070.688.024,82	774.410.991.653,59	715.383.787.682,95	729.687.511.750,67	805.803.209.696,96
	<i>Dikurangi Realisasi :</i>					
2	Belanja Daerah	852.955.415.742,94	796.259.444.362,27	796.653.090.963,73	716.700.153.286,42	749.196.056.304,73
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0	500.000.000,00	1.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
	Defisit Riil	(84.884.727.718,12)	(22.348.452.708,68)	(82.269.303.280,78)	10.987.358.464,25	54.607.153.392,23

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bima Tahun 2018-2022 (Audited)

Kemampuan Kota Bima untuk menutup defisit riil dapat dilihat dari analisis komposisi penutup defisit riil pada tabel di bawah ini. Terlihat bahwa pada tahun 2018 hingga tahun 2022 Pemerintah Kota Bima mempunyai SILPA yang cukup besar sebagai akumulasi dari surplus/defisit, ditambah penerimaan pembiayaan yang relatif besar. Kondisi demikian menggambarkan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Bima cukup kuat untuk membiayai belanja.

Tabel 3.10. Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Bima Tahun 2018-2022

No	Uraian	Realisasi (Rp)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pendapatan Daerah	768.070.688.024,82	774.410.991.653,59	715.383.787.682,95	729.687.511.750,67	805.803.209.696,96	1,41
2	Belanja Daerah	852.955.415.742,94	796.259.444.362,27	796.653.090.963,73	716.700.153.286,42	749.196.056.304,73	-3,02
3	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	500.000.000,00	1.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	50,00
A	Defisit Riil	(84.884.727.718,12)	(22.348.452.708,68)	(82.269.303.280,78)	10.987.358.464,25	54.607.153.392,23	119,52
Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan							
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	200.447.971.628,52	115.573.573.658,39	93.241.433.641,71	10.973.784.614,93	21.962.179.832,18	-12,44
2	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	10.329.748,00	16.312.692,00	1.654.254,00	1.036.753,00	5.647.042,00	93,85
B	Total Realisasi Penerimaan	200.458.301.376,52	115.589.886.350,39	93.243.087.895,71	10.974.821.367,93	21.967.826.874,18	-12,43
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)		115.573.573.658,40	93.241.433.641,71	10.973.784.614,93	21.962.179.832,18	76.574.980.266,41	60,31

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bima Tahun 2018-2022 (Audited)

2. Analisis Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Analisis SiLPA diperlukan untuk melihat dari mana sumber perolehan SiLPA, dan seberapa besar kontribusi yang diberikan. Berikut adalah gambaran perolehan SiLPA selama tahun 2018 hingga 2022 disajikan dalam Tabel di bawah ini.

**Tabel 3.11. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Kota Bima Tahun 2018-2022**

No.	Uraian	2018		2019		2020		2021		2022	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Jumlah SiLPA	115.573.573.658,40	100,00	93.241.433.641,71	100,00	10.973.784.614,93	100,00	21.962.179.832,18	100,00	76.574.980.266,41	100,00
2	Pelampauan Penerimaan PAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Sampai Dengan Akhir Tahun Belum terselesaikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kegiatan Lanjutan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bima Tahun 2018-2022 (Audited)

3.3. Kerangka Pendanaan

3.3.1. Proyeksi Pendapatan Daerah

Proyeksi pendapatan Daerah untuk tahun 2024-2026 secara umum didasarkan pada perkembangan penerimaan pendapatan pada kurun waktu 2018-2022. Tren pertumbuhan anggaran dalam kurun waktu yang semakin panjang secara konseptual merefleksikan bagaimana kemampuan pencapaian penerimaan pendapatan dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menghimpun pendapatan dari berbagai sumber yang ada. Namun demikian, penentuan anggaran ini juga mempertimbangkan karakteristik pendapatan daerah, sehingga penentuan anggaran berdasarkan tren relatif kurang tepat; sebagai contoh terkait dengan dana perimbangan, yang penentuan besarnya sangat bergantung pada kebijakan pemerintah pusat.

Mengingat karakteristik pendapatan yang berbeda, proyeksi pendapatan diperhitungkan dari perkembangan masing-masing sumber pendapatan daerah dan berbagai asumsi yang diperkirakan akan mempengaruhi penerimaan di masa mendatang. Terkait dengan itu, beberapa asumsi yang digunakan dalam memproyeksikan besaran anggaran pendapatan daerah dengan data dasar APBD murni tahun 2023 yaitu:

- a. Asumsi perhitungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menggunakan pendekatan pertumbuhan linier untuk setiap komponennya.
- b. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diproyeksikan meningkat sebesar 5%, hal ini didasarkan pada komitmen pemerintah kota dalam upaya mengoptimalkan potensi lokal sebagai penunjang dalam peningkatan pendapatan. Sedangkan komponen PAD berupa Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah dianggap konstan.
- c. Perhitungan proyeksi Pendapatan Transfer mengalami kenaikan pada komponen Pendapatan Transfer Pusat sebesar 2% dengan asumsi terjadi peningkatan pada penerimaan alokasi DAU dan DAK, sedangkan pada komponen Pendapatan Transfer Antar Daerah berkurang sebesar 200 Juta dari komponen Bantuan Keuangan Provinsi. Penentuan terjadinya kenaikan tersebut sebetulnya masih dalam pertimbangan yang relatif optimis bahwa pemerintah pusat tidak menerapkan kebijakan penurunan pemberian dana perimbangan.

Kebijakan pendapatan merupakan rencana jangka menengah dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan agar kapasitas fiskal daerah mampu menopang upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Kebijakan pendapatan tahun 2024-2026 difokuskan untuk memberdayakan potensi pendapatan daerah dan mendorong peningkatan dana perimbangan melalui:

- a. Optimalisasi penggalan sumber-sumber pendapatan daerah (ekstensifikasi dan intensifikasi).
- b. Peningkatan pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan aset daerah yang berdaya guna dan berhasil guna.
- c. Peningkatan sistem pelayanan unit pelayanan teknis daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- d. Peningkatan profesionalisme sumber daya manusia dalam pengelolaan pendapatan daerah.
- e. Peningkatan koordinasi dengan Perangkat Daerah penghasil PAD.
- f. Pengembangan fasilitas sarana dan prasarana untuk peningkatan investasi dan sumber-sumber pendapatan.
- g. Pengembangan dan peningkatan pengelolaan perusahaan daerah.
- h. Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- i. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait dana perimbangan.
- j. Penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah melalui revisi perda-perda yang berhubungan dengan pendapatan daerah.

Hasil proyeksi pendapatan daerah Kota Bima tahun 2024-2026 secara rinci ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 3.12. Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2024-2026

Kode	Uraian	2024	2025	2026	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
4	PENDAPATAN DAERAH				
04.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH	65.159.895.756,00	67.662.261.072,00	70.289.744.654,00	3,86
04.01.01	Pajak Daerah	26.186.241.058,00	27.495.553.111,00	28.870.330.767,00	5,00
04.01.02	Retribusi Daerah	23.861.065.242,00	25.054.118.505,00	26.306.824.431,00	5,00
04.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.284.388.412,00	1.284.388.412,00	1.284.388.412,00	0,00
04.01.04	Lain-lain PAD yang Sah	13.828.201.044,00	13.828.201.044,00	13.828.201.044,00	0,00
04.02	PENDAPATAN TRANSFER	733.004.692.204,00	745.847.925.304,00	758.691.158.404,00	1,74
04.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	665.204.888.100,00	678.248.121.200,00	691.291.354.300,00	1,94
04.02.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	67.799.804.104,00	67.599.804.104,00	67.399.804.104,00	-0,30
	Jumlah Pendapatan	798.164.587.960,00	813.510.186.376,00	828.980.903.058,00	1,91

Sumber: Hasil Analisis

3.3.2. Proyeksi Belanja yang Bersifat Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama

Analisis proyeksi belanja dan pengeluaran yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah. Format laporan keuangan yang dibuat mengikuti ketentuan dalam Permendagri Nomor 60 tahun 2020 yang membagi belanja menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja tidak terduga dan Belanja Transfer. Proyeksi belanja dilakukan dengan menggunakan pendekatan linear. Namun demikian, penentuan belanja ini juga mempertimbangkan anggaran pendapatan dan ketersediaan surplus anggaran tahun-tahun sebelumnya.

Penyelenggaraan fungsi pemerintah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan (*money follow function*).

Mencermati pola belanja dalam laporan keuangan yang tersedia yaitu tahun anggaran 2018 sampai dengan 2022, dapat diambil beberapa asumsi sebagai berikut:

1. Pola perubahan belanja operasi menunjukkan perubahan yang relatif konstan. Oleh karena itu, proyeksi terhadap belanja ini menggunakan pendekatan linear dengan mempertimbangan kebijakan penerimaan pegawai PPPK serta asumsi kenaikan DAK Non fisik TPG dan Tamsil sehingga mempengaruhi ketentuan perhitungan belanja pegawai maksimal 30% selama 5 tahun.
2. Pola perubahan belanja modal sangat berfluktuasi, tidak sama antar satu belanja dengan belanja lain. Namun demikian, dikarenakan karakteristik belanja ini yang bersifat strategis terhadap peningkatan pelayanan publik, maka target belanja ini dinaikkan sesuai (akan linear) dengan perubahan pendapatan. Idealnya porsi belanja ini akan terus meningkat seiring dengan komitmen untuk meningkatkan pelayanan publik. Selama periode ini, Pemerintah Kota Bima berkomitmen untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, diperlukan komitmen kuat dari pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan kapasitas fiskalnya dengan mengoptimalkan potensi lokal yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Hasil proyeksi belanja daerah Kota Bima tahun 2024-2026 secara rinci ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 3.13. Proyeksi Belanja Tahun 2024-2026

Kode	Uraian	2024	2025	2026
5	BELANJA			
05.01	BELANJA OPERASI	684.330.934.997,00	684.676.533.413,00	687.147.250.095,00
05.01.01	Belanja Pegawai	399.460.588.381,00	399.460.588.381,00	399.460.588.381,00
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	253.961.090.616,00	254.306.689.032,00	256.777.405.714,00
05.01.05	Belanja Hibah	27.329.756.000,00	27.329.756.000,00	27.329.756.000,00
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	3.579.500.000,00	3.579.500.000,00	3.579.500.000,00
05.02	BELANJA MODAL	123.833.652.963,00	133.833.652.963,00	141.833.652.963,00
05.02.01	Belanja Modal Tanah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.953.757.193,00	20.953.757.193,00	20.953.757.193,00
05.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	47.326.138.300,00	50.326.138.300,00	54.326.138.300,00
05.02.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	52.449.966.560,00	55.449.966.560,00	59.449.966.560,00
05.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.103.790.910,00	5.103.790.910,00	5.103.790.910,00
05.03	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
05.03.01	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
	Jumlah Belanja	811.164.587.960,00	821.510.186.376,00	831.980.903.058,00

Sumber: Hasil Analisis

3.3.3. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan daerah selama 3 (tiga) tahun ke depan. Tahapan penghitungan kerangka pendanaan didahului dengan penghitungan kapasitas riil keuangan daerah, yaitu total penerimaan daerah setelah dikurangi dengan belanja yang bersifat mengikat. Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.

Hasil penghitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.14. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026

Uraian	2024	2025	2026
Total Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan	813.164.587.960	823.510.186.376	833.980.903.058
Pendapatan	798.164.587.960	813.510.186.376	828.980.903.058
Penerimaan Pembiayaan	15.000.000.000	10.000.000.000	5.000.000.000
Prioritas 1 (Belanja Yang Bersifat Mengikat)	653.421.678.997	653.767.277.413	656.237.994.095
Belanja Pegawai	399.460.588.381	399.460.588.381	399.460.588.381
Belanja Barang dan Jasa	253.961.090.616	254.306.689.032	256.777.405.714
Kapasitas riil kemampuan keuangan	159.742.908.963	169.742.908.963	177.742.908.963

Sumber: Hasil Analisis

Pengalokasian belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan Kota Bima menyesuaikan dengan pendapatan daerah. Belanja daerah diproyeksikan meningkat dari **Rp. 811.164.587.960,00** pada tahun 2024 menjadi **Rp. 831.980.903.058,00** pada tahun 2026. Kebijakan dalam pengalokasian belanja daerah Kota Bima sebagai berikut.

1. Anggaran belanja daerah yang ditetapkan dalam periode 2024-2026 sebagian besar melebihi anggaran pendapatan daerah. Anggaran selama periode berjalan cenderung mengalami defisit setiap tahunnya, namun hal ini relatif teratasi karena adanya SiLPA pada tahun-tahun sebelumnya.
2. Belanja diprioritaskan pada belanja yang bersifat mengikat, dalam hal ini belanja pegawai serta belanja barang dan jasa.
3. Selebihnya dari saldo anggaran yang ada, akan digunakan untuk membiayai belanja wajib untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, infrastruktur, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.
4. Belanja modal dianggarkan semakin meningkat. Peningkatan belanja ini ditujukan untuk pemenuhan barang-barang publik (*public goods*), sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari layanan publik yang disediakan.
5. Komitmen pembiayaan terkait dengan kepemilikan pada Badan Usaha Milik Daerah, baik yang dimiliki oleh pemerintah kota maupun provinsi mengacu pada peraturan tentang penyertaan modal pemerintah daerah.
6. Belanja hibah dan bantuan sosial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Hasil penghitungan proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.15. Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2024-2026

Kode	Uraian	2024	2025	2026
4	PENDAPATAN DAERAH			
04.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH	65.159.895.756,00	67.662.261.072,00	70.289.744.654,00
04.01.01	Pajak Daerah	26.186.241.058,00	27.495.553.111,00	28.870.330.767,00
04.01.02	Retribusi Daerah	23.861.065.242,00	25.054.118.505,00	26.306.824.431,00
04.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.284.388.412,00	1.284.388.412,00	1.284.388.412,00
04.01.04	Lain-lain PAD yang Sah	13.828.201.044,00	13.828.201.044,00	13.828.201.044,00
04.02	PENDAPATAN TRANSFER	733.004.692.204,00	745.847.925.304,00	758.691.158.404,00
04.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	665.204.888.100,00	678.248.121.200,00	691.291.354.300,00
04.02.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	67.799.804.104,00	67.599.804.104,00	67.399.804.104,00
	Jumlah Pendapatan	798.164.587.960,00	813.510.186.376,00	828.980.903.058,00
5	BELANJA			
05.01	BELANJA OPERASI	684.330.934.997,00	684.676.533.413,00	687.147.250.095,00
05.01.01	Belanja Pegawai	399.460.588.381,00	399.460.588.381,00	399.460.588.381,00
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	253.961.090.616,00	254.306.689.032,00	256.777.405.714,00
05.01.05	Belanja Hibah	27.329.756.000,00	27.329.756.000,00	27.329.756.000,00
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	3.579.500.000,00	3.579.500.000,00	3.579.500.000,00
05.02	BELANJA MODAL	123.833.652.963,00	133.833.652.963,00	141.833.652.963,00
05.02.01	Belanja Modal Tanah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.953.757.193,00	20.953.757.193,00	20.953.757.193,00

Kode	Uraian	2024	2025	2026
05.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	47.326.138.300,00	50.326.138.300,00	54.326.138.300,00
05.02.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	52.449.966.560,00	55.449.966.560,00	59.449.966.560,00
05.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.103.790.910,00	5.103.790.910,00	5.103.790.910,00
05.03	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
05.03.01	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
	Jumlah Belanja	811.164.587.960,00	821.510.186.376,00	831.980.903.058,00
	Total Surplus/(Defisit)	(13.000.000.000,00)	(8.000.000.000,00)	(3.000.000.000,00)
6	PEMBIAYAAN			
06.01	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	15.000.000.000,00	10.000.000.000,00	5.000.000.000,00
06.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	15.000.000.000,00	10.000.000.000,00	5.000.000.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	15.000.000.000,00	10.000.000.000,00	5.000.000.000,00
06.02	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
06.02.02	Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	13.000.000.000,00	8.000.000.000,00	3.000.000.000,00
06.03	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0,00	0,00	0,00

Sumber: Hasil Analisis

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Permasalahan dan isu strategis daerah dalam dokumen Rancangan Pembangunan Daerah (RPD) merupakan hasil dari telaahan dokumen-dokumen perencanaan meliputi hasil evaluasi dokumen Perubahan RPJMD Kota Bima tahun 2018-2023, RPJPD Kota Bima Tahun 2008-2028, RPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2026, RPJPN dan RPJMN yang meliputi permasalahan-permasalahan yang menjadi isu nasional maupun isu permasalahan yang ada di tingkat daerah. Selain dari telaahan dokumen perencanaan juga mencakup kebijakan-kebijakan nasional, maupun isu global yang juga turut mempengaruhi isu permasalahan nasional dan daerah.

Telaahan masalah-masalah penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan sebagaimana diuraikan tersebut, diidentifikasi menjadi masalah pokok dan akan dijadikan isu strategis daerah, dalam kondisi yang ada sekarang dan selanjutnya akan dirumuskan menjadi suatu tujuan, sasaran, strategis, dan arah kebijakan yang akan digambarkan dalam dokumen RPD Kota Bima tahun 2024-2026. Penyusunan Bab IV juga dilakukan melalui analisis atas gambaran umum kondisi daerah yang berisi tentang capaian kinerja pembangunan dalam Perubahan RPJMD 2018-2023 yang diuraikan pada Bab II. Dengan demikian dapat terlihat permasalahan pembangunan yang menjadi kesenjangan antara target dan harapan dalam dokumen perencanaan dengan realitas di lapangan. Permasalahan yang muncul kemudian dielaborasi dengan berbagai lingkungan strategis yang bersifat membawa potensi sekaligus tantangan bagi pembangunan daerah. Lingkungan strategis yang menjadi bahan pertimbangan antara lain isu internasional, nasional, provinsi maupun daerah sekitar Kota Bima.

Elaborasi antara permasalahan pembangunan pada setiap kategori antara lain Sumberdaya Manusia (SDM), Ekonomi, Infrastruktur, Tata Kelola Pemerintahan dan Sosial yang akan di-*mapping* dalam urusan penyelenggaraan Pemerintahan baik yang merupakan urusan wajib pelayanan dasar, dan wajib yang bukan pelayanan dasar, serta urusan pilihan yang menjadi sektor unggulan serta potensi daya saing daerah, yang menjadi isu strategis yang harus diintervensi dan akan terus didorong menjadi rumusan tujuan serta sasaran strategis dalam dokumen RPD.

4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan adalah gambaran kesenjangan kinerja yang

direncanakan dengan yang dicapai pada saat ini. Kesenjangan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang mempengaruhi seperti kapasitas kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, perkembangan teknologi, sarana prasarana maupun bencana baik bencana alam maupun non alam seperti Covid-19. Dengan demikian, perumusan permasalahan pembangunan ini akan fokus pada beberapa capaian pembangunan yang belum memenuhi target kinerja baik itu target SPM dan NSPK maupun target kinerja RPJMD periode sebelumnya.

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) ini, menggunakan metode *fold grand cascading*, yaitu metode pengklasifikasian masalah ke dalam tiga level yang memiliki hubungan sebab-akibat atau kausalitas yaitu masalah pokok, masalah dan akar masalah. Dengan klasifikasi ini, akan mempermudah dalam perumusan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah.

Permasalahan Pembangunan Per urusan

4.1.1. Layanan Urusan Pemerintahan Wajib yang Terkait Pelayanan Dasar

Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia.

4.1.1.1. Urusan Pendidikan

Penyelenggaraan urusan pendidikan di Kota Bima telah berjalan baik seperti telah alokasi anggaran pendidikan telah mencapai 23% dalam APBD atau melampaui ketentuan minimal dalam undang-undang pendidikan sebesar 20%. Namun demikian penyelenggaraan urusan pendidikan di Kota Bima masih dihadapkan oleh beberapa permasalahan seperti angka rata-rata lama sekolah baru mencapai 10,65 tahun (kelas 10 SMA) pada tahun 2021 atau belum mencapai angka penuntasan wajib belajar 12 tahun. Adapun jumlah sekolah TK/PAUD, SD dan SMP di Kota Bima sebanyak 199 sekolah. Dari sekian jumlah sekolah tersebut yang sudah memiliki perpustakaan sebanyak 100 sekolah dan yang belum memiliki perpustakaan sebanyak 99 sekolah. Kemudian ketersediaan laboratorium sekolah adalah sebanyak 41 sekolah yang memiliki laboratorium. Sedangkan pada aspek ketersediaan dan kualifikasi guru terdapat 770 guru bersertifikasi dan 521 guru belum bersertifikasi. Disamping itu, ada kebutuhan penambahan tenaga guru baru sebanyak 202. Pelaksanaan urusan pendidikan masih berhadapan dengan dengan masalah pokok yaitu belum optimalnya akses dan kualitas pendidikan terutama pada tingkat dasar dan menengah.

Permasalahan lain adalah standardisasi pelaksanaan sekolah PAUD yang belum maksimal. Selama ini, pelaksanaan pendidikan tingkat PAUD sebagian

besar dilaksanakan oleh pihak non pemerintah. Pada saat yang sama, proses penyediaan sarana dan prasarana serta standarisasi pendidikan oleh perangkat daerah belum maksimal.

Berbagai permasalahan tersebut berakibat pada rendahnya rapor pendidikan di Kota Bima. Pemerintah pusat pada saat ini telah menetapkan standar untuk menilai kualitas penyelenggaraan urusan pendidikan di setiap daerah melalui penilaian rapor pendidikan.

Tabel 4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pendidikan		
Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Kualitas penyelenggaraan pendidikan masih kurang optimal	Sarana dan prasarana belum tersedia secara penuh	Laboratorium dan perpustakaan sekolah belum tersedia secara merata
		Pemenuhan standarisasi penyelenggaraan Dikdas masih kurang
		Pemenuhan standarisasi penyelenggaraan PAUD belum optimal
	kualitas lulusan masih dalam kategori sedang	Ketersediaan tenaga pendidik/guru masih kurang
		Kualifikasi guru terstandar masih kurang
		Pembelajaran berbasis digital belum merata
		Bahan belajar mengajar berbasis aplikasi belum dapat diakses secara merata

4.1.1.2. Urusan Kesehatan

Kondisi kesehatan masyarakat menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan di suatu daerah, mengingat urusan kesehatan menjadi salah satu komponen yang menunjang ketercapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) baik di level daerah maupun nasional. Upaya pembangunan dalam bidang kesehatan di Kota Bima lebih mengarah pada pokok permasalahan yaitu belum optimalnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat sebagai dari kualitas pelayanan kesehatan yang belum optimal. Hal ini dapat digambarkan dengan beberapa kondisi sebagai berikut: pada tahun 2021 angka stunting sebesar 17,56%, penanganan penyakit menular terhadap penderita TBC sebanyak 166 orang, Pneumonia balita 1136 balita, malaria 17 orang, DBD 138 orang, HIV 8 orang dan Aids 17 orang. Demikian juga dengan angka penyakit tidak menular masih cukup tinggi dan butuh pelayanan kesehatan. Pada tahun 2021 dpenderita hipertensi mencapai angka 9287 orang, Diabetes Militus sebanyak 3523 orang, Kanker rahim dan payudara sebanyak 4417).

Pelayanan kesehatan ibu dan anak juga belum optimal karena capaian SPM

untuk pelayanan kesehatan Ibu baru mencapai 94,15. Sedangkan capaian pelayanan kesehatan anak balita baru mencapai angka 91,30% dari target SPM 100%. Penanganan dan pemulihan pasca pandemi Covid-19 juga menjadi hal penting untuk diperhatikan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh akar permasalahan sebagai berikut: seperti kualitas nakes yang masih terbatas yang perlu didukung oleh pelatihan dan peningkatan kapasitas secara berkala, jumlah nakes yang terbatas dan masih melaksanakan tugas ganda dalam hal pemberian pelayanan maupun sebagai pengelola program. Disamping itu, meskipun alokasi anggaran bidang kesehatan sudah mencapai 10 % dalam APBD sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun alokasi anggaran tersebut masih belum cukup untuk menyediakan BMHP dan kebutuhan obat-obatan serta pengadaan sarana prasarana kesehatan yang menunjang pelayanan prima pada semua tingkatan.

Tabel 4.2. Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Kesehatan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih rendahnya kualitas pelayanan kesehatan	Masih rendahnya kualitas kesehatan Ibu dan anak	Masih rendahnya akreditasi puskesmas dan rumah sakit
		Masih rendahnya kapasitas SDM tenaga kesehatan
		Masih kurang tersedianya BMHP dan Obat-obatan
		Masih rendahnya kunjungan K1 dan K4
		Belum optimalnya penanganan komplikasi saat persalinan dan pasca persalinan
	Angka stunting masih	Masih rendahnya imunisasi dasar lengkap
		Masih rendahnya pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil Belum optimalnya peningkatan gizi bayi dan balita
		Belum optimalnya penerapan PHBS (perilaku hidup bersih dan sehat)
		Masih tingginya bayi lahir dengan berat badan bawah garis merah (BBBGM)
		Masih tingginya bayi lahir dengan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)
	Belum optimalnya penanganan penyakit menular dan tidak menular	Masih rendahnya cakupan pelayanan PM dan PTM

		Belum optimal edukasi masyarakat tentang penyakit menular dan tidak menular
		Masih terbatasnya alat kesehatan untuk pelayanan PM dan PTM

4.1.1.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kota Bima masih dihadapkan pada tiga permasalahan yaitu infrastruktur pelayanan dasar terkait air minum dan sanitasi, infrastruktur jalan dan jembatan serta irigasi. Pada tahun 2022 masih dihadapkan pada persoalan macetnya pengelolaan PDAM sehingga pelayanan air bersih melalui penyediaan sumur bor pada berbagai wilayah. Cakupan pelayanan air bersih sudah mencapai angka 95,71 persen tapi belum masuk pada kategori minum layak sehingga untuk konsumsi air minum banyak dilayani oleh air kemasan dan air isi ulang serta pemanfaatan air hujan melalui teknologi panen air hujan. Demikian juga pelayanan sanitasi masih terdapat 1281 KK yang tidak memperoleh akses sanitasi. Sedangkan infrastruktur jalan baru mencapai 74,77 persen jalan dalam kondisi baik dan rasio jaringan irigasi teknis hanya sebesar 2,69 persen.

Tabel 4.3. Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

MasalahPokok	Masalah	Akar Masalah
Rendahnya ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar secara merata.	Pelayanan air bersih belum mencakup seluruh wilayah	PDAM pengelolaannya masih dibawah pemerintah Kabupaten Bima dan terjadi kemacetan dalam pelayanan
		Berkurangnya sumber mata air dan menurunnya debit air untuk kebutuhan air bersih
	Penuntasan BABS belum optimal	Pembangunan sarana sanitasi dan pengolahan limbah belum terpadu antar sektor
Belum optimalnya infrastruktur pendukung pengembangan ekonomi	Panjang jalan dan jembatan dalam kondisi rusak masih tinggi	Bencana banjir yang sering melanda berakibat pada rusaknya infrastruktur jalan dan jembatan
		Pembukaan jalan baru pada kawasan produktif dan daerah pinggiran yang belum mampu langsung ditangani
	Terjadi pelanggaran pemanfaatan ruang	Rendahnya pemahaman masyarakat tentang rencana tata ruang
		Tidak tersedianya PPNS bidang tata ruang
		RDTR belum ditetapkan untuk seluruh kecamatan

4.1.1.4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman masih mengalami permasalahan dalam hal pemenuhan rumah yang layak huni yang masih perlu penanganan. Pada tahun 2021 jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) adalah sebanyak 11.656 unit dari 34.878 dan pada tahun 2022 sebanyak 11.539 unit. Tingginya jumlah RTLH ini disebabkan karena masih rendahnya pendapatan masyarakat dan cakupan bantuan untuk rumah layak huni yang masih terbatas. Disamping itu, penyediaan prasarana utilitas umum (PSU) juga masih terbatas seperti untuk air minum, sanitasi dan persampahan. Permasalahan lain yang dihadapi adalah masih tingginya luas kawasan kumuh dimana pada tahun 2021 seluas 147,08 hektar. Masih tingginya angka kawasan kumuh ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kebersihan lingkungan/persampahan, air bersih, sanitasi, kondisi rumah, jalan lingkungan dan saluran drainase. Penanganan kekumuhan ini sangat membutuhkan kerjasama dan sinergi lintas sektor karena terdapat 7 indikator kumuh yang kewenangannya pelaksanaan urusannya ada pada urusan perumahan dan permukiman, urusan pekerjaan umum, urusan lingkungan hidup dan urusan ketertiban (pemadan kebakaran).

Tabel 4.4. Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

MasalahPokok	Masalah	Akar Masalah
Lingkungan permukiman yang layak masih terbatas	Rumah tidak layak huni masih tinggi	Rendahnya daya beli akibat kemiskinan dan bencana
		Cakupan bantuan rumah layak huni masih bergantung pada kepada kemampuan pendanaan pemerintah.
	Luas kawasan kumuh masih tinggi	Rendahnya ketersediaan prasarana dan sarana utilitas umum (PSU) pada kawasan permukiman
		Kesadaran masyarakat tentang PHBS masih rendah

4.1.1.5. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Dalam rangka meningkatkan kondusifitas wilayah di Kota Bima, beberapa upaya yang dilakukan antara lain peningkatan kualitas demokrasi, ketertiban umum, memelihara kerukunan antar umat beragama serta penanggulangan bencana. Pada aspek ketertiban umum dan kerukunan umat beragama ditinjau berdasarkan angka konflik sosial yang terjadi setiap tahunnya. Pada tahun 2022

jumlah konflik sosial yang terjadi sebanyak 50 kasus. Sedangkan pada aspek pelanggaran K3 yang ditangani mencapai 47 dari total 53 kasus K3 yang terjadi. Sedangkan pada aspek penegakan Perda terjadi peningkatan setiap tahunnya.

Tabel 4.5. Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

MasalahPokok	Masalah	Akar Masalah
ketentraman dan ketertiban masyarakat belum optimal	Angka pelanggaran K3 masih tinggi	Rendahnya kesadaran dan ketaatan terhadap PeraturanDaerah dan Kepala Daerah
		Belum optimalnya patroli ketentraman dan ketertiban
		Belum optimalnya kewaspadaan dini masyarakat
	Angka konflik sosial masih tinggi	Peran FKUB dan organisasi sosial kemasyarakatan belum optimal
		Deteksi dini potensi konflik masih rendah
Tingginya risiko bencana	Belum optimalnya ketahanan dan perlindungan masyarakat terhadap bencana	Kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan belum sepenuhnya memenuhi SPM kebencanaan
		Belum optimalnya penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

4.1.1.6. Sosial

Masalah kesejahteraan sosial meliputi urusan anak terlantar, anak yang berhadapan dengan masalah hukum, anak jalanan, disabilitas, perlindungan dan perlakuan khusus dan lansia yang semuanya tertuang dalam DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial). Angka DTKS di Kota Bima pada tahun 2021 mencapai 91.904 jiwa dengan jumlah KK sebanyak 33.308 dengan kualifikasi data sebanyak 18.489 yang masih perlu dilakukan perbaikan. Angka tahun 2021 tersebut mengalami kenaikan pada tahun 2022 menjadi sebesar 100.605 jiwa dengan jumlah KK sebanyak 33.848. Dari data tahun 2022 tersebut yang masih perlu dilakukan perbaikan dan validasi data adalah sebanyak 5.315 jiwa.

Tabel 4.6. Permasalahan Pembangunan Daerah UrusanSosial

MasalahPokok	Masalah	Akar Masalah
Penanganan kesejahteraan	Penyaluran bantuan sosial	Belum optimalnya validasi dan update data DTKS

sosial belum merata	ada yang tidak tepat sasaran	Rendahnya pemberdayaan dan perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas
		Rehabilitasi penyandang masalah kesejahteraan sosial di luar panti masih terbatas
		Belum optimalnya integrasi program lintas urusan dan sektor dalam penanganan fakir miskin
	Banyak warga terdampak bencana	Fasilitasi pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana alam dan non alamsaat terjadi bencana masih terbatas

4.1.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Terkait Pelayanan Dasar

Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia.

4.1.2.1. Tenaga Kerja

Angka pengangguran terbuka pada kurun waktu tahun 2020-2022 mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2020 jumlah pengangguran 4.391 kemudian turun menjadi 3.650 pada tahun 2022. Jumlah pengangguran tersebut setara dengan angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) 3,73. Disamping itu permasalahan yang dihadapi pada urusan tenaga kerja ini adalah perlindungan tenaga kerja berdasarkan norma kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, dimana jumlah perusahaan yang menerapkan norma kerja secara penuh baru 164 perusahaan dari 978 perusahaan yang terdaftar.

Tabel 4.7. Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Tenaga Kerja

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Angka pengangguran masih tinggi	Masih rendahnya kesempatan kerja	Rendahnya kesesuaian keterampilan pencari kerja dengan permintaan pasar kerja
		Belum optimalnya jaringan pemasaran tenaga kerja
		Rendahnya investasi yang menyerap tenaga kerja
		BLK belum didukung oleh instruktur dan peralatan yang memadai

4.1.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan yang erat kaitannya dengan isu kesetaraan gender dalam program pembangunan nasional. Partisipasi perempuan dalam pembangunan yang diukur melalui indeks pemberdayaan gender (IDG) pada tahun 2021 mencapai 70,16. Kemudian permasalahan lain adalah kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan tingkat KDRT sebesar 0,091 atau setara dengan 42 kasus yang dilaporkan. Sedangkan kekerasan terhadap anak mencapai angka 0,090 atau setara dengan 51 kasus.

Tabel 4.8. Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Pemberdayaan gender dan perlindungan anak belum optimal	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) masih belum optimal	Partisipasi perempuan pada kegiatan ekonomi masih rendah
		Program Pemberdayaan perempuan masih terbatas pada DPPP saja.
	Angka KDRT masih tinggi	Implementasi program pendampingan Lembaga perlindungan perempuan masih terbatas.
		Terbatasnya kapasitas kader dalam pendampingan dan advokasi
	Kekerasan terhadap anak tinggi	Implementasi program pemenuhan hak anak masih terbatas
		Lembaga Perlindungan Anak belum ditingkatkan kapasitasnya secara optimal dalam melakukan kampanye dan advokasi pemenuhan hak dan perlindungan anak

4.1.2.3. Ketahanan Pangan

Salah satu faktor yang mempengaruhi capaian indeks ketahanan pangan adalah skor pola pangan harapan (PPH). Skor PPH mengalami fluktuasi selama 4 tahun terakhir. Penurunan terjadi pada tahun 2019, dimana nilai Skor PPH Konsumsi turun 1,2 poin. Demikian juga pada tahun 2022 terjadi penurunan Skor PPH Konsumsi dari Skor PPH 86 di tahun 2021 turun menjadi 81.8 di tahun 2022 atau turun sebesar 4,2 poin, ini disebabkan adanya perbaikan kualitas data perhitungan PPH Konsumsi antara lain adanya penambahan data pada 10 item bahan pangan, faktor peubah pada aplikasi yang tadinya menggunakan Justifikasi menjadi Aktual dan penggunaan AKE 2.100 Kkal/Kapita/Hari menjadi AKE 2.150 Kkal/Kapita/Hari.

Permasalahan lain yang dihadapi dalam bidang ketahanan pangan yaitu:

- 1. Belum optimalnya pelaksanaan program diversifikasi pangan

2. Terjadinya konversi lahan pertanian ke nonpertanian,
3. Menurunnya kualitas kesuburan lahan akibat kerusakan lingkungan,
4. Semakin terbatas atau tidak pastinya penyediaan air untuk produksi akibat kerusakan hutan.

4.1.2.4. Lingkungan Hidup

Capaian Indeks Kualitas Lingkungan hidup dipengaruhi oleh variabel indeks kualitas air dan kualitas udara. Pada indikator indeks kualitas air dari target 50 dapat terealisasi sebesar 28,75 (cemar sedang) atau sebesar 57,10%. Sedangkan untuk indikator indeks kualitas udara dari yang ditargetkan sebesar 82 mampu direalisasikan menjadi 87,35 atau 105,50%. Dengan demikian bahwa kinerja meningkatnya kualitas air kurang baik sedangkan kualitas udara berada pada kondisi yang sangat baik.

Rendahnya pencapaian target pada bidang lingkungan hidup juga dipengaruhi oleh minimnya anggaran rehabilitasi yang ditargetkan 31,20 Ha, hanya tersedia anggaran untuk 2,5 Ha. Disamping itu, kecilnya tingkat keberhasilan pada kegiatan penanaman pada daerah sekitar mata air yang kurang maksimal. Hal ini terjadi karena banyaknya lahan di sekitar mata air yang mengalami kerusakan akibat pembakaran lahan, juga kesadaran masyarakat terhadap perlindungan hutan sangat minim.

4.1.2.5. Administrasi Kependudukan

Keberhasilan dari pelayanan administrasi kependudukan di Kota Bima tidak menutup kemungkinan adanya hambatan atau kendala. Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa kendala dan hambatan dalam pencapaian target indikator kinerja bidang administrasi kependudukan pada tahun 2022, diantaranya:

1. Faktor Internal
 - Dalam *Database* Kependudukan masih ditemukan data ganda.
 - Belum optimalnya Sosialisasi kegunaan Kartu Identitas Anak (KIA)
 - Belum memadainya kesejahteraan petugas pelayanan kependudukan.
2. Faktor Eksternal
 - Kurangnya kesadaran Masyarakat untuk mengurus Administrasi Kependudukan;
 - Adanya pemalsuan data dokumen kependudukan
 - Penyalahgunaan hak akses *database*
 - Merosotnya budaya tertib dalam antrean pelayanan.
 - Apatisnya penduduk dalam memenuhi persyaratan administrasi kependudukan.

4.1.2.6. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pertumbuhan penduduk di Kota Bima termasuk masih tinggi dengan dengan angka kelahiran total mencapai 2,24 dengan rata-rata jumlah anak 2,47.

Oleh karena itu, upaya pengendalian pertumbuhan penduduk dan meningkatkan peserta keluarga berencana masih menjadi permasalahan yang dihadapi. Persoalan ini muncul diakibatkan oleh berbagai aspek antara keberadaan kampung KB yang saat ini kurang optimal, belum optimalnya peran kader dalam memberikan edukasi pengendalian penduduk. Hal lain juga menjadi penting adalah masalah stunting.

Tabel 4.9. Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Pengendalian pertumbuhan penduduk dan keluarga berencana belum optimal	Angka kelahiran masih tinggi	Angka kelahiran remaja masih tinggi
	Partisipasi ber KB masih rendah	Edukasi dan advokasi tentang pengendalian penduduk masih rendah
		Rendahnya partisipasi PUS dalam ber KB

4.1.2.7. Perhubungan

- a. Masih ada kendaraan angkutan umum yang tidak lulus uji KIR dikarenakan kurangnya kesadaran pemilik kendaraan dalam memelihara unit secara berkala (prinsip yang penting mendapatkan pemasukan tanpa merencanakan pemeliharaan berkala unit) dan kurangnya pengetahuan pengemudi terhadap keadaan unit kendaraan yang dioperasikan.
- b. Belum optimalnya standar keamanan dan keselamatan berlalulintas.
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku berlalu lintas yang baik.
- d. Belum optimalnya kualitas sarana prasarana perhubungan.

4.1.2.8. Komunikasi dan Informatika

- a. Belum optimalnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi oleh birokrasi terutama untuk peningkatan pelayanan publik.
- b. Belum optimalnya integrasi sistem informasi daerah yang telah tersedia dan cukup baik dalam pelaksanaan pemerintahan.
- c. Terbatasnya kemampuan dan keahlian SDM dalam mengelola informasi dan komunikasi.

4.1.2.9. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

- a. Lambatnya pertumbuhan skala usaha UMKM.
- b. Masih rendahnya daya saing UMKM dalam mengakses pasar.

- c. Belum optimalnya promosi dan pemasaran serta terbatasnya informasi pasar mengenai produk unggulan daerah.
- d. Belum optimalnya pelaksanaan kemitraan usaha antara UMKM dengan pelaku usaha lainnya.
- e. Akses UMKM terhadap sumber-sumber pembiayaan dan permodalan masih lemah.
- f. Masih terbatasnya jiwa kewirausahaan pelaku usaha.
- g. Sumber dana modal usaha umumnya berasal dari tabungan sendiri dan/atau dari lembaga keuangan tidak resmi(rentenir) dan PKL sulit mengakses permodalan.
- h. Program diklat wirausaha baru belum secara maksimal membekali para peserta menjadi wirausaha baru yang tangguh dan berdaya saing.

4.1.2.10. Penanaman Modal

- a. Belum optimalnya pengembangan infrastruktur pendukung kawasan potensial investasi.
- b. Belum berkembangnya pola kemitraan dan kerja sama dengan investor baik.
- c. Kurangnya informasi potensi investasi yang akurat dan promosi yang terbatas.
- d. Implementasi perizinan terintegrasi secara terpadu belum optimal sehubungan belum ada kesepahaman dengan PD teknis.

4.1.2.11. Statistik

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan Statistik antara lain belum optimalnya penerapan Satu Data Kota Bima. Meskipun persentase capaian meningkat dari tahun 2021 ke 2022, namun secara umum masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi yaitu:

1. Kurangnya koordinasi antar *stakeholder* dalam hal penyediaan data;
2. Belum ada mekanisme validasi data laporan Perangkat Daerah.

4.1.2.12. Persandian

Permasalahan pada urusan persandian mencakup beberapa hal yaitu:

1. keterbatasan SDM pengelola keamanan informasi daerah;
2. keterbatasan kualitas *hardware* pengamanan data;
3. urusan keamanan data masih belum menjadi prioritas utama dalam alokasi penganggaran.

4.1.2.13. Kepemudaan dan Olahraga

- a. Masih rendahnya peran organisasi olah raga dalam pembibitan dan pembinaan atlet muda berpotensi.

- b. Terbatasnya atau rendahnya fasilitas sarana dan prasarana olahraga untuk menunjang aktivitas latihan dan pertandingan olahraga.
- c. Rendahnya aktifitas organisasi kepemudaan.
- d. Belum adanya kajian untuk menyusun program-program pencarian bakat dibidang olahraga dan kepemudaan melalui penerimaan siswa baru di SD dan SMP, serta memberikan pelatihan dan pembinaan secara berkesinambungan agar potensi yang ada bisa menjadi prestasi di masa depan.

4.1.2.14. Kebudayaan

- a. Belum optimalnya pengelolaan seni dan budaya sebagai aset berharga daerah.
- b. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran pemuda tentang nilai-nilai sosial budaya serta adat istiadat.
- c. Belum optimalnya pengelolaan warisan budaya dan cagar budaya.
- d. Belum optimalnya perlindungan, pengembangan, pemeliharaan dan pembinaan terhadap objek pemajuan kebudayaan yang ada di Kota Bima.
- e. Minimnya kegiatan yang mengakar dalam rangka pengembangan kebudayaan, seperti diskusi, seminar, sarasehan budaya.
- f. Minimnya kegiatan pelatihan dan pembinaan bagi pelaku budaya sebagai pelaku budaya.
- g. Belum optimalnya pembinaan bagi lingkungan seni.

4.1.2.15. Perpustakaan

- a. Rendahnya minat baca di Kota Bima.
- b. Kurangnya SDM Pustakawan dan Pengelola Perpustakaan yang memiliki kualifikasi pendidikan perpustakaan atau memiliki pengalaman di bidang perpustakaan.
- c. Masih minimnya jaringan informasi, mempermudah akses kedalam sumber-sumber informasi apapun bentuk dan jenisnya.

4.1.2.16. Kearsipan

- a. Rendahnya pemahaman aparatur birokrasi dalam pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis.
- b. Masih kurangnya pemahaman Perangkat Daerah akan pentingnya arsip serta proses dan alur pelaksanaan kearsipan sesuai dengan regulasi yang ada.
- c. Kurangnya SDM arsiparis dan atau petugas kearsipan di setiap Perangkat Daerah yang khusus membidangi tata kelola arsip, yang memiliki kualifikasi pendidikan kearsipan atau berpengalaman di bidang kearsipan.
- d. Belum optimalnya pengadaan sarana dan prasarana kearsipan di Perangkat Daerah
- e. Rendahnya pengembangan taman baca masyarakat.

4.1.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

4.1.3.1 Pariwisata

- a. Masih kurangnya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam menunjang pariwisata
- b. Belum terbangunnya kemitraan dan kerjasama dengan daerah lain dalam mengembangkan pariwisata.
- c. Lemahnya daya dukung infrastruktur dan SDM lokal pariwisata.
- d. Minimnya destinasi pariwisata yang memenuhi aspek atraksi, amenitas, dan aksesibilitas yang baik.
- e. Belum optimalnya dukungan seni dan budaya serta ekonomi kreatif dalam menggerakkan roda pariwisata.

4.1.3.2. Pertanian

- a. Manajemen skala usaha pertanian pada umumnya masih rendah, sehingga potensi sektor pertanian tidak tergali.
- b. Semakin sempitnya lahan pertanian sebagai akibat alih fungsi lahan.
- c. Pertumbuhan jumlah populasi ternak cenderung stagnan, sehingga masuknya daging dari luar untuk memenuhi kebutuhan dalam daerah.
- d. Berkurangnya tenaga kerja di sektor pertanian.

4.1.3.3. Perdagangan

- a. Belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pemasaran produk.
- b. Terbatasnya akses sumber permodalan bagi para pelaku usaha dalam meningkatkan kapasitas usahanya atau mengembangkan produk yang memiliki daya saing.
- c. Belum tertatanya pedagang kaki lima yang cepat dan cenderung tidak terkendali sehingga menimbulkan eksternalitas negatif bagi sektor lainnya.
- d. Pembinaan dan fasilitasi promosi produk perdagangan belum optimal.

4.1.3.4. Perindustrian

- a. Terbatasnya kemampuan dan pengetahuan pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam berinovasi untuk menciptakan dan mengembangkan produknya.
- b. Terbatasnya kemampuan SDM pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam penguasaan teknologi proses produksi dan desain kemasan produk.
- c. Rendahnya kreatifitas dan inovasi pelaku industri.

4.1.3.5. Kelautan dan Perikanan

- a. Manajemen skala usaha perikanan masih rendah.

- b. Masih rendahnya produktifitas hasil perikanan.
- c. Belum terpenuhinya infrastruktur pendukung usaha perikanan.
- d. Rendahnya tingkat pendidikan dan terbatasnya kecakapan petani ikan.
- e. Rendahnya daya saing produk perikanan.

4.1.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

4.1.4.1 Urusan Perencanaan

- a. Belum optimalnya pengembangan instrumen pengendalian dan evaluasi perencanaan.
- b. Belum optimalnya sinergitas perencanaan di tingkat daerah dengan perangkat daerah.
- c. Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan daerah.
- d. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan daerah.
- e. Masih belum semua target program pembangunan yang sudah direncanakan dapat direalisasikan.

4.1.4.2. Keuangan

- a. Belum optimalnya akses publik terhadap keuangan daerah.
- b. Potensi-potensi sumber-sumber pendapatan daerah belum tergali secara optimal atau dengan kata lain belum optimalnya identifikasi dan pendataan sumber sumber retribusi daerah.
- c. Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan sumber PAD.
- d. Belum optimalnya pengelolaan aset daerah.
- e. Masih belum optimalnya pemberian sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang menunggak.

4.1.4.3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

- a. Belum optimalnya peningkatan kesejahteraan aparatur penyelenggara pemerintahan.
- b. Belum optimalnya pengukuran kinerja unit kerja dan individu secara komprehensif.
- c. Penempatan ASN belum sepenuhnya berbasis kompetensi.

4.1.4.4. Penelitian dan Pengembangan

- a. Belum optimalnya peran penelitian sebagai dasar perumusan kebijakan.
- b. Belum optimalnya koordinasi kelitbangan.
- c. Belum optimalnya fasilitasi pengembangan inovasi.

4.1.4.5. Pengawasan

- a. Belum optimalnya penguatan sistem pengendalian intern pemerintah.
- b. Kurangnya kelembagaan pengawasan daerah.

4.1.5 Urusan pendukung urusan Pemerintahan

4.1.5.1. Sekretariat Daerah

- a. Belum optimalnya pentaan kelembagaan
- b. Belum optimalnya ketatalaksanaan.
- c. Belum optimalnya fasilitas perangkat daerah dalam reformasi birokrasi.
- d. Belum optimalnya sinkronisasi, pengendalian dan evaluasi kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat.
- e. Masih perlunya fasilitasi dan pembinaan penyusunan produk hukum daerah.
- f. Perlunya sinkronisasi, pengendalian dan evaluasi kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan.
- g. Rendahnya kapasitas BUMD.

4.1.5.2. Sekretariat DPRD

- a. Belum optimalnya fasilitasi kapasitas anggota dewan berbasis kebutuhan daerah.
- b. SDM aparatur dewan yang perlu ditingkatkan.

4.1.6 Urusan Kewilayahan

4.1.6.1. Kecamatan

- a. Masih perlunya penerapan instrumen pengendalian kualitas pelayanan publik.
- b. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik Kecamatan.
- c. Belum optimalnya fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kecamatan.
- d. Belum optimalnya kapasitas ASN tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
- e. Masih perlunya fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Kelurahan.

4.1.7 Urusan Pemerintahan Umum

4.1.7.1. Kesatuan Bangsa dan Politik

- a. Belum optimalnya pembinaan politik dan wawasan kebangsaan.

4.2 Analisis Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, menkelurahank, berjangka menengah/panjang dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Isu

strategis selain menggambarkan berbagai permasalahan dan peluang pembangunan yang berbasis kewenangan dan urusan daerah, juga menggambarkan lingkungan strategis supra daerah yang meliputi dinamika lingkungan skala regional, nasional, maupun internasional yang berpotensi memberi dampak terhadap daerah dalam kurun waktu jangka menengah maupun jangka panjang.

4.2.1. Telaahan terhadap RTRW Kota Bima Tahun 2011-2031

Kota Bima telah memiliki Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yaitu Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2011 – 2031. Namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, setiap lima tahun sekali Perda harus dilakukan peninjauan kembali terhadap peraturan daerah tersebut. Atas amanah tersebut, maka disusun materi teknis dan Raperda RTRW Kota Bima untuk memenuhi ketentuan dan arahan dalam Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), bahwa strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional perlu dijabarkan lebih lanjut dalam rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima atau disebut RTRW Kota Bima merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan provinsi Nusa Tenggara Barat dalam strategi dan struktur pemanfaatan ruang wilayah Kota Bima. Untuk mewujudkan RTRW Kota Bima, selain menyusun konsep dan strategi pembangunan, RTRW Kota Bima disusun berdasarkan kebijakan yang tertuang dalam RTRWN, RTRW Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Susunan RTRW Kota Bima, memuat ketentuan sebagai berikut:

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kota;
- b. rencana struktur ruang wilayah kota yang meliputi sistem hirarki pusat pelayanan wilayah kota dan sistem jaringan prasarana wilayah kota;
- c. rencana pola ruang wilayah kota yang meliputi kawasan lindung wilayah kota dan kawasan budidaya wilayah kota;
- d. penetapan kawasan strategis Kota Bima;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kota yang berisi indikasi program utama tahunan dan lima tahunan;
- f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta

arahan sanksi.

Program penataan ruang Kota Bima diarahkan untuk:

- a. meningkatkan penyelenggaraan kegiatan perencanaan tata ruang yang efektif, transparan dan partisipatif;
- b. mengembangkan penyelenggaraan kegiatan pemanfaatan ruang yang tertib berdasarkan rencana tata ruang;
- c. meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjamin efektifitas dan efisiensi kegiatan pembangunan secara berkelanjutan.

Kawasan Strategis Kota meliputi:

1. Kawasan strategis berdasarkan kepentingan pertumbuhan ekonomi:

- a. Kawasan Pantai Amahami – Niu dan sekitarnya serta kawasan Pantai Kolo dengan sektor unggulan pariwisata;
- b. Kawasan Perkotaan Bima dan sekitarnya yang meliputi Kelurahan Sarae, kelurahan Tanjung, termasuk didalamnya pelabuhan Laut Bima dan Kelurahan Paruga dengan sektor unggulan perdagangan dan jasa;
- c. Kawasan Oi Fo'o dan sekitarnya dengan sektor unggulan industri marmer.

2. Kawasan Strategis berdasarkan Kepentingan Sosial Budaya:

Kawasan strategis di bidang sosial budaya ditetapkan pada sebuah kawasan yang dianggap memiliki nilai historis maupun kegiatan-kegiatan budaya untuk tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya. Kawasan strategis ini juga merupakan aset wisata sejarah dan budaya yang dapat menunjukkan jati diri wilayah Kota Bima. Kawasan strategis berdasarkan kepentingan sosial budaya meliputi:

- a. Kawasan Kota Tua Tanjung di Kelurahan Tanjung;
- b. Kawasan Istana Kesultanan Bima di Kelurahan Paruga;
- c. Kawasan Pemakaman Datuk Di Banta Tolobali di Kelurahan Sarae;
- d. Kawasan Dana Traha di Kelurahan Dara.

3. Kawasan Strategis berdasarkan Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Kawasan strategis berdasarkan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup mencakup:

- a. Kawasan lindung dan kawasan hutan Lampe-Maria di Kecamatan Rasanae Timur dan
- b. Kawasan Ncai Kapenta yang berfungsi sebagai konservasi di Kecamatan Asakota.

4.2.2. Telaahan terhadap RPJPD Kota Bima Tahun 2008-2028

Pembangunan jangka panjang Kota Bima 2008-2028 merupakan kelanjutan dari tahapan pembangunan yang sudah dilakukan sebelumnya. Hanya saja dilakukan penataan kembali tentang fokus dan arah kebijakan pembangunan seiring dengan

pergeseran paradigma perencanaan pembangunan nasional. Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkan peraturan daerah tentang RPJPD Kota Bima Tahun 2008-2028 adalah untuk: (a) mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan dalam pencapaian pembangunan, (b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar ruang, antar waktu, antar fungsi, antar tingkatan pemerintah maupun antar daerah, (c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, (d) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, dan (e) mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Visi RPJPD Kota Bima Tahun 2008-2028

Sebagai bagian dari tahapan pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2008-2028, maka RPD Tahun 2024-2026 mempedomani RPJPD 2008-2028, khususnya tahapan keempat dalam penyusunannya. Untuk itu diperlukan pemahaman mengenai visi RPJPD Tahun 2008-2028. Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.

Visi pembangunan dalam RPJPD Kota Bima Tahun 2008-2028 adalah:
Mewujudkan Kota Bima Yang Sejahtera, Maju dan Mandiri pada Tahun 2028

Visi pembangunan Kota Bima Tahun 2008-2028 ini mengarah pada pencapaian tujuan, cita-cita dan harapan masyarakat Kota Bima. Visi pembangunan daerah tersebut harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat kesejahteraan, kemajuan dan kemandirian yang ingin dicapai. Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi serta capaian pada masa yang akan datang, diharapkan Kota Bima mampu berperan dalam perubahan yang terjadi dilingkup regional, nasional maupun global. Oleh karena itu, perlu kiranya diberikan perumusan dan penjelasan makna visi untuk mendapatkan kesamaan persepsi tentang muatan substansi filosofis yang terkandung, sehingga segenap pemangku kepentingan secara sinergis dan optimal dapat memberikan kontribusi dalam rangka pencapaiannya. Perumusan dan penjelasan terhadap visi yang dimaksud dijabarkan lebih lanjut dalam beberapa pokok-pokok visi sebagai berikut:

Kota Bima diartikan sebagai suatu daerah otonom. Daerah otonom (selanjutnya disebut daerah) adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah menunjukkan suatu kesatuan pemerintahan dan kemasyarakatan beserta semua potensi yang dimiliki.

Sejahtera artinya suatu kondisi dimana taraf hidup masyarakat secara keseluruhan menjadi lebih baik dan lebih menyenangkan dari keadaan sebelumnya.

Dalam perspektif ekonomi, kondisi ini dapat dicapai dengan mengupayakan peningkatan ekonomi produktif dan pemerataan pembangunan serta keadilan sosial ekonomi bagi seluruh masyarakat dengan meningkatkan keberpihakan kepada masyarakat lemah, kelompok rentan dan wilayah yang masih tertinggal.

Maju artinya bahwa pelaksanaan pembangunan daerah senantiasa dilandasi dengan keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik secara fisik maupun non fisik didukung oleh sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi. Upaya pembangunan ekonomi Kota Bima kedepan harus berbasis pada sector potensial dan potensi ekonomi lokal yang mampu menjadi motor penggerak perekonomian daerah. Prioritas pembangunan ekonomi kedepan haruslah berbasis pada sektor yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan menjadi mata pencaharian masyarakat banyak, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penciptaan iklim investasi yang kondusif menjadi kunci utama dalam mendukung pembangunan ekonomi di Kota Bima. Sistem birokrasi yang efisien dan efektif menjadi perhatian utama dalam mendukung iklim investasi. Sebagai sentra ekonomi dan sentra penghubung antar daerah, kebutuhan infrastruktur pendukung perdagangan menjadi faktor penting untuk terus dikembangkan di Kota Bima.

Misi RPJPD Kota Bima Tahun 2008-2028

Misi merupakan pernyataan tentang rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008-2028, terdapat rumusan misi yang telah ditetapkan, yakni sebagai berikut:

1. *Mewujudkan masyarakat Kota Bima yang sejahtera dan mandiri* melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan standar pelayanan minimum bidang kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik lainnya melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung, peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur dalam bidang permukiman dan prasarana wilayah, peningkatan SDM yang berkualitas, meningkatkan keamanan dan ketertiban penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah;
2. *Mewujudkan masyarakat yang maju dan berdaya saing* melalui pembangunan manusia yang berkualitas, meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian, pengembangan secara berkelanjutan maupun pembangunan bidang infrastruktur yang maju serta reformasi di bidang hukum dan aparatur Negara;
3. *Mewujudkan Kota Bima sebagai Kota Pendidikan* yang dilaksanakan melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas dan penciptaan iklim

belajar yang kondusif dalam lingkungan kehidupan masyarakat melalui peningkatan partisipasi masyarakat;

4. *Mewujudkan masyarakat religius, berakhlak mulia, dan berbudaya* dengan membentuk manusia yang bertaqwa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama, melaksanakan interaksi antarbudaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan kearifan lokal;
5. *Mewujudkan Kota Bima asri dan lestari* yang diwujudkan melalui upaya-upaya nyata dalam pembenahan pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi serta meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan;
6. *Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan* melalui meningkatkan pembangunan daerah secara menyeluruh, mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi.

Tahapan dan Skala Prioritas Periode Keempat (2023-2028) RPJPD Tahun 2008-2028

Berdasarkan pada pelaksanaan, pencapaian serta sebagai kelanjutan dari periode sebelumnya yang diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Kota Bima yang sejahtera, maju dan mandiri melalui akselerasi pembangunan diberbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur kehidupan sosial budaya dan ekonomi masyarakat Kota Bima yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang unggul, berkualitas dan berdaya saing. Dalam rangka mencapai tujuan akhir maka pada tahap ini pembangunan diselenggarakan untuk mencapai daerah yang meliputi:

1. Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-3, RPJM ke-4 ditujukan untuk mewujudkan Kota Bima yang maju dan mandiri, melalui percepatan pembangunan diberbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan yang kompetitif yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing;
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat ditunjukkan oleh makin tinggi dan meratanya tingkat pendapatan masyarakat dengan jangkauan Lembaga jaminan

sosial yang lebih menyeluruh, mantapnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, antara lain ditandai oleh meningkat dan meratanya akses, tingkat kualitas dan relevansi pendidikan seiring dengan makin efisien dan efektifnya manajemen pelayanan pendidikan, meningkatnya kemampuan iptek, meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak, terwujudnya kesetaraan gender, bertahannya kondisi dan penduduk tumbuh seimbang. Dalam rangka memantapkan pembangunan yang berkelanjutan, keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam terus dipelihara dan dimanfaatkan untuk terus mempertahankan nilai tambah dandinya saing bangsa serta meningkatkan modal pembangunan nasional pada masa yang akan datang.

4.2.3. Telaahan terhadap RPJMN Tahun 2020-2024

Amanah pembangunan nasional tahun 2020-2024 untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Lampiran terkait Arah Pembangunan Wilayah tersebut menjabarkan Target Pembangunan, Prioritas Pembangunan, dan Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) pada masing-masing wilayah termasuk didalamnya Wilayah Nusa Tenggara yang terdiri dari Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional, ditetapkan target pembangunan beserta perkiraan kebutuhan investasinya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024), dengan indikator makro sebagai berikut:

- 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
- 2. Tingkat Kemiskinan (%)
- 3. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
- 4. Perkiraan Kebutuhan Investasi (Rp triliun)

Secara eksplisit dalam lampiran V RPJMN 2020-2024, dijabarkan Matriks Pembangunan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mencakup 4 (empat) Kegiatan Prioritas, yaitu: 1) Pengembangan Kawasan Perkotaan; 2) Pengembangan Sektor Unggulan; 4) Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi; serta 5) Kelembagaan dan Keuangan Daerah. Kota Bima termasuk dalam prioritas 1 (Pengembangan Kawasan Perkotaan) dan prioritas 2 (Pengembangan Sektor Unggulan).

Tabel 4.10. Matrik Pembangunan Kota Bima Dalam RPJMN 2020-2024

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target 2024	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024 (Rp miliar)*	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7
KP2: Pengembangan Sektor Unggulan	Persentase Peningkatan Produksi Komoditas Unggulan Per Tahun					
Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa	Persentase Peningkatan Produksi Komoditas Unggulan Per Tahun Provinsi NTB					
Kawasan Kelapa	Kawasan Karet (ha)	880,87	20,15	Nusa Tenggara Barat, Kab Lombok Tengah, Kab Lombok Timur, Kab Sumbawa, Kota Bima	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perekebunan Berkelanjutan	Kementan
KP3: Pengembangan Kawasan Perkotaan						
Peningkatan pelayanan pertanahan						
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (ha)	590.721	38,88	NTB	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	KemenATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (ha)	22.256	0,54	NTB	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	KemenATR/BPN
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	23	32,09	NTB	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya kementerian ATR/BPN	KemenATR/BPN
Penyelenggaraan Penataan Ruang						
Peninjauan kembali/ Penyusunan rencana tata ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis peninjauan	1	0,86	NTB	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	KemenATR/BPN

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target 2024	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024 (Rp miliar*)	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7
	kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang					
Peninjauan kembali/ Penyusunan rencana tata ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari bimbingan teknis penyusunan RDTR	6	1,84	NTB	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	KemenATR/BPN
Peninjauan kembali/ Penyusunan rencana tata ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RTR Pro/Kab/Kota	6	1,86	NTB	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	KemenATR/BPN

Sumber: Lampiran IV RPJMN 2020-2024

4.2.4. Telaahan terhadap SDGs

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan kelanjutan dari MDGs (*Millenium Development Goals*), yang telah berakhir pada tahun 2015. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, kualitas lingkungan hidup, menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup. *Sustainable Development Goals* dimulai dari kesepakatan dari pertemuan dunia pada September 2015 melalui agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan (*the 2030 Agenda for Sustainable Development atau SDGs*) yang merupakan kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup.

Untuk menjamin terlaksananya pembangunan berkelanjutan di Kementerian/Lembaga maupun di daerah, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. TPB bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs dilakukan dengan prinsip universal, integrasi, dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak ada satu orang pun yang terlewatkan atau "*No-one Left Behind*". SDGs terdiri dari 169 target dan 17 (tujuh belas) Tujuan yaitu:

Tujuan 1. Menghapus segala bentuk kemiskinan

Strategi:

1. Memperluas dan menyempurnakan pelaksanaan sistem jaminan sosial terutama jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan
2. Meningkatkan ketersediaan penyediaan pelayanan dasar yang disertai dengan peningkatan kualitas pelayanannya dan jangkauannya bagi masyarakat miskin

dan rentan berupa pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial dan infrastruktur dasar

3. Meningkatkan kemampuan penduduk miskin dalam mengembangkan penghidupan yang berkelanjutan melalui penguatan asset sosial penduduk miskin, peningkatan kemampuan berusaha dan bekerja penduduk miskin, dan peningkatan dan perluasan akses penduduk miskin terhadap modal.

Tujuan 2. Mengakhiri Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Peningkatan Gizi, dan Menganangkan Pertanian Berkelanjutan

Strategi:

1. Peningkatan produksi padi dan sumber pangan protein dari dalam negeri;
2. Peningkatan kelancaran distribusi dan penguatan stok pangan dalam negeri;
3. Perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat; dan
4. Mitigasi gangguan iklim terhadap produksi pangan.

Tujuan 3. Menjamin Kehidupan Yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Penduduk di Segala Usia

Strategi:

1. Akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lanjut usia yang berkualitas
2. Mempercepat perbaikan gizi masyarakat
3. Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan
4. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas
5. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, dan kualitas farmasi dan alat kesehatan
6. Meningkatkan pengawasan obat dan makanan
7. Meningkatkan ketersediaan, penyebaran, dan mutu sumber daya manusia kesehatan
8. Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
9. Memperkuat manajemen, penelitian pengembangan dan sistem informasi
10. Memantapkan pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional (SJSN) bidang kesehatan
11. Mengembangkan dan meningkatkan efektifitas pembiayaan kesehatan.

Tujuan 4. Menjamin Kualitas Pendidikan Yang Adil dan Inklusif serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Seumur Hidup untuk Semua

Strategi:

1. Melaksanakan wajib belajar 12 tahun;
2. Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan melalui peningkatan kualitas lembaga pendidikan formal
3. Memperkuat jaminan kualitas (quality assurance) pelayanan pendidikan
4. Memperkuat kurikulum dan pelaksanaannya
5. Memperkuat sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan kredibel
6. Meningkatkan pengelolaan dan penempatan guru
7. Meningkatkan pemerataan akses pendidikan tinggi
8. Meningkatkan kualitas pendidikan tinggi
9. Meningkatkan relevansi dan daya saing pendidikan tinggi; (10) meningkatkan tata kelola kelembagaan perguruan tinggi.

Tujuan 5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Semua Perempuan dan Anak

Strategi :

1. Peningkatan pemahaman dan komitmen tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai tahapan, proses, dan bidang pembangunan, di tingkat nasional maupun di daerah
2. Penerapan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (pprg) di dalam berbagai bidang pembangunan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, politik, ekonomi, dan hukum.

Tujuan 6. Menjamin Ketersediaan dan Manajemen Air dan Sanitasi Secara Berkelanjutan

Strategi:

1. Menjamin ketahanan air melalui peningkatan pengetahuan, perubahan sikap dan perilaku dalam pemanfaatan air minum dan pengelolaan sanitasi
2. Penyediaan infrastruktur produktif dan manajemen layanan melalui penerapan manajemen aset baik di perencanaan, penganggaran, dan investasi

3. Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi yang dilakukan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat
4. Peningkatan efektifitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur air minum dan sanitasi.

Tujuan 7. Menjamin Akses Terhadap Energi yang Terjangkau, Dapat Diandalkan, Berkelanjutan, dan Modern

Strategi:

1. Meningkatkan produksi energi primer terutama minyak dan gas dari lapangan yang mengalami penurunan tingkat produksinya
2. Meningkatkan cadangan penyangga dan operasional energi
3. Meningkatkan peranan energi baru terbarukan dalam bauran energi; meningkatkan aksesibilitas energi
4. Meningkatkan efisiensi dalam penggunaan energi dan listrik
5. Meningkatkan pengelolaan subsidi BBM yang lebih transparan dan tepat sasaran
6. Memanfaatkan potensi sumber daya air untuk PLTA.

Tujuan 8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Merata dan Berkelanjutan, Tenaga Kerja yang Optimal dan Produktif, serta Pekerjaan Yang Layak untuk Semua

Strategi :

1. Mengoptimalkan kerjasama global dengan memperhatikan dimensi sosial dan budaya
2. Memperluas lapangan kerja
3. Meningkatkan iklim investasi dan promosi ekspor
4. Meningkatkan sinergi arah kebijakan industri
5. Meningkatkan fleksibilitas pasar tenaga kerja serta pengembangan sistem kerja yang layak
6. Pendalaman kapital dan pendidikan tenaga kerja
7. Peningkatan partisipasi perempuan dalam tenaga kerja.

Tujuan 9. Membangun Infrastruktur Tangguh, Mempromosikan Industrialisasi Inklusif dan Berkelanjutan dan Mendorong Inovasi

Strategi :

1. Mempercepat pembangunan sistem transportasi multimoda
2. Mempercepat pembangunan transportasi yang mendorong penguatan industri nasional untuk mendukung sistem logistik nasional dan penguatan konektivitas nasional dalam kerangka mendukung kerjasama regional dan global
3. Membangun sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi untuk mendukung investasi pada koridor ekonomi, kawasan industri khusus, kompleks industri, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi
4. Meningkatkan keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi serta pertolongan dan penyelamatan korban kecelakaan transportasi
5. Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi yang ramah lingkungan dan mempertimbangkan daya dukung lingkungan
6. Mentransformasi kewajiban pelayanan universal (universal service obligation/USO) menjadi broadband-ready dengan cara reformulasi kebijakan penggunaan dana USO yang lebih berorientasi kepada ekosistem broadband (tidak hanya untuk penyediaan infrastruktur dan daerah perdesaan) dan memperkuat kelembagaan pengelola dana USO
7. Mengoptimalisasi pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit sebagai sumber daya terbatas
8. Mendorong pembangunan fixed/wireline broadband termasuk di daerah perbatasan negara
9. mempercepat implementasi e-government dengan mengutamakan prinsip keamanan, interoperabilitas dan cost effective
10. Mendorong tingkat literasi dan inovasi TIK.

Tujuan 10. Mengurangi Ketimpangan Dalam dan Antar Negara**Strategi :**

1. Peningkatan penyerapan tenaga kerja miskin dan rentan produktif ke dalam sektor industri pengolahan unggulan
2. Pengembangan aktivitas rantai pengolahan yang bersifat penambahan nilai (value added) untuk mendukung pengembangan ekonomi lokal dan komoditas unggulan berbasis agro industri
3. Perbaikan rantai distribusi komoditas unggulan yang berpihak kepada petani kecil

4. Pengembangan ekonomi lokal di pulau-pulau terluar berbasis potensi alam daerah setempat.

Tujuan 11. Membuat Kota dan Pemukiman Penduduk yang Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan

Strategi :

1. Perwujudan sistem perkotaan nasional (SPN)
2. percepatan pemenuhan standar pelayanan perkotaan (SPP) untuk mewujudkan kota aman, nyaman, dan layak huni
3. Pembangunan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana
4. Pengembangan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal
5. Peningkatan kapasitas tata kelola pembangunan perkotaan,

Tujuan 12. Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi Yang Berkelanjutan

Strategi :

1. Inventarisasi dan sinkronisasi kebijakan sektor-sektor prioritas terkait dengan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan
2. Menggalakkan penggunaan teknologi bersih untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumberdaya dan mengurangi limbah
3. Penyebaran informasi ketersediaan produk ramah lingkungan bagi konsumen/masyarakat mengenai manfaat produk tersebut
4. Pengembangan standar produk ramah lingkungan yang terukur
5. Pengembangan peraturan dan standar pelayanan publik dalam penerapan pola konsumsi berkelanjutan.

Tujuan 13. Mengambil Tindakan Segera untuk Memerangi Perubahan Iklim dan Dampaknya

Strategi :

1. Peningkatan pelibatan sektor baik di pusat maupun di daerah untuk melaksanakan kegiatan penurunan emisi dan pengalokasian pendanaannya;
2. Standarisasi kegiatan penurunan emisi di setiap sektor.,
3. Meningkatkan kontribusi swasta dan masyarakat dalam penurunan emisi GRK;

4. Pengembangan dan penerapan insentif fiskal;
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan RAN/RAD-GRK dan adaptasi;
6. Pelaksanaan kegiatan dan rencana aksi terkait dengan REDD+, baik yang berdampak langsung, maupun tidak langsung pada penurunan emisi GRK;
7. Pengembangan indeks dan indikator kerentanan, serta penguatan sistem informasi iklim dan cuaca;
8. Pelaksanaan kajian kerentanan dan peningkatan ketahanan (resiliensi) pada sektor yang sensitive serta pelaksanaan pilot adaptasi;
9. Sosialisasi RAN-API dan peningkatan kapasitas daerah dalam upaya adaptasi.

Tujuan 14. Melestarikan Samudera, Laut, dan Sumber Daya Kelautan Secara Berkelanjutan untuk Pembangunan Berkelanjutan

Strategi :

1. Peningkatan sarana dan prasarana dalam mendukung konektivitas laut;
2. Peningkatan sdm, iptek, wawasan dan budaya bahari;
3. Peningkatan tata kelola dan pengamanan wilayah yuridiksi dan batas laut Indonesia;
4. Peningkatan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan pengendalian kegiatan ilegal;
5. Pengelolaan pulau-pulau kecil, terutama pulau-pulau terluar. pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar; (6) peningkatan pengamanan pesisir dan konservasi perairan

Tujuan 15. Melindungi, Memulihkan, dan Meningkatkan Pemanfaatan secara Berkelanjutan Terhadap Ekosistem Darat, Mengelola Hutan Secara Berkelanjutan, Memerangi Desertifikasi, dan Menghentikan dan Memulihkan Degradasi Lahan dan Menghentikan Hilangnya Keanekaragaman Hayati

Strategi :

1. Peningkatan instrumen penegakan hukum;
2. peningkatan efektivitas penegakan hukum;
3. peningkatan efektivitas dan kualitas pengelolaan hutan

Tujuan 16. Meningkatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Terhadap Keadilan Bagi Semua, dan Membangun Institusi yang Efektif, Akuntabel dan Inklusif di Semua

Strategi :

1. Mempromosikan proses pembangunan yang inklusif;
2. Menghormati hak-hak semua kelompok sosial-budaya, minoritas, masyarakat adat, agama;
3. Melestarikan seluruh budaya warisan dan sumber daya alam dan
4. Menghormati hak mereka untuk menentukan dan mewujudkan aspirasi pembangunannya.

Tujuan 17. Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan

Strategi :

1. Meningkatkan peran Indonesia di tingkat global;
2. Meningkatkan kesiapan publik domestik dan meningkatnya peran (kontribusi) dan kepemimpinan Indonesia di ASEAN;
3. Memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia dalam forum bilateral, multilateral, regional dan global;
4. Meningkatkan peran Indonesia dalam kerja sama selatan selatan dan triangular;
5. Meningkatkan promosi dan pemajuan demokrasi dan HAM;
6. Meningkatkan kerjasama ekonomi internasional di tingkat multilateral, regional, dan bilateral dengan prinsip mengedepankan kepentingan nasional, saling menguntungkan, serta memberikan keuntungan yang maksimal bagi pembangunan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Implementasi dari capaian SDGs tentunya sangat diharapkan dan dapat diwujudkan melalui pengembangan kemitraan yang baik antara pemangku kebijakan baik pusat maupun daerah, juga diperlukan pengembangan sumberdaya dan kapasitas dalam pengintegrasian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam perencanaan yang ada, baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka

pendek, disamping alokasi anggaran dari pemerintah maupun swasta untuk mendukung setiap tujuan pembangunan yang akan dicapai. Upaya pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs ditandai dengan lahirnya Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 36 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs) Tahun 2019-2023.

4.2.5. Telaah terhadap Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon

Kondisi ketahanan lingkungan pada era globalisasi pembangunan saat ini menunjukkan penurunan. Hal ini disebabkan pembangunan yang mengesampingkan faktor kelestarian lingkungan hidup sehingga menyebabkan ancaman *global warming*. *Global warming* merupakan efek atau dampak dari rusaknya kelestarian ekosistem alam yang dapat mengakibatkan kekeringan, kelangkaan bahan pangan, hingga banjir dan bahkan mampu menjadi penyebab utama dalam adanya bencana alam. Perlu adanya antisipasi dari pemerintah dan masyarakat dunia dalam menyikapi *global warming*. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mempunyai strategi dalam menerapkan pembangunan yang ramah lingkungan terlebih lagi Nusa Tenggara Barat yang memiliki indeks risiko bencana tinggi. Hal ini dilakukan agar kelestarian alam dapat terjaga dan efek *global warming* dapat diminimalisir ditengah tantangan pembangunan yang diharapkan akan semakin meningkat.

Pemanasan global mengakibatkan perubahan iklim dan kenaikan frekuensi maupun intensitas kejadian cuaca ekstrim. Pemanasan global dapat menyebabkan terjadi perubahan yang signifikan dalam sistem fisik dan biologis seperti peningkatan intensitas badai tropis, perubahan pola presipitasi, salinitas air laut, perubahan pola angin, mempengaruhi masa reproduksi hewan dan tanaman, distribusi spesies dan ukuran populasi, frekuensi serangan hama dan wabah penyakit, serta mempengaruhi berbagai ekosistem yang terdapat di daerah dengan garis lintang tinggi, lokasi yang tinggi, serta ekosistem-ekosistem pantai.

Pemanasan global terjadi sebagai akibat meningkatnya jumlah Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di atmosfer. Naiknya intensitas efek rumah kaca yang terjadi karena adanya gas dalam atmosfer yang menyerap sinar panas yaitu sinar infra

merah yang dipancarkan oleh bumi menjadikan perubahan iklim global. Jika tidak ada upaya yang sistematis dan terintegrasi untuk meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim dan perbaikan kondisi lingkungan lokal dan global mulai dari sekarang, maka dampak yang ditimbulkan akibat adanya perubahan iklim ke depan akan semakin besar dan lebih lanjut akan berdampak pada sulitnya mencapai sistem pembangunan yang berkelanjutan.

Upaya penanganan masa perubahan iklim dalam konteks pembangunan membutuhkan manajemen perubahan iklim secara efektif, dan pada saat bersamaan mengantisipasi dampak perubahan iklim global jangka panjang secara komprehensif. Disamping itu membutuhkan pendekatan lintas sektor baik pada tingkat nasional, regional, maupun lokal melalui upaya adaptasi dan mitigasi.

Salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam mengantisipasi isu perubahan iklim adalah dengan membuat Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) tingkat nasional dan daerah yang merupakan dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan nasional. Oleh karena itu, implementasi dari rencana aksi tersebut diharapkan dapat berjalan dan mendapat dukungan dari seluruh pemangku kepentingan baik ditingkat pusat maupun di daerah.

4.2.6. Telaahan Terhadap Capaian RPJMD 2018-2023

Terdapat 16 Sasaran pada RPJMD Kota Bima Tahun 2018-2023 yang diukur melalui 19 Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

1. Angka Harapan Hidup

Capaian Angka Harapan Hidup pada tahun 2021 telah melewati target yang ditetapkan untuk tahun 2023.

2. Angka Partisipasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Capaian pada tahun 2021 telah melewati target yang ditetapkan untuk tahun 2023.

3. Persentase peningkatan mutu pendidikan

Dari target yang ditetapkan sebesar 33,17% pada akhir tahun 2023, telah tercapai sebesar 33% pada tahun 2021. Diharapkan pada akhir tahun 2023 target RPJMD telah tercapai 100%.

4. Pengeluaran Per Kapita

Capaian pada tahun 2021 telah melewati target yang ditetapkan untuk tahun 2023.

5. Indeks Ketahanan Pangan

Capaian Indeks Ketahanan Pangan pada tahun 2021 sebesar 65,9, masih cukup jauh dari target yang ditetapkan untuk akhir masa RPJMD Tahun 2023 yakni sebesar 87,3.

6. Pertumbuhan PDRB

Capaian Pertumbuhan PDRB pada tahun 2021 sebesar 2,08%. Sementara target yang ditetapkan untuk akhir masa RPJMD Tahun 2023 sebesar 3,9%. Dengan berbagai upaya pembedayaan ekonomimasyarakat, daya ungkit sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, diharapkan angka pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 3,90% pada tahun 2023.

7. Angka Kemiskinan

Capaian angka kemiskinan tahun 2021 sebesar 8,88% sementara target pada tahun 2023 sebesar 8.20%. Dengan komitmen kepala daerah untuk melaksanakan program penanganan kemiskinan yang terintegrasi, baik perencanaan dan pelaksanaannya, diharapkan target ini akan tercapai pada akhir periode RPJMD.

8. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2021 telah mencapai angka 3,56% dari target 3,55% pada akhir periode RPJMD Tahun 2023. Dengan komitmen Pemerintah Kota Bima dalam mendorong program perluasan lapangan kerja, membangun kelembagaan dan sarana prasarana ketenagakerjaan, seperti membentuk Dinas Tenaga Kerja dan Balai Latihan Kerja (BLK), target RPJMD akan tercapai.

9. Nilai SAKIP

Nilai SAKIP Kota Bima pada tahun 2021 adalah 68,48 (B). Target tahun 2023 adalah 80,01 (A). Berdasarkan trend capaian nilai SAKIP 5 tahun terakhir, target ini perlu dievaluasi atau perlu dilakukan upaya terobosan untuk mencapainya pada tahun 2023.

10. Skor LPPD

Capaian skor LPPD tahun 2021 adalah 3,2590 (Sangat Baik) dan ditargetkan pada tahun 2023 akan mencapai nilai 3,2300 (Sangat Tinggi).

11. Opini BPK

Kota Bima telah meraih opini WTP selama 7 tahun berturut-turut.

12. Rasio PAD terhadap APBD

Rasio PAD terhadap APBD pada tahun 2021 telah melewati angka target tahun 2023.

13. Rata-rata skor Indeks Kepuasan Masyarakat

Rata-rata skor IKM pada tahun 2021 adalah 83,42 sementara target pada tahun 2023 adalah 88. Diperlukan upaya terobosan dalam peningkatan pelayanan publik agar skor nilai IKM pada tahun 2023 mencapai target yang ditetapkan.

14. Persentase Kesesuaian Tata Ruang

Capaian persentase kesesuaian tata ruang pada tahun 2021 adalah 98,50% sementara target tahun 2023 adalah 98,90%. Kesesuaian Tata Ruang menunjukkan ketaatan terhadap rencana tata ruang. Masih ada kawasan yang pemanfaatan lahannya belum sesuai rencana tata ruang, misalnya di kawasan bantaran sungai.

15. Indeks kualitas lingkungan hidup

Indeks kualitas lingkungan hidup Kota Bima Tahun 2021 mengalami penurunan signifikan dari tahun sebelumnya yaitu pada angka 52,73. Sementara target yang ditetapkan pada tahun 2023 adalah 87. Penurunan Indeks kualitas lingkungan hidup dipengaruhi oleh penurunan kualitas air secara signifikan (bakteri coli).

16. Luas kawasan kumuh

Pada tahun 2021, luas kawasan kumuh Kota Bima mencapai 11,66%. Ditargetkan pada tahun 2023 angka ini akan turun menjadi 10%. Faktor pendukung pencapaian target ini yaitu Efektifnya pelaksanaan Program Perencanaan Pemukiman Kumuh melalui kegiatan Pendampingan Perencanaan dan Penanganan Kumuh Kota Bima melalui Pokja PKP dan (Kotaku).

17. Persentase peningkatan infrastruktur daerah dalam kondisi baik

Ada 3 komponen infrastruktur yang diukur yaitu irigasi teknis, jalan dan saluran drainase. Pada tahun 2019, 61,09% infrastruktur irigasi teknis, jalan dan saluran drainase berada dalam kondisi baik. Pada tahun 2020, 63,78% infrastruktur dalam kondisi baik. Dengan demikian terdapat peningkatan sebesar 2,8% pada tahun 2020, dan peningkatan 9,94% pada tahun 2021.

Angka ini telah melampaui target tahun 2023 yaitu 4,3%.

Kendala yang dihadapi adalah masih banyaknya jalan di Kota Bima yang belum memiliki status sehingga apabila diterbitkan SK status jalan baru maka akan menambah panjang jalan Kota dengan kondisi yang belum baik. Disamping itu, kerusakan infrastruktur akibat bencana banjir bandang Tahun 2016 yang lalu belum sepenuhnya mampu diperbaiki. Salah satu upaya Pemerintah Kota Bima kedepan adalah peningkatan kualitas kemitraan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah dalam pembangunan infrastruktur yang ada di Kota Bima.

18. Indeks Ketahanan Daerah

Capaian indeks ketahanan daerah Kota Bima Tahun 2021 adalah 92,61 dan telah melampaui target akhir periode RPJMD yaitu 88.

Faktor pendukung antara lain adanya PUSDALOPS yang telah terintegrasi dengan pusat. Sementara kendala yang masih dihadapi adalah kurangnya penyelarasan semua dokumen yang mendukung pengkajian risiko dan perencanaan terpadu dan masih belum optimalnya pencegahan dan mitigasi bencana maupun kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana.

19. Persentase penurunan Angka kriminalitas

Persentase penurunan Angka kriminalitas tahun 2021 mencapai 66% dan telah melampaui target tahun 2023 yaitu 45%. Faktor pendukung antara lain adanya intervensi program yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan terbentuknya forum-forum seperti Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) serta Forum Konflik Sosial (FPK) yang ikut mendukung penurunan angka kriminalitas dan konflik sosial di Kota Bima.

4.2.7. Isu Nasional didalam RPJMN 2020-2024

A. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia

Salah satu misi Presiden Republik Indonesia yang termuat dalam RPJMN 2020-2024 adalah Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia. Kualitas manusia menjadi salah satu fokus yang harus segera ditangani, hal ini juga sesuai dengan arahan Presiden untuk melakukan percepatan pembangunan sumberdaya manusia Indonesia yang tertuang dalam salah satu agenda pembangunan yaitu meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang

inklusif dan merata di seluruh wilayah. Peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia dalam RPJMN 2020-2024 meliputi manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui: Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial, Peningkatan pelayanan Kesehatan menuju cakupan Kesehatan semesta, Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, Pengentasan kemiskinan dan Peningkatan produktivitas dan daya saing.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2021 mencapai 72,79 poin, meningkat 0,35 poin (0,49 persen) dibandingkan capaian tahun 2020 sebesar 71,94 poin. Selama tahun 2020-2021, IPM Indonesia rata-rata meningkat sebesar 0,76 persen. Adapun Indeks Pembangunan Manusia di Nusa Tenggara Barat tahun 2021 68,65 poin berada dibawah rata-rata nasional, dengan komponen harapan lama sekolah sebesar 13,90 tahun, rata-rata lama sekolah sebesar 7,38 tahun, umur harapan hidup 66,69 tahun, dan pengeluaran perkapita sebesar 10,38 juta rupiah per orang per tahun. Banyaknya permasalahan terkait pembangunan manusia di Nusa Tenggara Barat menjadi faktor masih rendahnya kualitas pembangunan manusia saat ini, beberapa permasalahan tersebut diantaranya masih tingginya angka stunting yang mencapai 31,4 persen yang merupakan satu dari 12 provinsi prioritas yang memiliki prevalensi stunting tertinggi secara nasional. Upaya peningkatan kualitas pembangunan manusia yang menjadi salah satu fokus pemerintah pusat dalam RPJMN 2020-2024, harus menjadi perhatian pemerintah daerah khususnya Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam membangun sinergi kebijakan dalam upaya peningkatan kualitas pembangunan manusia melalui program-program strategis guna menghasilkan sumberdaya manusia berkualitas.

B. Standar Pelayanan Minimal

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang memuat pengaturan terkait jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM. Hal itu merujuk pada ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan

ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Sebagai bentuk penguatan terhadap pelaksanaan SPM di daerah maka telah dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai pengganti dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 yang sudah tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan penerapan Standar Pelayanan Minimal di daerah. Adapun urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri atas:

1. Pendidikan;
 - Pelayanan pendidikan menengah;
 - Pelayanan pendidikan khusus;
2. Kesehatan;
 - Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi;
 - Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi;
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas daerah kabupaten/kota;
 - Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas daerah kabupaten/kota;
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah provinsi;
 - Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi;
5. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
 - Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum daerah provinsi;
6. Sosial.
 - Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti;
 - Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti;

- Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti;
- Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti; dan
- Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi.

Penerapan SPM dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, pemenuhan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar. Hal ini menjadi tantangan pemerintah daerah agar mampu menyusun pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM yang telah ditetapkan. Dengan adanya SPM harapan masyarakat untuk mendapatkan suatu standar pelayanan dasar ataupun pelayanan publik yang sama di setiap daerah akan dapat diwujudkan.

C. Bonus Demografi

Pada tahun 2045, Indonesia akan mendapatkan bonus demografi. Bonus demografi merupakan fenomena langka karena hanya akan terjadi satu kali ketika proporsi penduduk usia produktif berada lebih dari dua pertiga jumlah penduduk keseluruhan, yaitu jumlah penduduk Indonesia 70 persen berada pada usia produktif antara 15-64 tahun, sedangkan sisanya 30 persen merupakan penduduk yang tidak produktif yaitu berada pada usia dibawah 14 tahun dan di atas 65 tahun pada periode tahun 2020-2045. Indonesia diprediksi akan mengalami masa bonus demografi pada tahun 2020-2035, dan puncaknya di tahun 2028-2030.

Kondisi ini perlu dijadikan sebagai peluang khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia usia produktif dalam menghadapi tantangan pasar bebas tenaga kerja. Penyiapan sumberdaya manusia yang unggul perlu dipersiapkan sejak saat ini. Jika bonus demografi ini tidak dimanfaatkan dengan baik, maka akan membawa dampak buruk terutama masalah sosial seperti kemiskinan, Kesehatan yang rendah, pengangguran, dan akan memicu tingkat kriminalitas tinggi.

D. Transfer Fiskal ke Daerah

Transfer fiskal pemerintah pusat ke daerah merupakan bentuk kebijakan pelaksanaan otonomi dalam mengatasi ketimpangan fiskal di daerah. Pemberian

transfer pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam membiayai belanja daerah untuk pembangunan dan pelayanan publik. Secara nasional terdapat sekitar 60 persen pendanaan daerah masih ditopang dari pemerintah pusat, yaitu melalui Transfer Keuangan dan Dana Kelurahan (TKDD). Demikian halnya dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang juga sangat tergantung dari Dana Transfer atau Dana Perimbangan. Besarnya rasio ketrgantungan Provinsi Nusa Tenggara Barat terhadap bantuan pihak eksternal sebesar 64,55 persen sementara derajat kemandirian Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 35,45 persen.

Dana transfer setiap tahunnya mengalami kenaikan, namun sejak tahun 2020 kondisi dana transfer daerah semakin menurun sebagai dampak Pandemi Covid-19. Pada tahun 2019 dana perimbangan Nusa Tenggara Barat sebesar 3,60 triliun mengalami penurunan tahun 2020 menjadi 3,38 triliun dan kembali menurun di tahun 2021 menjadi 3,35 triliun yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, serta Dana Insentif Daerah (DID). Kondisi tersebut sangat berdampak pada berbagai program dan target pembangunan yang ingin dicapai dalam periode RPJMD sebelumnya, belum lagi adanya *refocusing* anggaran untuk penanganan Covid-19 menyebabkan semakin kecilnya fiskal Nusa Tenggara Barat dalam mengintervensi berbagai permasalahan pembangunan seperti kemiskinan, pembangunan manusia, pengangguran, stunting dan berbagai permasalahan lainnya. Kebijakan fiskal pemerintah pusat saat ini juga mengalami sedikit pergeseran dan lebih menuntut agar daerah berprestasi agar mendapatkan tambahan dari Dana Insentif Daerah (DID). Dana tersebut dialokasikan untuk memberikan insentif/penghargaan kepada daerah atas kinerja pemerintah daerah dalam perbaikan/pencapaian kinerja di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.

Isu penurunan transfer fiskal harus segera ditindaklanjuti oleh daerah, salah satunya melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam menuju kemandirian daerah. Terdapat beberapa upaya yang perlu dilakukan diantaranya ekstensifikasi pendapatan yang dapat dilakukan melalui pengelolaan sumber penerimaan baru serta penjaringan Wajib Pajak (WP). Upaya yang kedua adalah melalui intensifikasi pendapatan yang dilakukan dengan optimalisasi penerimaan

sesuai potensi daerah serta optimalisasi penerimaan dari piutang. Salah satu kunci untuk mencapai potensi pajak daerah yaitu melalui pemutakhiran atau validasi data pajak daerah. Upaya selanjutnya adalah penguatan kelembagaan yang dapat dilakukan melalui restrukturisasi organisasi sesuai kebutuhan daerah, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), serta inovasi dan modernisasi administrasi perpajakan daerah. Berbagai upaya tersebut, diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga ketergantungan akan dana transfer dari pemerintah pusat dapat berkurang serta upaya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan pembangunan melalui kemandirian fiskal dapat diwujudkan.

E. Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024

Pada tahun 2024 Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi yaitu Pemilu dan Pilkada serentak, diantaranya pemilihan Presiden-Wakil Presiden dan calon legislatif DPR-DPRD dengan pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur, Walikota-Wakil Walikota, dan Walikota-Wakil Walikota yang akan digelar pada tahun yang sama. Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Pemerintah daerah harus memastikan dukungan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 dan tetap menjaga kondusifitas daerah dan meredam potensi konflik sosial di masyarakat. Pemerintah daerah juga harus menjamin ketersediaan anggaran pelaksanaan kegiatan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 termasuk untuk pengembangan kehidupan demokratis khususnya untuk meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih, secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.2.8. Isu Strategis Provinsi NTB dalam RPD 2024-2026

A. Konektivitas Wilayah

Wilayah regional Nusa Tenggara memiliki potensi sumber daya alam yang sangat melimpah. Nusa Tenggara Barat terdiri dari 2 (dua) pulau besar yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Setidaknya terdapat 5 (lima) sektor utama yang menjadi kontributor terbesar dalam perekonomian Nusa Tenggara Barat, yaitu sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan serta perdagangan dan

jasa.

Termuat dalam RPJMN 2020-2024, prioritas pengembangan wilayah nusa tenggara tahun 2020-2024 difokuskan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah berbasis hilirisasi pertanian, perikanan, pertambangan, dan pariwisata dengan memperhatikan lokasi prioritas berdasarkan koridor pertumbuhan dan pemerataan. Koridor pertumbuhan di Nusa Tenggara Barat meliputi: (1) Kabupaten Lombok Barat; (2) Kota Mataram; (3) Kabupaten Lombok Tengah; (4) Kabupaten Lombok Timur; (5) Kabupaten Sumbawa Barat; (6) Kabupaten Sumbawa; (7) Kota Bima; (8) Kabupaten Dompu; dan (9) Kabupaten Bima. Untuk koridor pemerataan terfokus di Kabupaten Lombok Utara. Dalam tahun 2020-2024, pembangunan wilayah Nusa Tenggara Barat akan mencakup kegiatan prioritas: (1) Pengembangan sektor unggulan; (2) Pengembangan kawasan strategis; (3) Pengembangan kawasan perkotaan; (4) Pembangunan kelurahan, kawasan perkulurahan dan transmigrasi, daerah tertinggal, dan kawasan perbatasan; (5) Penataan kelembagaan dan keuangan daerah.

Untuk mendukung pergerakan barang dan sumberdaya maka dibutuhkan pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat dan udara yang terintegrasi di wilayah Nusa Tenggara Barat antara lain pembangunan jalan lingkaran/trans pulau dan jalan akses ke kawasan pariwisata dan kawasan perbatasan, antara lain jalan akses Samota, jalan akses Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, dan pengembangan pelabuhan Gili Trawangan. Untuk itu peran dari semua Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat dalam mendukung percepatan pembangunan konektivitas sangat diharapkan melalui perencanaan yang terpadu, terintegrasi serta komprehensif untuk percepatan konektivitas wilayah di Nusa Tenggara Barat.

B. Ketahanan Terhadap Bencana

Nusa Tenggara Barat adalah salah satu pulau yang paling rawan bencana khususnya gempa, banjir, dan tanah longsor. Wilayah Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat terletak pada kawasan tektonik aktif, dimana menurut buku Sumber dan Bahaya Gempa Nasional 2017, Pulau Lombok dikelilingi oleh beberapa sumber gempa, yaitu diantaranya Zona Back Arc Thrust di wilayah utara, megathrust di selatan, dan sistem sesar geser di sisi barat dan timurnya.

Gempa Lombok, Bali, dan Sumbawa terjadi pada Minggu, tanggal 29 Juli 2018 pukul 05.47 WIB dengan kekuatan M6.4. gempa tersebut terletak pada koordinat 8,4 LS dan 116,5 BT, atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 47 km ke arah timur laut Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat pada kedalaman 24 km. berdasarkan informasi dari BMKG, gempa Lombok 29 Juli memiliki intensitas IV pada Skala Intensitas Gempa BMKG (SIG-BMKG) setara dengan VI-VII MMI. Gempa tersebut disusul dengan gempa susulan yang hingga pukul 22.00 WIB di hari yang sama, telah terjadi 213 kali gempa susulan dengan magnitudo terbesar 5,7 SR. Gempa ini kemudian diketahui sebagai *foreshock* dari gempa utama yang terjadi pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 pukul 18.46 WIB, dengan magnitudo 7.0 pada 8,25 LS dan 116,49 BT yang memberikan dampak luas. Hingga Senin dini hari 6 Agustus 2018 pukul 02.30 WIB, BNPB tercatat 82 orang meninggal dunia akibat gempa, ratusan orang luka-luka dan ribuan rumah mengalami kerusakan. Ribuan warga mengungsi ke tempat aman. Gempa bumi Lombok M7 5 Agustus 2018 sampai pukul 05.00 WIB tercatat sebanyak 121 gempa susulan. Empat belas (14) hari setelahnya, pada tanggal 19 Agustus 2018 terjadi kembali gempa pada segmen di sisi timur. Dimulai dengan gempa magnitudo 6.3 disusul oleh gempa dengan magnitudo 6,9, diikuti oleh 484 gempa susulan yang tercatat hingga tanggal 31 Agustus 2018 pukul 18.00 WIB, 23 diantaranya dirasakan. Hingga 31 Agustus 2018, BNPB mencatat 560 jiwa penduduk meninggal dunia, 396.032 jiwa penduduk mengungsi, 83.392 rumah rusak.

Pada periode 1 Januari-31 Januari 2022 telah terjadi bencana alam sebanyak 12 kejadian. Dari jumlah tersebut, bencana yang paling sering terjadi yaitu bencana banjir/banjir bandang dengan 6 kejadian, tanah longsor 3 kejadian, angin putting beliung 2 kejadian, dan banjir rob 1 kejadian. Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Dompu menjadi wilayah yang saat ini paling sering dilanda bencana dengan masing-masing 3 kejadian, Kabupaten Bima 2 kejadian, Kabupaten Lombok Tengah 1 kejadian, Kabupaten Lombok Utara 1 kejadian, Kota Bima 1 kejadian, dan Kabupaten Sumbawa 1 kejadian serta 3 Kabupaten/Kota masih nihil kejadian. Dari kejadian bencana tersebut mengakibatkan 3.184 jiwa terdampak, 2 orang luka-luka dan 1 meninggal dunia serta mengakibatkan 13 rumah rusak, 3 unit jembatan dan 7 titik jalan.

Besarnya potensi bencana di wilayah Nusa Tenggara Barat akan menjadi

tantangan dan peluang pembangunan, untuk itu pemerintah perlu mengupayakan pembangunan yang lebih adaptif, responsif, antisipatif dalam mitigasi bencana alam termasuk gempa bumi.

4.2.9. Isu Strategis Kota Bima dalam RPJPD Periode IV (Tahun 2023-2028)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-3, RPJM ke-4 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Kota Bima yang maju dan mandiri melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat ditunjukkan oleh makin tinggi dan meratanya tingkat pendapatan masyarakat dengan jangkauan lembaga jaminan sosial yang lebih menyeluruh; mantapnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, antara lain ditandai oleh meningkat dan meratanya akses, tingkat kualitas, dan relevansi pendidikan seiring dengan makin efisien dan efektifnya manajemen pelayanan pendidikan; meningkatnya kemampuan Iptek; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak; dan terwujudnya kesetaraan gender; bertahannya kondisi dan penduduk tumbuh seimbang.

Dalam rangka memantapkan pembangunan yang berkelanjutan, keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam terus dipelihara dan dimanfaatkan untuk terus mempertahankan nilai tambah dan daya saing bangsa serta meningkatkan modal pembangunan nasional pada masa yang akan datang.

4.2.10. Isu Strategis RTRW Kota Bima

Isu pembangunan dalam RTRW Kota Bima adalah:

- 1) Berkurangnya Sumber Mata Air
- 2) Alih fungsi Lahan
- 3) Peningkatan Risiko Bencana Banjir
- 4) Peningkatan Limbah dan Volume Sampah
- 5) Kerusakan Wilayah Laut/Pesisir

A. Berkurangnya Sumber Mata Air

Berkurangnya sumber mata air merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang dihadapi oleh Kota Bima, dimana Secara umum kondisi alam lingkungan Kota Bima dikelilingi oleh perbukitan yang memiliki lereng yang terjal dan sebelah barat dibatasi oleh teluk bima, kondisi ini memberikan dimensi lain dalam kondisi lingkungan Kota Bima, dikarenakan terletak pada suatu lembah pada dataran alluvial, endapan aluvial, batuan gunung api (*pliosen*), batu gamping (*miosen*), batuan gunung api (*miosen*), dengan kondisi demikian Kota Bima mempunyai potensi air yang kurang bagus kuantitas dan kualitasnya. Dari segi kuantitas kondisi debit sungai di musim kemarau kecil dikarenakan *base flow* kecil, sehingga air tanah menjadi sumber air strategis dalam pemenuhan kebutuhan air di Kota Bima.

Disamping itu Kota Bima dipengaruhi oleh adanya kondisi dua musim, yaitu musim panas dan musim hujan. Musim hujan sangat pendek yaitu tiga bulan (bulan Desember s/d Februari), sedangkan musim kemarau terjadi selama 9 bulan yaitu mulai bulan Maret s/d November. Musim kering yang lama, menyebabkan Kota Bima mengalami defisit air hingga 8 bulan yaitu mulai April-November. Defisit air tertinggi akan terjadi pada bulan Agustus-Oktober.

Adapun mata air di Kota Bima berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima pada tahun 2019 terinventarisir sebanyak 51 titik mata air dengan debit yang bervariasi, dan terus mengalami penurunan, dimana hal ini disebabkan oleh minimnya pengelolaan, upaya konservasi, rehabilitasi pada kawasan mata air.

Selain hal tersebut, berkurangnya sumber mata air di Kota Bima dipengaruhi oleh perubahan tata guna lahan pada daerah hulu dan perbukitan, dimana sebelumnya penggunaan lahan berupa kawasan perkebunan, tanaman pangan dan atau hutan produksi terbatas menjadi lahan jagung, dimana perubahan tata guna lahan ini juga sangat berpengaruh terhadap kebencanaan banjir yang sering terjadi di Kota Bima pada musim hujan. Dimana terdapat kurang lebih 7.277,8 hektar penggunaan lahan yang sebelumnya berupa kawasan tanaman pangan, perkebunan dan hutan produksi terbatas beralih ditanami jagung yang menyebar pada setiap Kecamatan.

B. Alih Fungsi Lahan

Alih fungsi lahan terjadi seiring dengan perkembangan jumlah penduduk yang membutuhkan lahan perumahan serta alternatif mata pencaharian pada sektor pertanian dengan perubahan tata guna lahan, dimana ketersediaan lahan ideal untuk pengembangan kegiatan perumahan sangat terbatas, mengingat kondisi geografis kota Bima didominasi perbukitan.

Secara keseluruhan luas lahan pertanian sawah di Kota Bima dari tahun 2011-2021 terlihat mengalami peningkatan karena adanya pembukaan lahan baru menjadi lahan pertanian tanaman pangan, namun bila ditinjau berdasarkan luas lahan pertanian sawah perkecamatan, terdapat 2 Kecamatan di Kota Bima yang mengalami penurunan luas lahan pertanian sawah yaitu Kecamatan Mpunda dan pada Kecamatan Raba, dimana di Kecamatan Mpunda terjadi pengurangan lahan pertanian sawah seluas 42 Ha dan di Kecamatan Raba seluas 22 Ha, dan ini menandakan bahwa telah terjadi alih fungsi lahan pertanian sawah menjadi Kawasan terbangun pada 2 Kecamatan ini, dimana laju pertumbuhan penduduk serta dinamika pembangunan di Kota Bima menjadi salah satu pemicu terjadinya alih fungsi lahan, hal ini juga terkait dengan keterbatasan lahan yang ideal atau relatif datar untuk pengembangan pembangunan, dimana Kota Bima didominasi oleh perbukitan.

Selain daripada itu perubahan tata guna lahan di daerah hulu dan perbukitan, dimana penggunaan lahan sebelumnya berupa kawasan perkebunan, tanaman pangan, dan atau hutan produksi terbatas menjadi budidaya jagung, dimana perubahan tata guna lahan ini juga sangat berpengaruh terhadap kebencanaan banjir yang sering terjadi di Kota Bima.

C. Peningkatan Risiko Bencana Banjir

Peningkatan risiko bencana banjir merupakan salah satu isu strategis di Kota Bima dimana Daerah yang berpotensi banjir teridentifikasi pada daerah-daerah sepanjang aliran sungai. Bencana banjir di Kota Bima terjadi hampir setiap tahunnya pada musim hujan dengan intensitas curah hujan yang tinggi (Desember-Februari), dimana banjir bandang pernah menghantam Kota Bima pada tanggal 21 dan 23 Desember 2016, yang berdampak pada seluruh kecamatan dan 37 kelurahan di Kota Bima. Bencana banjir selain disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, juga

disebabkan oleh kekritisan lahan pada daerah perbukitan mengakibatkan tingginya tingkat erosi dan terjadinya bencana banjir, dan sebagian besar air mengalir sampai ke laut, sehingga tidak dapat dimanfaatkan kembali pada waktu musim kemarau, bencana banjir di Kota Bima juga diakibatkan oleh adanya banjir kiriman dari wilayah Kabupaten Bima terutama di sebelah timur dan sebelah utara, disamping itu banjir juga disebabkan oleh masih kurang baiknya sistem drainase perkotaan.

Tabel 4.11. Daerah Rawan Banjir di Kota Bima

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	
1	Kecamatan Rasanae Timur	a. Kelurahan Lampe b. Kumbé c. Dodu	d. Kodo e. Nungga f. Oi Mbo
2	Kecamatan Raba	a. Rabangodu Selatan b. Rabangodu Utara c. Rabadompu Barat d. Rabadompu Timur e. Penaraga	f. Rontu g. Rite h. Kendo i. Ntobo j. Penanae
3	Kecamatan Mpunda	a. Manggemaci	f. Panggi
		b. Monggonao c. Lewirato d. Santi e. Matakando	g. Sambinae h. Mande i. Penatoi j. Sadia
4	Kecamatan Rasanae Barat	a. Paruga b. Nae c. Tanjung	d. Sarae e. Pane f. Dara
5	Kecamatan Asakota	a. Melayu b. Jatiwangi c. Jatibaru	d. Jatibaru Timur e. Ule

D. Peningkatan Limbah dan Volume Sampah

Peningkatan limbah dan volume sampah di Kota Bima tidak terlepas dari perkembangan jumlah penduduk yang terus meningkat, serta perilaku konsumsi penduduk yang mulai berubah dan cenderung mengkonsumsi makanan cepat saji yang menambah volume sampah, serta di tambah dengan kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah baik dalam lingkup skala rumah tangga bahkan lingkungan. Berdasarkan data SSK timbulan sampah Kota Bima sebesar 1072,42 ton/hari dengan rincian diperkotaan 361,63 ton/hari dan dipedesaan 710,8 ton/hari dengan komposisi 47,79% sampah organik dan 52,21 % sampah anorganik.

Tabel 4.12. Timbunan Sampah di Kota Bima

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
1	Timbunan sampah rumah tangga	ton/hari	1.072,42
	Perkotaan	ton/hari	361,63
	Perdesaan	ton/hari	710,80
2	Data Komposisi sampah	% organik	47,79
		% anorganik	52,21

Sumber: Instrumen SSK, 2021

Pengelolaan sampah di perkotaan Kota Bima terdiri dari penanganan sampah 47,71% , pengurangan sampah 0,1% dari aktivitas Bank Sampah. Sehingga jumlah sampah yang belum tertangani sebesar yaitu 52,25%. Secara rinci tergambar pada tabel di bawah ini.

E. Kerusakan Wilayah Laut/Pesisir

Kerusakan wilayah laut/ pesisir diakibatkan oleh peningkatan timbunan sedimen pada wilayah pesisir dimana sebagian besar sedimen terbawa air pada saat hujan melalui sungai, banyaknya sampah yang terdapat pada wilayah laut terutama pada kawasan mangrove, akibat kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah, dimana masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah kearah sungai yang kemudian sampai pada hilir sungai dan sampah-sampah tersebut terbawa ombak hingga menyebar pada wilayah laut/pesisir, yang menyebabkan terganggunya habitat biota disekitar kawasan pesisir serta dapat Penurunan kualitas air laut.

Disamping itu mangrove juga tidak luput dari kerusakan seperti pernah terjadinya alih fungsi lahan mangrove menjadi fasilitas perdagangan dan jasa seluas 6,18 Ha pada kelurahan Dara. Namun untuk pemulihan dan perluasan kawasan mangrove yang sekaligus merupakan upaya peningkatan kondisi jasa ekosistem yang terdapat pada wilayah pesisir Kota Bima maka direncanakan lahan seluas 29,45 Ha sebagai lokasi penanaman/reboisasi mangrove.

4.2.11. Isu Strategis RPD Kota Bima Tahun 2024-2026

Berdasarkan hasil telaahan RPJMN Tahun 2020-2024, RTRW Kota Bima, RPJPD Kota Bima Tahun 2008-2028, RPJMD Provinsi NTB Tahun 2009-2023, dan capaian RPJMD Kota Bima Tahun 2018-2023, terdapat 6 isu strategis dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bima Tahun 2024-2026 yaitu:

- 1) Peningkatan dan pemerataan kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan bermartabat

Konsep pembangunan yang berpusat pada manusia (*people centered development*) mendasari isu ini, mengingat investasi pada sumber daya manusia memiliki dampak positif yang besar dalam jangka Panjang pada seluruh aspek secara berkelanjutan.

Berbagai variabel yang dapat mengilustrasikan isu ini antara lain:

- a. Peningkatan kualitas sarana prasarana sekolah, tenaga pendidik, serta *output* pendidikan secara merata di seluruh wilayah Kota Bima.
 - b. Peningkatan kualitas sarana prasarana kesehatan dan tenaga kesehatan, serta *output* kesehatan secara merata di seluruh wilayah Kota Bima.
 - c. Peningkatan kesehatan ibu dan anak serta menurunkan angka *stunting*.
 - d. Mempromosikan budaya hidup sehat bagi masyarakat segala usia.
 - e. Mencapai kesetaraan gender dengan memberdayakan perempuan dan anak.
 - f. Penumbuhkan potensi pemuda yang mampu berperan dalam semua sektor pembangunan.
 - g. Cakupan layanan jaminan kesejahteraan sosial secara menyeluruh dan terintegrasi secara sistem bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat terdampak bencana Covid 19.
 - h. Penguatan ketahanan dan keamanan pangan.
- 2) Percepatan penanggulangan kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan ketimpangan pendapatan;
- a. Sinergi Pentahelix (pemerintah, dunia usaha, masyarakat, Lembaga Pendidikan dan media) dalam menumbuhkan dan mengembangkan kewirausahaan Usaha Mikro untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem, tingkat pengangguran terbuka, dan ketimpangan pendapatan.
 - b. Mengembangkan nilai tambah (*value added*) komoditas lokal unggulan yang mampu berdaya saing dan berkelanjutan.
 - c. Mengembangkan sistem distribusi dan pemasaran produk lokal berbasis *on line* yang terintegrasi antara produsen, lembaga keuangan dan konsumen.
 - d. Peningkatan performa BUMD sebagai badan usaha profit yang juga dapat memberikan *support* bagi ekonomi masyarakat.
 - e. Pengembangan pariwisata dan penunjang pariwisata perkotaan, yang mampu menjadi pendorong dan penggerak bagi bertumbuhkembangnya ekonomi lokal dan UMKM.
 - f. Mendorong berkembangnya ekonomi digital melalui ekonomi kreatif.
- 3) Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan pelayanan publik
- a. Pengelolaan Pemerintahan yang Transparan, Bersih, Efektif, dan Terpercaya.
 - b. Menyederhanakan birokrasi, meningkatkan kemudahan dan kecepatan layanan publik melalui inovasi berbasis teknologi informasi.
 - c. Peningkatan nilai SAKIP dan LPPD.
 - d. Pengembangan komitmen dan kualitas ASN secara *merit system* serta berkelanjutan.

- e. Pemantapan sistem informasi pembangunan yang transparan dan membuka ruang aspirasi secara luas serta mendukung partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- 4) Pengembangan Infrastruktur dan pemanfaatan Teknologi Informasi
- a. Pemantapan infrastruktur yang ramah lingkungan pendukung kualitas permukiman, jalan, kegiatan ekonomi, pariwisata, industri, perdagangan dan jasa.
 - b. Percepatan pengembangan transportasi massal orang dan transportasi barang yang berkelanjutan dan terintegrasi dengan pusat-pusat kegiatan serta simpul-simpul transportasi.
 - c. Peningkatan jaringan komunikasi dan teknologi informasi untuk memfasilitasi seluruh aktivitas ekonomi, aktivitas pemerintahan, dan sektor pendidikan.
 - d. Pengembangan sistem sanitasi perkotaan yang terintegrasi sesuai dengan karakter wilayah, untuk mewujudkan 100% terlayani sistem sanitasi perkotaan.
 - e. Penyediaan sarana prasarana umum (RTH, Tempat Olah Raga, Balai Pertemuan, Tempat Ibadah, Makam, dll) yang berkualitas dan merata.
 - f. Pengembangan jaringan air bersih dan manajemen pengelolaan air yang baik serta mengintegrasikan dengan sumber air baku sebagai wujud ketahanan air yang berkelanjutan.
 - g. Optimalisasi pengelolaan sampah rumah tangga.
 - h. Percepatan pengembangan jaringan jalan dan infrastruktur perkotaan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.
- 5) Mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim
- a. Melatih dan mendorong kesadaran masyarakat untuk tanggap pencegahan dan mitigasi bencana.
 - b. Menyediakan dan mengembangkan sarana prasarana penanganan bencana antara lain *command center*, jaringan pemadaman kebakaran, pos tanggap darurat dan lain sebagainya.
 - c. Penguatan Tim Siaga Bencana Kelurahan (TSBK) dan Kelurahan Siaga Bencana (KSB).
- 6) Keamanan dan ketenteraman wilayah;
- a. Menumbuhkan budaya inklusif, ramah, anti diskriminasi SARA, gotong royong, kebebasan politik dan mengembangkan budaya dan kearifan lokal.
 - b. Membangun sistem keamanan yang efektif, mengedukasi dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban.

Keterkaitan isu strategis Kota Bima dengan nasional dan provinsi diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.13. Keterkaitan Isu Strategis Kota Bima, Provinsi NTB, dan Nasional

RTRW Kota Bima Tahun 2008-2028	Hasil Evaluasi RPJMD Kota Bima Tahun 2018-2023	RPJMN 2020-2024	RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023	Rancangan RPD Provinsi NTB Tahun 2024-2026	Permasalahan Per Urusan	Isu Strategis RPD Kota Bima Tahun 2024-2026
		Transfer Fiskal ke Daerah	Peningkatan infrastruktur daerah dalam kondisi baik	Konektivitas Wilayah	Belum optimalnya kualitas dan kuantitas pemenuhan infrastruktur perkotaan	Pengembangan Infrastruktur dan pemanfaatan Teknologi Informasi
			Penurunan luas kawasan kumuh		Perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) tidak dapat dilaksanakan secara maksimal karena banyak calon penerima bantuan yang tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan	
			Kesesuaian Tata Ruang	Penataan Ruang, konektivitas, dan ketersediaan Infrastruktur Wilayah belum optimal	Belum optimalnya pemanfaatan dokumen rencana tata ruang sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan	
	Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka		Tingkat Kemiskinan masih di atas rata-rata nasional	Industrialisasi produk unggulan daerah belum optimal	Meningkatnya jumlah pengangguran terdidik, yang muncul karena ketidaksesuaian	Percepatan penanggulangan kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan ketimpangan pendapatan

RTRW Kota Bima Tahun 2008-2028	Hasil Evaluasi RPJMD Kota Bima Tahun 2018-2023	RPJMN 2020-2024	RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023	Rancangan RPD Provinsi NTB Tahun 2024-2026	Permasalahan Per Urusan	Isu Strategis RPD Kota Bima Tahun 2024-2026
					antara spesifikasi lapangan kerja dengan ketersediaan sumber daya	
	Peningkatan Pertumbuhan PDRB			Pertumbuhan ekonomi relatif stagnan	Masih rendahnya jumlah wirausahawan baru sebagai potensi untuk penyediaan lapangan kerja	
	Penurunan angka kemiskinan				Selama 2 tahun terakhir di Kota Bima terdapat penyandang kemiskinan ekstrem yaitu 1.521 jiwa pada tahun 2021 dan 2.461 jiwa pada tahun 2022	
		Standar Pelayanan Minimal	Peningkatan Nilai SAKIP, Skor LPPD, dan Rata-rata skor Indeks Kepuasan Masyarakat	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Belum Berjalan Optimal	Belum optimalnya pentaan kelembagaan dan ketatalaksanaan	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan pelayanan publik
Peningkatan Risiko Bencana Banjir	Peningkatan Indeks Ketahanan Pangan		NTB Daerah Rawan Bencana	Ketahanan Terhadap Bencana	Belum optimalnya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana alam maupun	Mitigasi bencana, adaptasi perubahan iklim dan pembangunan rendah karbon

RTRW Kota Bima Tahun 2008-2028	Hasil Evaluasi RPJMD Kota Bima Tahun 2018-2023	RPJMN 2020-2024	RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023	Rancangan RPD Provinsi NTB Tahun 2024-2026	Permasalahan Per Urusan	Isu Strategis RPD Kota Bima Tahun 2024-2026
					kebakaran	
Berkurangnya Sumber Mata Air			Peningkatan Indeks kualitas lingkungan hidup	Kualitas dan Daya Dukung Lingkungan belum optimal	Kualitas air sungai dan anak sungai di Kota Bima saat ini berada pada kondisi tercemar. Penyebab pencemaran terdiri dari dua hal yaitu sampah dan limbah cair. Sampah yang dibuang ke sungai dan anak-anak sungai seringkali menjadi penyebab banjir karena menyumbat aliran air	
Kerusakan Wilayah Laut/Pesisir						
Peningkatan Limbah dan Volume Sampah					Masih rendahnya cakupan pelayanan penanganan dan pengelolaan sampah	
Alih Fungsi Lahan				Belum direalisasikan dan dikembangkan Kebijakan strategis dari Pemerintah untuk		

RTRW Kota Bima Tahun 2008-2028	Hasil Evaluasi RPJMD Kota Bima Tahun 2018-2023	RPJMN 2020-2024	RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023	Rancangan RPD Provinsi NTB Tahun 2024-2026	Permasalahan Per Urusan	Isu Strategis RPD Kota Bima Tahun 2024-2026
				mengatasi penyusutan lahan produktif di perkotaan seperti program sawah abadi sebagai upaya menjaga keseimbangan lingkungan dengan penyusutan lahan pangan di Kota Bima semakin meningkat dan banyaknya alih fungsi lahan pertanian menjadi properti		
	Persentase peningkatan mutu pendidikan	Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia	Derajat Kesehatan Masyarakat Relatif Rendah	Partisipasi perempuan dalam pembangunan dan ketahanan keluarga belum optimal	Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Peningkatan dan pemerataan kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan bermartabat
		Bonus Demografi	Mutu dan Daya Saing Keluaran Pendidikan Belum Optimal		Rendahnya muatan pendidikan karakter dan keagamaan pada sekolah negeri dibanding pada sekolah swasta tertentu disebabkan kekurangan guru yang mengajar	

RTRW Kota Bima Tahun 2008-2028	Hasil Evaluasi RPJMD Kota Bima Tahun 2018-2023	RPJMN 2020-2024	RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023	Rancangan RPD Provinsi NTB Tahun 2024-2026	Permasalahan Per Urusan	Isu Strategis RPD Kota Bima Tahun 2024-2026
					muatan pendidikan karakter dan keagamaan tersebut	
		Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024		Belum Terciptanya Kehidupan Masyarakat yang aman dan damai secara optimal	Kompleksitas permasalahan gangguan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta rasio Polisi Pamong Praja dengan luas wilayah Kota Bima	Keamanan dan ketenteraman wilayah

Sumber: Hasil Analisis

4.3. Rancangan Prioritas RPD Kota Bima Tahun 2024-2026

Berdasarkan telaah atas isu strategis, maka dirumuskan 13 Prioritas pembangunan Kota Bima tahun 2024 yakni:

1. Pertumbuhan ekonomi
2. Penurunan angka kemiskinan
3. Perluasan kesempatan kerja
4. Penanganan *stunting*
5. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan
6. Peningkatan kualitas penyelenggaraan kesehatan
7. Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih
8. Peningkatan layanan publik
9. Peningkatan kualitas infrastruktur
10. Meningkatkan kualitas permukiman
11. Peningkatan kualitas lingkungan dan pembangunan rendah karbon
12. Mitigasi bencana
13. Mewujudkan keamanan dan stabilitas daerah.

Ketigabelas prioritas tersebut akan dilaksanakan dengan strategi dan kebijakan yang akan dituangkan dalam bab VI.

Sinkronisasi prioritas pembangunan Nasional, Provinsi NTB dan Kota Bima disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.14

Sinkronisasi prioritas pembangunan Nasional, Provinsi NTB dan Kota Bima

Prioritas Pembangunan (PN) Nasional			Prioritas Pembangunan Daerah (PD) Provinsi NTB	Prioritas Daerah (PD) Kota Bima	
PN 1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	PD 1	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	PD 1	Pertumbuhan ekonomi
				PD 2	Penurunan angka kemiskinan
PN 2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	PD 4	Pembangunan Kesejahteraan	PD 3	Perluasan kesempatan kerja
PN 3	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	PD 2	Pembangunan Manusia	PD 4	Penanganan <i>stunting</i>
				PD 5	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan
				PD 6	Peningkatan kualitas penyelenggaraan kesehatan
PN 4	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	PD 5	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	PD 7	Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih
PN 5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	PD 7	Peningkatan Daya saing Daerah	PD 8	Peningkatan layanan publik
				PD 9	Peningkatan kualitas infrastruktur
				PD 10	Meningkatkan kualitas permukiman
PN 6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	PD 3	Pembangunan Lingkungan	PD 11	Peningkatan kualitas lingkungan dan pembangunan rendah karbon
				PD 12	Mitigasi bencana
PN 7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	PD 6	Peningkatan Komitmen Dan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) (PD-6)	PD 13	Mewujudkan keamanan dan stabilitas daerah

Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024, RPD Provinsi NTB Tahun 2024-2026, Hasil Analisis

BAB V

TUJUAN DAN SASARAN

Intruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Inmendagri) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru menjadi panduan bagi Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bima Tahun 2024-2026. Sesuai Inmendagri ini, Bab V dokumen RPD tidak memuat Visi dan Misi lima tahunan yang akan memberikan arah bagi perencanaan pembangunan daerah masa transisi layaknya dokumen RPJMD. Namun uraian dari Bab V akan memuat tentang rumusan tujuan, dan sasaran pembangunan daerah pada periode tahun 2024-2026 atau selama tiga tahun kedepan.

Tujuan merupakan kondisi akhir yang akan dicapai pada akhir suatu periode pembangunan, sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang menggambarkan kondisi maupun hasil pembangunan yang lebih spesifik dan sangat berkaitan dalam rangka pencapaian tujuan. Pencapaian tujuan dan sasaran dievaluasi dengan seperangkat indikator kuantitatif yang relevan. Indikator-indikator tersebut ditetapkan dengan maksud agar proses dan pelaksanaan program prioritas dapat berlangsung secara tepat, efektif dan efisien. Perumusan tujuan dan sasaran beserta indikatornya adalah tahapan strategis yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tujuan dan Sasaran akan menjadi panduan dan pedoman pembangunan selama tiga tahun atau masa transisi keberadaan Kepala Daerah definitif. Rumusan tujuan dan sasaran tersebut akan menjadi dasar arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan dan menjadi cita-cita atau impian dalam prioritas pembangunan yang diformulasikan dari berbagai amanat atau telaahan dokumen perencanaan pembangunan antara lain RPJPN dan RPJMN, serta RPJPD dan RPMJD Provinsi maupun Kota, termasuk telaahan kajian atas dokumen-dokumen kebijakan nasional lainnya, RTRW, arahan Presiden Republik Indonesia serta isu global maupun nasional.

Berdasarkan hasil analisis dari identifikasi permasalahan daerah, maka diperoleh 6 isu strategis dalam perencanaan pembangunan selama tiga tahun kedepan yaitu:

1. Peningkatan dan pemerataan kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan bermartabat;
2. Percepatan penanggulangan kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan ketimpangan pendapatan;
3. Pengembangan Infrastruktur dan pemanfaatan Teknologi Informasi

4. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan pelayanan publik
5. Mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim
6. Keamanan dan ketenteraman wilayah

Enam isu strategis tersebut yang akan dikembangkan menjadi tujuan dan sasaran untuk perbaikan terhadap perencanaan pembangunan selama tiga tahun kedepan, mulai dari tahun 2024 yang akan dikerjakan oleh Penjabat Walikota sampai dengan tahun 2026 di Kota Bima.

5.1. Tujuan

Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam masa transisi. Rumusan tujuan dalam setiap misi menggambarkan pula kondisi yang akan dicapai dalam merespon isu strategis perencanaan, berpijak dari amanat dan upaya membangun sinkronisasi dengan visi pembangunan jangka panjang, serta dalam rangka menjawab isu strategis aktual yang keberlanjutan dalam pembangunan, maka dirumuskan Tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026, dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5. 1. Tujuan yang Menjawab Isu Strategis

Isu Strategis	Tujuan	Indikator Tujuan	Aspek Pendukung Sasaran	Sektor/Perangkat Daerah
	(Untuk menjawab Isu Strategis)			
Peningkatan dan pemerataan kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan bermartabat	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Pelayanan kesehatan, Kualitas SDM kesehatan, Ketersediaan sarpras, alkes dan farmasi	Dinas Kesehatan
			Pencegahan stunting, Peningkatan Ketahanan Pangan, Aksesibilitas pangan, Pemanfaatan pangan, Kesejahteraan keluarga	Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
			Pemenuhan kebutuhan dasar, Peningkatan partisipasi perempuan dalam Pembangunan, Penurunan Angka KDRT, Pemenuhan Hak Anak	Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

			Kualitas PSU,	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			Pengembangan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, Pengembangan Sarpras Pendidikan, Pengembangan kurikulum, Peningkatan prestasi pemuda	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
			Pengembangan perpustakaan dan arsip	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
			Penguatan UMKM, Pengembangan wirausaha baru, Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Dinas Tenaga Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Pertanian
			Stabilitas Harga	Bag. Ekonomi Setda
Percepatan penanggulangan kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan ketimpangan pendapatan	Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan kesejahteraan masyarakat	Indeks Gini	Perdagangan dan Perindustrian, Akses permodalan, Wirausaha mandiri	Dinas Koperindag
			Jasa Pariwisata	Dinas Pariwisata Kebudayaan
			Kualitas infrastruktur, Akses PSU	Dinas PUPR Dishub
			Perijinan dan Penanaman modal, Peningkatan investasi	Dinas PMPTSP
			Stabilitas Keamanan	Satpol PP
			Penyediaan tenaga kerja terampil, Hubungan industrial ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja
			Akses masyarakat miskin terhadap kebutuhan dasar, Perlindungan dan jaminan sosial	Dinsos
			Peningkatan kesejahteraan keluarga, Pemberdayaan	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, kecamatan

			perempuan	
Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan Tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	Bappeda
			Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Aset	BPKAD
			Manajemen ASN, Penguatan Organisasi dan Tatalaksana, Penataan Peraturan Perundangan	BKPSDM Bag Organisasi, Bag Adm Pembangunan, Bag Ekonomi, Bag Hukum, Bag Umum dan Perlengkapan, Bag Prokopim, Bag AP, LPBJ-LPSE, Sekretariat DPRD
			Penguatan Pengawasan	Inspektorat
			Peningkatan Kualitas Layanan Publik	DPMPTSP, Dukcapil, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Kecamatan
			Penguatan Inovasi	Brida
			Pengembangan E-Gov	Dinas Kominfo
			Manajemen Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Pengembangan Infrastruktur dan pemanfaatan Teknologi Informasi	Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman	Persentase kawasan permukiman layak huni	Penataan ruang terbuka hijau, Pengelolaan sampah	DLH
			Penataan Ruang, Peningkatan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Operasional dan Pemeliharaan	DPUPR Dishub
			Pemberdayaan Masyarakat, Partisipasi Masyarakat	Kecamatan Dikes
			Peningkatan Infrastruktur Permukiman	Dinas Perkim
			Peningkatan Infrastruktur Perhubungan dan Kominfo	Dinas Komifotik
Mitigasi bencana, adaptasi perubahan iklim, dan pembangunan rendah karbon			Peningkatan Infrastruktur Kebencanaan, Ketahanan terhadap bencana, Kesiapsiagaan, Tanggap Darurat, Rehab rekon	BPBD Damkar Satuan Pol PP Dinas Sosial

Keamanan dan ketenteraman wilayah	Meningkatnya keamanan dan ketertiban daerah	Indeks Rasa Aman	Upaya Pencegahan (Preventif), Upaya Penindakan (Represif)	Sat Pol PP Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Dinas Sosial, DP3A, Bag. Kesra, Kecamatan
			Kerjasama dengan aparat penegak hukum	Badan Kesbangpol

Sumber: Hasil Analisis

5.2. Sasaran

Berdasar tujuan yang telah dirumuskan pada tabel 5.1., perlu dijabarkan kedalam sasaran dan target yang akan dicapai selama tiga tahun masa transisi kepemimpinan penyelenggraan pemerintahan dibawah kendali seorang Penjabat Walikota. Sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainyatujuan.

Tujuan maupun sasaran perencanaan pembangunan daerah adalah rumusan kondisi yang memiliki indikator sebagai alat ukur yang akan dicapai keberhasilannya yang berorientasi pada hasil (*outcome-impact*). Rumusan Tujuan dan Sasaran serta indikator sasaran dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.2. Rumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Indikator Capaian RPD Kota Bima Tahun 2024-2026

Visi RPJPD Kota Bima Tahun 2008-2028:

“Mewujudkan Kota Bima Yang Sejahtera, Maju dan Mandiri pada Tahun 2028”

Indikator Tujuan	Sasaran		Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Tahun 2022	Target Kinerja Program Pada Tahun:			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	Outcome	
						2024	2025	2026			
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup	Tahun	70,83	71,11	71,26	71,40	71,40	1	Menurunnya angka kesakitan
										2	Menurunnya angka kematian bayi
										3	Menurunnya angka TFR
										4	Menurunnya UNMEET NEED
										5	Meningkatnya Angka Prevalensi Pengguna mCPR (Modern Contraceptive Prevalance Rate)
										6	Menurunnya ASFR (Age Specific Fertility Rate)
										7	Peningkatan jumlah kelahiran rawan/ rentan pangan yang ditangani
										8	Meningkatnya SDM Kesehatan yang memenuhi Standar
										9	Meningkatnya Jumlah Fasilitas Pelayanan Farmasi dan Alkes yang aman
										10	Meningkatnya Jumlah Fasilitas Pelayanan Farmasi dan Alkes yang aman

										11	Meningkatnya Rumah Tangga pengguna air bersih/air minum
										12	Meningkatnya pengembangan perumahan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah
										13	Meningkatnya Persentase PPKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial
										14	meningkatnya lembaga yang memenuhi kriteria layak anak
										15	Menurunnya tindak kekerasan terhadap anak
	2	Meningkatnya kualitas pendidikan	Indeks SPM Pendidikan	Angka (rentang 1-100)	52,76	54,76	57,76	60,76	60,76	1	Meningkatnya Persentase sekolah yang mendapat akreditasi A
										2	Meningkatnya Cakupan pembinaan dan peningkatan kualitas pendidik dan kependidikan
										3	Meningkatnya Presentase perpustakaan yang representatif
										4	Meningkatnya Persentase lembaga yang memenuhi kriteria layak anak
	3	Meningkatnya standar hidup masyakat	PDRB per kapita harga berlaku	Rp. Juta /Tahun	23,4	23,63	23,75	23,87	23,87	1	Meningkatnya Persentase Usaha mikro yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha
										2	Meningkatnya Produktifitas UKM

										3	Meningkatnya Persentase Koperasi Yang Mengikuti Pelatihan
										4	Meningkatnya Persentase Keanggotaan Koperasi yang mengikuti Pelatihan
										5	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Pengelola Koperasi
										6	Meningkatnya Persentase perusahaan yang melaksanakan K3
										7	Meningkatnya Persentase peserta BPJS Ketenagakerjaan
										8	Meningkatnya Persentase Perusahaan yang melaksanakan Upah Minimum Kota (UMK)
										9	Meningkatnya Persentase PMKS yang terlatih
										10	Meningkatnya Persentase PSKS yang diberdayakan
										11	Meningkatnya Persentase anak-anak terlantar yang ditangani
										12	Meningkatnya Persentase PMKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial
										13	Meningkatnya Persentase pengembangan ODTW
										14	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan
										15	Meningkatnya produksi perikanan

										16	Meningkatnya Persentase pemuda yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas daya saing kepemudaan
	4	Terwujudnya kebutuhan pangan masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	70,25	71,25	72,25	73,25	73,25	1	Meningkatnya penyediaan sarana pertanian sesuai anjuran
										2	Menurunnya jumlah ternak yang terinveksi PHMS
										3	Meningkatnya produksi perikanan
										4	Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan (AKI)
										5	Meningkatnya Jumlah ketersediaan energi dan protein
										6	Meningkatnya Persentase kelurahan rawan/ rentan pangan yang ditangani
	5	Meningkatnya pemberdayaan gender dan pemuda	Indeks pemberdayaan gender (IDG)	Angka	70,16	70,23	70,27	70,30	70,30	1	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam berusaha, berorganisasi serta lembaga pemerintahan dan swasta
			Jumlah Pemuda berprestasi tingkat nasional	Orang	10	12	13	14	14	2	Peningkatan Persentase pemuda yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas daya saing kepemudaan
										3	Peningkatan Persentase Pengembangan Kapasitas Daya saing Keolahragaan yang diakomodir

										4	menurunnya UNMEET NEED
										5	meningkatnya Angka Prevalensi Pengguna mCPR (Modern Contraceptive Prevalance Rate)
										6	Menurunnya ASFR (Age Specific Fertility Rate)
Indeks Gini	6	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	%	2,7	5,0-6,0	5,0-6,0	5,0-6,0	5,0-6,0	1	Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan (AKI)
										2	Meningkatnya pemanfaatan prasarana dan sarana pertanian dalam kondisi baik
										3	Meningkatnya Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah
										4	Meningkatnya Persentase Kelompok Industri Kecil Menengah yang mendapat Bantuan Hibah
										5	Meningkatnya Pembangunan Industri Kota Bima
										6	menurunnya angka kecelakaan transportasi darat
	7	Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,73	3,55	3,38	3,21	3,21	1	Meningkatnya jumlah tenaga kerja terlatih
										2	Meningkatnya Angka produktivitas Tenaga Kerja
										3	Kesesuaian antara rencana tenaga kerja dengan realisasi

										4	Meningkatnya persentase perusahaan yang melaksanakan K3
										5	Meningkatnya peserta BPJS Ketenagakerjaan
										6	Meningkatnya jumlah Perusahaan yang melaksanakan Upah Minimum Kota (UMK)
	8	Menurunnya tingkat kemiskinan	Persentase penduduk miskin	%	8,80	7,94	7,54	7,17	7,17	1	Meningkatnya PMKS yang terlatih
										2	Meningkatnya PMKS yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi
										3	Meningkatnya jumlah anak-anak terlantar yang ditangani
										4	Meningkatnya PMKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial
										5	Meningkatnya jumlah sekolah penerima buku muatan lokal
										6	Menurunnya Angka kesakitan
										7	Menurunnya Angka Kematian Bayi
										8	Meningkatnya Persentase wilayah strategis dan cepat tumbuh Kota Bima yang ditangani
										9	Meningkatnya jumlah penduduk yang memperoleh akses air minum layak
										10	Meningkatnya luas wilayah permukiman bebas genangan

											11	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni masyarakat yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah
											12	Meningkatnya IKM
											13	Meningkatnya Index Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah
Indeks Reformasi Birokrasi	9	Meningkatnya Tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	55,6	60,14	62,55	65,05	65,05	1	Meningkatnya pemanfaatan Hasil Monev yang menjadi dasar perencanaan pembangunan	
										2	Meningkatnya Index Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	
										3	Menurunnya Temuan APIP dan BPK	
										4	Meningkatnya Level Hasil Quality Assurance Perwakilan BPKP Provinsi NTB Terhadap Maturitas SPIP Kota Bima	
										5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan	
										6	Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB)	
										7	peningkatan ASN yang telah memiliki sertifikat sesuai ketentuan	
										8	Peningkatan Pendapatan Daerah	

Persentase kawasan permukiman layak huni	10	Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman	Indeks kualitas lingkungan hidup	Angka	56,08	61,83	64,92	68,17	68,17	1	Meningkatnya Luas RTH Publik
										2	Meningkatnya Indeks Kualitas Air/Udara
										3	Ketersediaan dokumen rencana tata ruang sesuai ketentuan
	11	Meningkatnya kemandapan infrastruktur	Indeks Infrastruktur	Angka	78,26	79,04	79,83	80,63	80,63	1	Meningkatnya panjang Jalan Kota dalam kondisi mantap
										2	Meningkatnya luas wilayah pertanian yang terlayani irigasi teknis
										3	Meningkatnya pengembangan perumahan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah
										4	menurunnya angka kecelakaan transportasi darat
										5	Meningkatnya Predikat PLID Kota Bima
										6	Meningkatnya pemenuhan sistem kesiapsiagaan dan pencegahan terhadap bencana
	12	Meningkatnya kapasitas daerah terhadap bencana, adaptasi perubahan iklim, dan pembangunan rendah karbon	Indeks ketahanan daerah	Angka	0,74	0,75	0,78	0,81	0,81	1	Meningkatnya penanganan korban bencana pada masa tanggap darurat

										2	Meningkatnya Luas Wilayah yang terlayani kegiatan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
Indeks Rasa Aman	13	Meningkatnya keamanan dan ketertiban	Indeks Rasa Aman	Angka (skala 1-100)	87,6	88,48	88,92	89,37	89,37	1	Meningkatnya penyelesaian keamanan, ketentraman dan ketertiban (K3)
										2	Meningkatnya Pelayanan Pemerintahan umum
										3	Meningkatnya penanganan Gangguan Kamtibmas
										4	Meningkatnya Kelompok masyarakat yang diberdayakan
										5	Meningkatnya jumlah Kelompok sasaran yang mendapatkan Penguatan ideologi pancasila dan Karakter Bangsa
										6	Meningkatnya jumlah Kelompok Sasaran Pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Sumber: Hasil Analisis

Tabel 5.3.

Definisi Operasional Variabel dan Formula Perhitungan setiap Indikator Kinerja Sasaran RPD Kota Bima Tahun 2024 – 2026

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Formulasi/ Definisi	Keterangan	Sumber Data	Penanggungjawab
1	Umur Harapan Hidup	Tahun	AHH=Kumulatif umur masing-masing orang yang meninggal tahun n/ Jumlah orang yang meninggal tahun n	a. AHH adalah Angka Harapan Hidup b. AHH adalah perkiraan jumlah tahun hidup dari penduduk yang berdiam di suatu wilayah tertentu.	Dokumen IPM (BPS)	1. Dinas Kesehatan 2. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 4. Dinas Ketahanan pangan

2	Indeks SPM Pendidikan	Angka (rentang 1-100)	Dihitung dari indikator prioritas SPM dan jenjang sederajat terpilih (PAUD, SDM SMP, SMA, SMK, SDLB, SMPLB, dan SMALB) dan tidak termasuk satuan pendidikan keagamaan. Penghitungan indeks dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) RI dan dapat dilihat oleh Pemerintah Daerah melalui <i>platform</i> Rapor Pendidikan Daerah pada bagian Ringkasan Capaian. Kategori capaian Indeks SPM yaitu: Tuntas Paripurna (100), Tuntas Utama (90-99), Tuntas Madya (80-89), Tuntas Pratama (70-79), Tuntas Muda (60-69), dan <60 (Belum Tuntas).	Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Pelayanan dasar merupakan bagian dari pelaksanaan urusan wajib pemerintah daerah. Hal ini juga sudah diatur dalam Permendagri 59 tahun 2021. Atas dasar peraturan tersebut, pendidikan juga wajib memiliki Standar Pelayanan Minimal yang disahkan melalui Permendikbudristek RI nomor 32 tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan yang mengatur tentang Jenis dan penerima Pelayanan Dasar, Mutu Pelayanan Dasar, pencapaian SPM Pendidikan dan pelaporan serta evaluasi.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
3	PDRB per kapita harga berlaku	Rp. Juta /Tahun		a. Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut.	Data Pengeluaran Per kapita (BPS)	1. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

				b. Pengeluaran adalah biaya yang dikeluarkan oleh seluruh anggota rumah tangga selama sebulan. c. Rumah Tangga adalah adalah seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus, dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur.		2. Dinas Pertanian 3. Dinas Pariwisata 4. Dinas Tenaga Kerja
4	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	$Y(j) = \sum_{i=1}^9 a_i X_{ij}$	i : Indikator ke 1,2,3,...7,8 dan 9 j : Kabupaten ke 1,2,3,...414,415 dan 416; kota ke 1,2,3...96,97, dan 98 Yi : Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota ke-j ai : Bobot masing-masing indikator ke – j Xij : Nilai standarisasi masing-masing indikator ke-i pada kabupetn/kota ke-j	BPS/Kementerian Pertanian	1. Dinas Ketahanan Pangan 2. Dinas Pertanian 3. Dinas Kelautan Dan Perikanan
5	Indeks pemberdayaan gender (IDG)	Angka	IDG mengukur partisipasi aktif perempuan pada kegiatan ekonomi dengan 3 (tiga) indikator, yaitu persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, keterlibatan perempuan di parlemen, dan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan melalui indikator perempuan sebagai tenaga manajerial, professional, dan lain-lain.	Digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan.	BPS	1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 2. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

6	Jumlah Pemuda berprestasi tingkat nasional	Orang	Merupakan jumlah pemuda Kota Bima yang masuk dalam 10 besar perlombaan/kejuaraan tingkat nasional		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
7	Pertumbuhan Ekonomi	%	Angka pertumbuhan PDRB diterbitkan oleh Badan pusat Statistik (BPS) secara rutin setiap tahun.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. a. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah.	Data PDRB (BPS)	1. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan 2. Dinas Penanaman Modal dan PTSP

				b. PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.		3. Dinas Pariwisata 4. Dinas Pertanian 5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 6. Dinas Kelautan dan Perikanan
8	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	$\text{Tingkat Pengangguran Terbuka} = \frac{\text{Jumlah pengangguran}}{\text{Angkatan Kerja}} \times 100\%$	a. Pengangguran adalah jumlah penduduk berusia 15 tahun atau lebih yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari atau mempersiapkan pekerjaan, dan penduduk usia 15 tahun atau lebih yang telah memiliki pekerjaan, tetapi belum memulai bekerja. b. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.	Data Ketenagakerjaan (BPS)	1. Dinas Tenaga Kerja 2. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
9	Persentase penduduk miskin	%	$= \frac{\text{Jumlah penduduk miskin}}{\text{jumlah penduduk}} \times 100\%$	a. Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. b. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat 14 kriteria masyarakat miskin antara lain: 1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m ² per orang	Data Kemiskinan (BPS)	1. Dinas Sosial 2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 3. Dinas Kesehatan

				2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan 3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester. 4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain. 5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik. 6. Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan. 7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah 8. Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam dalam satu kali seminggu. 9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun 10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari 11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik		4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 6. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 7. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
10	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	Hasil Evaluasi Kemen PAN RB (Permen PAN RB Nomor 30 Tahun 2018)	Komponen penilaian: (1) manajemen perubahan; (2) Penataan Peraturan Perundang-undangan; (3) Penataan dan Penguatan Organisasi; (4) Penataan Tatalaksana; (5) Penataan Sistem	Inspektorat, Setda, BPKAD, Bappeda, BKPSDM, Semua PD Pelayanan Publik	1. Bappeda 2. Inspektorat

				Manajemen SDM Aparatur; (6) Penguatan Pengawasan; (7) Penguatan Akuntabilitas Kinerja; (8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.		3. Bagian Organisasi SETDA 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 5. BPKAD
11	Indeks kualitas lingkungan hidup	Angka	$IKLH = (IPA \times 30\%) + (IPU \times 30\%) + (ITH \times 40\%)$	IKLH = Indeks kualitas lingkungan hidup IPA = Indeks kualitas air IPU = Indeks Kualitas Udara ITH = Indeks tutupan hutan	Data IKLH (Kementerian Lingkungan Hidup)	1. Dinas Lingkungan Hidup 2. Bagian Perekonomian SETDA
12	Indeks Infrastruktur	Angka	Indeks infrastruktur didapatkan dengan cara menjumlahkan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada air bersih, persentase rumah tangga yang memiliki akses pada sanitasi, persentase jalan dalam kondisi baik, persentase drainase dalam kondisi baik, rasio panjang jalan yang memiliki penerangan	a. Infrastruktur adalah seluruh fasilitas untuk dapat memenuhi berbagai macam kebutuhan dasar, baik fisik dan sosial untuk pelayanan publik, seperti jalan raya, jembatan, drainase, air bersih, limbah, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya. b. kondisi baik adalah terpeliharanya kondisi infrastruktur yang memenuhi persyaratan.	Data Infrastruktur (Dinas PUPR)	1. Dinas PUPR 2. Dinas Perhubungan
13	Indeks ketahanan daerah	Angka	Indeks Ketahanan Daerah adalah instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap.	Pelaksanaan penilaian Indeks Ketahanan Daerah dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).	Data Indeks Ketahanan Daerah (BNPB)	BPBD
14	Indeks Rasa Aman	Angka (skala 1-100)	Indeks Rasa Aman didapatkan dengan cara menjumlahkan capaian komponen variabel: (bobot 0,3) Persentase	Variabel: 1. Persentase penanganan Pelanggaran PERDA; 2. Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response	Diolah	1. Satuan Polisi Pamong Praja; 2. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;

			penanganan Pelanggaran PERDA, (bobot 0,3) Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate), (bobot 0,4) persentase penanganan konflik sosial	Time Rate); 3. persentase penanganan konflik sosial		3. Badan Kesbangpol

5.3. *Cascading* Kinerja

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level perencanaan yang lebih tinggi hingga level yang lebih rendah/detil.

Sesuai amanat Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022, dokumen Rencana Pembangunan Daerah harus memuat *cascading* kinerja mulai dari tujuan sampai dengan *outcome* hingga indikator masing-masing kinerja. *Cascading* kinerja Kota Bima Tahun 2024-2026 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.4. *Cascading* Kinerja Daerah Tahun 2024-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Baseline 2022	Target			Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Baseline 2022	Target			Aspek Pendukung Sasaran	Perangkat Daerah Pendukung	Program Pembangunan
				2024	2025	2026					2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	19
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	76,84	77,00	77,00	77,00	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup	Tahun	70,83	71,11	71,26	71,40	Pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
														Pencegahan stunting	Dikes	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
															DPPKB	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
																PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
															Dinas Ketahanan Pangan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
																PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN

															Kualitas SDM kesehatan	Dinas Kesehatan	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
															Ketersediaan sarpras, alkes dan farmasi	Dinas Kesehatan	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
															Kualitas PSU	DPUPR	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN,
																	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
																	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
																	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
																	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
																Dinas Perkim	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
																	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

														Pemenuhan kebutuhan dasar	Dinsos	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
															DP3A	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
																PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
															Dinas Ketahanan Pangan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
							Meningkatnya kualitas pendidikan	Indeks SPM Pendidikan	Angka (rentan g 1-100)	52,76	54,76	57,76	60,76	Pengembangan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	Dinas Dikpora	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
																PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
																PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
														Pengembangan Sarpras pendidikan	Dikpora	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN
														Pengembangan kurikulum	Dikpora	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
														Pemenuhan Hak Anak	Dikpora	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

																PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
															DP3A	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
													Pengembangan perpustakaan dan arsip	Dinarsip&perpus		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
																PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
																PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP
							Meningkatnya standar hidup masyarakat	PDRB per kapita harga berlaku	Rp. Juta /Tahun	23,4	23,63	23,75	23,87	Penguatan UMKM	Dinas Koperindag	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO
																PROGRAM PENGEMBANGA N UMKM
															Dinas Pertanian	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANG AN BENCANA PERTANIAN
															Dinas Tenaga Kerja	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

															Dinas kelautan&perikanan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
														Pengembangan wirausaha baru	Dinas Koperindag	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
															Dinas Tenaga Kerja	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
															Dinas kelautan&perikanan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
														Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Koperindag	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
															Dinas Pertanian;	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
															Dinas P3A	PROGRAM PENGARUSUTAM AAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
																PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK

															Stablitasi Harga	Dinas Koperindag	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
																Bag. Ekonomi Setda	Program Perekonomian dan Pembangunan
							Terwujudnya kebutuhan pangan masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	70,25	71,25	72,25	73,25	Peningkatan Ketahanan Pangan	Dinas Ketahan Pangan		program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat.
																Dinas Pertanian	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
																	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
																	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
															Aksesibilitas pangan	Dinas Ketahanan Pangan Dinas PUPR	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

															Diskoperindag	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
														Pemanfaatan pangan	Dinas Ketahanan Pangan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
															Dinas kelautan&perik anan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
															Diskoperindag	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
							Meningkatnya pemberdayaa n gender dan pemuda	Indeks pemberdayaa n gender (IDG)	Angka	70,16	70,23	70,27	70,30	Peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan	DP3A	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
														Kesejahteraan keluarga	DPPKB	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
															Dinsos	PROGRAM PEMBERDAY AAN SOSIAL
								Jumlah Pemuda berprestasi tingkat nasional	Orang	10	12	13	14	Peningkatan prestasi pemuda	Dinas Dikpora	PROGRAM PENGEMBANGA N KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAAGAN
																PROGRAM PENGEMBANGA N KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN

														Penurunan Angka KDRT	DP3A	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
																PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
														Kesehatan Ibu dan Remaja	Dikes	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
															DPPKB	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
Meningk atkan pemban gunan ekonomi yang inklusif dan kesejaht eraan masyara kat	Indeks Gini	Angka	0,429	0,370- 0,400	0,370- 0,400	0,370- 0,400	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	%	2,70	5,0- 6,0	5,0- 6,0	5,0- 6,0	Perdagangan dan Perindustrian	Dinas Koperindag	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
																PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
															Dinas PMPTSP	PROGRAM PENGEMBANGA N IKLIM PENANAMAN MODAL
																PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL,

																PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
															Bag.Ekonomi Setda	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
														Jasa Pariwisata	Dinas Pariwisata Kebudayaan	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
																PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
																PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
																PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
															Dinas PUPR	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
																PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
																PROGRAM PENYELENGGAAN JALAN
																PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

																PROGRAM PENGEMBANGA N PERMUKIMAN
															Dishub	PROGRAM PENYELENGGAR AAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
															DLH	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
														Kualitas infrastruktur	DPUPR	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGA N SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
																PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGA N SISTEM DRAINASE
																PROGRAM PENYELENGGAR AAN JALAN
														Perijinan dan Penanaman modal	Dinas PMPTSP	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
																PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
														Stabilitas Keamanan	Satpol PP	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

							Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,73	3,55	3,38	3,21	Penyediaan tenaga kerja terampil	Disnaker	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
																PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
														Wirausaha mandiri	Dinas Tenaga Kerja	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA,
																PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
														Hubungan industrial ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
														Peningkatan investasi	Dinas PMPTSP	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL,
																PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
																PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
														Akses permodalan	Dinas Koperindag	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM),
																PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

																PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
							Menurunnya tingkat kemiskinan	Persentase penduduk miskin	%	8,80	7,94	7,54	7,17	Akses masyarakat miskin terhadap kebutuhan dasar	Dinsos	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
																PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
																PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
														Peningkatan kesejahteraan keluarga	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
														Pemberdayaan perempuan	Dinas Sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
															Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
															kecamatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
														Perlindungan dan jaminan sosial	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
															Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

																PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
																PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
															Dinas Sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
														Akses PSU	DPUPR	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
Meningkatkan Tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	55,6	60,14	62,55	65,05	Meningkatnya Tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	55,6	60,14	62,55	65,05	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	Bappeda	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH, PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
															Inspektorat	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
															Bag.Adm Pembangunan	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
															BPKAD	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

															BKPSDM	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
														Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Aset	BPKAD	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
																PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
															Bag. Ekonomi	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
														Manajemen ASN	BKPSDM	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
														Penguatan Organisasi dan Tatalaksana	Bagian Organisasi SETDA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
														Penguatan Pengawasan	Inspektorat	PROGRAM PENYELENGGAAN PENGAWASAN
														Penataan Peraturan Perundangan	Bagian Hukum;	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
															Sekretariat DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

															Peningkatan Kualitas Layanan Publik	Bagian Organisasi SETDA;	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
																DPMTSP;	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
																Dinas Kependudukan dan Capil;	PROGRAM PENCATATAN SIPIL
																	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
																Dinas Kesehatan;	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
																	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
																Dinas Perhubungan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
																Dinas Kominfo	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

															Kecamatan	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
															Bagian Adminstrasi Pemerintahan, Bagian LPBJ- LPSE, Bagian Umum, Bagian Prokopim	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA
														Penguatan Inovasi	Brida	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
														Pengembangan E-Gov	Dinas Kominfo	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
														Manajemen Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP, PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP
Meningk atkan kualitas lingkung an permuki man	Persentase kawasan permukim an layak huni	%	68,84	72,28	75,9	79,69	Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman	Indeks kualitas lingkungan hidup	Angka	56,08	61,83	64,92	68,17	Penataan ruang terbuka hijau	DLH	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
															DPUPR	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PENATAAN RUANG

																	RUANG,PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
																Dishub	PROGRAM PENYELENGGAR AAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
																DLH	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAM AN HAYATI (KEHATI)
																DPUPR	PROGRAM PENGEMBANGA N PERMUKIMAN
														Pengelolaan sampah		DLH	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
																Kecamatan	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
														Penataan Ruang		DPUPR	PROGRAM PENGEMBANGA N PERMUKIMAN
																	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PENATAAN RUANG
														Pemberdayaan Masyarakat		Dikes	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

															Kecamatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
							Meningkatnya kemantapan infrastruktur	Indeks Infrastruktur	Angka	78,26	79,04	79,83	80,63	Peningkatan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Dinas PUPR	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGA N SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
																PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGA N SISTEM DRAINASE
																PROGRAM PENYELENGGAR AAN JALAN
															DLH	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
														Peningkatan Infrastruktur Permukiman	Dinas Perkim	PROGRAM PENGEMBANGA N PERUMAHAN
																PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
														Peningkatan Infrastruktur Perhubungan dan Kominfo	Dinas Perhubungan	PROGRAM PENYELENGGAR AAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ

															Dinas Komifotik	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
														Peningkatan Infrastruktur Kebencanaan	BPBD	PROGRAM PENANGGULANG AN BENCANA
															Damkar	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANG AN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
														Operasional dan Pemeliharaan	DPUPR	PROGRAM PENYELENGGAR AAN JALAN
																PROGRAM PENGELOLAA N SUMBER DAYA AIR (SDA)
															Dinas Perkim	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
															Dishub	PROGRAM PENYELENGG ARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

															Diskominfotik	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
														Partisipasi Masyarakat	Kecamatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
							Meningkatnya kapasitas daerah terhadap bencana, adaptasi perubahan iklim, dan pembangunan rendah karbon	Indeks ketahanan daerah	Angka	0,74	0,75	0,78	0,81	Ketahanan terhadap bencana	BPBD	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
														Kesiapsiagaan	BPBD	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
															Dinas Damkar dan Penyelamatan	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
														Tanggap Darurat	BPBD	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
															Dinas Sosial	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
														Rehab rekon	BPBD	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

															Satuan Pol PP	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
															Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
															Dinas PKP	PROGRAM PENGEMBANGA N PERUMAHAN
														Partisipasi Masyarakat	Kecamatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Meningk atnya keaman an dan ketertiba n daerah	Indeks Rasa Aman	Angka	87,6	88,48	88,92	89,37	Meningkatnya keamanan dan ketertiban	Indeks Rasa Aman	Angka (skala 1-100)	87,6	88,48	88,92	89,37	Upaya Pencegahan (Preventif)	Sat Pol PP	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
															Badan Kesbangpol	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKAT AN
															Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGEMBANGA N KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
																PROGRAM PENGEMBANGA N KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
															Dinas Sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

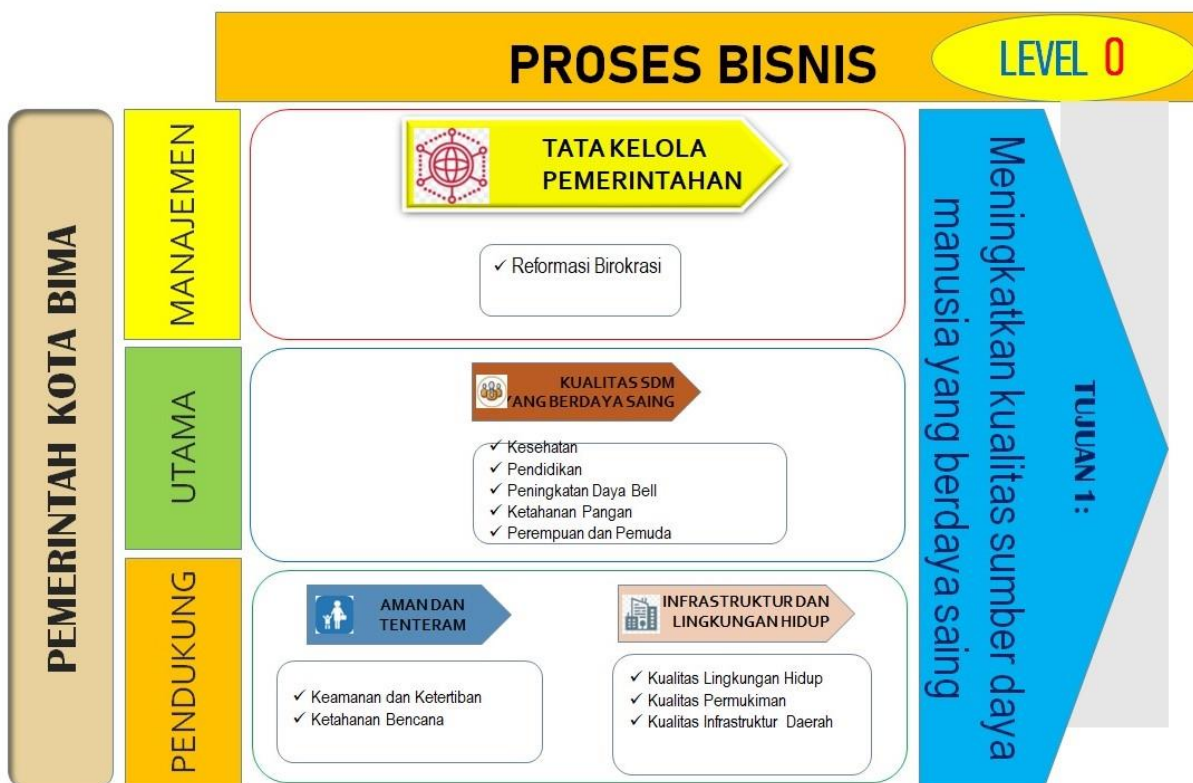
															DP3A	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN, PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
															Bag. Kesra	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
															Kecamatan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
														Upaya Penindakan (Represif)	Satpol PP	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
														Kerjasama dengan aparat penegak hukum	Badan Kesbangpol	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
															Kecamatan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Sumber: Hasil Analisis

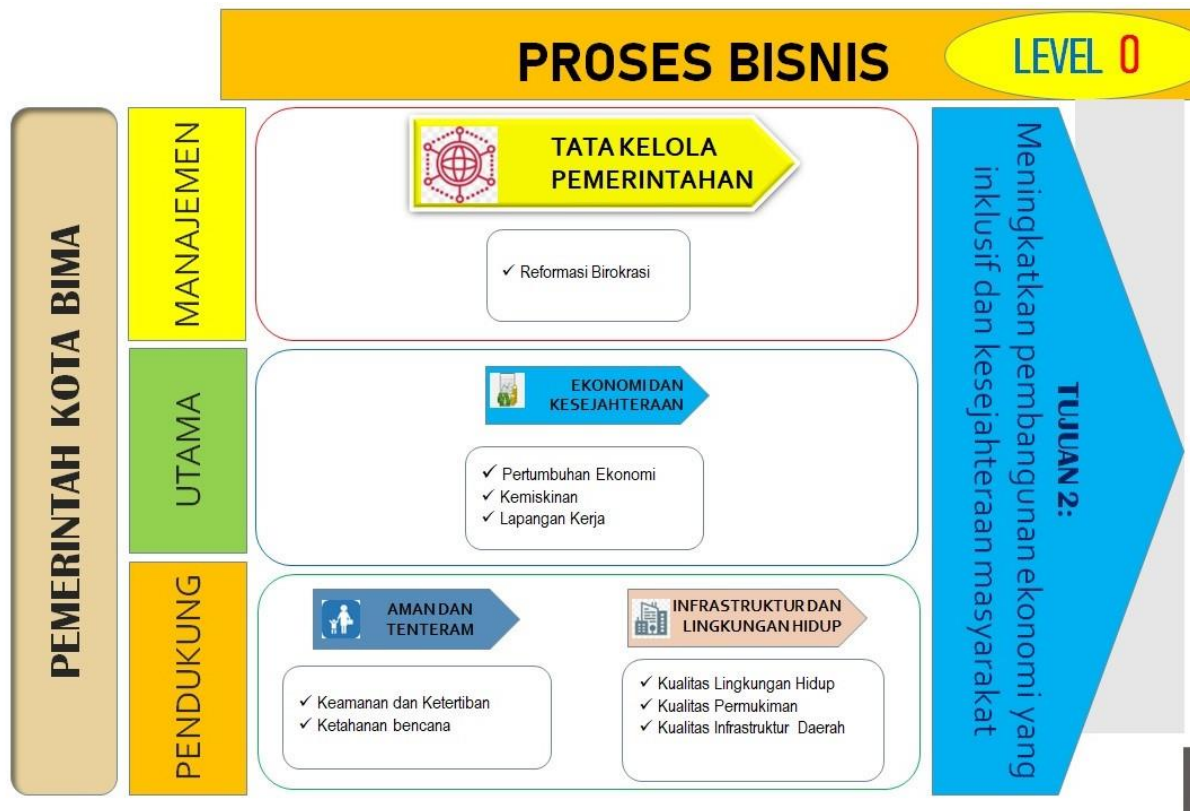
Selanjutnya *cascading* tersebut akan ditampilkan dalam peta proses bisnis. Proses Bisnis merupakan keseluruhan rangkaian alur kerja yang saling berhubungan dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan. Penyusunan peta proses bisnis RPD Kota Bima tahu 2024-2026 dimulai dari Tujuan Daerah yang kemudian diturunkan ke dalam sasaran serta unsur pendukung.

Tujuan utama pemetaan proses adalah untuk memberikan informasi mendalam tentang proses yang membantu organisasi dan apa unsur-unsur pendukungnya dalam mencapai tujuan bisnisnya. Hal ini memungkinkan organisasi untuk menjalankan bisnis mereka lebih efektif, produktif, dan fleksibel.

Setelah pemetaan proses bisnis, proses selanjutnya adalah pembuatan *cross cutting* program. *Cross-cutting program* bukan berarti satu program digunakan pada banyak Perangkat Daerah, namun lebih kepada identifikasi berbagai program pada berbagai Perangkat Daerah yang memiliki tujuan dan fokus untuk mendukung sasaran pembangunan yang sama.



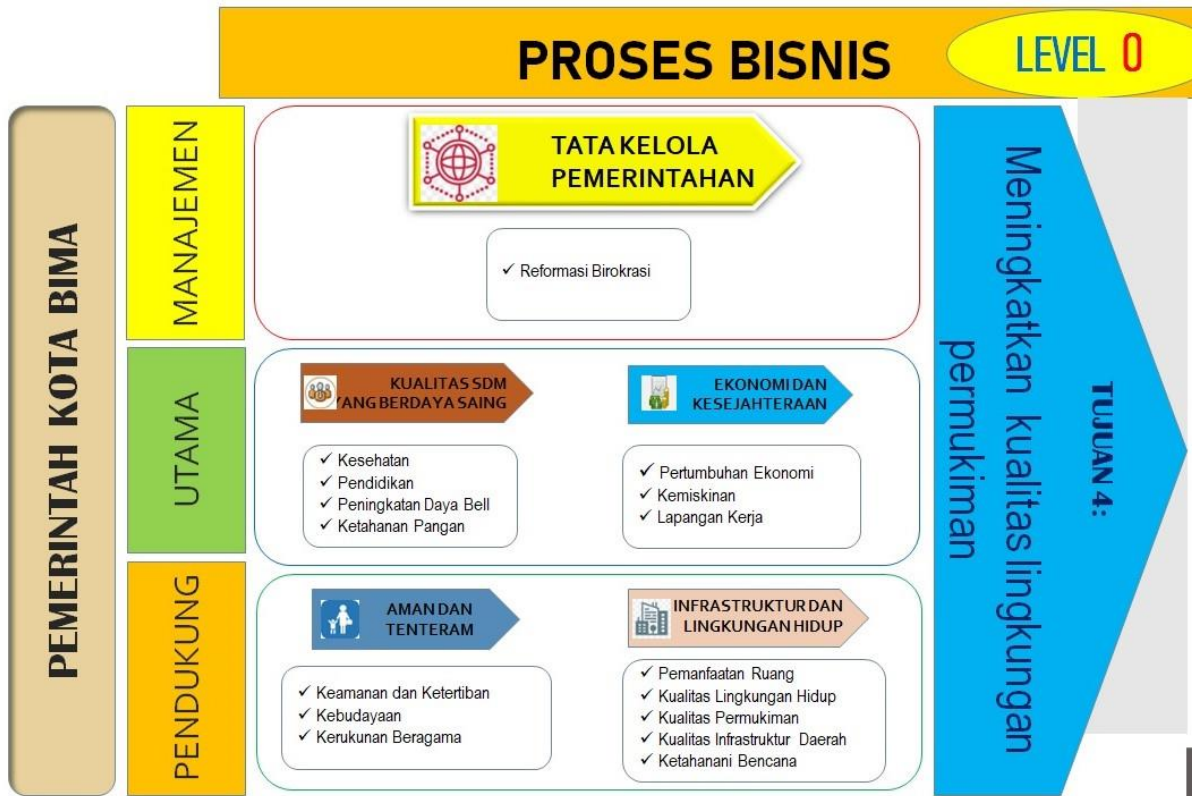
Gambar 5.1 Proses Bisnis Tujuan 1



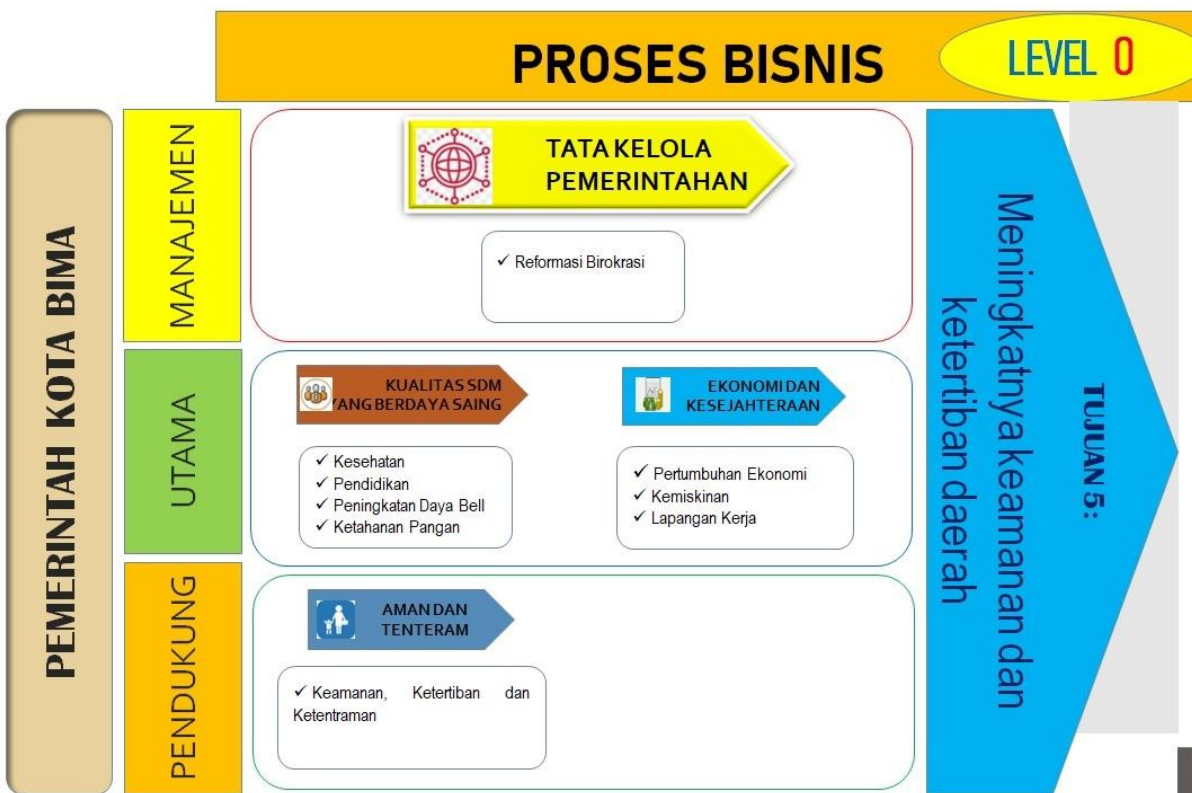
Gambar 5.2 Proses Bisnis Tujuan 2



Gambar 5.3 Proses Bisnis Tujuan 3



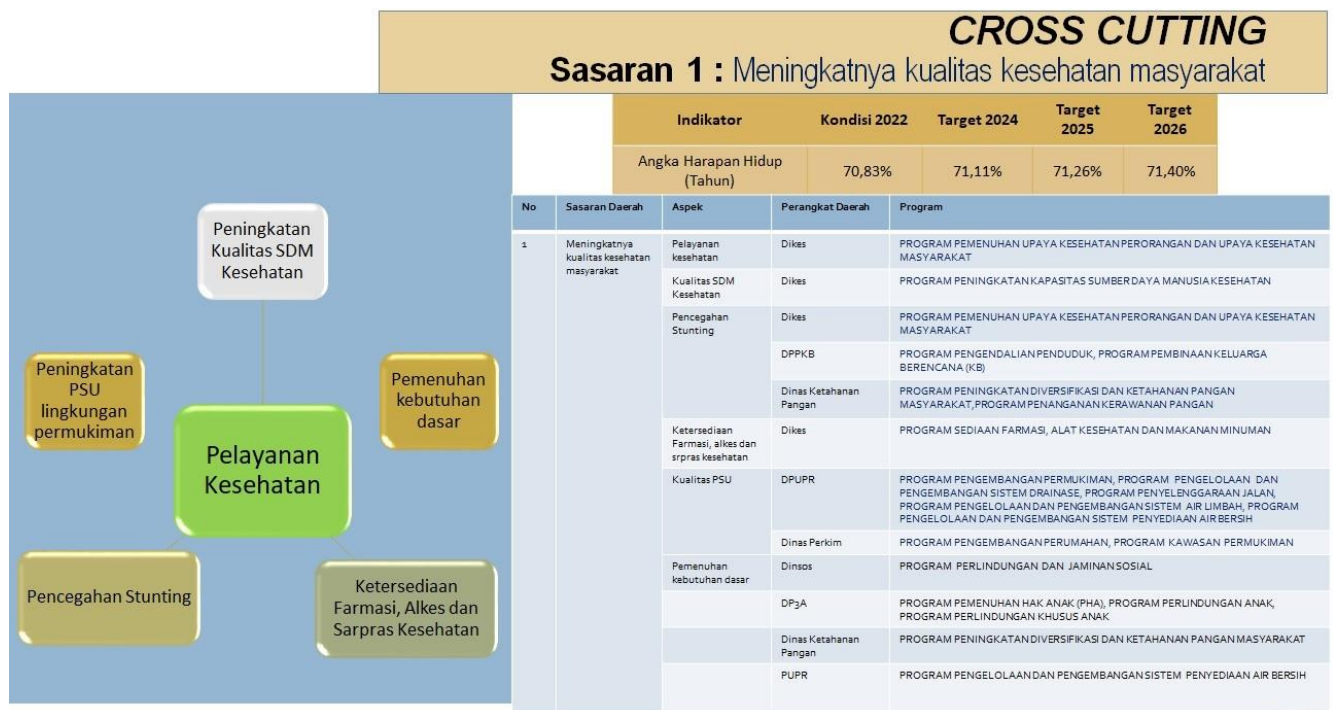
Gambar 5.4 Proses Bisnis Tujuan 4



Gambar 5.5 Proses Bisnis Tujuan 5



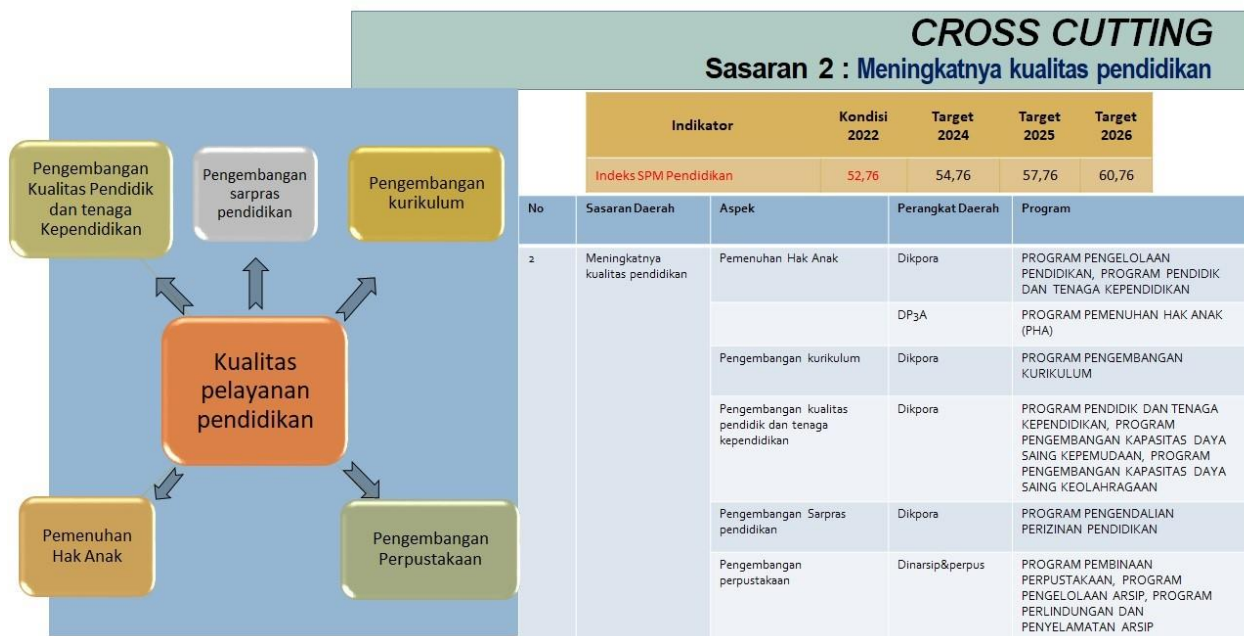
Gambar 5.6 Proses Bisnis Sasaran 1



Gambar 5.7 Cross Cutting Sasaran 1



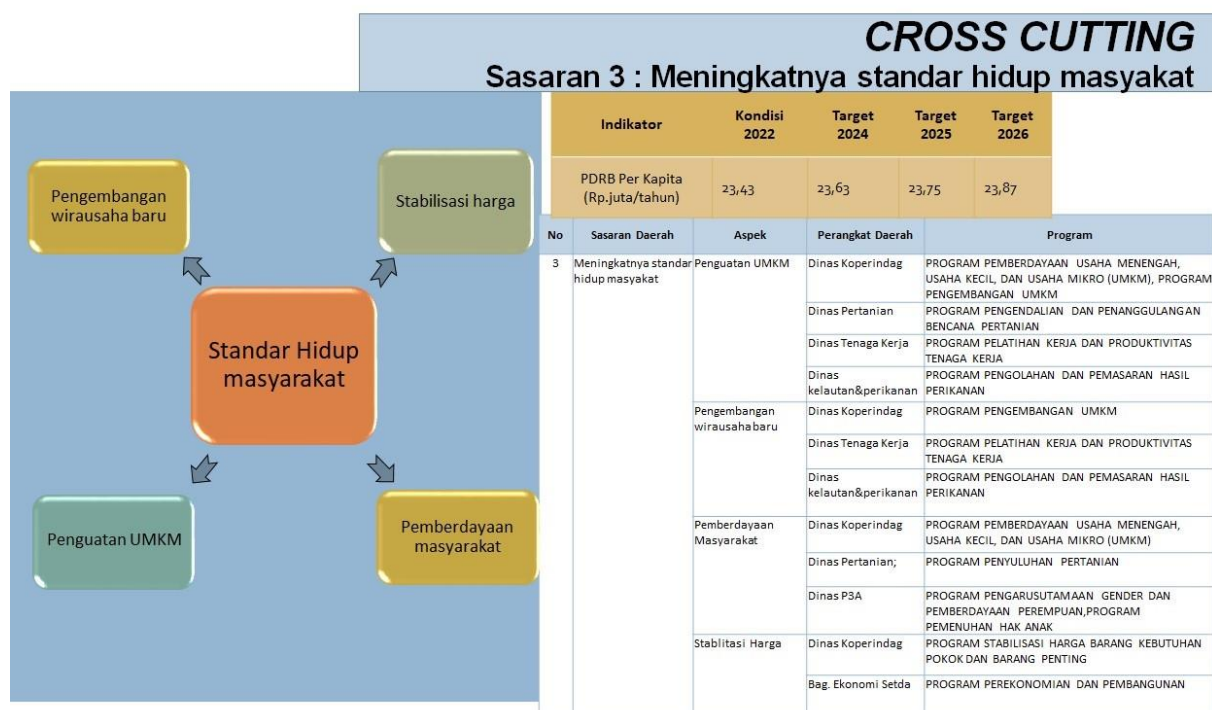
Gambar 5.8 Proses Bisnis Sasaran 2



Gambar 5.9 Cross Cutting Sasaran 2



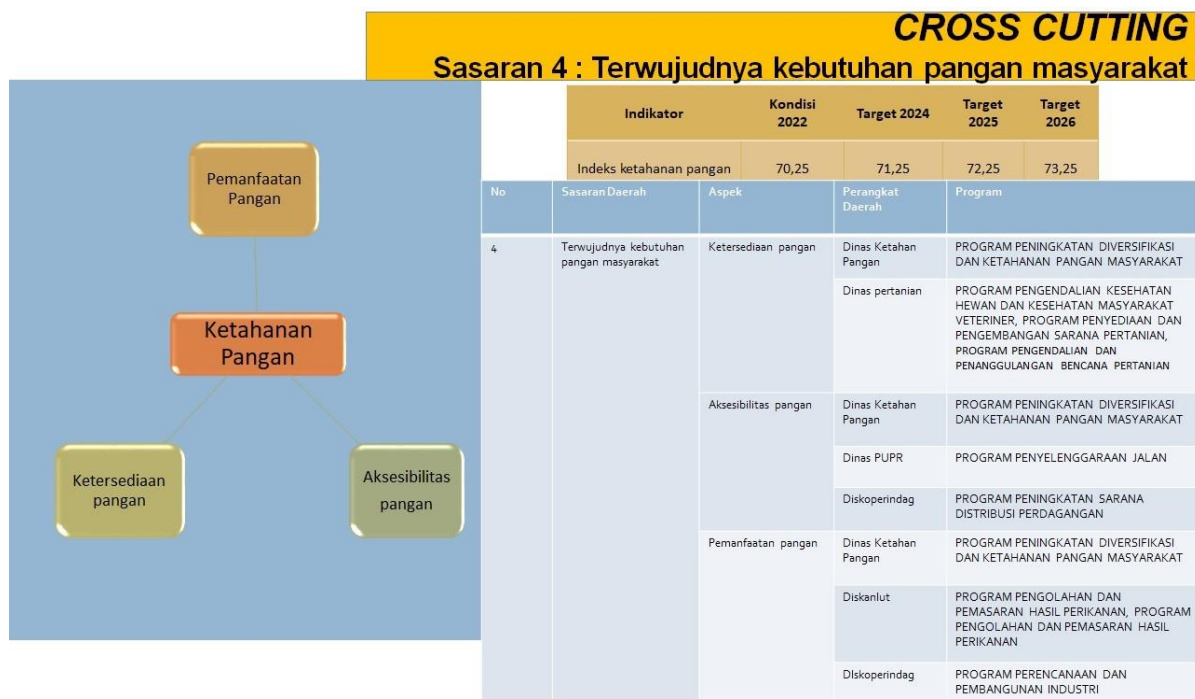
Gambar 5.10 Proses Bisnis Sasaran 3



Gambar 5.11 Cross Cutting Sasaran 3



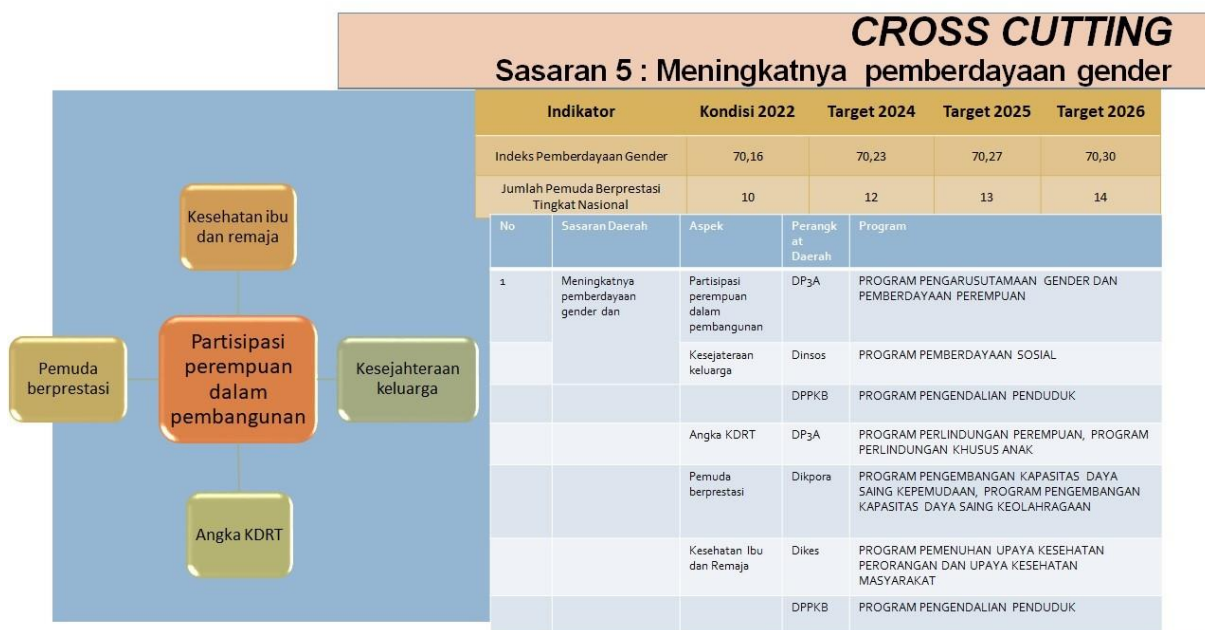
Gambar 5.12 Proses Bisnis Sasaran 4



Gambar 5.13 Cross Cutting Sasaran 4



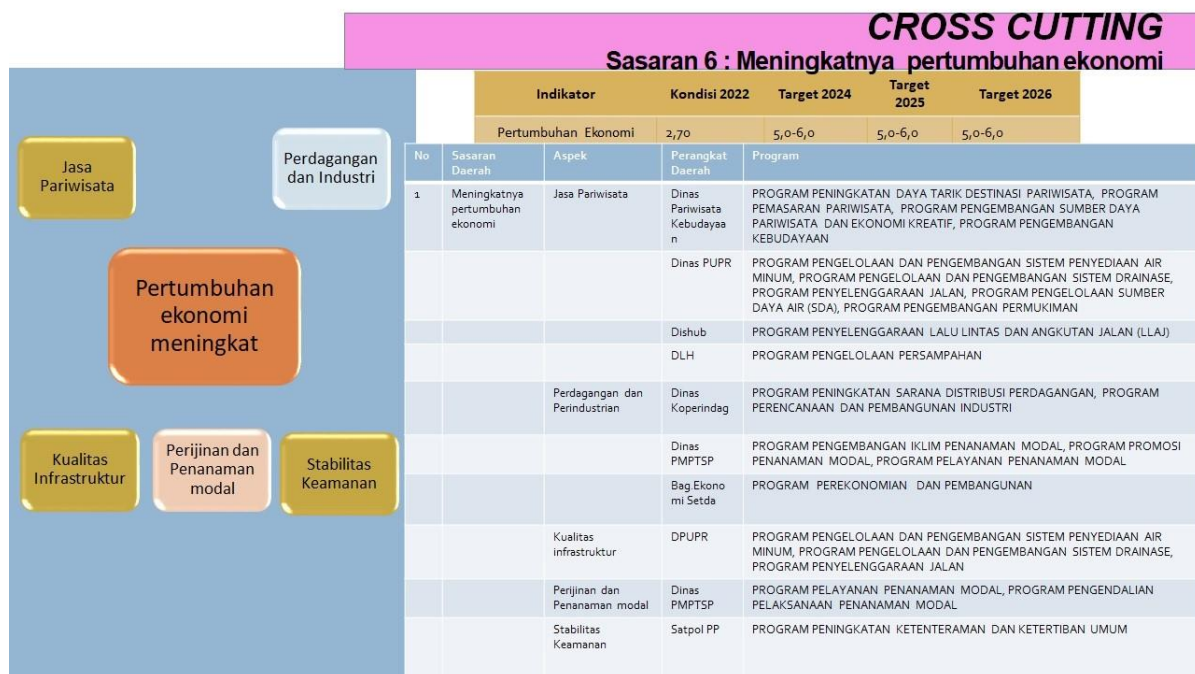
Gambar 5.14 Proses Bisnis Sasaran 5



Gambar 5.15 Cross Cutting Sasaran 5



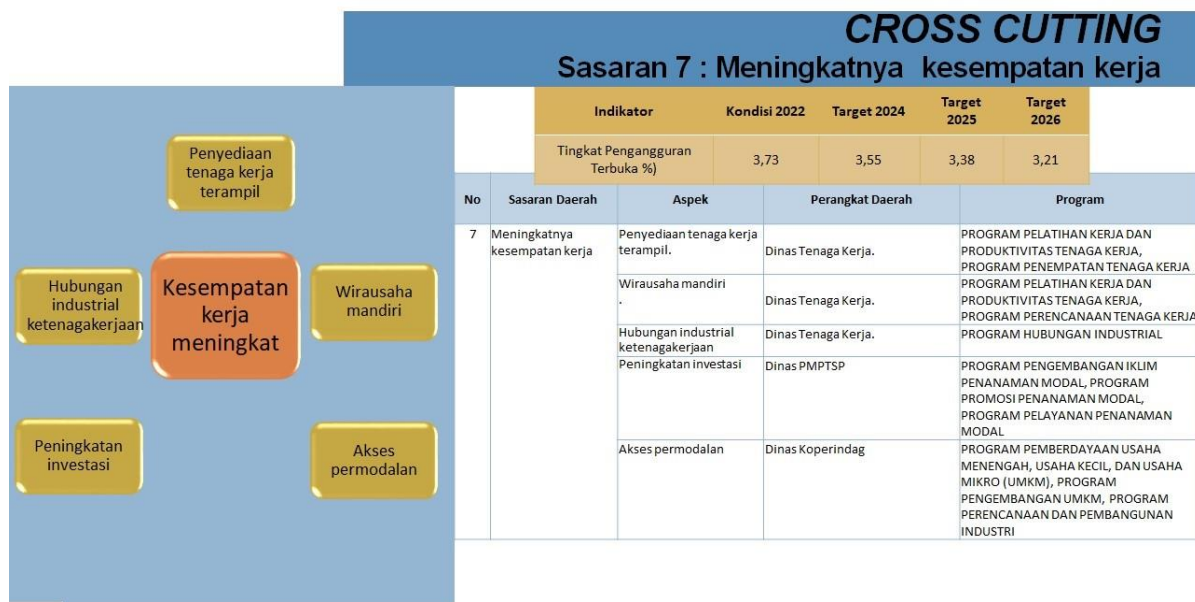
Gambar 5.16 Proses Bisnis Sasaran 6



Gambar 5.17 Cross Cutting Sasaran 6



Gambar 5.18 Proses Bisnis Sasaran 7



Gambar 5.19 Cross Cutting Sasaran 7



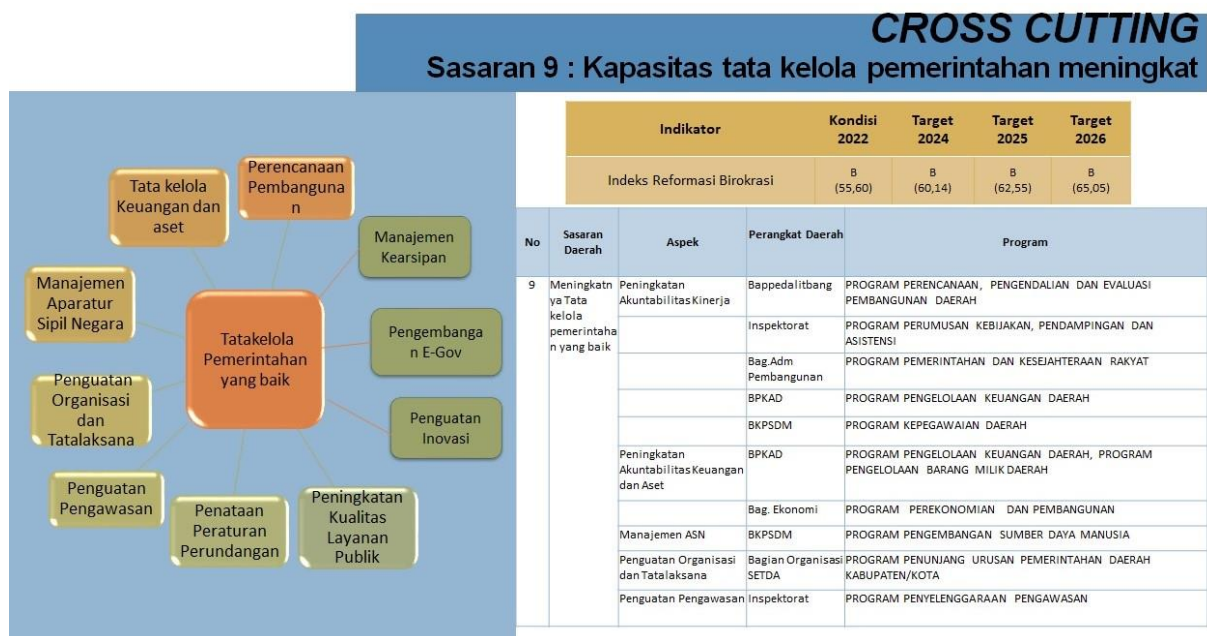
Gambar 5.20 Proses Bisnis Sasaran 8

CROSS CUTTING				
Sasaran 8 : Menurunnya Angka Kemiskinan Menurun				
Indikator		Kondisi 2022	Target 2024	Target 2025
Persentase penduduk miskin (%)		8,80	7,94	7,54
Target 2026		7,17		
No	Sasaran Daerah	Aspek	Perangkat Daerah	Program
8	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Akses masyarakat miskin terhadap kebutuhan dasar	Dinas Sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL, PROGRAM REHABILITASI SOSIAL, PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL, PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
		Peningkatan kesejahteraan keluarga	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
		Pemberdayaan perempuan	Dinas Sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
			Dinas Pengendalian Penduduk dan KB kecamatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
		Perlindungan dan jaminan sosial	Dinas Sosial	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN, PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
			Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
		Kesempatan Kerja dan Berusaha	Dinas Koperindag	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA, PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA, PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
			Dinas Sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
		Akses PSU	DPUPR	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN, PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

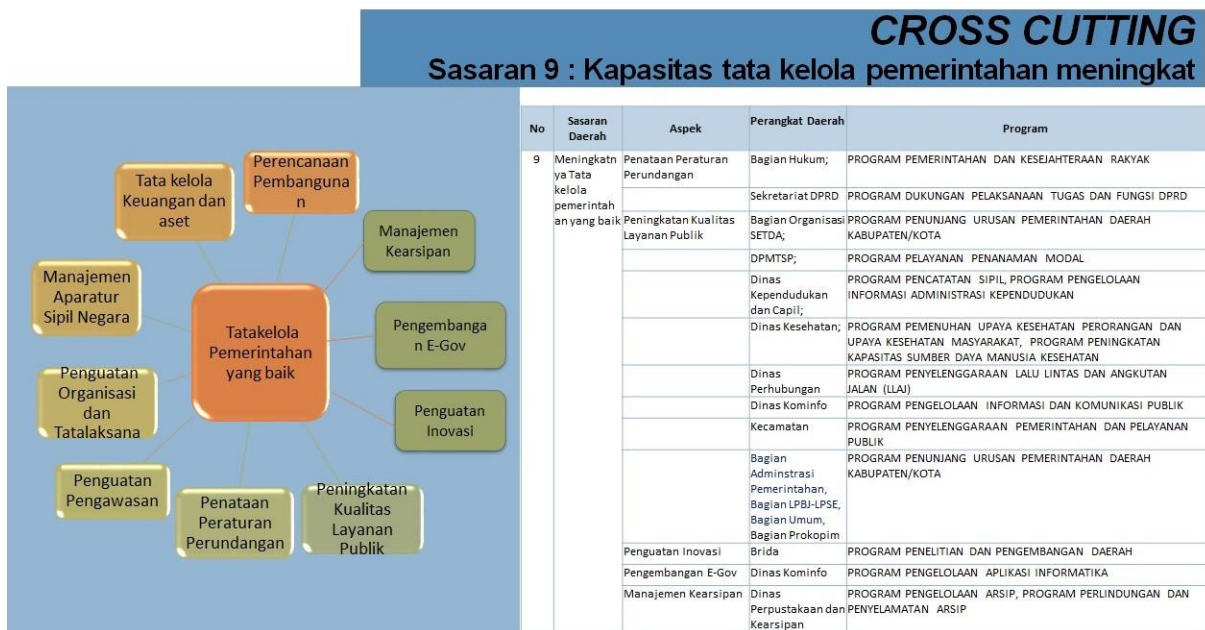
Gambar 5.21 Cross Cutting Sasaran 8



Gambar 5.22 Proses Bisnis Sasaran 9



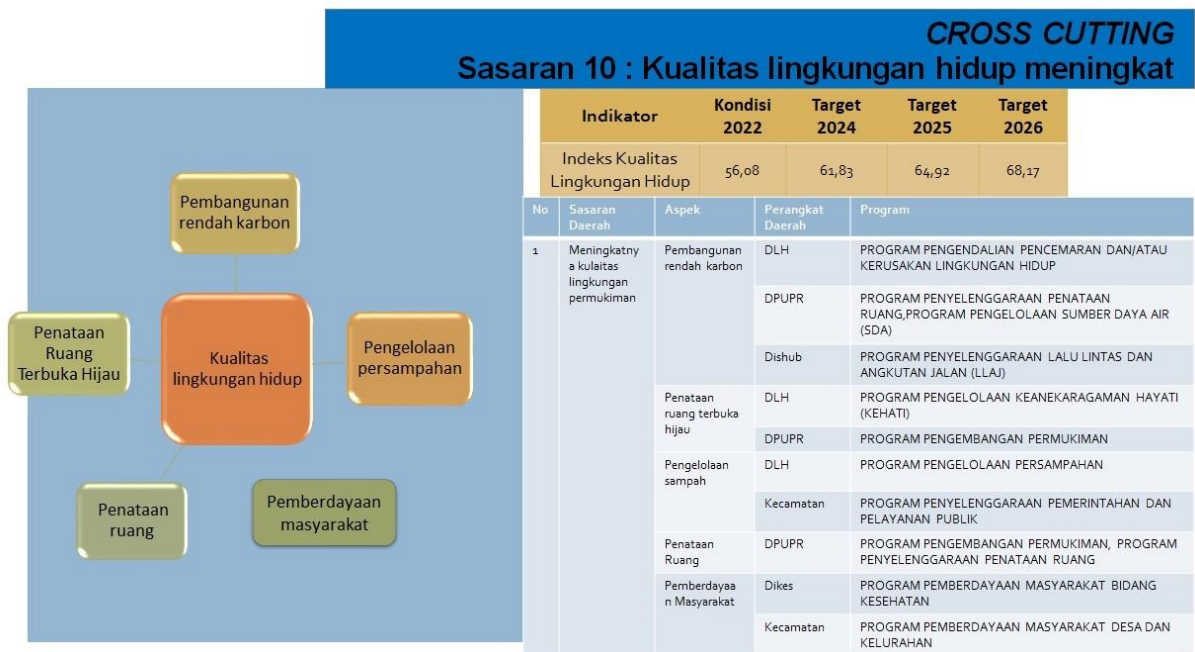
Gambar 5.23 Cross Cutting Sasaran 9



Gambar 5.24 Cross Cutting Sasaran 9 – lanjutan



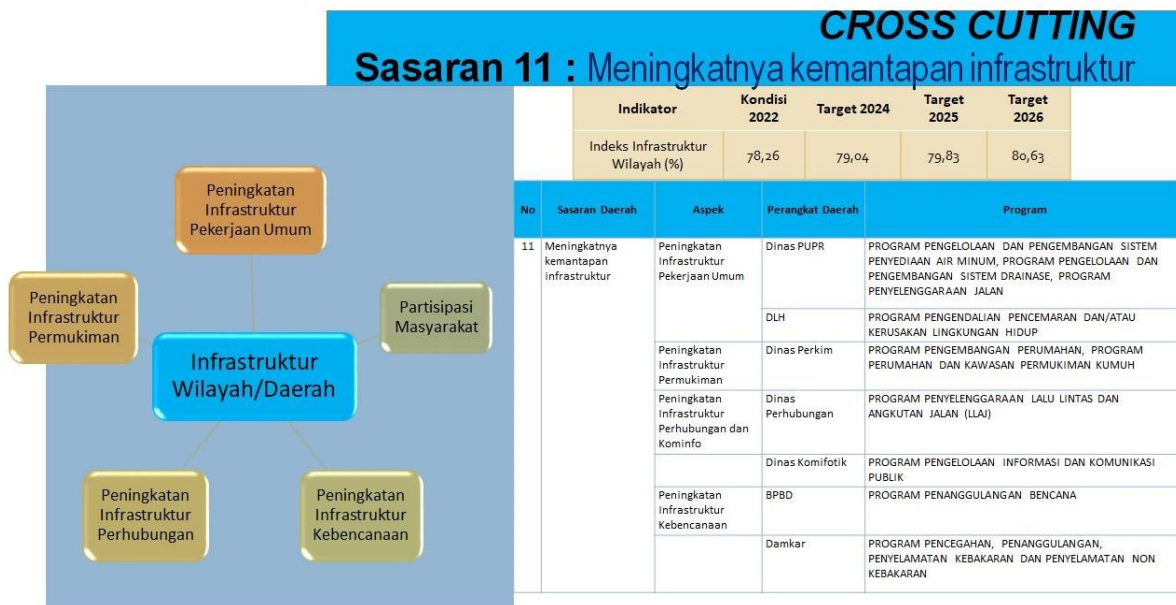
Gambar 5.25 Proses Bisnis Sasaran 10



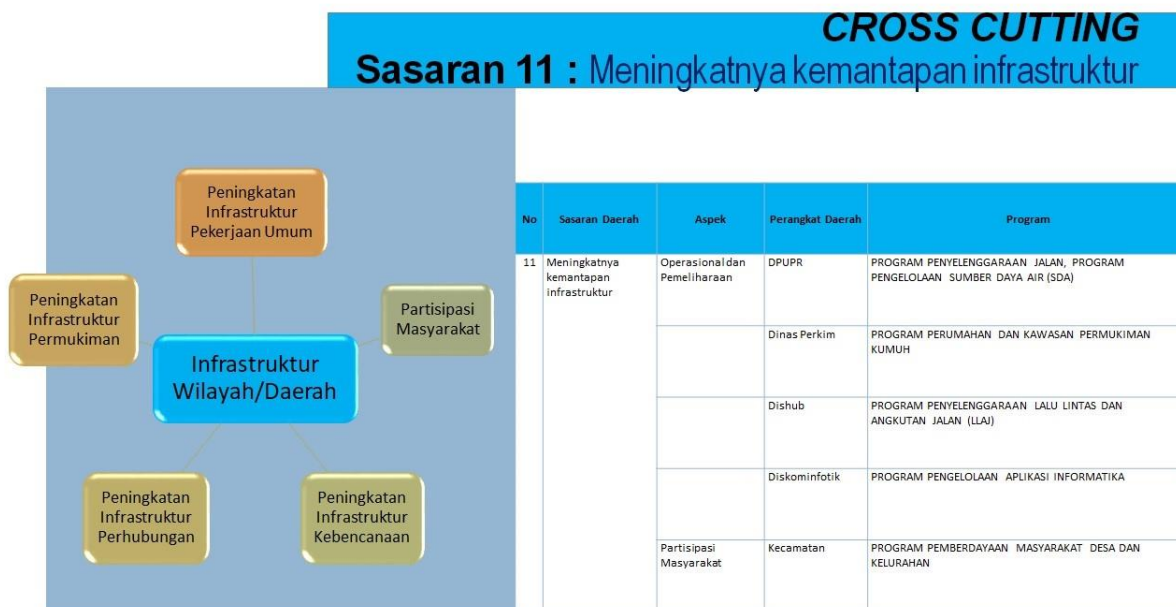
Gambar 5.26 Cross Cutting Sasaran 10



Gambar 5.27 Proses Bisnis Sasaran 11



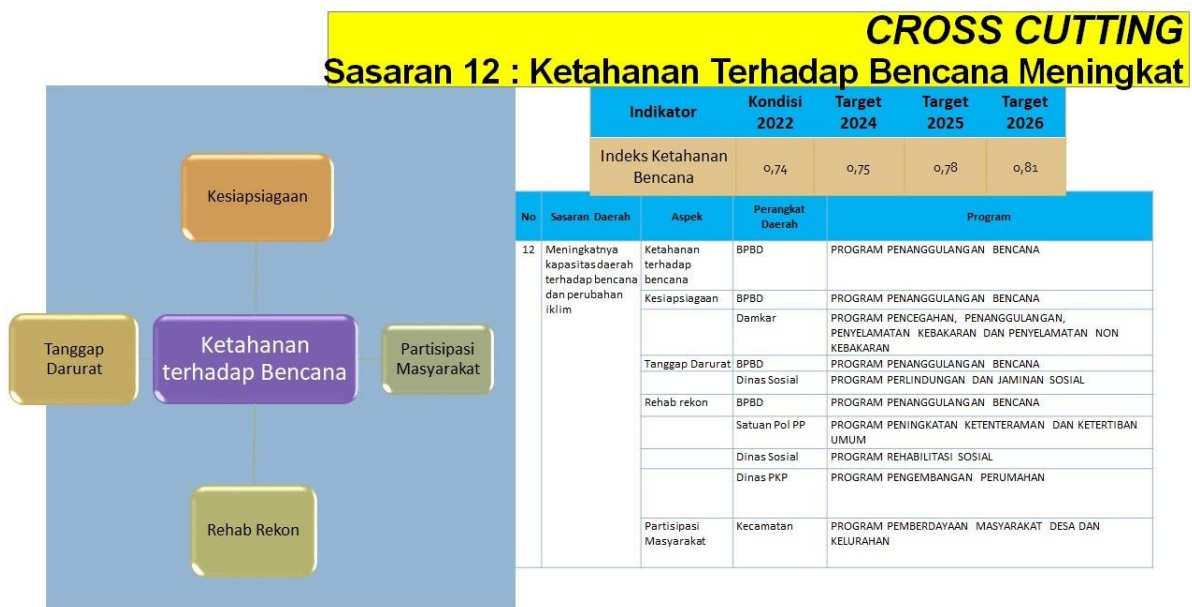
Gambar 5.28 Cross Cutting Sasaran 11



Gambar 5.29 Cross Cutting Sasaran 11-lanjutan



Gambar 5.30 Proses Bisnis Sasaran 12



Gambar 5.31 Cross Cutting Sasaran 12



Gambar 5.32 Proses Bisnis Sasaran 13



Gambar 5.33 Cross Cutting Sasaran 13

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

Bab ini berisi tentang penjelasan terkait upaya-upaya yang akan dilakukan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah seperti yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya. Upaya yang dilakukan untuk mencapai kondisi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun yang akan datang dirumuskan melalui strategi dan arah kebijakan pembangunan Daerah. Secara umum bab ini mencakup 3 (tiga) poin besar, yaitu: strategi dan arah kebijakan, arah kebijakan tahunan, dan program pembangunan Daerah.

6.1. Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2024-2026

Strategi dan arah kebijakan dirumuskan dalam bentuk upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun kedepan yang dirumuskan dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Rumusan strategi dan arah kebijakan juga memperhatikan pemetaan permasalahan pembangunan dijabarkan pada Bab IV. Strategi dan arah kebijakan ditata dengan memperhatikan kondisi eksisting, melakukan komunikasi dan kolaborasi dalam menentukan arah kebijakan, serta fleksibel dalam mempertimbangkan ide-ide dalam pencapaian tujuan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi situasi yang tidak pasti dan kompleks. Strategi dan arah kebijakan diharapkan mampu menjawab permasalahan yang terjadi dan selanjutnya akan dikonversi menjadi rumusan program pembangunan/perangkat daerah. Oleh karena itu, pilihan program dan indikator didalam RPD dipandu oleh rumusan strategi dan arah kebijakan.

Untuk menentukan strategi, dilakukan dengan menggunakan metoda analisis SWOT (kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman) dengan memperhatikan berbagai isu strategis yang berkembang. Selanjutnya strategi yang telah ditentukan dijabarkan ke dalam berbagai kegiatan yang akan mendukung tercapainya sasaran yang diinginkan. Pada akhirnya rumusan alternatif tersebut ditetapkan menjadi strategi melalui aktivitas FGD, *scoring*, analisis *balanced scorecard*.

Tabel 6.1
Analisa SWOT Bagi Perumusan Strategi Pembangunan

Misi RPJPD Kota Bima Tahun 2008-2028:			
"Mewujudkan Kota Bima Yang Sejahtera, Maju dan Mandiri pada Tahun 2028"			
Tujuan 1:			
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing			
Sasaran 1:			
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat			
ANALISIS SWOT			
KEKUATAN	Alokasi anggaran bidang kesehatan sudah mencapai 10% dalam APBD sesuai dengan ketentuan yang berlaku	MEMBANGUN KEKUATAN	Penguatan perencanaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi program-program kesehatan
KELEMAHAN	Masih rendahnya kualitas kesehatan Ibu dan anak,	MENGATASI KELEMAHAN	Meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap ibu dan anak
PELUANG	Kurangnya penerapan PHBS Masih rendahnya kapasitas SDM tenaga kesehatan Partisipasi dan atensi masyarakat terhadap pelayanan kesehatan sangat baik	MENANGKAP PELUANG	Upaya promosi terhadap PHBS Upaya peningkatan kualitas nakes melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas secara berkala Menyediakan media bagi partisipasi masyarakat untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
ANCAMAN	§ rendahnya pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil, § Belum optimalnya peningkatan gizi bayi dan balita Angka stunting masih tinggi	MEREDUKSI ANCAMAN	Mengupayakan pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil, bayi dan balita Program 1000 Hari Pertama Kelahiran
STRATEGI	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat Kota Bima melalui peningkatan kualitas nakes, layanan kesehatan ibu dan anak, serta mendorong PHBS.		
Sasaran 2:			
Meningkatnya kualitas pendidikan			
ANALISIS SWOT			
KEKUATAN	Alokasi anggaran pendidikan telah mencapai 23% dalam APBD atau melampaui ketentuan minimal dalam undang-undang pendidikan sebesar 20%	MEMBANGUN KEKUATAN	Optimalisasi perencanaan dan penganggaran program kegiatan bidang pendidikan
KELEMAHAN	Kualifikasi guru terstandar masih kurang	MENGATASI KELEMAHAN	Peningkatan kualitas tenaga pendidik

PELUANG	Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan relatif tinggi (pelaksanaan pendidikan tingkat PAUD sebagian besar dilaksanakan oleh pihak non pemerintah) Tingginya minat belajar mengajar berbasis aplikasi	MENANGKAP PELUANG	Mempermudah pengelolaan perizinan pendirian PAUD sdisertai optimalisasi pengendalian dan pengawasan Pemerataan akses belajar mengajar berbasis aplikasi
ANCAMAN	Proses penyediaan sarana dan prasarana serta standardisasi pendidikan oleh perangkat daerah belum maksimal	MEREDUKSI ANCAMAN	Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, terutama di daerah-daerah pinggiran
STRATEGI	Meningkatkan kualitas SDM Pendidikan dan pemerataan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan		
Sasaran 3:			
Meningkatnya standar hidup masyarakat			
ANALISIS SWOT			
KEKUATAN	Daya ungkit pariwisata sebagai penggerak perekonomian	MEMBANGUN KEKUATAN	Mendorong pertumbuhan wirausaha serta sektor barang dan jasa terutama terkait sektor pariwisata
KELEMAHAN	Belum optimalnya infrastruktur pendukung pengembangan ekonomi	MENGATASI KELEMAHAN	Memperkuat program Pembangunan insfrastruktur pendukung pengembangan ekonomi
PELUANG	Pertumbuhan sektor barang dan jasa	MENANGKAP PELUANG	Menciptakan iklim yang mendukung pertumbuhan sektor barang dan jasa
ANCAMAN	Kondisi ekonomi makro yang sulit diprediksi akibat pemulihan pasca covid 19 dan resesi global	MEREDUKSI ANCAMAN	Menguatkan potensi unggulan daerah
STRATEGI	Mewujudkan stabilitas ekonomi daerah melalui dukungan infrastruktur, pertumbuhan wirausaha dan pertumbuhan investasi.		
Sasaran 4:			
Terwujudnya kebutuhan pangan masyarakat			
ANALISIS SWOT			
KEKUATAN	Peningkatan produksi pangan terjadi dari tahun ketahun	MEMBANGUN KEKUATAN	Penyediaan sarana dan prasarana pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan untuk mendukung peningkatan produksi
KELEMAHAN	Rendah ketersediaan infrastruktur lumbung	MENGATASI KELEMAHAN	Membangun sistem lumbung pangan daerah
PELUANG	Kota Bima termasuk dalam kebijakan prioritas nasional di wilayah NTB untuk pengembangan sektor perkebunan	MENANGKAP PELUANG	Penguatan kelompok tani dan mendorong pemerataan akses permodalan bagi petani

ANCAMAN	Perubahan iklim dan cuaca ekstrem	MEREDUKSI ANCAMAN	Menggalakkan sistem pertanian berkelanjutan
STRATEGI	Meningkatkan ketersediaan cadangan pangan utama, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan serta diversifikasi bahan pangan		
Sasaran 5:			
Meningkatnya pemberdayaan gender dan pemuda			
ANALISIS SWOT			
KEKUATAN	Pertumbuhan jumlah organisasi wanita dan organisasi pemuda di Kota Bima	MEMBANGUN KEKUATAN	Memfasilitasi kegiatan organisasi wanita dan organisasi pemuda di Kota Bima
KELEMAHAN	Lingkungan kerja yang masih kurang nyaman bagi kaum perempuan (kebiasaan merokok yang banyak dilakukan laki-laki di lingkungan kerja)	MENGATASI KELEMAHAN	Membangun lingkungan kerja dan sosial yang mendukung pemberdayaan perempuan dan pemuda
PELUANG	Bonus demografi	MENANGKAP PELUANG	Upaya pengarusutamaan gender dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan
ANCAMAN	Angka kenakalan remaja (tawuran, pergaulan bebas dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang) yang masih ada di Kota Bima	MEREDUKSI ANCAMAN	Pelibatan seluruh elemen masyarakat untuk melaksanakan fungsi kontrol sosial dalam rangka mengurangi angka kenakalan remaja
STRATEGI	Mendorong prestasi pemuda dan pengarusutamaan gender dalam pembangunan		
Tujuan 2:			
Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan kesejahteraan masyarakat			
Sasaran 6:			
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi			
ANALISIS SWOT			
KEKUATAN	Posisi strategis Kota Bima sebagai daerah transit dan penyangga kawasan pariwisata nasional (Lombok dan Pulau Komodo)	MEMBANGUN KEKUATAN	Meningkatkan iklim investasi dan produktifitas sector-sektor unggulan: pariwisata, pertanian tanaman pangan, kelautan dan perikanan, perdagangan dan jasa serta industri
KELEMAHAN	Kurangnya daya saing UMKM	MENGATASI KELEMAHAN	silitasi pelatihan, akses modal dan pendampingan pelaku usaha dan UMKM dalam meningkatkan dan mengembangkan skala usahanya
PELUANG	Dukungan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam pengembangan pariwisata sebagai kawasan penyangga destinasi wisata nasional.	MENANGKAP PELUANG	Integrasi arah kebijakan daerah dengan Provinsi dan Pusat

ANCAMAN	Resesi ekonomi dan kenaikan tingkat inflasi.	MEREDUKSI ANCAMAN	Penguatan sistem perekonomian berbasis kemasyarakatan
STRATEGI	Penguatan UMKM dan sektor pariwisata sebagai poros integrasi pembangunan produk unggulan dalam kerangka pembangunan ekonomi Kota Bima yang berkelanjutan		
Sasaran 7:			
Meningkatnya kesempatan kerja			
ANALISIS SWOT			
KEKUATAN	Jumlah penduduk dan usia produktif serta angkatan kerja potensial cukup tinggi	MEMBANGUN KEKUATAN	Menguatkan afirmasi pemerintah dengan melibatkan stakeholder dalam perluasan kesempatan dan penciptaan lapangan kerja baru
KELEMAHAN	Kota Bima belum memiliki BLK terpadu	MENGATASI KELEMAHAN	Membentuk UPTD BLK dan membangun gedung serta fasilitas BLK yang berkualitas
PELUANG	Pengembangan produk unggulan dan pariwisata membuka lapangan kerja dan peluang usaha	MENANGKAP PELUANG	Memfasilitasi dan menstimulasi penciptaan lapangan kerja baru dan peluang usaha melalui akses permodalan dan pelatihan
ANCAMAN	Tidak meratanya sebaran dan kepadatan penduduk	MEREDUKSI ANCAMAN	Membangun pusat pertumbuhan baru di wilayah pinggiran kota
STRATEGI	Meningkatkan partisipasi angkatan kerja serta tumbuhnya wirausaha baru mandiri melalui pembanguna BLK sebagai wadah penyediaan tenaga kerja terampil serta peningkatan akses permodalan		
Sasaran 8:			
Menurunnya tingkat kemiskinan			
ANALISIS SWOT			
KEKUATAN	Optimalnya kinerja pengentasan kemiskinan dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan social	MEMBANGUN KEKUATAN	Meningkatkan pengintegrasian dan kerjasama lintas urusan serta keterlibatan multipihak dalam penanggulangan kemiskinan
KELEMAHAN	Sejak tahun 2020 di Kota Bima terdapat penyandang kemiskinan ekstrem	MENGATASI KELEMAHAN	Optimalisasi program pengentasan kemiskinan dan pengentasan PKMS
PELUANG	Perhatian dan partisipasi NGO sangat tinggi dalam upaya penanggulangan kemiskinan	MENANGKAP PELUANG	Mengembangkan regulasi tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemanfaatan dana CSR
ANCAMAN	Indeks Gini Rasio mengalami peningkatan pada tahun 2021 dan ini mengindikasikan ketimpangan dan tidak meratanya pembangunan	MEREDUKSI ANCAMAN	Upaya pemerataan pembangunan dan efektivitas sasaran penerima bantuan ekonomi dan program-program sosial lainnya
STRATEGI	Meningkatkan pemerataan akses masyarakat miskin terhadap kebutuhan dasar dan memperluas cakupan penanganan PMKS		
Tujuan 3:			
Meningkatkan Tata kelola pemerintahan yang baik			

Sasaran 9:			
Meningkatnya Tata kelola pemerintahan yang baik			
ANALISIS SWOT			
KEKUATAN	Komitmen pemerintah kota Bima untuk memaksimalkan implementasi SAKIP dan <i>Monitoring Center for Prevention</i> (MCP)	MEMBANGUN KEKUATAN	Mengoptimalkan dan mengakselerasi implementasi rencana aksi reformasi birokrasi
KELEMAHAN	Belum ada <i>roadmap</i> reformasi birokrasi	MENGATASI KELEMAHAN	Menyusun <i>roadmap</i> reformasi birokrasi dan membangun bisnis proses pemerintah daerah yang berorientasi pada hasil
PELUANG	Paradigma baru untuk menerapkan penyederhanaan birokrasi dan tata laksana	MENANGKAP PELUANG	Penataan organisasi terus dilakukan melalui penyederhanaan birokrasi dan tata laksana
ANCAMAN	Regulasi pusat yang diskret dan cepat berubah	MEREDUKSI ANCAMAN	Meningkatkan kapasitas SDM Aparatur
STRATEGI	Mewujudkan wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) melalui tata kelola pemerintahan yang bersih dan reformasi birokrasi.		
Tujuan 4:			
Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman			
Sasaran 10:			
Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman			
ANALISIS SWOT			
KEKUATAN	Komitmen Pemerintah untuk mewujudkan 100% sanitasi, 0% kumuh, dan 100% air bersih pada akhir masa RPD	MEMBANGUN KEKUATAN	Menetapkan penyediaan rumah layak huni sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah
KELEMAHAN	masih rendahnya pendapatan masyarakat dan cakupan bantuan untuk rumah layak huni yang masih terbatas	MENGATASI KELEMAHAN	Mendorong peningkatan program penyediaan rumah layak huni
PELUANG	Besarnya atensi dan kontrol masyarakat dalam penataan lingkungan	MENANGKAP PELUANG	Mendorong program-program berbasis pemberdayaan masyarakat, salah satunya melalui optimalisasi pemanfaatan dana kelurahan
ANCAMAN	Kawasan kumuh masih luas (pada tahun 2021 sebesar 147,08 hektar)	MEREDUKSI ANCAMAN	Mendorong penataan berbagai aspek pendukung lingkungan layak yaitu mencakup kebersihan lingkungan/persampahan, air bersih, sanitasi, kondisi rumah, jalan lingkungan dan saluran drainase.
STRATEGI	Membangun lingkungan permukiman yang layak melalui penyediaan prasana utilitas umum (PSU) serta pemberdayaan masyarakat.		
Sasaran 11:			
Meningkatnya kemandirian infrastruktur			

ANALISIS SWOT			
KEKUATAN	Pembangunan infrastruktur daerah selalu menjadi prioritas pembangunan tahunan Kota Bima	MEMBANGUN KEKUATAN	Meningkatkan cakupan pembangunan infrastruktur daerah yang memenuhi standar.
KELEMAHAN	Cakupan pembangunan infrastruktur daerah belum merata di seluruh wilayah	MENGATASI KELEMAHAN	
PELUANG	Perhatian pemerintah pusat dalam penyediaan infrastruktur daerah sangat tinggi	MENANGKAP PELUANG	Melaksanakan program <i>sharing</i> bersama pemerintah pusat
ANCAMAN	Potensi bencana yang dapat terjadi setiap saat	MEREDUKSI ANCAMAN	Membangun infrastruktur yang tahan bencana
STRATEGI	Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur daerah yang tahan bencana dan mendukung pengurangan karbon		
Sasaran 12:			
Meningkatnya kapasitas daerah terhadap bencana, adaptasi perubahan iklim, dan pembangunan rendah karbon			
ANALISIS SWOT			
KEKUATAN	Sistem kesiapsiagaan sudah terbangun	MEMBANGUN KEKUATAN	Meningkatkan cakupan mitigasi bencana dan tanggap darurat penanganan bencana
KELEMAHAN	Belum optimalnya sistem peringatan dini bencana	MENGATASI KELEMAHAN	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mitigasi dan tanggap darurat bencana
PELUANG	Keterlibatan Pemerintah Pusat, masyarakat maupun pihak NGO dalam membantu membangun ketahanan terhadap bencana	MENANGKAP PELUANG	Melaksanakan program sharing bersama pemerintah pusat, NGO maupun BUMN
ANCAMAN	Tingginya angka sedimentasi Teluk Bima,	MEREDUKSI ANCAMAN	Rehabilitasi kawasan hulu dan daerah resapan air,
	Pengundulan kawasan hulu yang masif		Penataan DAS
STRATEGI	Meningkatkan cakupan kesiapsiagaan, tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana		
Tujuan 5:			
Meningkatnya keamanan dan ketertiban daerah			
Sasaran 13:			
Meningkatnya keamanan dan ketertiban			
ANALISIS SWOT			
KEKUATAN	Pemerintah Kota Bima mampu menjaga stabilitas keamanan daerah	MEMBANGUN KEKUATAN	Meningkatkan keamanan ketentraman dan ketertiban mulai dari skala lingkungan
KELEMAHAN	Cakupan pengendalian stabilitas keamanan daerah belum menyeluruh	MENGATASI KELEMAHAN	Meningkatkan koordinasi dan kerjasama FKPD dalam mewujudkan stabilitas keamanan daerah

PELUANG	Partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan ketentraman dan ketertiban cukup tinggi	MENANGKAP PELUANG	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dana kelurahan termasuk didalamnya menjaga K3
ANCAMAN	Angka kejadian kasus kriminalitas masih tinggi	MEREDUKSI ANCAMAN	Memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum dan Meningkatkan peran lembaga keagamaan, organisasi social kemasyarakatan dan tokoh agama/tokoh masyarakat
STRATEGI	Mewujudkan stabilitas daerah melalui peningkatan peran serta masyarakat dan stakeholder lainnya dalam menekan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban serta konflik sosial		

Sumber: Hasil Analisis

Tabel 6.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Tahun 2024-2026
Tujuan 1: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing		
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat Kota Bima melalui peningkatan kualitas nakes, layanan kesehatan ibu dan anak, serta mendorong PHBS.	1. Peningkatan akreditasi puskesmas dan rumah sakit 2. Peningkatan kapasitas SDM tenaga kesehatan 3. Penyediaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan Obat-obatan 4. Pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil, bayi dan balita 5. Promosi penerapan PHBS (perilaku hidup bersih dan sehat) 6. Optimalisasi layanan kesehatan ibu dan anak 7. Peningkatan cakupan cakupan pelayanan PM dan PTM 8. Edukasi masyarakat tentang penyakit menular dan tidak menular
Meningkatnya kualitas pendidikan	Meningkatkan kualitas SDM Pendidikan dan pemerataan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan	1. Pemenuhan standarisasi penyelenggaraan Dikdas 2. Pemenuhan standarisasi penyelenggaraan PAUD 3. Pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik/guru 4. Peningkatan kualifikasi guru terstandar

		5. Peningkatan Pembelajaran berbasis digital 6. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah
Meningkatnya standar hidup masyarakat	Mewujudkan stabilitas ekonomi daerah melalui dukungan infrastruktur, pertumbuhan wirausaha dan pertumbuhan investasi.	1. Peningkatan daya beli masyarakat 2. Pembangunan infrastruktur pendukung perekonomian 3. Mendorong percepatan investasi 4. Mendorong pertumbuhan wirausaha baru 5. Mengurangi ketimpangan kesejahteraan masyarakat
Terwujudnya kebutuhan pangan masyarakat	Meningkatkan ketersediaan cadangan pangan utama, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan serta diversifikasi bahan pangan	1. Peningkatan produksi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan 2. Fasilitasi kelompok tani dan nelayan 3. Kemudahan akses modal bagi para petani dan nelayan 4. Optimalisasi program diversifikasi pangan 5. Membangun sistem lumbung pangan daerah
Meningkatnya pemberdayaan gender dan pemuda	Mendorong prestasi pemuda dan pengarusutamaan gender dalam pembangunan	1. Membangun lingkungan kerja dan sosial yang mendukung pemberdayaan perempuan dan pemuda; 2. Pengarusutamaan gender dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan; 3. Fasilitasi kegiatan organisasi wanita dan organisasi pemuda di Kota Bima
Tujuan 2: Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan kesejahteraan masyarakat		
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Penguatan UMKM dan sektor pariwisata sebagai poros integrasi pembangunan produk unggulan dalam kerangka pembangunan ekonomi Kota Bima yang berkelanjutan	1. Penataan dan pengembangan destinasi wisata daerah 2. Promosi wisata dan pengembangan ekonomi kreatif 3. Penguatan kelembagaan UMKM dan daya saing produk UMKM 4. Pengembangan produk unggulan daerah

		5. Pengembangan industri pengolahan ikan 6. Penguatan kelembagaan dan kualitas SDM koperasi 7. Identifikasi dan optimalisasi potensi investasi 8. Peningkatan kualitas layanan perizinan
Meningkatnya kesempatan kerja	Meningkatkan partisipasi angkatan kerja serta tumbuhnya wirausaha baru mandiri melalui pembanguna BLK sebagai wadah penyediaan tenaga kerja terampil serta peningkatan akses permodalan	1. Penguatan BLK sebagai sarana peningkatan kualitas tenaga kerja 2. Mendorong tumbuhnya wirausaha baru 3. Mendorong tumbuhnya industri kecil sebagai penyedia lapangan kerja 4. Mendorong terbentuknya jaringan pemasaran tenaga kerja daerah 5. Membangun sistem yang mendukung kesesuaian keterampilan pencari kerja dengan permintaan pasar kerja
Menurunnya tingkat kemiskinan	Meningkatkan pemerataan akses masyarakat miskin terhadap kebutuhan dasar dan memperluas cakupan penanganan PMKS	1. Memperluas cakupan penanganan PMKS 2. Optimalisasi upaya rehabilitasi sosial diluar panti 3. Peningkatan kapasitas tenaga penyelenggara kesejahteraan sosial 4. Meningkatkan pemberdayaan penyandang disabilitas 5. Fasilitasi pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana alam dan non alam saat terjadi bencana 6. Mengurangi ketimpangan sosial
Tujuan 3: Meningkatkan Tata kelola pemerintahan yang baik		
Meningkatnya Tata kelola pemerintahan yang baik	Mewujudkan wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) melalui tata kelola pemerintahan yang bersih dan reformasi birokrasi.	1. Memperkuat Sistem Pengawasan Internal Pemerintah 2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani

		3. Penataan dan penyederhanaan birokrasi berbasis <i>outcome</i> 4. Penguatan kinerja perencanaan pembangunan 5. Penguatan kinerja penganggaran dan pengelolaan keuangan
Tujuan 4: Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman		
Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman	Membangun lingkungan permukiman yang layak melalui penyediaan prasana utilitas umum (PSU) serta pemberdayaan masyarakat.	1. Pemenuhan layanan air bersih 2. Peningkatan infrastruktur jalan, jalan lingkungan dan jembatan 3. Pembangunan sarana sanitasi dan pengolahan limbah belum terpadu antar sektor 4. Optimalisasi penataan dan pemanfaatan ruang 5. Optimalisasi pengelolaan sampah, khususnya sampah rumah tangga 6. Penanganan rumah tidak layak huni 7. Memperluas cakupan cakupan bantuan untuk rumah layak huni 8. Penataan drainase
Meningkatnya kemantapan infrastruktur	Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur daerah yang tahan bencana dan mendukung pengurangan karbon	1. Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan 2. Peningkatan sarana sanitasi dan pengolahan limbah terpadu 3. Penataan terminal AKDP dan AKAP 4. Pembukaan jalan baru pada kawasan produktif dan daerah pinggiran 5. Peningkatan sistem irigasi 6. Pembangunan DAM penahan banjir
Meningkatnya kapasitas daerah terhadap bencana, adaptasi perubahan iklim, dan pembangunan rendah karbon	Meningkatkan cakupan kesiapsiagaan, tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana	1. Penguatan sistem kesiapsiagaan bencana 2. Peningkatan jumlah Kelurahan Siaga Bencana

		3. Peningkatan kerjasama dengan masyarakat, NGO dan BUMD dalam membangun masyarakat tangguh bencana 4. Pelibatan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana 5. Optimalisasi pengelolaan sampah dan limbah 6. Peningkatan upaya pemulihan sarana dan prasarana fisik, ekonomi dan sosial pascabencana 7. Menggalakkan program reboisasi untuk rehabilitasi kawasan hulu 8. Melaksanakan program Kampung Iklim dan penyelamatan mata air
Tujuan 5: Meningkatnya keamanan dan ketertiban daerah		
Meningkatnya keamanan dan ketertiban	Mewujudkan stabilitas daerah melalui peningkatan peran serta masyarakat dan stakeholder lainnya dalam menekan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban serta konflik sosial	1. Peningkatan kesadaran dan ketaatan terhadap Peraturan Daerah dan Kepala Daerah 2. Penguatan peran FKUB dan organisasi sosial kemasyarakatan 3. Penguatan sistem kewaspadaan dini masyarakat 4. Memperkuat koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum 5. Deteksi dini potensi konflik 6. Peningkatan koordinasi dengan stakeholder terkait penyelenggaraan Pemilu

Sumber: Hasil Analisis

6.2. Arah Kebijakan Tahunan dan Prioritas Pembangunan

Arah kebijakan tahunan yang terdapat dalam RPD memandu sinkronisasi antara perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan. Arah kebijakan tahunan akan menjadi tema dan prioritas pembangunan dalam dokumen RKPD Kota Bima. Perumusan arah kebijakan tahunan berbasis pada telaah urgensi isu/permasalahan pembangunan yang perlu direspon secara sistematis dan bertahap.

Rumusan arah kebijakan perlu memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi Nusa Tenggara Barat, agar tercapai sinergi pembangunan

antara level pemerintah. Sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang RPJMN Tahun 2020-2024 telah dijelaskan tentang arah pembangunan untuk pengembangan wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang selanjutnya menjadi program prioritas pembangunan pemerintah di wilayah NTB.

Berdasarkan rumusan arah kebijakan Kota Bima untuk periode tahun 2024-2026, maka dapat dijabarkan arah kebijakan dan prioritas tahunan yang selanjutnya akan menjadi acuan dalam RKPD selama 3 tahun sebagai berikut.

Tabel 6.3

Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Kota Bima Tahun 2024-2026

Arah Kebijakan Tahunan						Prioritas Pembangunan Tahun 2024-2026	
2024		2025		2026			
1	Penyediaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan Obat-obatan	1	Peningkatan kapasitas SDM tenaga kesehatan	1	Peningkatan akreditasi puskesmas dan rumah sakit	PD 6	Peningkatan kualitas penyelenggaraan kesehatan
2	Pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil, bayi dan balita	2	Peningkatan cakupan pelayanan PM dan PTM				
3	Promosi penerapan PHBS (perilaku hidup bersih dan sehat)	3	Edukasi masyarakat tentang penyakit menular dan tidak menular				
4	Optimalisasi layanan kesehatan ibu dan anak						
1	Pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik/guru	1	Pemenuhan standarisasi penyelenggaraan Dikdas	1	Peningkatan kualifikasi guru terstandar	PD 5	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan
2	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah	2	Pemenuhan standarisasi penyelenggaraan PAUD	2	Peningkatan Pembelajaran berbasis digital		
1	Peningkatan daya beli masyarakat	1	Mengurangi ketimpangan kesejahteraan masyarakat	1	Pembangunan insfrastruktur pendukung perekonomian	PD 8	Peningkatan layanan publik
2	Mendorong pertumbuhan wirausaha baru	2	Mendorong pertumbuhan wirausaha baru	2	Mendorong percepatan investasi		
1	Peningkatan produksi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan	1	Peningkatan produksi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan	1	Optimalisasi program diversifikasi pangan	PD 4	Penanganan stunting

2	Fasilitasi kelompok tani dan nelayan	2	Kemudahan akses modal bagi para petani dan nelayan	2	Membangun sistem lumbung pangan daerah		
1	Pengarusutamaan gender dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan	1	Pengarusutamaan gender dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan	1	Membangun lingkungan kerja dan sosial yang mendukung pemberdayaan perempuan dan pemuda	PD 7	Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih
1	Penataan dan pengembangan destinasi wisata daerah	1	Penataan dan pengembangan destinasi wisata daerah	1	Pengembangan industri pengolahan ikan	PD 1	Pertumbuhan ekonomi
2	Promosi wisata dan pengembangan ekonomi kreatif	2	Pengembangan produk unggulan daerah	2	Identifikasi dan optimalisasi potensi investasi		
3	Penguatan kelembagaan UMKM dan daya saing produk UMKM	3	Penguatan kelembagaan dan kualitas SDM koperasi	3	Peningkatan kualitas layanan perizinan		
1	Penguatan BLK sebagai sarana peningkatan kualitas tenaga kerja	1	Mendorong tumbuhnya industri kecil sebagai penyedia lapangan kerja	1	Membangun sistem yang mendukung kesesuaian keterampilan pencari kerja dengan permintaan pasar kerja	PD 3	Perluasan kesempatan kerja
2	Mendorong tumbuhnya wirausaha baru	2	Mendorong terbentuknya jaringan pemasaran tenaga kerja daerah				
1	Memperluas cakupan penanganan PMKS	1	Meningkatkan pemberdayaan penyandang disabilitas	1	Peningkatan kapasitas tenaga penyelenggara kesejahteraan sosial	PD 2	Penurunan angka kemiskinan
2	Fasilitasi pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana alam dan non alam saat terjadi	2	Mengurangi ketimpangan sosial	2	Optimalisasi upaya rehabilitasi sosial di luar panti		
1	Memperkuat Sistem Pengawasan Internal Pemerintah	1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani	1	Memperkuat Sistem Pengawasan Internal Pemerintah	PD 7	Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih
2	Penguatan kinerja perencanaan pembangunan	2	Penataan dan penyederhanaan birokrasi berbasis <i>outcome</i>	2	Penguatan kinerja perencanaan pembangunan		

3	Penguatan kinerja penganggaran dan pengelolaan keuangan			3	Penguatan kinerja penganggaran dan pengelolaan keuangan		
1	Pemenuhan layanan air bersih	1	Pemenuhan layanan air bersih	1	Pemenuhan layanan air bersih	PD 10	Meningkatkan kualitas permukiman
2	Pembangunan sarana sanitasi dan pengolahan limbah belum terpadu antar sektor	2	Peningkatan infrastruktur jalan, jalan lingkungan dan jembatan	2	Optimalisasi penataan dan pemanfaatan ruang		
3	Penanganan rumah tidak layak huni	3	Optimalisasi pengelolaan sampah, khususnya sampah rumah tangga	3	Memperluas cakupan bantuan untuk rumah layak huni		
4	Penataan drainase	4	Penataan drainase	4	Penataan drainase		
1	Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan	1	Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan	1	Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan	PD 9	Peningkatan kualitas infrastruktur
2	Penataan terminal AKDP dan AKAP	2	Peningkatan sarana sanitasi dan pengolahan limbah terpadu	2	Pembukaan jalan baru pada kawasan produktif dan daerah pinggiran		
3	Peningkatan sistem irigasi			3	Pembangunan DAM penahan banjir		
1	Penguatan sistem kesiapsiagaan bencana	1	Peningkatan jumlah Kelurahan Siaga Bencana	1	Peningkatan upaya pemulihan sarana dan prasarana fisik, ekonomi dan sosial pascabencana	PD 12	Mitigasi bencana
2	Peningkatan kerjasama dengan masyarakat, NGO dan BUMD dalam membangun masyarakat tangguh bencana	2	Optimalisasi pengelolaan sampah dan limbah	2	Menggalakkan program reboisasi untuk rehabilitasi kawasan hulu	PD 11	Peningkatan kualitas lingkungan dan pembangunan rendah karbon
3	Pelibatan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana	3	Melaksanakan program Kampung Iklim dan penyelamatan mata air				
1	Memperkuat koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum	1	Peningkatan koordinasi dengan <i>stakeholder</i> terkait penyelenggaraan Pemilu	1	Memperkuat koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum	PD 13	Mewujudkan keamanan dan stabilitas daerah
2	Penguatan peran FKUB dan	2	Penguatan sistem kewaspadaan dini	2	Penguatan peran FKUB dan organisasi		

	organisasi sosial kemasyarakatan		masyarakat		sosial kemasyarakatan		
3	Peningkatan kesadaran dan ketaatan terhadap Peraturan Daerah dan Kepala Daerah	3	Deteksi dini potensi konflik	3	Peningkatan kesadaran dan ketaatan terhadap Peraturan Daerah dan Kepala Daerah		

Sumber: Hasil Analisis

6.3. Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026

Program pembangunan daerah pada RPD merupakan program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang memiliki dimensi teknokratik. Dimana perencanaan dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas melibatkan atau mengakomodasi keilmiahan dan perkembangan teknologi.

Program prioritas pembangunan Kota Bima dalam periode 2024-2026 sebagai berikut:

Tabel 6.4. Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Bima Tahun 2024-2026

Misi/Tujuan/Sa saran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPD		Urusan		
			2022	2024		2025		2026		TARGE T	RP (000)		TARGE T	RP (000)
				TARGE T	RP (000)	TARGE T	RP (000)	TARGE T	RP (000)					
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Tujuan 1.1. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang berdaya saing	Indeks Pembanguna n Manusia	Nilai	76,84	77,00	129.015.340.1 76,00	77,00	129.015.340.1 76,00	77,00	129.015.340.1 76,00	77,00	129.015.340.1 76,00			
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup	Tahun	70,83	71,11	50.198.875.12 2,00	71,26	50.198.875.12 2,00	71,4	50.198.875.12 2,00	71,4	50.198.875.12 2,00			
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penurunan Angka kesakitan	Persen	35	37	45.435.939.62 2,00	38	45.435.939.62 2,00	40	45.435.939.62 2,00	40	45.435.939.62 2,00	Kesehatan		
	Penurunan Angka Kematian Bayi	KH	2/100	2/100		2/100		2/100		2/100				
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Penurunan Angka TFR	Persen	80	80	368.134.000,0 0	80	368.134.000,0 0	80	368.134.000,0 0	80	368.134.000,0 0	Pengendali an Penduduk dan Keluarga Berencana		

PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Penurunan (UNMET NEED)	Persen	25	25	3.178.637.000,00	25	3.178.637.000,00	25	3.178.637.000,00	25	3.178.637.000,00	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase Peningkatan Angka Prevalensi Pengguna mCPR (Modern Contraceptive Prevalance Rate)	Persen	70	70		70		70		70		
	Persentase Penurunan ASFR (Age Specific Fertility Rate)	Persen	37/1000	38/1.000		38/1.000		38/1.000		38/1.000		
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Jumlah ketersediaan energi	kka/kap/hari	3.198	3.198	663.743.000,00	3.198	663.743.000,00	3.198	663.743.000,00	3.198	663.743.000,00	Ketahanan Pangan
	Jumlah ketersediaan protein	gram/kap/hari	75,74	75,74		75,74		75,74		75,74		
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase kelurahan rawan/ rentan pangan yang ditangani	persen	92	92	75.987.200,00	92	75.987.200,00	92	75.987.200,00	92	75.987.200,00	Ketahanan Pangan

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang memenuhi Standar	persen	91	91	50.918.000,00	91	50.918.000,00	91	50.918.000,00	91	50.918.000,00	Kesehatan
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Jumlah Fasilitas Pelayanan Farmasi dan Alkes yang aman	persen		95	425.516.300,0 0	95	425.516.300,0 0	95	425.516.300,0 0	95	425.516.300,0 0	Kesehatan
			95									
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/K ota	Sistem jaringan		3 Sistem jaringan	10.032.741.09 4	3 Sistem jaringan	11.032.741.09 4	3 Sistem jaringan	15.032.741.09 4	9 Sistem jaringan	15.032.741.09 4	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase panjang jaringan drainase dalam kondisi baik	Persen		4,00%	7.567.261.786	4,20%	7.567.261.786	4,50%	7.567.261.786	4,50%	7.567.261.786	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENYELENGGARA AN JALAN	Persentase Peningkatan Panjang Jalan Kota dalam Kondisi Mantap	Persen		1,03%	26.424.491.10 0	1,06%	28.924.491.10 0	1,09%	28.924.491.10 0	3,18%	28.924.491.10 0	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Peningkatan rumah tangga yang dapat mengakses IPAL	Persen		1,92%	7.624.966.020	2,02%	7.624.966.020	2,12%	7.624.966.020	2,12%	7.624.966.020	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Peningkatan Rumah Tangga pengguna air bersih/air minum	Persen		1,82%	8.157.162.744	1,91%	8.157.162.744	2,01%	8.157.162.744	2,01%	8.157.162.744	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase pengembangan perumahan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Persen		100	1.527.505.200	100	1.527.505.200	100	1.527.505.200	100	1.527.505.200	Perumahan dan Kawasan Permukiman
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Presentase Penurunan Kawasan Kumuh	Persen		100	1.149.967.820	100	1.149.967.820	100	1.149.967.820	100	1.149.967.820	Perumahan dan Kawasan Permukiman
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persen	75	80	2.514.620.600	80	2.514.620.600	80	2.514.620.600	80	2.514.620.600	Sosial

PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase meningkatnya lembaga yang memenuhi kriteria layak anak	Persen		54,76	215.856.200	54,76	215.856.200	54,76	215.856.200	54,76	215.856.200	
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase penurunan tindak kekerasan terhadap anak	Persen		9%	943.619.100	0,09	943.619.100	0,09	943.619.100	0,09	943.619.100	
	Persentase pengaduan tindak kekerasan terhadap Anak yang dilayani			100		100		100		100		
Meningkatnya kualitas pendidikan	Indeks SPM Pendidikan	Angka (rentang 1-100)	52,76	54,76	49.367.365.85 0,00	57,76	49.367.365.85 0,00	60,76	49.367.365.85 0,00	60,76	49.367.365.85 0,00	
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Cakupan pembinaan dan peningkatan kualitas pendidik dan kependidikan	Persen	75	75	2.417.604.153 ,00	75	2.465.956.236 ,06	75	2.515.275.360 ,78	75	2.515.275.360 ,78	Pendidikan
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pemuda yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas daya saing kepemudaan	Persen	8,5	10	927.943.600	10	927.943.600	10	927.943.600	10	927.943.600	Pemuda dan Olahraga

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Pengembangan Kapasitas Daya saing Keolahragaan yang diakomodir	Persen		10	5.085.579.000	10	5.085.579.000	10	5.085.579.000	10	5.085.579.000	Pemuda dan Olahraga
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah/Lembaga yang Memiliki Izin Penyelenggaraan Pendidikan	Persen		100	0	100	0	100	0	0	0	Pendidikan
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase sekolah penerima buku mutan lokal	Persen		100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	Pendidikan
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase sekolah yang mendapat akreditasi A	Persen	100	100	48.354.298.250,00	100	48.354.298.250,00	100	48.354.298.250,00	100	48.354.298.250,00	Pendidikan
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase meningkatnya lembaga yang memenuhi kriteria layak anak	Persen		54,76	215.856.200	54,76	215.856.200	54,76	215.856.200	54,76	215.856.200	Pendidikan
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Presentase perpustakaan yang representatif	Persen	100	100	529.086.800,00	100	529.086.800,00	100	529.086.800,00	100	529.086.800,00	Perpustakaan
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Presentase jumlah arsip yang diolah	Persen		100	268.124.600	100	268.124.600	100	268.124.600	100	268.124.600	Kearsipan

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Presentasi perlindungan arsip	Persen		100	13.528.000	100	13.528.000	100	13.528.000	100	13.528.000	Kearsipan
Meningkatnya standar hidup masyarakat	PDRB per kapita harga berlaku	Rp. Juta /Tahun	23,4	23,63	23.982.692.105,00	23,75	23.982.692.105,00	23,87	23.982.692.105,00	23,87	23.982.692.105,00	
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO	Persentase Usaha mikro yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha	Persen	2,00	2,58	414.225.200,00	2,58	414.225.200,00	2,58	414.225.200,00	2,58	414.225.200,00	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Meningkatnya Produktifitas UKM	Persen	100	100		100		100		100		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru	Persen		26,3	275.108.300	26,3	275.108.300	26,3	275.108.300	26,3	275.108.300	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas standarisasi dan sertifikasi	Persen		6,41		6,41		6,41		6,41		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

	Persentase Usaha Mikro yang diberikan Dukungan Fasilitas Pemasaran	Persen		1,06		1,06		1,06		1,06		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Persentase Usaha Mikro yang bermitra	Persen		25,11		25,11		25,11		25,11		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase penanganan terhadap DPI	Persen		52	218.100.500	52	218.100.500	52	218.100.500	52	218.100.500	Pertanian
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja terlatih	Persen		30	498.316.100	30	498.316.100	30	548.316.100	30	548.316.100	Tenaga Kerja
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Peningkatan Angka Konsumsi Ikan (AKI) Per Kapita Per Tahun	Persen		6,35	598.074.800	8,28	598.074.800	8,76	598.074.800	8,76	598.074.800	Perikanan
	Persentase Peningkatan Produk Olahan Hasil Perikanan	Persen		3,30		3,40		3,50		3,50		Perikanan
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan kelas kelompok tani	Persen		22	218.044.245	22	218.044.245	22	218.044.245	22	218.044.245	Pertanian

PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase partisipasi perempuan dalam berorganisasi	Persen		32	3.290.168.526	32	3.290.168.526	32	3.290.168.526	32	3.290.168.526	Pemberdayaan Perempuan
	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan dan swasta			47,02		47,02		47,02		47,02		Pemberdayaan Perempuan
	Persentase peningkatan bidang usaha ekonomi perempuan			57,4		57,4		57,4		57,4		Pemberdayaan Perempuan
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase meningkatnya lembaga yang memenuhi kriteria layak anak	Persen		54,76	215.856.200	54,76	215.856.200	54,76	215.856.200	54,76	215.856.200	Pendidikan
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Pelaku Usaha Perdagangan yang menjual Barang Kadarluasa	Persen		80%	390.537.584	0,8	390.537.584	0,8	390.537.584	0,8	390.537.584	Perdagangan

	Rata-rata ketersediaan Barang Pokok dan barang penting lainnya Tahun	Persen		10000%		100		100		100		Perdagangan
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan	Persen		100	2.306.861.700	100	2.306.861.700	100	2.306.861.700	100	2.306.861.700	
Terwujudnya ketahanan pangan masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	70,25	71,25	5.466.407.099,00	72,25	5.466.407.099,00	73,25	5.466.407.099,00	73,25	5.466.407.099,00	
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Jumlah ketersediaan energi	kka/kap/hari	3.198	3.198	663.743.000,00	3.198	663.743.000,00	3.198	663.743.000,00	3.198	663.743.000,00	Ketahanan Pangan
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan ternak yang terinfeksi PHMS (%)	Persen		14%	254.958.524,00	0,14	254.958.524,00	0,14	254.958.524,00	0,14	254.958.524,00	Pertanian
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase penyediaan sarana pertanian sesuai anjuran	Persen	100	100	3.076.238.875,00	100	3.076.238.875,00	100	3.076.238.875,00	100	3.076.238.875,00	Pertanian

PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase penanganan terhadap DPI	Persen		52	218.100.500	52	218.100.500	52	218.100.500	52	218.100.500	Pertanian
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Peningkatan Panjang Jalan Kota dalam Kondisi Mantap	Persen		1,03%	26.424.491.100	1,06%	28.924.491.100	1,09%	28.924.491.100	3,18%	28.924.491.100	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Capaian Sarana dan Prasarana Pasar yang dibangun/ direvitalisasi/ Direhabilitasi	Persen		42	90.650.000	42	90.650.000	42	90.650.000	42	90.650.000	Perdagangan
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Peningkatan Angka Konsumsi Ikan (AKI) Per Kapita Per Tahun	Persen		6,35	598.074.800	8,28	598.074.800	8,76	598.074.800	8,76	598.074.800	Perikanan
	Persentase Peningkatan Produk Olahan Hasil Perikanan	Persen		3,30		3,40		3,50		3,50		Perikanan

PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Kelompok Industri Kecil Menengah yang mendapat Bantuan Hibah	Persen		100	1.467.765.250	100	1.467.765.250	100	1.467.765.250	100	1.467.765.250	Perindustrian
	Persentase Ketersediaan Dokumentasi Rencana Pembangunan Industri	Persen		100		100		100		100		Perindustrian
Meningkatnya pemberdayaan gender dan pemuda	Indeks pemberdayaan gender (IDG)	Angka	70,16	70,23	9.303.691.126	70,27	9.303.691.126	70,3	9.303.691.126	70,3	9.303.691.126	Lintas Urusan
	Jumlah Pemuda berprestasi tingkat nasional	Orang	10	12	9.303.691.126	13	9.303.691.126	14	9.303.691.126	14	9.303.691.126	
PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase partisipasi perempuan dalam berorganisasi	Persen	29,94	32	3.290.168.526,00	32	3.290.168.526,00	32	3.290.168.526,00	32	3.290.168.526,00	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan dan swasta	Persen	35,00	47,02		47,02		47,02		47,02		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

	Persentase peningkatan bidang usaha ekonomi perempuan	Persen	55,00	57,4		57,4		57,4		57,4		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Penurunan Angka TFR	Persen		2,2	368.134.000	2,2	368.134.000	2,2	368.134.000	2,2	368.134.000	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	Persen	75	80	96.450.000	82	96.450.000	85	96.450.000	85	96.450.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Pengembangan Kapasitas Daya saing Keolahragaan yang diakomodir	Persen	8,5	10	5.085.579.000	10	5.085.579.000	10	5.085.579.000	10	5.085.579.000	Dinas Pendidikan , Pemuda dan Olahraga
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pemuda yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas daya saing kepemudaan	Persen	8,5	10	927.943.600	10	927.943.600	10	927.943.600	10	927.943.600	Dinas Pendidikan , Pemuda dan Olahraga

PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase penurunan tindak kekerasan terhadap anak	Persen		9%	943.619.100	0,09	943.619.100	0,09	943.619.100	0,09	943.619.100	Pemberday aan Perempuan dan Perlindung an Anak
	Persentase pengaduan tindak kekerasan terhadap Anak yang dilayani			100		100		100		100		Pemberday aan Perempuan dan Perlindung an Anak
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase penurunan tindak kekerasan terhadap perempuan	Persen		10%	336.044.600	0,1	336.044.600	0,1	336.044.600	0,1	336.044.600	Pemberday aan Perempuan dan Perlindung an Anak
	Persentase pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan yang dilayani			100		100		100		100		Pemberday aan Perempuan dan Perlindung an Anak
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penurunan Angka kesakitan	Persen	35	37	45.435.939.62 2,00	38	45.435.939.62 2,00	40	45.435.939.62 2,00	40	45.435.939.62 2,00	Kesehatan
	Penurunan Angka Kematian Bayi	KH	2/100	2/100		2/100		2/100		2/100		

Tujuan 2.1. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan kesejahteraan masyarakat	Indeks Gini	Angka	0,429	0,370-0,400	97.599.046.330,00	0,370-0,400	98.599.046.330,00	0,370-0,400	102.749.046.330,00	0,370-0,400	102.749.046.330,00	
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	%	2,7	5,0-6,0	13.251.237.336,00	5,0-6,0	13.251.237.336,00	5,0-6,0	13.251.237.336,00	5,0-6,0	13.251.237.336,00	
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Capaian Sarana dan Prasarana Pasar yang dibangun/direvitalisasi/Direhabilitasi	Persen		42	90.650.000	42	90.650.000	42	90.650.000	42	90.650.000	Perdagangan
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Kelompok Industri Kecil Menengah yang mendapat Bantuan Hibah	Persen	100	100	1.467.765.250,00	100	1.467.765.250,00	100	1.467.765.250,00	100	1.467.765.250,00	Perindustrian
	Meningkatnya Pembangunan Industri Kota Bima	Persen	128,6	100		100		100		100		
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Cakupan ketersediaan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal	Persen		0	0	0	0	0	0	0	0	Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha yang Berinvestasi	Persen	95,67	100	35.023.200	100	35.023.200	100	35.023.200	100	35.023.200	Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB)	Persen	98,4	100	160.183.500	100	160.183.500	100	160.183.500	100	160.183.500	Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan	Persen		100	2.306.861.700	100	2.306.861.700	100	2.306.861.700	100	2.306.861.700	
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase pengembangan ODTW	Persen		32	12.089.086.47 ₉	32	12.089.086.47 ₉	32	12.089.086.47 ₉	32	12.089.086.47 ₉	
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	Persen		32	1.292.787.900	32	1.292.787.900	32	1.292.787.900	32	1.292.787.900	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Kepariwisata an yang terlibat	Persen		32,5	367.588.400	32,5	367.588.400	32,5	367.588.400	32,5	367.588.400	

PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Porsentase cagar budaya yang kembangkan	Persen			625.737.110		625.737.110		625.737.110		625.737.110	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Peningkatan Rumah Tangga pengguna air bersih/air minum	Persen		1,82%	8.157.162.744	1,91%	8.157.162.744	2,01%	8.157.162.744	2,01%	8.157.162.744	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase panjang jaringan drainase dalam kondisi baik	Persen		4,00%	7.567.261.786	4,20%	7.567.261.786	4,50%	7.567.261.786	4,50%	7.567.261.786	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Peningkatan Panjang Jalan Kota dalam Kondisi Mantap	Persen		1,03%	26.424.491.100	1,06%	28.924.491.100	1,09%	28.924.491.100	3,18%	28.924.491.100	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Sistem jaringan		3 Sistem jaringan	10.032.741.094	3 Sistem jaringan	11.032.741.094	3 Sistem jaringan	15.032.741.094	9 Sistem jaringan	15.032.741.094	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase menurunnya angka kecelakaan transportasi darat	Persen	90	100	8.838.166.786,00	100	8.838.166.786,00	100	8.838.166.786,00	100	8.838.166.786,00	Perhubungan
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Sampah yang tertangani	Persen		70	7.009.003.705	70	7.009.003.705	70	7.009.003.705	70	7.009.003.705	Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang Telah Melaporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Persen	99,72	100	459.100.000	100	459.100.000	100	459.100.000	100	459.100.000	Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penyelesaian keamanan, ketenteraman dan ketertiban (K3)	Persen		100	1.852.724.500	100	1.852.724.500	100	1.852.724.500	100	1.852.724.500	Trantibum
Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,73	3,55	617.213.000,00	3,38	617.213.000,00	3,21	667.213.000,00	3,21	667.213.000,00	
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja terlatih	Persen	27,00	30	498.316.100,00	30	498.316.100,00	30	548.316.100,00	30	548.316.100,00	Tenaga Kerja
	Angka produktivitas Tenaga Kerja	Rupiah	43,72	44 juta		44 juta		44 juta		44 juta		

PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Kesesuaian antara rencana tenaga kerja dengan realisasi	Persen	93,75	95	21.249.000,00	95	21.249.000,00	95	21.249.000,00	95	21.249.000,00	Tenaga Kerja
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan Tingkat kepuasan pelayanan ketenagakerjaan	Persen		98	111.165.900	98	111.165.900	98	161.165.900	98	161.165.900	
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang melaksanakan K3	Persen	89,6	25	97.647.900,00	89,6	97.647.900,00	89,6	97.647.900,00	89,6	97.647.900,00	Tenaga Kerja
	Persentase peserta BPJS Ketenagakerjaan	Persen	78,57			78,57		78,57		78,57		
	Persentase Perusahaan yang melaksanakan Upah Minimum Kota (UMK)	Persen	60,8	75		60,8		60,8		60,8		
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Cakupan ketersediaan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal	Persen		0	0	0	0	0	0	0	0	Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha yang Berinvestasi	Persen	95,67	100	35.023.200	100	35.023.200	100	35.023.200	100	35.023.200	Penanama n Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB)	Persen	98,4	100	160.183.500	100	160.183.500	100	160.183.500	100	160.183.500	Penanama n Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO	Persentase Usaha mikro yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha	Persen	2,00	2,58	414.225.200,0 0	2,58	414.225.200,0 0	2,58	414.225.200,0 0	2,58	414.225.200,0 0	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Meningkatnya Produktifitas UKM	Persen	100	100		100		100		100		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru	Persen		26,3	275.108.300	26,3	275.108.300	26,3	275.108.300	26,3	275.108.300	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

	Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas standarisasi dan sertifikasi	Persen		6,41		6,41		6,41		6,41		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Persentase Usaha Mikro yang diberikan Dukungan Fasilitas Pemasaran	Persen		1,06		1,06		1,06		1,06		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Persentase Usaha Mikro yang bermitra	Persen		25,11		25,11		25,11		25,11		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Kelompok Industri Kecil Menengah yang mendapat Bantuan Hibah	Persen		100	1.467.765.250	100	1.467.765.250	100	1.467.765.250	100	1.467.765.250	Perindustrian
	Persentase Ketersediaan Dokumentasi Rencana Pembangunan Industri	Persen		100		100		100		100		
Menurunnya tingkat kemiskinan	Persentase penduduk miskin	Persen	8,8	7,94	83.730.595.994,00	7,54	84.730.595.994,00	7,17	88.830.595.994,00	7,17	88.830.595.994,00	

PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PMKS yang terlatih	Persen	82,06	83	96.450.000,00	84	96.450.000,00	85	96.450.000,00	85	96.450.000,00	Sosial
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi	Persen	193	60	1.262.704.802,00	60	1.262.704.802,00	60	1.262.704.802,00	60	1.262.704.802,00	Sosial
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase anak-anak terlantar yang ditangani Persentase PMKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persen	185	80	2.514.620.600,00	80	2.514.620.600,00	80	2.514.620.600,00	80	2.514.620.600,00	Sosial
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Penurunan Keluarga PRA SEJAHTERA DAN SEJAHTERA I	Persen		7,1	1.166.797.000	7,1	1.166.797.000	7,1	1.166.797.000	7,1	1.166.797.000	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kelompok masyarakat yang di berdayakan	Persen		100	21.363.400.398	100	21.363.400.398	100	21.363.400.398	100	3.465.431.500	Kecamatan
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Penurunan Angka TFR	Persen		2,2	368.134.000	2,2	368.134.000	2,2	368.134.000	2,2	368.134.000	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja terlatih	Persen	27,00	30	498.316.100,0 0	30	498.316.100,0 0	30	548.316.100,0 0	30	548.316.100,0 0	Tenaga Kerja
	Angka produktivitas Tenaga Kerja	Rupiah	43,72	44 juta		44 juta		44 juta		44 juta		
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan Tingkat kepuasan pelayanan ketenagakerjaan	Persen		98	111.165.900	98	111.165.900	98	161.165.900	98	161.165.900	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Peningkatan Rumah Tangga pengguna air bersih/air minum	Persen		1,82%	8.157.162.744	1,91%	8.157.162.744	2,01%	8.157.162.744	2,01%	8.157.162.744	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tujuan 3.1. Meningkatkan Tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	55,6	60,14	14.299.991.51 3,00	62,55	14.299.991.51 3,00	65,05	14.799.991.51 3,00	65,05	14.799.991.51 3,00	
Meningkatnya Tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	55,6	60,14	14.299.991.51 3,00	62,55	14.299.991.51 3,00	65,05	14.799.991.51 3,00	65,05	14.799.991.51 3,00	

PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase capaian kinerja pengendalian perencanaan pembangunan daerah (hasil Monev yang menjadi dasar perencanaan pembangunan)	Persen	122,34	100	717.645.000,00	100	717.645.000,00	100	817.645.000,00	100	817.645.000,00	Perencanaan
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Index Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	97	98,5	1.785.213.800,00	100	1.785.213.800,00	100	1.885.213.800,00	100	1.885.213.800,00	Perencanaan
	Persentase program dan kegiatan yang diakomodir dalam RKPD	Persen	100	100		100		100		100		Perencanaan
	Persentase renja perangkat daerah yang diakomodir dalam RKPD	Persen	100	100		100		100		100		Perencanaan

PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Level Hasil Quality Assurance Perwakilan BPKP Provinsi NTB Terhadap Maturitas SPIP Kota Bima	Level	85,71*	86	181.386.300,0 0	87	181.386.300,0 0	88	181.386.300,0 0	88	181.386.300,0 0	Pengawas an
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Pelaksanaan Penyelengga raan Pemerintah an dan Kesejahteraa n Rakyat	Persen		100	18.035.128.89 0	100	18.035.128.89 0	100	18.035.128.89 0	100	18.035.128.89 0	Penunjang Pemerintah an (Setda)
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase PD yang mengelola keuangan dengan baik	Persen		100	6.773.739.909	100	6.773.739.909	100	6.873.739.909	100	6.873.739.909	Keuangan
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Meningkatny a tingkat Kepuasan ASN terhadap pelayanan Administrasi Kepegawaia n	Persen		100	1.211.827.600	100	1.211.827.600	100	1.211.827.600	100	1.211.827.600	Kepegawai an

PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase PD yang Menyelesaikan Rekon Aset Tepat Waktu dan Terupdate	Persen	100	100	923.574.000,00	100	923.574.000,00	100	1.023.574.000,00	100	1.023.574.000,00	Keuangan
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan	Persen		100	2.306.861.700	100	2.306.861.700	100	2.306.861.700	100	2.306.861.700	Penunjang Pemerintahan (Setda)
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase peningkatan ASN yang telah memiliki sertifikat sesuai ketentuan	Persen	46,46	65	1.286.616.900,00	65	1.286.616.900,00	65	1.286.616.900,00	65	1.286.616.900,00	Kepegawaian
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen		100	155.306.044,529	100	155.306.044,529	100	155.366.044,529	100	155.366.044,529	Semua Urusan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Menurunnya Temuan APIP dan BPK	Persen	35	40	879.368.900,00	40	879.368.900,00	40	879.368.900,00	40	879.368.900,00	Pengawasan
	Persentase OPD yang tidak mendapat temuan bersifat materil	persen	57,14	57,14		57,14		57,14		57,14		Pengawasan

	Persentase tindak lanjut penyelesaian temuan hasil pemeriksaan APIP dan BPK	persen	93,37	93,37		93,37		93,37		93,37		Pengawasan
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Rancangan Peraturan Daerah dan Naskah Akademik	Persen		100	10.663.460.000	100	10.663.460.000	100	10.763.460.000	100	10.763.460.000	Penunjang Pemerintahan (Sekretariat DPRD)
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB)	Persen	98,4	100	160.183.500,00	100	160.183.500,00	100	160.183.500,00	100	160.183.500,00	
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	Persen		97	126.470.100	97	126.470.100	97	126.470.100	97	126.470.100	Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah persentasi Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen		99,72	374.815.400	99,72	374.815.400	99,72	374.815.400	99,72	374.815.400	Kependudukan dan Pencatatan Sipil

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penurunan Angka kesakitan	Persen	35	37	45.435.939.62 2,00	38	45.435.939.62 2,00	40	45.435.939.62 2,00	40	45.435.939.62 2,00	Kesehatan
	Penurunan Angka Kematian Bayi	KH	2/100	2/100		2/100		2/100		2/100		
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang memenuhi Standar	persen	91	91	50.918.000,00	91	50.918.000,00	91	50.918.000,00	91	50.918.000,00	Kesehatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase menurunnya angka kecelakaan transportasi darat	Persen	90	100	8.838.166.786 ,00	100	8.838.166.786 ,00	100	8.838.166.786 ,00	100	8.838.166.786 ,00	Perhubung an
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Predikat PLID Kota Bima	Nilai	B	A	3.054.062.000	A	3.054.062.000	A	3.054.062.000	A	3.054.062.000	Komunikasi , Informatik a dan Statistik
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Masyarakat yang memperoleh pelayanan publik	Persen		50	238.913.300	55	238.913.300	60	238.913.300	100	44.691.300	Kecamatan
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase kebermanfaa tan inovasi daerah	Persen		50	1.668.770.000	50	1.668.770.000	50	1.668.770.000	50	1.668.770.000	Riset dan Pengemba ngan

PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya Penerapan E-Government dan pelayanan TIK	Persen	100	100	1.995.071.200	100	1.995.071.200	100	1.995.071.200	100	1.995.071.200	Komunikasi, Informatika dan Statistik
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Presentase jumlah arsip yang diolah	Persen		100	268.124.600	100	268.124.600	100	268.124.600	100	268.124.600	Kearsipan
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Presentasi perlindungan arsip	Persen		100	13.528.000	100	13.528.000	100	13.528.000	100	13.528.000	Kearsipan
Tujuan 4.1. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman	Persentase kawasan permukiman layak huni	Persen	68,84	72,28	53.382.832.606,00	75,9	55.882.832.606,00	79,69	55.982.832.606,00	79,69	55.982.832.606,00	
Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman	Indeks kualitas lingkungan hidup	Angka	56,08	61,83	5.606.814.220,00	64,92	5.606.814.220,00	68,17	5.606.814.220,00	68,17	5.606.814.220,00	
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air/Udara	Nilai	28,75/87,33	29,75/87,83	403.054.095,00	30,75/88,33	403.054.095,00	31,75/88,83	403.054.095,00	31,75/88,83	403.054.095,00	
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Luas RTH Publik	Persen	11,30	11,64	4.142.449.675,00	11,64	4.142.449.675,00	11,64	4.142.449.675,00	11,64	4.142.449.675,00	

PROGRAM PENYELENGGARA AN PENATAAN RUANG	Persentase ketersediaan dokumen rencana tata ruang sesuai ketentuan	Persen	97,73	97,73	658.256.355,0 0	97,73	658.256.355,0 0	97,73	658.256.355,0 0	97,73	658.256.355,0 0	
PROGRAM PENYELENGGARA AN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase menurunnya angka kecelakaan transportasi darat	Persen	90	100	8.838.166.786 ,00	100	8.838.166.786 ,00	100	8.838.166.786 ,00	100	8.838.166.786 ,00	Perhubung an
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kelompok masyarakat yang di berdayakan	Persen		100	21.363.400.39 8	100	21.363.400.39 8	100	21.363.400.39 8	100	3.465.431.500	Kecamatan
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Peningkatan Luas wilayah Pertanian yang terlayani irigasi Teknis	Persen	92,78%	1,50%	4.731.797.000	1,65%	4.731.797.000	1,86%	4.831.797.000	#VALUE!	4.831.797.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/K ota	Sistem jaringan		3 Sistem jaringan	10.032.741.09 4	3 Sistem jaringan	11.032.741.09 4	3 Sistem jaringan	15.032.741.09 4	9 Sistem jaringan	15.032.741.09 4	

PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Sampah yang tertangani	Persen		70	7.009.003.705	70	7.009.003.705	70	7.009.003.705	70	7.009.003.705	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Masyarakat yang memperoleh pelayanan publik	Persen		100	14.669.032.338	100	14.669.032.338	100	14.669.032.338	100	44.691.300	Kecamatan
Meningkatnya kemandapan infrastruktur	Indeks Infrastruktur	Angka	78,26	79,04	46.656.657.186,00	79,83	49.156.657.186,00	80,63	49.256.657.186,00	80,63	49.256.657.186,00	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Peningkatan Rumah Tangga pengguna air bersih/air minum	Persen		1,82%	8.157.162.744	1,91%	8.157.162.744	2,01%	8.157.162.744	2,01%	8.157.162.744	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan Kota dalam kondisi mantap	Persen	18,33	2,43	26.424.491.100,00	2,43	28.924.491.100,00	2,43	28.924.491.100,00	2,43	28.924.491.100,00	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase panjang jaringan drainase dalam kondisi baik	Persen		4,00%	7.567.261.786	4,20%	7.567.261.786	4,50%	7.567.261.786	4,50%	7.567.261.786	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air/Udara	Nilai	28,75/87,33	29,75/87,83	403.054.095,00	30,75/88,33	403.054.095,00	31,75/88,83	403.054.095,00	31,75/88,83	403.054.095,00	Lingkungan Hidup

PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase pengembangan perumahan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Persen		100	1.527.505.200	100	1.527.505.200	100	1.527.505.200	100	1.527.505.200	Perumahan dan Kawasan Permukiman
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Peningkatan Jumlah Rumah dan permukiman Layak Huni	Persen		0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase menurunnya angka kecelakaan transportasi darat	Persen	90	100	8.838.166.786,00	100	8.838.166.786,00	100	8.838.166.786,00	100	8.838.166.786,00	Perhubungan
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Predikat PLID Kota Bima	Nilai	B	A	3.054.062.000	A	3.054.062.000	A	3.054.062.000	A	3.054.062.000	Komunikasi, Informatika dan Statistik
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase pemenuhan sistem kesiapsiagaan dan pencegahan terhadap bencana	Persen	83,40	85	2.080.635.100,00	85	2.080.635.100,00	85	2.080.635.100,00	85	2.080.635.100,00	

PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGA N, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Luas Wilayah yang terlayani kegiatan Pencegahan, Penanggulan gan, Penyelamata n Kebakaran Dan Penyelamata n Non Kebakaran	Persen	97	100	979.478.700,0 0	100	979.478.700,0 0	100	979.478.700,0 0	100	979.478.700,0 0	
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	persentase luas wilayah pertanian yang terlayani irigasi teknis	Persen	22,74	73,01	4.731.797.000 ,00	73,01	4.731.797.000 ,00	73,01	4.831.797.000 ,00	73,01	4.831.797.000 ,00	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kelompok masyarakat yang di berdayakan	Persen		10000,0 0%	21.363.400.39 8	10000,0 0%	21.363.400.39 8	10000,0 0%	21.363.400.39 8	10000,0 0%	3.465.431.500	Kecamatan
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatny a Penerapan E-Government dan pelayanan TIK	Persen	100	100	1.995.071.200	100	1.995.071.200	100	1.995.071.200	100	1.995.071.200	Komunikasi , Informatik a dan Statistik
Meningkatnya kapasitas daerah terhadap bencana dan perubahan iklim	Indeks ketahanan daerah	Angka	0,74	0,75	1.119.361.200 ,00	0,78	1.119.361.200 ,00	0,81	1.119.361.200 ,00	0,81	1.119.361.200 ,00	

PROGRAM PENANGGULANGA N BENCANA	Persentase pemenuhan sistem kesiapsiagaan dan pencegahan terhadap bencana	Persen	83,40	85	2.080.635.100 ,00	85	2.080.635.100 ,00	85	2.080.635.100 ,00	85	2.080.635.100 ,00	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapatka n Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persen	75	80	2.514.620.600	80	2.514.620.600	80	2.514.620.600	80	2.514.620.600	
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGA N, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Luas Wilayah yang terlayani kegiatan Pencegahan, Penanggulan gan, Penyelamata n Kebakaran Dan Penyelamata n Non Kebakaran	Persen	97	100	979.478.700,0 0	100	979.478.700,0 0	100	979.478.700,0 0	100	979.478.700,0 0	
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penyelesaian keamanan, ketentraman dan ketertiban (K3)	Persen		100	1.852.724.500	100	1.852.724.500	100	1.852.724.500	100	1.852.724.500	Trantibum

PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi sosial	Persen	55	60	1.262.704.802	60	1.262.704.802	60	1.262.704.802	60	1.262.704.802	
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase pengembangan perumahan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Persen		100	1.527.505.200	100	1.527.505.200	100	1.527.505.200	100	1.527.505.200	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kelompok masyarakat yang di berdayakan	Persen		100	21.363.400.39 8,00	100	21.363.400.39 8,00	100	21.363.400.39 8,00	100	3.465.431.500 ,00	Kecamatan
Meningkatnya keamanan dan ketertiban daerah	Indeks Rasa Aman	Angka (skala 1-100)	87,6	88,48	26.769.783.10 8,00	88,92	26.769.783.10 8,00	89,37	26.769.783.10 8,00	89,37	26.769.783.10 8,00	
Meningkatnya keamanan dan ketertiban	Indeks Rasa Aman	Angka (skala 1-100)	87,6	88,48	26.769.783.10 8,00	88,92	26.769.783.10 8,00	89,37	26.769.783.10 8,00	89,37	26.769.783.10 8,00	
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penyelesaian keamanan, ketentraman dan ketertiban (K3)	Persen	92.50	100	1.852.724.500 ,00	100	1.852.724.500 ,00	100	1.852.724.500 ,00	100	1.852.724.500 ,00	

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATA N	Persentase Kelompok Sasaran Pemberdaya an dan pengawasan Organisasi Kemasyarak atan	Persen	92,48	80	181.184.600,0 0	80	181.184.600,0 0	80	181.184.600,0 0	80	181.184.600,0 0	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Pengembang an Kapasitas Daya saing Keolahragaa n yang diakomodir	Persen	8,5	10	5.085.579.000	10	5.085.579.000	10	5.085.579.000	10	5.085.579.000	Dinas Pendidikan , Pemuda dan Olahraga
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pemuda yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas daya saing kepemudaan	Persen	8,5	10	927.943.600	10	927.943.600	10	927.943.600	10	927.943.600	Dinas Pendidikan , Pemuda dan Olahraga
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraa n Sosial (PSKS) yang diberdayaka n	Persen	75	80	96.450.000	82	96.450.000	85	96.450.000	85	96.450.000	
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase penurunan tindak kekerasan terhadap perempuan	Persen		10%	336.044.600	0,1	336.044.600	0,1	336.044.600	0,1	336.044.600	

	Persentase pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan yang dilayani			100		100		100		100		
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase penurunan tindak kekerasan terhadap anak	Persen		0,09	943.619.100	0,09	943.619.100	0,09	943.619.100	0,09	943.619.100	
	Persentase pengaduan tindak kekerasan terhadap Anak yang dilayani			100		100		100		100		
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persen		100	18.035.128.890	100	18.035.128.890	100	18.035.128.890	100	18.035.128.890	Penunjang Pemerintahan (Setda)
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Kamtibmas yang tertangani	Persen		100	190.604.800	100	190.604.800	100	190.604.800	100	190.604.800	

Sumber: Hasil Analisis

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat indikasi rencana program prioritas Pemerintah Daerah, untuk memenuhi layanan Perangkat Daerah dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah. Selain itu, bab ini memuat target program dan pagu indikatifnya. Pagu indikatif merupakan proyeksi kebutuhan pendanaan dalam bentuk jumlah dana yang tersedia untuk menyusun program tahunan. Jumlah dana yang tersedia mengacu pada bab III RPD ini, terutama mengenai kerangka pendanaan yang terdiri dari kapasitas riil keuangan dan belanja daerah.

Pelaksanaan pembangunan daerah tidak terlepas dari kerangka pendanaan yang diproyeksikan saat

ini. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab III, proyeksi APBD tahun 2024 hingga 2026 menuai tantangan besar, terutama diakibatkan oleh pemulihan pertumbuhan ekonomi pasca pandemi Covid-19 dan ancaman resesi global. Diharapkan proyeksi pendapatan daerah dapat tercapai melalui upaya sebagai berikut:

1. Peningkatan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak;
2. Penguatan data objek pajak;
3. Peningkatan *punishment* dan *reward* terhadap subjek pajak;
4. Optimalisasi objek retribusi daerah;
5. Peningkatan koordinasi dengan perangkat daerah penghasil;
6. Peningkatan pelayanan pajak berbasis digital;
7. Peningkatan kontribusi BUMD terhadap PAD; serta
8. Optimalisasi aset-aset daerah yang potensial dalam mendukung investasi daerah.

Adapun kerangka pendanaan dan program pembangunan daerah Kota Bima tahun 2024-2026 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Bima Tahun 2024-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintah an dan Program Prioritas Pembangun an	Indikator Program	Satuan	Kon disi Kine rja Awal (202 2)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir Periode RPD		Urusan Penangg ung- jawab
					2024		2025		2026				
					Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	URUSAN PEMERINTA HAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					453.956.36 4.480		463.956.36 4.480		472.416.36 4.480		472.416.36 4.480	
01.01	URUSAN PEMERINTA HAN BIDANG PENDIDIKA N					203.860.34 2.779		203.860.34 2.779		203.920.34 2.779		203.920.34 2.779	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen		100	155.306.044 .529	100	155.306.044 .529	100	155.366.044 .529	100	155.366.044 .529	Dinas Pendidikan , Pemuda dan Olahraga

01.01.0 2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka kelulusan siswa sesuai jenjang	Persen		100	48.354.298. 250	100	48.354.298. 250	100	48.354.298. 250	100	48.354.298. 250	Dinas Pendidikan , Pemuda dan Olahraga
01.01.0 3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase sekolah penerima buku mutan lokal	Persen		100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	Dinas Pendidikan , Pemuda dan Olahraga
01.01.0 4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan , Pemuda dan Olahraga
01.01.0 5	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah/Lembaga yang Memiliki Izin Penyelenggaraan Pendidikan	Persen		100	0	100	0	100	0	0	0	Dinas Pendidikan , Pemuda dan Olahraga
01.01.0 6	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA				0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan , Pemuda dan Olahraga
01.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					126.777.50 7.297		126.777.50 7.297		126.837.50 7.297		126.837.50 7.297	

01.02.01	DINAS KESEHATAN					102.872.54 5.054		102.872.54 5.054		102.872.54 5.054		102.872.54 5.054	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	56.533.651.132	100	56.533.651.132	100	56.533.651.132	100	56.533.651.132	Dinas Kesehatan
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase saryankes yang berAKredita si minimal madya	Persen			45.435.939.622		45.435.939.622		45.435.939.622		45.435.939.622	Dinas Kesehatan
		Jumlah puskesmas yang obat esensial, Vaksin, BMHP dan alat kesehatan terpenuhi											
01.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang sesuai standar	Persen			50.918.000		50.918.000		50.918.000		50.918.000	Dinas Kesehatan

01.02.0 4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana Sediaan farmasi Alat Kesehatan dan Makanan Minuman produk rumah tangga yang sesuai standar	Persen			425.516.300		425.516.300		425.516.300		425.516.300	Dinas Kesehatan
01.02.0 5	PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM yang dibina	Persen			426.520.000		426.520.000		426.520.000		426.520.000	Dinas Kesehatan
1.02.0 1.01	RSUD					23.904.962 .243		23.904.962 .243		23.964.962 .243		23.964.962 .243	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	9.578.328.2 99	100	9.578.328.2 99	100	9.638.328.2 99	100	9.638.328.2 99	RSUD

01.02.0 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					14.326.633. 944		14.326.633. 944		14.326.633. 944		14.326.633. 944	RSUD
01.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					86.989.930 .838		96.989.930 .838		105.149.93 0.838		105.149.93 0.838	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen		100	10.305.419. 955	100	10.305.419. 955	100	10.365.419. 955	100	10.365.419. 955	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
01.03.0 2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Peningkatan Luas wilayah Pertanian yang terlayani irigasi Teknis	Persen	92,78 %	1,50 %	4.731.797.0 00	1,65 %	4.731.797.0 00	1,86 %	4.831.797.0 00	97,79 %	4.831.797.0 00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

01.03.0 3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Peningkatan Rumah Tangga pengguna air bersih/air minum	Persen		1,82 %	8.157.162.744	1,91 %	8.157.162.744	2,01 %	8.157.162.744	2,01 %	8.157.162.744	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
01.03.0 4	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Sampah yang tertangani	Persen		0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
01.03.0 5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Peningkatan rumah tangga yang dapat mengakses IPAL	Persen		1,92 %	7.624.966.020	2,02 %	7.624.966.020	2,12 %	7.624.966.020	2,12 %	7.624.966.020	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
01.03.0 6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase panjang jaringan drainase dalam kondisi baik	Persen		4,00 %	7.567.261.786	4,20 %	7.567.261.786	4,50 %	7.567.261.786	4,50 %	7.567.261.786	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

01.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	Sistem jaringan		3 Sistem jaringan	10.032.741.094	3 Sistem jaringan	11.032.741.094	3 Sistem jaringan	15.032.741.094	9 Sistem jaringan	15.032.741.094	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
01.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Dokumen		200 Dokumen	290.840.000	200 Dokumen	290.840.000	200 Dokumen	290.840.000	600 Dokumen	290.840.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

01.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN NYA	Jumlah Penataan dan pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Sistem jaringan		3 Sistem jaringan	10.951.301.184	3 Sistem jaringan	17.451.301.184	3 Sistem jaringan	21.451.301.184	9 Sistem jaringan	21.451.301.184	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
01.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Peningkatan Panjang Jalan Kota dalam Kondisi Mantap	Persen		1,03 %	26.424.491.100	1,06 %	28.924.491.100	1,09 %	28.924.491.100	3,18 %	28.924.491.100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

01.03.1 1	PROGRAM PENGEMBANG AN JASA KONSTRUKSI	Jumlah Pembinaan Jasa Konstruksi Komponen Jasa Konstruksi Sesuai Standar	Badan/O rang		20 Badan dan 40 Orang	245.693.600	20 Badan dan 40 Orang	245.693.600	20 Badan dan 40 Orang	245.693.600	20 Badan dan 40 Orang	245.693.600	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
01.03.1 2	PROGRAM PENYELENGG ARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Peningkata n luas ruang yang sesuai peruntukan nya	Persen		3,30 %	658.256.355	3,40 %	658.256.355	3,50 %	658.256.355	10,20 %	658.256.355	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
01.04	URUSAN PEMERINTA HAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIM AN					6.589.730. 780		6.589.730. 780		6.649.730. 780		6.649.730. 780	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen		100	3.912.257.7 60	100	3.912.257.7 60	100	3.972.257.7 60	100	3.972.257.7 60	Dinas Perumaha n dan Kawasan Permukima n

01.04.0 2	PROGRAM PENGEMBANG AN PERUMAHAN	Persentase pengemban g an perumahan layak huni bagi masyarakat berpenghas ilan rendah	Persen		100	1.527.505.2 00	100	1.527.505.2 00	100	1.527.505.2 00	100	1.527.505.2 00	Dinas Perumaha n dan Kawasan Permukima n
01.04.0 3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Presentase Penurunan Kawasan Kumuh	Persen		100	1.149.967.8 20	100	1.149.967.8 20	100	1.149.967.8 20	100	1.149.967.8 20	Dinas Perumaha n dan Kawasan Permukima n
01.04.0 4	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Peningkata n Jumlah Rumah dan permukima n Layak Huni	Persen		0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumaha n dan Kawasan Permukima n
01.04.0 5	PROGRAM PENINGKATA N PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Peningkata n PSU permukima n yang layak	Persen		0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumaha n dan Kawasan Permukima n

01.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase pelayanan sertifikasi perumahan dan permukiman	Persen		0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
01.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					21.094.173 .133		21.094.173 .133		21.154.173 .133		21.154.173 .133	

X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen		100	16.181.334. 833	100	16.181.334. 833	100	16.241.334. 833	100	16.241.334. 833	Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggul angan Bencana Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelama tan
01.05.0 2	PROGRAM PENINGKATA N KETENTERAM AN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penyelesaia n keamanan, ketentrama n dan ketertiban (K3)	Persen		100	1.852.724.5 00	100	1.852.724.5 00	100	1.852.724.5 00	100	1.852.724.5 00	Satuan Polisi Pamong Praja
01.05.0 3	PROGRAM PENANGGULA NGAN BENCANA	Persentase pemenuhan sistem kesiapsiaga an dan pencegahan terhadap bencana	Persen		85	2.080.635.1 00	85	2.080.635.1 00	85	2.080.635.1 00	85	2.080.635.1 00	Badan Penanggul angan Bencana Daerah

01.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN / PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN, KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Luas Wilayah yang terlayani kegiatan Pencegahan / Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persen		100	979.478.700	100	979.478.700	100	979.478.700	100	979.478.700	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
01.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					8.644.679.653		8.644.679.653		8.704.679.653		8.704.679.653	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	4.631.021.751	100	4.631.021.751	100	4.691.021.751	100	4.691.021.751	Dinas Sosial

01.06.0 2	PROGRAM PEMBERDAYA AN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahtera an Sosial (PSKS) yang diberdayaka n	Persen	75	80	96.450.000	82	96.450.000	85	96.450.000	85	96.450.000	Dinas Sosial
01.06.0 3	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN yang tertangani	Persen		0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial
01.06.0 4	PROGRAM REHABILITAS I SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapatk an Pelayanan Rehabilitasi sosial	Persen	55	60	1.262.704.8 02	60	1.262.704.8 02	60	1.262.704.8 02	60	1.262.704.8 02	Dinas Sosial
01.06.0 5	PROGRAM PERLINDUNG AN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapatk an Perlindunga n dan Jaminan Sosial	Persen	75	80	2.514.620.6 00	80	2.514.620.6 00	80	2.514.620.6 00	80	2.514.620.6 00	Dinas Sosial

01.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Kampung Siaga Bencana yang terbentuk	Persen	100	100	139.882.500	100	139.882.500	100	139.882.500	100	139.882.500	Dinas Sosial
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					113.884.483.976		114.180.082.392		114.710.082.392		114.710.082.392	
02.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					4.115.553.666		4.115.553.666		4.275.553.666		4.275.553.666	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen		100	3.387.174.766	100	3.387.174.766	100	3.447.174.766	100	3.447.174.766	Dinas Tenaga Kerja

02.07.0 2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Kesesuaian antara rencana tenaga kerja dengan realisasi	Persen		95	21.249.000	95	21.249.000	95	21.249.000	95	21.249.000	Dinas Tenaga Kerja
02.07.0 3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja terlatih	Persen		30	498.316.100	30	498.316.100	30	548.316.100	30	548.316.100	Dinas Tenaga Kerja
		Angka produktivitas Tenaga Kerja	Rupiah		40 juta		40 juta		40 juta		40 juta		
02.07.0 4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan Tingkat kepuasan pelayanan ketenagakerjaan	Persen		98	111.165.900	98	111.165.900	98	161.165.900	98	161.165.900	Dinas Tenaga Kerja
02.07.0 5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang melaksanakan K3	Persen		25	97.647.900	25	97.647.900	25	97.647.900	25	97.647.900	Dinas Tenaga Kerja

		Persentase peserta BPJS Ketenagakerjaan	Persen										
		Persentase Perusahaan yang melaksanakan Upah Minimum Kota (UMK)	Persen		75		75		75		75		
02.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					8.217.293.433		8.262.891.849		8.282.891.849		8.282.891.849	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen		100	3.384.178.007	100	3.429.776.423	100	3.449.776.423	100	3.449.776.423	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

02.08.0 2	PROGRAM PENGARUSUT AMAAN GENDER DAN PEMBERDAYA AN PEREMPUAN	Persentase partisipasi perempuan dalam berorganisa si	Persen		32	3.290.168.5 26	32	3.290.168.5 26	32	3.290.168.5 26	32	3.290.168.5 26	Dinas Pemberday aan Perempua n dan Perlindung an Anak
		Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah an dan swasta			47,02		47,02		47,02		47,02		
		Persentase peningkata n bidang usaha ekonomi perempuan			57,4		57,4		57,4		57,4		
02.08.0 3	PROGRAM PERLINDUNG AN PEREMPUAN	Persentase penurunan tindak kekerasan terhadap perempuan	Persen		0,1	336.044.600	0,1	336.044.600	0,1	336.044.600	0,1	336.044.600	Dinas Pemberday aan Perempua n dan Perlindung an Anak
		Persentase pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan yang dilayani			100		100		100		100		

02.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					0		0		0		0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
02.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase pemenuhan data gender dan anak	Persen		100	47.427.000	100	47.427.000	100	47.427.000	100	47.427.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
02.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase meningkatnya lembaga yang memenuhi kriteria layak anak	Persen		54,76	215.856.200	54,76	215.856.200	54,76	215.856.200	54,76	215.856.200	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
02.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase penurunan tindak kekerasan terhadap anak	Persen		0,09	943.619.100	0,09	943.619.100	0,09	943.619.100	0,09	943.619.100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Persentase pengaduan tindak kekerasan terhadap Anak yang dilayani			100		100		100		100		

02.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					4.115.422.182		4.165.422.182		4.175.422.182		4.175.422.182	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen		100	3.282.144.382	100	3.332.144.382	100	3.342.144.382	100	3.342.144.382	Dinas Ketahanan pangan
02.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase ketersediaan seluruh prasarana kemandirian pangan	Persen		0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan pangan
02.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Jumlah ketersediaan energi	Jumlah		2692	663.743.000	2692	663.743.000	2692	663.743.000	2692	663.743.000	Dinas Ketahanan pangan
		Jumlah ketersediaan protein	Jumlah		67,68		67,68		67,68		67,68		

02.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase kelurahan rawan/ rentan pangan yang ditangani	Persen		20	75.987.200	20	75.987.200	20	75.987.200	20	75.987.200	Dinas Ketahanan pangan
02.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase bahan pangan yang lolos uji	Persen		90	93.547.600	90	93.547.600	90	93.547.600	90	93.547.600	Dinas Ketahanan pangan
02.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					3.016.147.985		3.016.147.985		3.016.147.985		3.016.147.985	
02.10.02	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Presentase penyelesaian administrasi izin lokasi	Persen		0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
02.10.03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM		Persen		0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

02.10.0 4	PROGRAM PENYELESAIA N SENGKETA TANAH GARAPAN	Presentase penangana n sengketa, konflik dan konflik yang termediasi	Persen		0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumaha n dan Kawasan Permukima n
02.10.0 5	PROGRAM PENYELESAIA N GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNA N	Presentase Pengadaan Tanah Berdasarka n Prioritas Pembangun an	Persen		100	2.489.890.5 85	100	2.489.890.5 85	100	2.489.890.5 85	100	2.489.890.5 85	Dinas Perumaha n dan Kawasan Permukima n
02.10.0 6	PROGRAM REDISTRIBUS I TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase fasilitasi penangana n obyek redistribusi tanah, tanah absente dan tanah yang mendapatk an ganti rugi	Persen		0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumaha n dan Kawasan Permukima n
02.10.0 7	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Terinventari sirnya tanah ulayat	Persen		0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumaha n dan Kawasan Permukima n

02.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Jumlah sertifikat aset tanah pemerintah yang diterbitkan	Persen		100	526.257.400	100	526.257.400	100	526.257.400	100	526.257.400	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
02.10.09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH				0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
02.10.10	PROGRAM PENATAGUNAN TANAH				0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
02.10.13	PROGRAM SURVEI, PENGUKURAN DAN PEMETAAN				0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
02.10.15	PROGRAM PENGATURAN PERTANAHAN DI WILAYAH PESISIR, LAUT DAN PULAU				0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

02.10.1 7	PROGRAM PENANGANAN KONFLIK, SENGKETA DAN PERKARA PERTANAHAN	persentase penyelesaia n konflik, sengketa dan perkara pertanahan	Persen		0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumaha n dan Kawasan Permukima n
02.11	URUSAN PEMERINTA HAN BIDANG LINGKUNGA N HIDUP					23.594.355 .371		23.594.355 .371		23.654.355 .371		23.654.355 .371	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen		100	10.837.539. 671	100	10.837.539. 671	100	10.897.539. 671	100	10.897.539. 671	Dinas Lingkunga n Hidup
02.11.0 2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase meningkatn ya jumlah pokmas sadar lingkungan	Persen		40	396.383.225	40	396.383.225	40	396.383.225	40	396.383.225	Dinas Lingkunga n Hidup
02.11.0 3	PROGRAM PENGENDALI AN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air dan Udara	Nilai		104'4 4/ 125	403.054.095	104'4 4/ 125	403.054.095	104'4 4/ 125	403.054.095	104'4 4/ 125	403.054.095	Dinas Lingkunga n Hidup

02.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persen		11,64	4.142.449.675	11,64	4.142.449.675	11,64	4.142.449.675	11,64	4.142.449.675	Dinas Lingkungan Hidup
02.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun	Persen			0		0		0		0	Dinas Lingkungan Hidup
02.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase meningkatkan jumlah izin lingkungan yang diawasi	Persen		75	660.438.000	75	660.438.000	75	660.438.000	75	660.438.000	Dinas Lingkungan Hidup

02.11.0 7	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase masyarakat hukum adat yang di bina	Persen		0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
02.11.0 8	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase meningkatn ya jumlah pokmas sadar lingkungan	Persen		100	56.935.000	100	56.935.000	100	56.935.000	100	56.935.000	Dinas Lingkungan Hidup
02.11.0 9	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Meningkatn ya Penghargaa n di bidang Lingkungan hidup	Persen		100	53.108.000	100	53.108.000	100	53.108.000	100	53.108.000	Dinas Lingkungan Hidup

02.11.1 0	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase menurunnya pengaduan lingkungan hidup	Persen		60	35.444.000	60	35.444.000	60	35.444.000	60	35.444.000	Dinas Lingkunga n Hidup
02.11.1 1	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Sampah yang tertangani	Persen		70	7.009.003.7 05	70	7.009.003.7 05	70	7.009.003.7 05	70	7.009.003.7 05	Dinas Lingkunga n Hidup
02.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					6.499.683. 492		6.549.683. 492		6.559.683. 492		6.559.683. 492	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen		100	5.639.641.1 92	100	5.689.641.1 92	100	5.699.641.1 92	100	5.699.641.1 92	Dinas Kependud ukan dan Pencatatan Sipil
02.12.0 2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Penyajian data kependud ukan skala Provinsi dalam 1 Tahun	Persen		85	342.948.800	85	342.948.800	85	342.948.800	85	342.948.800	Dinas Kependud ukan dan Pencatatan Sipil

02.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	Persen		97	126.470.100	97	126.470.100	97	126.470.100	97	126.470.100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
02.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah persentasi Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen		99,72	374.815.400	99,72	374.815.400	99,72	374.815.400	99,72	374.815.400	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
02.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan	Dokumen		3	15.808.000	3	15.808.000	3	15.808.000	3	15.808.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
02.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					10.238.111.504		10.288.111.504		10.298.111.504		10.298.111.504	

X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen		100	5.524.543.5 04	100	5.574.543.5 04	100	5.584.543.5 04	100	5.584.543.5 04	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
02.14.0 2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Penurunan Angka TFR	Persen		2,2	368.134.000	2,2	368.134.000	2,2	368.134.000	2,2	368.134.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
02.14.0 3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Penurunan (UNMET NEED)	Persen		8,84	3.178.637.0 00	8,84	3.178.637.0 00	8,84	3.178.637.0 00	8,84	3.178.637.0 00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase Peningkatan Angka Pervalensi Pengguna mCPR (Modern Contraceptive Prevalance Rate)	Persen		68		68		68		68		

		Persentase Penurunan ASFR (Age Specific Fertility Rate)	Persen		38/1.000		38/1.000		38/1.000		38/1.000		
02.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Penurunan Keluarga PRA SEJAHTERA DAN SEJAHTERA I	Persen		7,1	1.166.797.000	7,1	1.166.797.000	7,1	1.166.797.000	7,1	1.166.797.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
02.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					13.423.591.179		13.423.591.179		13.483.591.179		13.483.591.179	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen		100	4.531.919.393	100	4.531.919.393	100	4.591.919.393	100	4.591.919.393	Dinas Perhubungan
02.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase menurunnya angka kecelakaan transportasi darat	Persen		100	8.838.166.786	100	8.838.166.786	100	8.838.166.786	100	8.838.166.786	Dinas Perhubungan

02.15.0 3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Presentase penataan dan pengelolaan pelayaran	Persen		90	53.505.000	90	53.505.000	90	53.505.000	90	53.505.000	Dinas Perhubung an
02.15.0 4	PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGA N	Persentase sarana dan prasarana transportasi udara yang telah sesuai standar	Persen		0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perhubung an
02.15.0 5	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETA APIAN	Persentase sarana dan prasarana transportasi perkereta api yang telah sesuai standar	Persen		0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perhubung an
02.16	URUSAN PEMERINTA HAN BIDANG KOMUNIKA SI DAN INFORMATI KA					11.731.953 .315		11.731.953 .315		11.791.953 .315		11.791.953 .315	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	6.682.820.1 15	100	6.682.820.1 15	100	6.742.820.1 15	100	6.742.820.1 15	Dinas Komunikas i, Informatik a dan Statistik

02.16.0 2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Predikat PLID Kota Bima	Nilai	B	A	3.054.062.0 00	A	3.054.062.0 00	A	3.054.062.0 00	A	3.054.062.0 00	Dinas Komunikas i, Informatik a dan Statistik
02.16.0 3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIK A	Meningkatn ya Penerapan E- Goverment dan pelayanan TIK	Persen	100	100	1.995.071.2 00	100	1.995.071.2 00	100	1.995.071.2 00	100	1.995.071.2 00	Dinas Komunikas i, Informatik a dan Statistik
02.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					7.020.635. 608		7.020.635. 608		7.080.635. 608		7.080.635. 608	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Presentase penataan dan pengelolaan pelayaran	Persen		100	6.052.698.3 08	100	6.052.698.3 08	100	6.112.698.3 08	100	6.112.698.3 08	Dinas Koperasi, Perindustri an dan Perdagang an
02.17.0 2	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM				0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Koperasi, Perindustri an dan Perdagang an

02.17.0 3	PROGRAM PENGAWASA N DAN PEMERIKSAA N KOPERASI	Pesentase Pengawasa n Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi	Persen		89,71	33.025.000	89,71	33.025.000	89,71	33.025.000	89,71	33.025.000	Dinas Koperasi, Perindustri an dan Perdagang an
		Pesentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatany a	Persen		25,94		25,94		25,94		25,94		
02.17.0 4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Koperasi, Perindustri an dan Perdagang an
02.17.0 5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASI AN	Persentase Koperasi Yang Mengikuti Pelatihan.	Persen		69,32	211.663.800	69,32	211.663.800	69,32	211.663.800	69,32	211.663.800	Dinas Koperasi, Perindustri an dan Perdagang an
		Persentase Keanggotaan Koperasi yang mengikuti Pelatihan.	Persen		1,42		1,42		1,42		1,42		

		Pesentase Koperasi Yang RAT.	Persen		44,7		44,7		44,7		44,7		
02.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pendampingan kelembagaan dan usaha	Persen		24,47	33.915.000	24,47	33.915.000	24,47	33.915.000	24,47	33.915.000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
		Persentase Koperasi yang diberikan dukungan fasilitas Kemitraan	Persen		3,06		3,06		3,06		3,06		
		Persentase koperasi yang telah diterbitkan sertifikat Nomor Induk Koperasi	Persen		76,46		76,46		76,46		76,46		

02.17.0 7	PROGRAM PEMBERDAYA AN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha mikro yang diberikan pendampin gan kelembagaa n dan usaha	Persen		2,58	414.225.200	2,58	414.225.200	2,58	414.225.200	2,58	414.225.200	Dinas Koperasi, Perindustri an dan Perdagang an
		Persentase Usaha Mikro yang diinput ke dalam Sistem Data Online (ODS)	Persen		23,87		23,87		23,87		23,87		
02.17.0 8	PROGRAM PENGEMBANG AN UMKM	Persentase Pertumbuh an Wirausaha Baru	Persen		26,3	275.108.300	26,3	275.108.300	26,3	275.108.300	26,3	275.108.300	Dinas Koperasi, Perindustri an dan Perdagang an
		Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas standarisasi dan sertifikasi	Persen		6,41		6,41		6,41		6,41		

		Persentase Usaha Mikro yang diberikan Dukungan Fasilitas Pemasaran	Persen		1,06		1,06		1,06		1,06		
		Persentase Usaha Mikro yang bermitra	Persen		25,11		25,11		25,11		25,11		
02.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					4.218.363.818		4.268.363.818		4.278.363.818		4.278.363.818	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen		100	3.522.215.718	100	3.572.215.718	100	3.582.215.718	100	3.582.215.718	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
02.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Cakupan ketersediaan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal	Persen		0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

02.18.0 3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkata n Jumlah Pelaku Usaha yang Berinvestasi	Persen	95,67	100	35.023.200	100	35.023.200	100	35.023.200	100	35.023.200	Dinas Penanama n Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
02.18.0 4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkata n Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatk an Nomor Induk Berusaha (NIB)	Persen	98,4	100	160.183.500	100	160.183.500	100	160.183.500	100	160.183.500	Dinas Penanama n Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
02.18.0 5	PROGRAM PENGENDALI AN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang Telah Melaporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Persen	99,72	100	459.100.000	100	459.100.000	100	459.100.000	100	459.100.000	Dinas Penanama n Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

02.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Persen	100	100	41.841.400	100	41.841.400	100	41.841.400	100	41.841.400	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
02.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					6.013.522.600		6.013.522.600		6.013.522.600		6.013.522.600	

02.19.0 2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pemuda yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas daya saing kepemudaan	Persen		10	927.943.600	10	927.943.600	10	927.943.600	10	927.943.600	Dinas Pendidikan , Pemuda dan Olahraga
02.19.0 3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Pengembangan Kapasitas Daya saing Keolahragaan yang diakomodir	Persen		10	5.085.579.000	10	5.085.579.000	10	5.085.579.000	10	5.085.579.000	Dinas Pendidikan , Pemuda dan Olahraga
02.19.0 4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan , Pemuda dan Olahraga
02.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					248.290.000		248.290.000		248.290.000		248.290.000	
02.20.0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Capaian Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Kota Bima	Skor	0,55	1,83	248.290.000	1,83	248.290.000	1,83	248.290.000	1,83	248.290.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

02.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					231.640.100		231.640.100		231.640.100		231.640.100	
02.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAAN INFORMASI	Persentase Perangkat daerah yang menggunakan jaringan komunikasi sandi	Persen	10	25	231.640.100	30	231.640.100	35	231.640.100	35	231.640.100	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
02.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					5.185.108.904		5.185.108.904		5.245.108.904		5.245.108.904	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen		100	4.354.730.104	100	4.354.730.104	100	4.414.730.104	100	4.414.730.104	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
02.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase cagar budaya yang berkembang	Persen			625.737.110		625.737.110		625.737.110		625.737.110	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

02.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Porsentase kesenian tradisional yang dikembangkan	Persen		0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
02.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Porsentase pembinaan sejarah yang dilakukan	Persen		0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
02.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase pengelolaan cagar budaya	Persen			204.641.690		204.641.690		204.641.690		204.641.690	Sekretariat Daerah
02.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Porsentase pengelolaan musium	Persen		0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
02.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					5.733.158.219		5.783.158.219		5.793.158.219		5.793.158.219	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen		100	5.204.071.419	100	5.254.071.419	100	5.264.071.419	100	5.264.071.419	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

02.23.0 2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKA AN	Presentase perpustaka n yang representati f	Persen		80	529.086.800	80	529.086.800	80	529.086.800	80	529.086.800	Dinas Perpustaka an dan Arsip Daerah
02.23.0 3	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Nilai Minat Baca	Nilai		0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perpustaka an dan Arsip Daerah
02.24	URUSAN PEMERINTA HAN BIDANG KEARSIPAN					281.652.60 0		281.652.60 0		281.652.60 0		281.652.60 0	
02.24.0 2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Presentase jumlah arsip yang diolah	Persen		100	268.124.600	100	268.124.600	100	268.124.600	100	268.124.600	Dinas Perpustaka an dan Arsip Daerah
02.24.0 3	PROGRAM PERLINDUNG AN DAN PENYELAMAT AN ARSIP	Presentasi perlindunga n arsip	Persen		100	13.528.000	100	13.528.000	100	13.528.000	100	13.528.000	Dinas Perpustaka an dan Arsip Daerah
02.24.0 4	PROGRAM PERIZINAN PENGUNAAN ARSIP				0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perpustaka an dan Arsip Daerah
3	URUSAN PEMERINTA HAN PILIHAN					38.179.152 .831		38.179.152 .831		38.299.152 .831		38.299.152 .831	

03.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					5.184.486.421		5.184.486.421		5.244.486.421		5.244.486.421	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen		100	3.789.006.921	100	3.789.006.921	100	3.849.006.921	100	3.849.006.921	Dinas Kelautan dan Perikanan
03.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Persen		2,01	268.607.600	3,02	268.607.600	4,03	268.607.600	4,03	268.607.600	Dinas Kelautan dan Perikanan
03.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Persen		1,55	528.797.100	1,60	528.797.100	1,65	528.797.100	1,65	528.797.100	Dinas Kelautan dan Perikanan
03.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kelautan dan Perikanan

03.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Peningkatan Angka Konsumsi Ikan (AKI) Per Kapita Per Tahun	Persen		6,35	598.074.800	8,28	598.074.800	8,76	598.074.800	8,76	598.074.800	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Persentase Peningkatan Produk Olahan Hasil Perikanan	Persen		3,30		3,40		3,50		3,50		
03.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					13.749.462.779		13.749.462.779		13.749.462.779		13.749.462.779	
03.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase pengembangan ODTW	Persen		32	12.089.086.479	32	12.089.086.479	32	12.089.086.479	32	12.089.086.479	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
03.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	Persen		32	1.292.787.900	32	1.292.787.900	32	1.292.787.900	32	1.292.787.900	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

03.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	Persen		0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
03.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Kepariwisataaan yang terlibat	Persen		32,5	367.588.400	32,5	367.588.400	32,5	367.588.400	32,5	367.588.400	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
03.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					16.451.375.497		16.451.375.497		16.511.375.497		16.511.375.497	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen		100	12.595.428.553	100	12.595.428.553	100	12.655.428.553	100	12.655.428.553	Dinas Pertanian

03.27.0 2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANG AN SARANA PERTANIAN	Persentase penyediaan sarana pertanian sesuai anjuan	Persen		100	3.076.238.8 75	100	3.076.238.8 75	100	3.076.238.8 75	100	3.076.238.8 75	Dinas Pertanian
03.27.0 3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANG AN PRASARANA PERTANIAN	Persentase peningkata n pemanfaata n prasarana dan sarana pertanian dalam kondisi baik (%)	Persen		62	40.368.800	62	40.368.800	62	40.368.800	62	40.368.800	Dinas Pertanian
03.27.0 4	PROGRAM PENGENDALI AN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan ternak yang terinfeksi PHMS (%)	Persen		0,14	254.958.524	0,14	254.958.524	0,14	254.958.524	0,14	254.958.524	Dinas Pertanian
03.27.0 5	PROGRAM PENGENDALI AN DAN PENANGGULA NGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase penangana n terhadap DPI	Persen		52	218.100.500	52	218.100.500	52	218.100.500	52	218.100.500	Dinas Pertanian

03.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Cakupan pelayanan proses rekomendasi teknis bidang pertanian	Persen		52	48.236.000	52	48.236.000	52	48.236.000	52	48.236.000	Dinas Pertanian
03.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan kelas kelompok tani	Persen		22	218.044.245	22	218.044.245	22	218.044.245	22	218.044.245	Dinas Pertanian
03.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					1.227.982.884		1.227.982.884		1.227.982.884		1.227.982.884	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Persen			536.047.300		536.047.300		536.047.300		536.047.300	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
03.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		Persen			0		0		0		0	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

03.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Capaian Sarana dan Prasarana Pasar yang dibangun/ direvitalisasi / Direhabilitasi	Persen		42	90.650.000	42	90.650.000	42	90.650.000	42	90.650.000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
03.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Pelaku Usaha Perdagangan yang menjual Barang Kadarluasa	Persen		0,8	390.537.584	0,8	390.537.584	0,8	390.537.584	0,8	390.537.584	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
		Rata-rata ketersediaan Barang Pokok dan barang penting lainnya Tahun	Persen		100		100		100		100		
03.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

03.30.0 6	PROGRAM STANDARDIS ASI DAN PERLINDUNG AN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkap annya (UTTP) yang di tera/tera ulang dalam tahun berjalan	Persen			210.748.000		210.748.000		210.748.000		210.748.000	Dinas Koperasi, Perindustri an dan Perdagang an
03.30.0 7	PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Koperasi, Perindustri an dan Perdagang an
03.31	URUSAN PEMERINTA HAN BIDANG PERINDUST RIAN					1.565.845. 250		1.565.845. 250		1.565.845. 250		1.565.845. 250	

03.31.0 2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Kelompok Industri Kecil Menengah yang mendapat Bantuan Hibah	Persen		100	1.467.765.2 50	100	1.467.765.2 50	100	1.467.765.2 50	100	1.467.765.2 50	Dinas Koperasi, Perindustri an dan Perdagang an
		Persentase Ketersedian Dokumenta si Rencana Pembangun an Industri	Persen		100		100		100		100		
03.31.0 3	PROGRAM PENGENDALI AN IZIN USAHA INDUSTRI		Persen			0		0		0		0	Dinas Koperasi, Perindustri an dan Perdagang an
03.31.0 4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Persen			98.080.000		98.080.000		98.080.000		98.080.000	Dinas Koperasi, Perindustri an dan Perdagang an
4	UNSUR PENDUKUN G URUSAN PEMERINTAHAN					76.926.113 .315		76.926.113 .315		77.366.113 .315		77.366.113 .315	
04.01	SEKRETARIAT DAERAH					47.955.203 .894		47.955.203 .894		48.195.203 .894		48.195.203 .894	

X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen		100	27.613.213.304	100	27.613.213.304	100	27.853.213.304	100	27.853.213.304	Sekretariat Daerah
04.01.02	PROGRAM PEMERINTAH AN DAN KESEJAHTERA AN RAKYAT	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persen		100	18.035.128.890	100	18.035.128.890	100	18.035.128.890	100	18.035.128.890	Sekretariat Daerah
04.01.03	PROGRAM PEREKONOMI AN DAN PEMBANGUNA N	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan	Persen		100	2.306.861.700	100	2.306.861.700	100	2.306.861.700	100	2.306.861.700	Sekretariat Daerah
04.02	SEKRETARI AT DPRD					28.970.909.421		28.970.909.421		29.170.909.421		29.170.909.421	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen		100	18.307.449.421	100	18.307.449.421	100	18.407.449.421	100	18.407.449.421	Sekretariat DPRD

04.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Rancangan Peraturan Daerah dan Naskah Akademik	Persen		100	10.663.460.000	100	10.663.460.000	100	10.763.460.000	100	10.763.460.000	Sekretariat DPRD
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					42.123.922.402		42.123.922.402		42.914.639.084		42.914.639.084	
05.01	PERENCANAAN					7.771.244.894		7.771.244.894		8.071.244.894		8.071.244.894	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen		100	5.268.386.094	100	5.268.386.094	100	5.368.386.094	100	5.368.386.094	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
05.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian capaian kinerja perangkat daerah	Persen		100	717.645.000	100	717.645.000	100	817.645.000	100	817.645.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

05.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen		77,97	1.785.213.800	77,97	1.785.213.800	77,97	1.885.213.800	77,97	1.885.213.800	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
05.02	KEUANGAN					21.510.225.734		21.510.225.734		21.880.942.416		21.880.942.416	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen		100	12.220.648.621	100	12.220.648.621	100	12.291.365.303	100	12.291.365.303	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
05.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase PD yang mengelola keuangan dengan baik	Persen		100	6.773.739.909	100	6.773.739.909	100	6.873.739.909	100	6.873.739.909	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
05.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase PD yang Menyelesaikan Rekon Aset Tepat Waktu dan Terupdate	Persen		100	923.574.000	100	923.574.000	100	1.023.574.000	100	1.023.574.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

05.02.0 4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah	Persen		100	1.592.263.2 04	100	1.592.263.2 04	100	1.692.263.2 04	100	1.692.263.2 04	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
05.03	KEPEGAWAIAN					5.990.681. 154		5.990.681. 154		6.050.681. 154		6.050.681. 154	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen		100	4.778.853.5 54	100	4.778.853.5 54	100	4.838.853.5 54	100	4.838.853.5 54	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
05.03.0 2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Meningkatnya tingkat Kepuasan ASN terhadap pelayanan Administrasi Kepegawaian	Persen		100	1.211.827.6 00	100	1.211.827.6 00	100	1.211.827.6 00	100	1.211.827.6 00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
05.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					1.286.616. 900		1.286.616. 900		1.286.616. 900		1.286.616. 900	

05.04.0 2	PROGRAM PENGEMBANG AN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase peningkata n ASN yang telah memiliki sertifikat sesuai ketentuan	Persen		65	1.286.616.9 00	65	1.286.616.9 00	65	1.286.616.9 00	65	1.286.616.9 00	Badan Kepegawai an dan Pengemba ngan Sumber Daya Manusia
05.05	PENELITIAN DAN PENGEMBA NGAN					5.565.153. 720		5.565.153. 720		5.625.153. 720		5.625.153. 720	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen		100	3.896.383.7 20	100	3.896.383.7 20	100	3.956.383.7 20	100	3.956.383.7 20	Badan Riset dan Inovasi Daerah
05.05.0 2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANG AN DAERAH	Persentase kebermanfa atan inovasi daerah	Persen		100	1.668.770.0 00	100	1.668.770.0 00	100	1.668.770.0 00	100	1.668.770.0 00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
6	PENGAWAS AN URUSAN PEMERINTA HAN					9.419.743. 518		9.419.743. 518		9.479.743. 518		9.479.743. 518	
06.01	INSPEKTOR AT DAERAH					9.419.743. 518		9.419.743. 518		9.479.743. 518		9.479.743. 518	

X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen		100	8.358.988.318	100	8.358.988.318	100	8.418.988.318	100	8.418.988.318	Inspektora t
06.01.02	PROGRAM PENYELENGG ARAAN PENGAWASA N	Persentase Menurunnya Temuan APIP dan BPK	Persen			879.368.900		879.368.900		879.368.900		879.368.900	Inspektora t
06.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPING AN DAN ASISTENSI	Persentase Laporan hasil rumusan kebijakan, hasil pendampin gan dan asistensi	Persen			181.386.300		181.386.300		181.386.300		181.386.300	Inspektora t
7	UNSUR KEWILAYAH AN					68.663.285.954		68.663.285.954		68.723.285.954		68.723.285.954	
07.01	KECAMATAN					68.663.285.954		68.663.285.954		68.723.285.954		68.723.285.954	
07.01.01	KECAMATAN RASANA E BARAT					10.678.071.267		10.678.071.267		10.688.071.267		10.688.071.267	

X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen		100	7.096.337.667	100	7.096.337.667	100	7.106.337.667	100	7.106.337.667	Kecamatan Rasanae Barat
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH AN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Masyarakat yang memperoleh pelayanan publik	Persen		100	44.691.300	100	44.691.300	100	44.691.300	100	44.691.300	Kecamatan Rasanae Barat
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kelompok masyarakat yang di berdayakan	Persen		100	3.465.431.500	100	3.465.431.500	100	3.465.431.500	100	3.465.431.500	Kecamatan Rasanae Barat
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Kamtibmas yang tertangani	Persen		100	71.610.800	100	71.610.800	100	71.610.800	100	71.610.800	Kecamatan Rasanae Barat
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH AN UMUM	Cakupan Pelayanan Pemerintah an umum	Persen		0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Rasanae Barat

07.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pelaksanaan dana kelurahan dengan hasil baik	Persen		0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Rasanae Barat
07.01.02	KECAMATAN RASANAETIMUR					12.215.921.192		12.215.921.192		12.225.921.192		12.225.921.192	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen		100	8.233.017.832	100	8.233.017.832	100	8.243.017.832	100	8.243.017.832	Kecamatan Rasanae Timur
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Masyarakat yang memperoleh pelayanan publik	Persen		100	46.520.000	100	46.520.000	100	46.520.000	100	46.520.000	Kecamatan Rasanae Timur
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kelompok masyarakat yang di berdayakan	Persen		100	3.918.383.360	100	3.918.383.360	100	3.918.383.360	100	3.918.383.360	Kecamatan Rasanae Timur

07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Kamtibmas yang tertangani	Persen		100	18.000.000	100	18.000.000	100	18.000.000	100	18.000.000	Kecamatan Rasanae Timur
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Pelayanan Pemerintahan umum	Persen		0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Rasanae Timur
07.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pelaksanaan dana kelurahan dengan hasil baik	Persen		0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Rasanae Timur
07.01.03	KECAMATAN ASAKOTA					11.400.450.686		11.400.450.686		11.410.450.686		11.410.450.686	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen		100	7.526.917.902	100	7.526.917.902	100	7.536.917.902	100	7.536.917.902	Kecamatan Asakota
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Masyarakat yang memperoleh pelayanan publik	Persen		95,21	43.736.000	95,21	43.736.000	95,21	43.736.000	95,21	43.736.000	Kecamatan Asakota

07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kelompok masyarakat yang di berdayakan	Persen		90,11	3.781.486.384	90,11	3.781.486.384	90,11	3.781.486.384	90,11	3.781.486.384	Kecamatan Asakota
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Kamtibmas yang tertangani	Persen		99,43	47.280.000	99,43	47.280.000	99,43	47.280.000	99,43	47.280.000	Kecamatan Asakota
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Pelayanan Pemerintahan umum	Persen		100	1.030.400	100	1.030.400	100	1.030.400	100	1.030.400	Kecamatan Asakota
07.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pelaksanaan dana kelurahan dengan hasil baik	Persen		0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Asakota
07.01.04	KECAMATAN MPUNDA					15.978.172.072		15.978.172.072		15.988.172.072		15.988.172.072	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen		100	11.304.130.477	100	11.304.130.477	100	11.314.130.477	100	11.314.130.477	Kecamatan Mpunda

07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Masyarakat yang memperoleh pelayanan publik	Persen		100	65.800.000	100	65.800.000	100	65.800.000	100	65.800.000	Kecamatan Mpunda
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kelompok masyarakat yang di berdayakan	Persen		100	4.569.767.595	100	4.569.767.595	100	4.569.767.595	100	4.569.767.595	Kecamatan Mpunda
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Kamtibmas yang tertangani	Persen		100	25.544.000	100	25.544.000	100	25.544.000	100	25.544.000	Kecamatan Mpunda
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Pelayanan Pemerintahan umum	Persen		100	12.930.000	100	12.930.000	100	12.930.000	100	12.930.000	Kecamatan Mpunda
07.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pelaksanaan dana kelurahan dengan hasil baik	Persen		0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Mpunda
07.01.05	KECAMATAN RABA					18.390.670.737		18.390.670.737		18.410.670.737		18.410.670.737	

X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen		100	12.696.003.178	100	12.696.003.178	100	12.716.003.178	100	12.716.003.178	Kecamatan Raba
07.01.02	PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAH AN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Masyarakat yang memperoleh pelayanan publik	Persen		75	38.166.000	75	38.166.000	75	38.166.000	75	38.166.000	Kecamatan Raba
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kelompok masyarakat yang di berdayakan	Persen		75	5.628.331.559	75	5.628.331.559	75	5.628.331.559	75	5.628.331.559	Kecamatan Raba
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMA N DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Kamtibmas yang tertangani	Persen		60	28.170.000	60	28.170.000	60	28.170.000	60	28.170.000	Kecamatan Raba
07.01.05	PROGRAM PENYELENGG ARAAN URUSAN PEMERINTAH AN UMUM	Cakupan Pelayanan Pemerintah an umum	Persen		0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Raba

07.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pelaksanaan dana kelurahan dengan hasil baik	Persen		0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Raba
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					8.011.521.484		8.061.521.484		8.071.521.484		8.071.521.484	
08.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					8.011.521.484		8.061.521.484		8.071.521.484		8.071.521.484	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen		100	3.220.644.384	100	3.270.644.384	100	3.280.644.384	100	3.280.644.384	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
08.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Kelompok sasaran yang mendapatkan Penguatan ideologi pancasila dan Karakter Bangsa	Persen	91,2	70	689.446.800	70	689.446.800	70	689.446.800	70	689.446.800	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

08.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Elemen Masyarakat yang mendapatkan Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persen		70	1.404.236.300	70	1.404.236.300	70	1.404.236.300	70	1.404.236.300	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
08.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Kelompok Sasaran Pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persen		80	181.184.600	80	181.184.600	80	181.184.600	80	181.184.600	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

08.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Kelompok Sasaran Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persen		80	121.937.200	80	121.937.200	80	121.937.200	80	121.937.200	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
08.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Konflik Sosial yang tertangani	Persen		70	2.394.072.200	70	2.394.072.200	70	2.394.072.200	70	2.394.072.200	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	JUMLAH					811.164.587.960		821.510.186.376		831.980.903.058		831.980.903.058	

Sumber: *Hasil Analisis*

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini menyajikan gambaran kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk satu periode ke depan. Gambaran kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berkaitan dengan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK). Selain itu, bab ini juga menyajikan IKU masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bima.

Target IKU yang sudah ditetapkan pada setiap tahapan mulai dari tahun 2024 sampai tahun 2026 merupakan target yang ditetapkan dengan menggunakan dua pendekatan. Pertama menggunakan pendekatan proyeksi statistik, yang kedua pendekatan terhadap situasi dan kondisi riil yang dihadapi daerah saat ini. Pertama, penetapan target dilakukan dengan pendekatan statistik dengan melihat kinerja dari setiap indikator selama 5 tahun ke belakang. Teknik yang digunakan antara lain *forecast linear*, *forecast Exponential Triple Smoothing* (ETS), serta menggunakan rata-rata pertumbuhan tiap indikator selama 5 tahun sebelumnya.

Kedua, menggunakan teknik pendekatan empiris dengan mempertimbangkan pendekatan kondisi yang dihadapi daerah. Hal tersebut menjadi pertimbangan dalam menentukan target IKU sehingga dapat dijabarkan target-target yang sifatnya pesimis, moderat, maupun optimis. Selain itu, pendekatan empiris juga memperhatikan aspek-aspek adanya ketidakpastian atau uncertainty akibat Pandemi Covid-19, kebijakan pusat dan daerah serta prioritas dalam pembangunan 3 (tiga) tahun ke depan.

8.1. Indikator Kinerja Utama Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah merupakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Daerah. IKU tersebut ditetapkan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk satu periode ke depan. Adapun IKU Daerah yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Bima Tahun 2024-2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian Tahun 2022	Target Kinerja Program Pada Tahun:			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
				2024	2025	2026	
1	Umur Harapan Hidup	Tahun	70,83	71,11	71,26	71,40	71,40
2	Indeks SPM Pendidikan	Angka (rentang 1-100)	52,76	54,76	57,76	60,76	60,76
3	PDRB per kapita harga berlaku	Rp. Juta /Tahun	23,4	23,63	23,75	23,87	23,87
4	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	70,25	71,25	72,25	73,25	73,25
5	Indeks pemberdayaan gender (IDG)	Angka	70,16	70,23	70,27	70,30	70,30
6	Jumlah Pemuda berprestasi tingkat nasional	Orang	10	12	13	14	14
7	Pertumbuhan Ekonomi	%	2,70	5,0-6,0	5,0-6,0	5,0-6,0	5,0-6,0
8	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,73	3,55	3,38	3,21	3,21
9	Persentase penduduk miskin	%	8,80	7,94	7,54	7,17	7,17
10	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	55,60	60,14	62,55	65,05	65,05
11	Indeks kualitas lingkungan hidup	Angka	56,08	61,83	64,92	68,17	68,17
12	Indeks Infrastruktur	Angka	78,26	79,04	79,83	80,63	80,63
13	Indeks ketahanan daerah	Angka	0,74	0,75	0,78	0,81	0,81
14	Indeks Rasa Aman	Angka (skala 1-100)	87,6	88,48	88,92	89,37	89,37

Sumber: Hasil Analisis

8.2. INDIKATOR KINERJA KUNCI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH(IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan ukuran capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. IKK ini diambil dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

IKK Kota Bima yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 8.2.
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

NO	BIDANG URUSAN/INDIKAT OR	Satuan	Capa ian Tahu n 2022	Target RPD			Kondisi Kinerja pada akhir RPD
				2024	2025	2026	
1	2		4	5	6	7	8
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi						
01.01	Pertumbuhan ekonomi	Persen	2,7	5,0-6,0	5,0-6,0	5,0-6,0	5,0-6,0
01.02	PDRB per kapita harga berlaku	Rp. Juta /Tahun	23,4	23,63	23,75	23,87	23,87
01.03	PPKS yang tertangani	Persen	82,06	84	85	86	86,00
01.04	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	3,73	3,55	3,38	3,21	3,21
01.05	Indeks Rasa Aman	Angka (skala 1-100)	87,6	88,48	88,92	89,37	89,37
2	Fokus Kesejahteraan Masyarakat						
02.01	Pendidikan						
02.01.01	Angka Partisipasi Sekolah (5-6)	Tahun	75	87	89	91	91
02.01.02	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-15	Tahun	99,7	100	100	100	100
02.01.03	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 Kesetaraan	Tahun	28,91	55,23	57,23	59,23	59,23
02.01.04	Kemampuan Literasi SD	Angka	50,87	53	55	57	57
03.01.05	Kemampuan Literasi SMP	Angka	35,3	49	51	53	53
04.01.06	Kemampuan Numerasi SD	Angka	44,13	46	48	50	50
05.01.07	Kemampuan Numerasi SMP	Persen	23,22	41	43	45	45
06.01.08	Proporsi Jumlah Kesatuan PAUD Terakreditasi Minimal B	Persen	28,35	40	42	44	44
07.01.09	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	Persen	81,59	83,69	84,69	85,69	85,69
08.01.10	Iklim Keamanan SD	Angka	73,29	80	81	83	83
09.01.11	Iklim Keamanan SMP	Angka	67,81	77	79	81	81
10.01.12	Iklim Kebinekaan SD	Angka	58,26	62	64	66	66
11.01.13	Iklim Kebinekaan SMP	Angka	64,23	72	74	76	76
12.01.14	Iklim Inklusivitas SD	Angka	64,52	72	74	76	76
13.01.15	Iklim Inklusivitas SMP	Angka	55,1	65	66,5	68,5	68,5
02.02	Kesehatan						
02.02.01	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	Persen	0,04 %	0,06%	0,09%	0,14%	0,14%

02.02.02	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	94,15	95,09	96,04	97	97
02.02.03	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	89,2	90,09	90,99	91,9	91,9
02.02.04	Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	91,15	92,06	92,98	93,91	93,91
02.02.05	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	91,3	92,21	93,14	94,07	94,07
02.02.06	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	90,99	91,9	92,82	93,75	93,75
02.02.07	persentase orang usia 15-19 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	67,18	67,85	68,53	69,22	69,22
02.02.08	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	75,68	76,44	77,2	77,97	77,97
02.02.09	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	75,68	76,44	77,2	77,97	77,97
02.02.10	persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100
02.02.11	persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	93,23	94,16	95,1	96,05	96,05
02.02.12	Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	62,55	63,18	63,81	64,45	64,45
02.02.13	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100
ASPEK PELAYANAN UMUM							
Layanan Urusan Wajib Dasar							

3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
03.01	Pekerjaan Umum:						
03.01.01	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	72,24 %	74,41%	76,64%	78,94%	78,94%
03.01.02	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Persen	84,94 %	87,49%	90,11%	92,82%	92,82%
03.01.04	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	89,99 %	92,69%	95,47%	98,33%	98,33%
03.01.05	Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota	Persen	74,77 %	77,01%	79,32%	81,70%	81,70%
03.02	Penataan Ruang:						
03.02.01	Rasio kepatuhan IMB kabupaten/kota (Kesesuaian fungsi bangunan dengan IMB)	Persen	69,96 %	72,06%	74,22%	76,45%	0,76
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman						
04.01	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	unit	42	43	45	46	46
04.02	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	unit	60	62	64	66	66
04.03	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	Persen	29,75	30,64	31,56	32,51	32,51
04.04	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persen	0,6	0,62	0,64	0,66	0,66

5	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat						
05.01	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	97,92	98,31	98,7	99,1	99,1
05.02	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	92	92,37	92,74	93,11	93,11
05.03	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	17.983	18.055	18.127	18.200	18.200
05.04	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	17.983	18.055	18.127	18.200	18.200
05.05	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	17.983	18.055	18.127	18.200	18.200
05.06	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100	100	100	100	100
05.07	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	15	14	14	13	13
6	Sosial						
06.01	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	Persen	82,06	84,00	85,00	86,00	86,00
06.02	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Persen	100	100	100	100	100
Layanan Urusan Wajib Non Dasar							
1	Tenaga Kerja						
01.01	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	95	95,95	96,91	97,88	97,88

01.02	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Persen	25	25,25	25,5	25,76	25,76
01.03	Tingkat produktivitas tenaga kerja	Rupiah	38.000.000	38.380.000	38.763.800	39.151.438	39.151.438,00
01.04	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	70	70,7	71,41	72,12	72,12
01.05	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Persen	98	98,2	98,39	98,59	98,59
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
02.01	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	1,13	1,14	1,15	1,16	1,16
02.02	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Persen	100	100	100	100	100
02.03	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Kasus/100.000 penduduk perempuan	5,5	4,4	3,5	2,8	2,8
3	Pangan						
03.01	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	Persen	72	72,72	73,45	74,18	74,18
03.02	Coefisien Stabilitas Pangan (Beras) ditingkat Konsumen	Persen	$\leq 10\%$	$\leq 10\%$	$\leq 10\%$	$\leq 10\%$	$\leq 10\%$
03.03	Persentase Pola Konsumsi dan Suplai Pangan	Persen	81,8	82,21	82,62	83,03	83,03
4	Lingkungan Hidup						
04.01	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	56,08	61,83	64,92	68,17	68,17
04.02	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten/Kota	Persen	71,54	72,97	74,43	75,92	75,92

5	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
05.01	Perekaman KTP elektronik	Persen	97	97,49	97,97	98,46	98,46
05.02	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	Persen	89,95	90,85	91,76	92,68	92,68
05.03	Kepemilikan akta kelahiran	Persen	95	95,95	96,91	97,88	97,88
05.04	Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Perangkat Daerah	20	21	22	23	23
6	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
06.01	TFR (Angka Kelahiran Total)	Angka	2,27	2,38	2,5	2,63	2,63
06.02	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate/mCPR)	Persen	81,37	82,59	83,83	85,09	85,09
06.03	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	Persen	8,6	8,17	7,76	7,37	7,37
7	Perhubungan						
07.01	Persentase fasilitas jalan dalam kondisi baik	Persen	70	75	80	85	85
07.02	Presentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang tersedia sesuai kebutuhan	Persen	75	75	80	80	80
8	Komunikasi dan Informatika						
08.01	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	85	88	94	100	100
08.02	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	75	76,65	80,2	85	85

08.03	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Persen	N/A	75	85	95	95
9	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah						
09.01	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	Persen	9,59	9,73	9,88	10,03	10,03
09.02	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	Persen	3,12	3,17	3,21	3,26	3,26
10	Penanaman Modal						
10.01	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	Persen	29,75	30,2	30,65	31,11	31,11
11	Kepemudaan dan Olahraga						
11.01	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	N/A	5	7	9	9
11.02	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	N/A	5	10	15	15
11.03	Peningkatan prestasi olahraga	Persen	11	11,55	12,13	12,73	12,73
12	Statistik						
12.01	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	80	84	88,2	92,61	92,61
12.02	persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	80	84	88,2	92,61	92,61
13	Persandian						
13.01	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	70	75	85	95	95

14	Kebudayaan						
14.01	Terlestarikannya cagar budaya	Persen	N/A	80	80	80	80
15	Perpustakaan						
15.01	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka (1-100)	N/A	45	45,9	46,82	46,82
16	Kearsipan						
16.01	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (pasal 40 dan pasal 59 UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan)	Persen	87,66	88,1	88,54	88,98	88,98
16.02	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persen	N/A	65	66,3	67,63	67,63
Layanan Urusan Pilihan							
1	Kelautan dan Perikanan						
01.01	Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Ton	3.112,50	3.174,75	3.238,25	3.303,01	3.303,01
2	Pariwisata						
02.01	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Persen	1,12	1,34	1,61	1,94	1,94
02.02	persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	Persen	-3,53	2	2,5	3	3
02.03	Tingkat hunian akomodasi	Persen	75%	76,50%	78,03%	79,59%	0,8
02.04	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Persen	6,68	6,81	6,95	7,09	7,09

02.05	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Persen	23,42	23,89	24,37	24,85	24,85
3	Pertanian						
03.01	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	ton/hektar	5,69	5,8	5,92	6,04	6,04
03.02	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04
4	Perdagangan						
04.01	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko swalayan)	Persen	94,12 %	94,78%	95,44%	96,11%	96,11%
5	Perindustrian						
05.01	Penambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/kota	Persen	59,29	59,71	60,12	60,54	60,54
05.02	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	95	95,67	96,33	97,01	97,01
05.03	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin perluasan usaha industri (IPUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	95	95,67	96,33	97,01	97,01
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan							
1	Kesekretariatan						
01.01	Rata-rata skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	86,89	87,39	87,89	88,39	88,39
2	Pengadaan						

02.01	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	7,55	8,55	9,55	10,55	10,55
02.02	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	26,14	27,00	27,50	28,00	28,00
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan							
1	Perencanaan dan Keuangan						
01.01	Rasio belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan	Persen	28,8	28,22	27,66	27,11	27,11
01.02	Rasio PAD terhadap APBD	Persen	8,99	9,02	9,04	9,07	9,07
01.03	Opini laporan keuangan	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
01.04	Indeks Kualitas Perencanaan Daerah	Angka	97	98,50	98,50	98,50	98,50
2	Pengawasan						
02.01	Maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
02.02	Peningkatan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP)	Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
3	Kepegawaian						
03.01	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	74,11	75,59	77,1	78,65	78,65
03.02	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	49,16	49,65	50,15	50,65	50,65
4	Penelitian dan Pengembangan						
04.01	Persentase hasil penelitian yang menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan	Persen	40	50	50	50	50
Unsur Kewilaya han							
1	Kecamatan						
01.01	Rata-rata skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	86,89	87,39	87,89	88,39	88,39

Unsur Pemerintah Umum							
1	Kesatuan Bangsa dan Politik						
01.01	Presentase penurunan Angka konflik sosial	Persen	58	20	25	33,33	33,33

Sumber: Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, Hasil Analisis

8.3. INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN

Penetapan target indikator makro pembangunan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Dalam RPJMN, indikator makro mencakup: (1) pertumbuhan ekonomi, (2) Indeks Pembangunan Manusia, (3) Tingkat Kemiskinan, (4) Pertumbuhan Ekonomi, (5) Indeks Gini Rasio, dan (6) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. Dalam dokumen perencanaan ingkat Kota/Kabupaten, hanya ditetapkan 5 indikator makro, dimana indikator Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca tidak dicantumkan karena pengukuran oleh BPS hanya dilakukan sampai level Provinsi.

Penetapan target indikator makro Kota Bima disajikan dalam tabel 8.3.

8.4. INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Penetapan target SPM mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Penetapan target SPM Kota Bima disajikan dalam tabel 8.4.

Tabel 8.3

Penetapan target indikator makro pembangunan Kota Bima Tahun 2024-2026

No	Indikator Makro	Satuan	Capaian				Target Nasional	Target Provinsi NTB	Penetapan Target RPD		
			2019	2020	2021	2022	RKP 2024	RKPD 2024	2024	2025	2026
1	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	75,8	75,81	76,11	76,84	75,54	70,88	77,00	77,00	77,00
2	Tingkat Kemiskinan	Persen	8,6	8,35	8,88	8,80	6,0-7,0	<10%	7,94	7,54	7,17
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,06	4,42	3,56	3,73	3,6-4,3	2,98	3,55	3,38	3,21
4	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,15	-4,95	2,08	2,70	5,7-6,0	5,8-7,1	5,0-6,0	5,0-6,0	5,0-6,0
5	Indeks Gini Ratio	Angka	0,371	0,375	0,413	0,429	0,360-0,374	0,366	0,370-0,400	0,370-0,400	0,370-0,400

Sumber: Hasil Analisis

Tabel 8.4
Target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten/Kota
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59
Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas waktu capaian
1	2	3	4	8
SPM Bidang Pendidikan				
1	Pendidikan dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%	Setiap tahun
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	
2	Pendidikan kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	Setiap tahun
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	
3	Pendidikan anak usia dini	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	Setiap tahun
SPM Bidang Kesehatan				
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah warga negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah warga negara orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	Jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
SPM Bidang Pekerjaan Umum				
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh pelayanan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	Setiap tahun

2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh pelayanan pengolahan air limbah domestik	100%	Setiap tahun
SPM Bidang Perumahan Rakyat				
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap tahun
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	Setiap tahun
SPM Bidang Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas)				
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada Kabupaten/Kota	100%	Setiap tahun
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Setiap tahun
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Setiap tahun
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Setiap tahun
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	Setiap tahun
SPM Bidang Sosial				
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap tahun
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap tahun
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap tahun
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	Setiap tahun
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100%	Setiap tahun

BAB IX

PENUTUP

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bima Tahun 2024-2026 disusun untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan rencana pembangunan 3 (tiga) tahun kedepan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bima Tahun 2008- 2028. Selanjutnya RPD ini akan menjadi pedoman dan arah bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Bima.

Implementasi RPD Kota Bima Tahun 2024-2026 diperlukan komitmen bersama untuk dilaksanakan secara konsisten berdasarkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kota Bima berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra PD) Tahun 2024-2026 yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan indikasi kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada RPD Kota Bima Tahun 2024-2026, yang selanjutnya sebagai acuan menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
2. Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah serta masyarakat, termasuk dunia usaha, dalam melaksanakan pembangunan agar mengacu pada RPD Tahun 2024-2026 ini dengan sebaik-baiknya;
3. Penyusunan RKPD berpedoman pada RPD yang selanjutnya sebagai acuan dalam penyusunan KUA-PPAS dan penyusunan Rancangan APBD Tahun 2024, 2025 dan 2026;
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPD Tahun 2024-2026, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPD Tahun 2024-2026, sebagai berikut:
 - a. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah;
 - b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bima menghimpun dan menganalisis hasil pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya;

- c. Kepala Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan perangkat daerah periode sebelumnya;
 - d. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud diatas menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
5. RPD Kota Bima Tahun 2024-2026 menjadi pedoman bagi pengendalian dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, melalui instrumen berupa rumusan dan target indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci yang termuat didalam tujuan, sasaran, dan program pembangunan.


WALIKOTA BIMA,

H. MUHAMMAD LUTFI, SE